



**PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEMATANG SIANTAR**

RPJMD

**KOTA PEMATANG SIANTAR
TAHUN 2022-2027**

**BALAI KOTA
PEMATANGSIANTAR**



**Jalan Merdeka No. 6 Pematang Siantar Kode Pos 21117 Sumatera Utara
Telepon (0622)-433815 Fax. (0622)-21058,
Website : www.pematangsiantarkota.go.id**

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2022-2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

- Menimbang :
- a. bahwa visi dan misi wali kota dan wakil wali kota terpilih perlu dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan diselaraskan dengan RTRW, RPJMD Provinsi Sumatera Utara serta RPJMN;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2027;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Drt Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
19. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2012 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2013 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

dan

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2022-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematang Siantar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pematang Siantar
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
9. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
12. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
13. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
24. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
25. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
27. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
28. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
29. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
30. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
31. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai landasan atau pedoman bagi Pemerintah Daerah berisi penjabaran

dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
 - e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
 - f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
 - g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
 - h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
 - i. BAB IX PENUTUP
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan hasil rencana pembangunan Daerah.

- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh BAPPEDA.
- (5) BAPPEDA dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan terhadap ketentuan dalam Bab VI, Bab VII dan Bab VIII dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Pematang Siantar.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar;
 - c. sisa masa berlaku RPJMD tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6

Pada saat RPJMD 2027-2032 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD Kota Pematang Siantar dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara serta mengacu pada RPJMN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal
WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

SUSANTI DEWAYANI

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR,

BUDI UTARI

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022 NOMOR:
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR, PROVINSI SUMATERA
UTARA :



DAFTAR ISI

	HALAMAN
DAFTAR ISI	I - i
DAFTAR TABEL.....	I - iii
DAFTAR GAMBAR.....	I - vi
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum.....	I - 5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I - 8
1.4. Maksud dan Tujuan	I - 11
1.5. Sistimatika Dokumen	I - 11
BAB II GAMBARAN UMUM	II - 1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II - 1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 9
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II - 35
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II - 82
2.5. Capaian Kinerja Utama Daerah	II - 90
2.6. Capaian Indikator Kinerja Daerah	II - 103
2.7. Capaian Standar Pelayanan Minimal	II - 129
2.8. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	II - 137
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III - 2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III - 6
3.1.2. Neraca Daerah	III - 24
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III - 33
3.2.1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja.....	III - 34
3.2.2. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III - 35
3.3. Kerangka Pendanaan.....	III - 39
BAB IV PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS	IV - 1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV - 1
4.2. Isu Strategis	IV - 10
4.2.1. Isu strategis RPJPD Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025	IV - 11
4.2.2. Isu strategis RPJMN Tahun 2020-2024	IV - 14
4.2.3. Isu strategis PRPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023	IV - 16
4.2.4. Isu Strategis Dalam Dokumen Perencanaan Sektorial	IV - 21
4.2.5. Isu Strategis Nasional dan Global.....	IV - 28
4.3. Isu Strategis RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027	IV - 38
BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN	V - 1
5.1. Visi.....	V - 1
5.2. Misi.....	V - 2
5.3. Tujuan dan Sasaran	V - 7
BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI - 1
6.1. Strategi	VI - 1
6.2. Arah Kebijakan.....	VI - 7
6.2.1. Arah Kebijakan Kewilayahan.....	IV - 15



6.2.2. Arah Kebijakan Penerapan SPM	IV - 42
6.3. Program Pembangunan Daerah	VI - 48
BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII - 1
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	VII - 1
7.2. Program Perangkat Daerah.....	VII - 4
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VIII -
8.1. Indikator Kinerja Utama	VIII - 1
8.2. Indikator Kinerja Daerah	VIII - 4
BAB IX PENUTUP	IX - 1
9.1. Kaidah Pelaksanaan	IX - 2
9.2. Pedoman Transisi	IX - 2



DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kota Pematang Siantar Dirinci Per Kelurahan..... II - 2
Tabel 2.2	Topografi Kota Pematang Siantar Menurut Kecamatan..... II - 3
Tabel 2.3	Sungai Utama Di Kota Pematang Siantar II - 4
Tabel 2.4	Suhu Udara, Rata-Rata Kelembaban dan Rata-rata Curah Hujan II - 5
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Kota Pematang Siantar Per Kecamatan II - 6
Tabel 2.6	Distribusi Penduduk dan Luas serta Kepadatan Penduduk II - 7
Tabel 2.7	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku..... II - 9
Tabel 2.8	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan..... II - 11
Tabel 2.9	LPE Kota Pematang Siantar Dirinci Menurut Sektor..... II - 12
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Miskin Kota Pematang Siantar..... II - 20
Tabel 2.11	Statistik Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar Tahun 2017 - 2021 II - 29
Tabel 2.12	Kondisi Melek Huruf Kota Pematang Siantar Tahun 2017 - 2021 II - 32
Tabel 2.13	Kondisi Seni dan Budaya Kota Pematang Siantar Tahun 2017 - 2021 II - 32
Tabel 2.14	Kondisi Keolahragaan Kota Pematang Siantar Tahun 2017 - 2021 II - 33
Tabel 2.15	Capaian Indikator Makro Kab/Kota Wilayah Dataran Tinggi II - 34
Tabel 2.16	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017-2021..... II - 36
Tabel 2.17	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2017-2021 II - 39
Tabel 2.18	Capaian Indikator Kinerja Urusan PUPR Tahun 2017-2021 II - 45
Tabel 2.19	Capaian Indikator Kinerja Urusan PRKP Tahun 2017-2021..... II - 46
Tabel 2.20	Capaian Indikator Kinerja Urusan Transtibum Tahun 2017-2021 II - 48
Tabel 2.21	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017-2021 II - 49
Tabel 2.22	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017-2021 II - 50
Tabel 2.23	Capaian Indikator Kinerja Urusan PP dan PA Tahun 2017-2021 II - 51
Tabel 2.24	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2017-2021..... II - 53
Tabel 2.25	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021 II - 54
Tabel 2.26	Capaian Indikator Kinerja Urusan Adm. Kependudukan II - 55
Tabel 2.27	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pem. Masyarakat Kelurahan II - 56
Tabel 2.28	Capaian Indikator Kinerja Urusan PP dan KB Tahun 2017-2021 II - 57
Tabel 2.29	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2021 II - 58
Tabel 2.30	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kominfo Tahun 2017-2021 II - 59
Tabel 2.31	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM II - 61
Tabel 2.32	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal II - 62
Tabel 2.33	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga..... II - 63
Tabel 2.34	Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2021 II - 64
Tabel 2.35	Capaian Indikator Kinerja Urusan Budaya Tahun 2017-2021 II - 65
Tabel 2.36	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2017-2021..... II - 66
Tabel 2.37	Capaian Indikator Kinerja Urusan Arsip Tahun 2017-2021 II - 67
Tabel 2.38	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2017-2021 II - 68
Tabel 2.39	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2021 II - 69
Tabel 2.40	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017-2021 II - 69
Tabel 2.41	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan dan Perindustrian II - 70
Tabel 2.42	Capaian Indikator Kinerja Urusan Unsur Pemerintahan Setdako II - 72
Tabel 2.43	Partai Politik dan Anggota DPRD Kota Pematang Siantar Tahun 2022..... II - 73



Tabel 2.44	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2017-2021	II - 75
Tabel 2.45	Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2017-2021.....	II - 76
Tabel 2.46	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2017-2021	II - 77
Tabel 2.47	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2017-2021	II - 78
Tabel 2.48	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2017-2021.....	II - 79
Tabel 2.49	Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Tahun 2017-2021	II - 82
Tabel 2.50	Tingkat Hunian Kamar.....	II - 84
Tabel 2.51	Angka Kriminalitas di Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021.....	II - 85
Tabel 2.52	Jumlah Demonstrasi di Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021	II - 86
Tabel 2.53	Rekapitulasi Perizinan di Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021.....	II - 87
Tabel 2.54	Rasio Ketergantungan di Kota Pematang Siantar Tahun 2016-2020	II - 89
Tabel 2.55	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2021.....	II - 93
Tabel 2.56	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2017-2021.....	II - 105
Tabel 2.57	Capaian SPM Kota Pematang Siantar Tahun 2019-2021	II - 130
Tabel 2.58	Capaian Indikator TPB Kota Pematang Siantar Tahun 2016-2021 (SS)	II - 138
Tabel 2.59	Capaian Indikator TPB Kota Pematang Siantar Tahun 2016-2021 (SB).....	II - 146
Tabel 2.60	Perkembangan Indikator TPB Yang Belum Memiliki Data.....	II - 152
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	III - 3
Tabel 3.2	Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	III - 7
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar	III - 8
Tabel 3.4	Realisasi Pendapatan Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021	III - 11
Tabel 3.5	Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah	III - 12
Tabel 3.6	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar	III - 13
Tabel 3.7	Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Pematang Siantar	III - 15
Tabel 3.8	Sumber-Sumber Belanja Daerah	III - 16
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Daerah Kota Pematang Siantar	III - 18
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Pematang Siantar	III - 19
Tabel 3.11	Realisasi BTT Penanganan Covid-19 TA. 2020.....	III - 21
Tabel 3.12	Perkembangan Pembiayaan Daerah Kota Pematang Siantar	III - 23
Tabel 3.13	Neraca Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021	III - 26
Tabel 3.14	Analisa Rasio Neraca Daerah Kota Pematang Siantar	III - 32
Tabel 3.15	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja.....	III - 34
Tabel 3.16	Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III - 37
Tabel 3.17	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III - 38
Tabel 3.18	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.....	III - 40
Tabel 3.19	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah.....	III - 42
Tabel 4.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran.....	IV - 8
Tabel 4.2	Target Pembangunan Wilayah Sumatera 2020-2024	IV - 16
Tabel 4.3	Sandingan Isu-Isu Strategis	IV - 46
Tabel 5.1	Penjelasan Visi RPJMD	V - 1
Tabel 5.2	Penjelasan Misi RPJMD.....	V - 2
Tabel 5.3	Keselarasan RPJPD dan RPJMD Kota Pematang Siantar	V - 4
Tabel 5.4	Keselarasan PRPJMD Provsu dan RPJMD Kota Pematang Siantar	V - 5
Tabel 5.5	Keselarasan RPJMN dan RPJMD Kota Pematang Siantar	V - 6
Tabel 5.6	Perumusan Tujuan Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar.....	V - 8
Tabel 5.7	Penjenjangan Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pematang Siantar.....	V - 11
Tabel 5.8	Rumusan Misi Tujuan Sasaran dan Indikator dan Target Kinerja.....	V - 15



Tabel 5.9	Sandingan Isu Strategis dengan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator	V - 22
Tabel 5.10	Sandingan Prioritas Nasional, Provsu dan Kota Pematang Siantar.....	V - 26
Tabel 5.11	Penyelarasan Target Ekonomi Makro Nasional, Provsu dan Kota	V - 27
Tabel 6.1	Strategi Pembangunan RPJMN 2020–2024.....	VI - 1
Tabel 6.2	Keterkaitan Misi Tujuan Sasaran dan Strategi Pembangunan	VI - 5
Tabel 6.3	Keterkaitan Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	VI - 8
Tabel 6.4	Implementasi Strategi dan Arah Kebijakan.....	VI - 13
Tabel 6.5	Arah Kebijakan Pembangunan	VI - 20
Tabel 6.6	Rencana Program Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	VI - 50
Tabel 6.7	Rencana Program Pembangunan Daerah.....	VI - 55
Tabel 6.8	Matriks Dukungan Kota Pematang Siantar Terhadap Prioritas	VI - 84
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022–2027	VII - 2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah.....	VII -27
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022-2027.....	VIII - 3
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022-2027	VIII - 4



DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan I - 9
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administratif Kota Pematang Siantar..... II - 1
Gambar 2.2	Luas Wilayah Kota Pematang Siantar Dirinci Per Kecamatan II - 2
Gambar 2.3	Jumlah Penduduk Kota Pematang Siantar Menurut Kelompok Umur..... II - 8
Gambar 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Kota Pematang Siantar Dirinci Menurut Sektor II - 13
Gambar 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Kota Pematang Siantar, Provsu dan Nasional II - 13
Gambar 2.6	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Se Sumatera Utara II - 14
Gambar 2.7	PDRB ADHB dan ADHK Per Kapita Kota Pematang Siantar II - 15
Gambar 2.8	Perbandingan PDRB Perkapita Kab/Kota Atas Dasar Konstan..... II - 16
Gambar 2.9	Perbandingan PDRB Perkapita Kab/Kota Atas Dasar Harga Berlaku II - 16
Gambar 2.10	Laju Inflasi Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara..... II - 17
Gambar 2.11	Perbandingan Laju Inflasi 5 Kota Di Sumatera Utara Tahun 2021 II - 18
Gambar 2.12	Indeks Gini Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara II - 19
Gambar 2.13	Perbandingan Indeks Gini Kab/Kota Se Sumatera Utara Tahun 2021 II - 19
Gambar 2.14	Tingkat Kemiskinan Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara II - 21
Gambar 2.15	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Se Sumatera Utara..... II - 22
Gambar 2.16	IPM Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional..... II - 23
Gambar 2.17	Perbandingan IPM Kota Pematang Siantar dengan Kab/Kota II - 23
Gambar 2.18	AHH Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional..... II - 24
Gambar 2.19	HLS di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara II - 25
Gambar 2.20	Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pematang Siantar II - 26
Gambar 2.21	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Pematang Siantar..... II - 26
Gambar 2.22	Indeks Pembangunan Gender Kota Pematang Siantar II - 27
Gambar 2.23	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Pematang Siantar..... II - 28
Gambar 2.24	TPT Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional..... II - 29
Gambar 2.25	Perbandingan TPT Kab/Kota Se-Sumatera Utara Tahun 2021 II - 30
Gambar 2.26	Peta Sebaran Pandemi Covid-19 di Kota Pematang Siantar..... II - 44
Gambar 2.27	Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Pematang Siantar yang Bekerja II - 88
Gambar 2.28	Capaian IKU Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 II - 92
Gambar 2.29	Capaian IKD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 II - 103
Gambar 2.30	TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional..... II - 145
Gambar 2.31	TPB Yang Belum Memiliki Data II - 151
Gambar 3.1	Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan..... III - 6
Gambar 3.2	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar..... III - 9
Gambar 3.3	Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar III - 9
Gambar 3.4	Peranan Komponen Belanja terhadap Total Belanja Daerah III - 20
Gambar 3.5	Perkembangan SiLPA Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 III - 24
Gambar 3.6	Proporsi Komponen Belanja Operasi Kota Pematang Siantar III - 35
Gambar 4.1	Permasalahan Pembangunan Kota Pematang Siantar dari Telaah Visi Misi ... IV - 8
Gambar 4.2	Komponen untuk Merumuskan Isu Strategis Kota Pematang Siantar IV - 38
Gambar 5.1	Struktur Visi dan Misi..... V - 3
Gambar 5.2	Penjenjangan Misi 1 V - 12



Gambar 5.3	Penjenjangan Misi 2 dan 4	V - 13
Gambar 5.4	Penjenjangan Misi 3	V - 13
Gambar 5.5	Penjenjangan Misi 5	V - 14
Gambar 6.1	Tema Arah kebijakan Pembangunan	VI - 7
Gambar 6.2	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Pematang Siantar	VI - 23
Gambar 6.3	Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi.....	VI - 27
Gambar 6.4	Peta Rencana Sistem Jaringan Energi	VI - 28
Gambar 6.5	Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi	VI - 29
Gambar 6.6	Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air.....	VI – 30
Gambar 6.7	Peta Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Air Limbah	VI – 33
Gambar 6.8	Peta Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Persampahan	VI - 34
Gambar 6.9	Peta Rencana Sistem Jaringan Drainase	VI – 36
Gambar 6.10	Peta Rencana Jaringan Pejalan Kaki	VI – 37
Gambar 6.11	Rencana Jalur Evakuasi Bencana	VI – 38
Gambar 6.12	Peta Kawasan Strategis Kota Pematang Siantar.....	VI - 47



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Pematang Siantar merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Utara yang berada di tengah wilayah Kabupaten Simalungun. Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia, Pematang Siantar adalah kawasan kerajaan Siantar yang bermarkas di pulau Holing dan Raja terakhir dari dinasti keturunan marga Damanik yaitu Tuan Sangnawaluh Damanik, yang memegang kekuasaan sebagai Raja Tahun 1906. Saat ini, Kota Pematang Siantar telah berumur 151 Tahun, tepat pada tanggal 24 April 2022. Kota Pematang Siantar termasuk salah satu dari 270 daerah di Indonesia yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan berdasarkan Keputusan KPU Kota Pematang Siantar Nomor 05/PL.02.7-Kpt/1272/KPU-Kot/I/2021 menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar Tahun 2020, adalah Ir. Asner Silalahi, MT dan Susanti Dewayani, Sp.A. Pelantikan kepala daerah terpilih dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 5 Ayat (2) menyebutkan, yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen

[illegible]

Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan tahapan yang sangat panjang meliputi 6 (enam) tahapan yaitu:

- Dalam tahap persiapan dilaksanakan beberapa aktivitas seperti: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun



RPJMD; orientasi mengenai RPJMD; penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistim Informasi Pemerintah Daerah dan Badan Pusat Statistik;

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD

Rancangan awal RPJMD yang merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Rancangan awal RPJMD selanjutnya dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Rancangan awal RPJMD yang telah dilakukan perbaikan selanjutnya diajukan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Selanjutnya dilakukan konsultasi Rancangan awal RPJMD kepada Gubernur untuk memperoleh masukan penyempurnaan. Selanjutnya Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepala kepada kepala Perangkat Daerah tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD;

3. Penyusunan rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi;

4. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJMD

Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Musrenbang RPJMD dihadiri oleh pemangku kepentingan. Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD;

5. Perumusan rancangan akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas



dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;

6. Penetapan RPJMD

Pada tahap ini Kepala Daerah menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah kota tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik.

Dengan dilantikannya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Pematang Siantar tanggal 2 Pebruari 2022, maka periode dokumen RPJMD Kota Pematang Siantar berlaku sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. RPJMD setelah ditetapkan akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan daerah. RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah

RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022–2027 merupakan tahapan terakhir RPJPD Kota Pematang Siantar Tahun 2005–2025 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2005–2025 dan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012–2032 yang mana masih dalam proses pembahasan di DPRD Kota Pematang Siantar dan diharapkan proses pembahasan diharapkan dapat selesai, seiring dengan proses penyusunan RPJMD yang membutuhkan waktu paling lama enam bulan sejak dilantikannya Kepala Daerah yang kemudian dapat diakomodir dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027. Dalam tahap awal penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 ini memiliki perbedaan dengan penyusunan periode sebelumnya, yang mana pada awal tahun 2020 negara-negara di dunia termasuk Indonesia sedang mengalami keadaan luar biasa akibat pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 ini telah mengganggu kehidupan manusia terutama pada aspek kesehatan dan ekonomi.



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898)
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);



9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



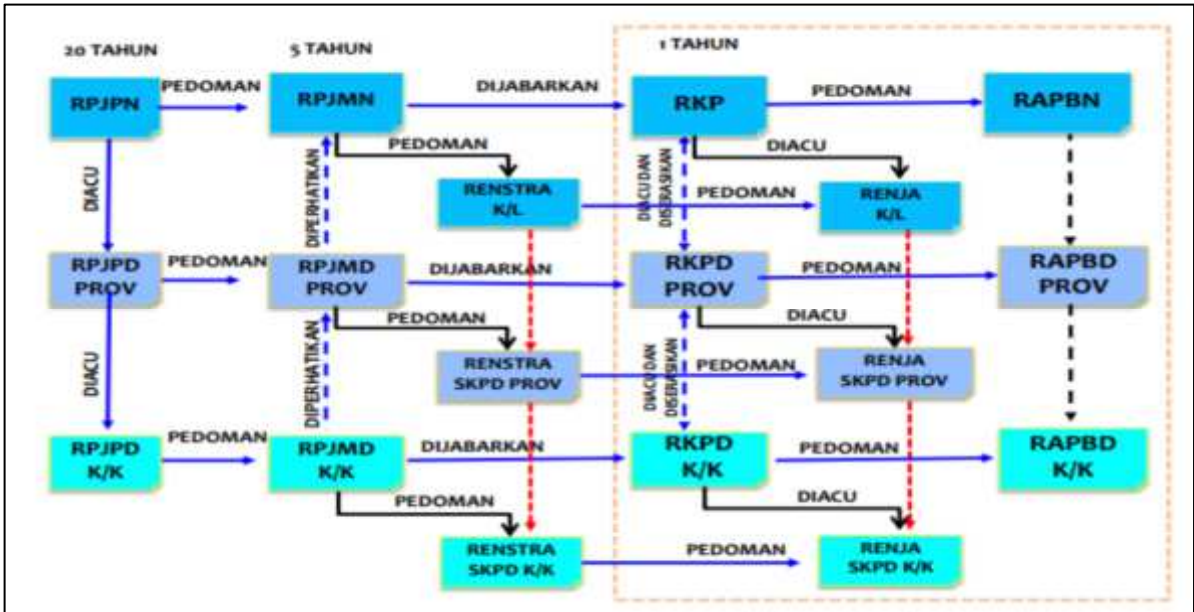
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;



28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
29. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032;
31. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
32. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematang Siantar;
33. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar;
34. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar;
35. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematang Siantar;
36. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Daerah Kota Pematang Siantar.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kota Pematang Siantar dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya, Gambaran keterkaitan antara dokumen RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: PMDN 86 2017, diolah

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.3.1 Hubungan Antara RPJMD Kota Pematang Siantar dengan RPJPD

RPJMD Tahun 2022-2027 merupakan RPJMD penjabaran dari tahap keempat RPJPD Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025 dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang daerah adalah;

”Mewujudkan Kota Pematang Siantar sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, yang Mantap, Maju dan Jaya, dengan dukungan sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pariwisata”

Dimana dalam tahap ini, sasaran pokok untuk perencanaan pembangunan periode ke 4 (empat) untuk perencanaan Tahun 2020-2025, adalah memantapkan pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan Dasar masyarakat yang mantap;
2. Pengembangan lanjut kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Pengembangan daya saing Regional dan Internasional Sektor Unggulan;
4. Pemeliharaan dan pengembangan lanjut Infrastruktur sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang unggul dan berdaya saing.

Dengan target pembangunan daerah adalah :

1. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dasar;
2. Kesiapan SDM dan infrastruktur memasuki era kemajuan teknis dan professional

1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kota Pematang Siantar dengan RPJMN

RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional.



Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu target-target nasional yang dicanangkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang perlu mendapatkan dukungan dari Kota Pematang Siantar juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

1.3.3 Hubungan Antara RPJMD Kota Pematang Siantar dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kota Pematang Siantar juga harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kota Pematang Siantar.

1.3.4 Hubungan Antara RPJMD Kota Pematang Siantar dengan Renstra Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Pematang Siantar

RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dalam rentang waktu kurang dari 5 tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.5 Hubungan Antara RPJMD Kota Pematang Siantar dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematang Siantar

RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 nantinya dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.



1.3.6 Hubungan Antara RPJMD Kota Pematang Siantar dengan Dokumen Perencanaan Sektor Lain

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan multi sektor, antara lain hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, Sustainable Development Goals (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 adalah untuk memberikan arah terhadap pembangunan, kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025. Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 sebagai berikut:

1. Memberikan landasan dan pedoman pada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam pelaksanaan pembangunan jangka waktu 2022-2027;
2. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan urusan dan kewenangan sesuai tugas dan fungsi;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.5 Sistematika Dokumen

Sistematika RPJMD Kota Pematang Siantar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD.



Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi tentang gambaran kondisi daerah pada aspek geografis, demografis, aspek pelayanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini berisi tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan daerah.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Bab V Visi, Misi Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang pada periode berkenaan. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang pada periode berkenaan. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Bab ini berisi tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang disajikan beserta target setiap tahun.

Bab IX Penutup

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.



BAB II

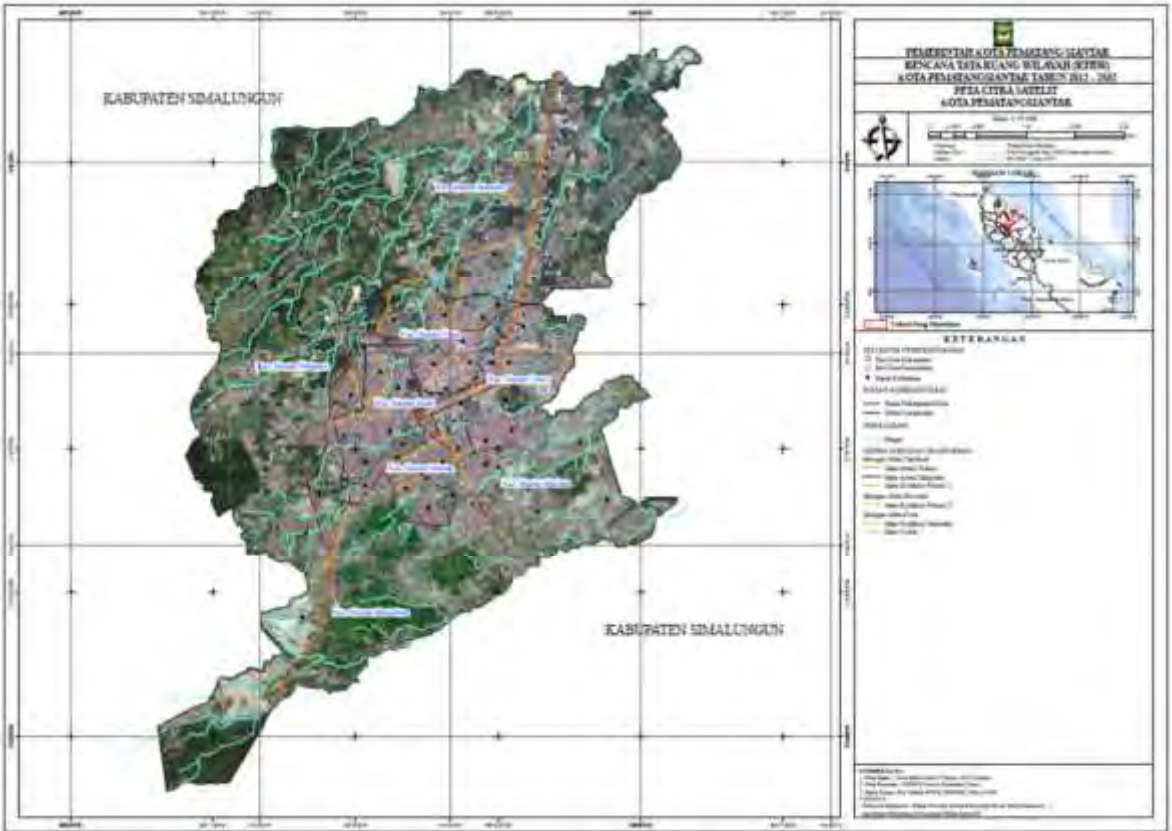
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karateristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

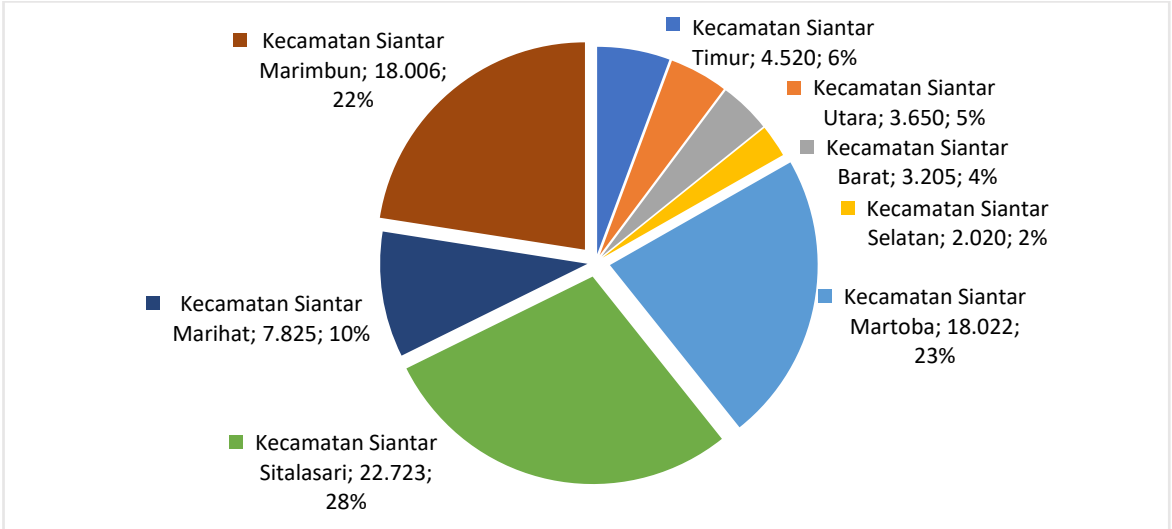
Kota Pematang Siantar merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara. Luas Daerah Kota Pematang Siantar adalah 79.971 Km² dengan wilayah administratif terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 53 (lima puluh tiga) kelurahan. Seluruh wilayah administratif Kota Pematang Siantar berbatasan langsung dengan wilayah administratif Kabupaten Simalungun.



Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012–2032

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kota Pematang Siantar

Urutan luas wilayah kecamatan yang terbesar di Kota Pematang Siantar adalah Kecamatan Sitalasari (28%), Kecamatan Martoba (23%), Kecamatan Marimbun (22%), Kecamatan Marihat (10%), Kecamatan Siantar Timur (6%), Kecamatan Siantar Utara (5%), Kecamatan Siantar Barat (4%), dan Kecamatan Siantar Selatan (2%). Luas wilayah per Kecamatan dan kelurahan di ditunjukkan dalam Gambar dan tabel dibawah ini;



Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012–2032
Gambar 2.2 Luas Wilayah Kota Pematang Siantar Dirinci Per Kecamatan

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Pematang Siantar Dirinci Per Kelurahan

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
1. Siantar Marihat	1. Sukamaju	20,30
	2. Pardamean	8,10
	3. Sukaraja	171,00
	4. BP.Nauli	233,52
	5. Sukamakmur	36,70
	6. Parhorasan Nauli	30,40
	7. Mekar Nauli	282,48
2. Siantar Marimbun	1. Simarimbun	612,04
	2. Nagahuta	259,60
	3. Pematang Marihat	162,80
	4. Tong Marimbun	379,76
	5. Nagahuta Timur	147,40
	6. Marihat Jaya	239,00
3. Siantar Selatan	1. Aek nauli	27,00
	2. Martimbang	49,50
	3. Kristen	37,50
	4. Toba	28,00
	5. Karo	33,50
	6. Simalungun	26,50
4. Siantar Barat	1. Sipinggol-Pinggol	37,00
	2. Teladan	36,00
	3. Dwikora	25,50
	4. Proklamasi	38,50
	5. Timbang Galung	37,50
	6. Simarito	42,00
	7. Banjar	36,00
	8. Bantan	68,00
5. Siantar Utara	1. Martoba	32,00
	2. Melayu	37,00
	3. Baru	25,00
	4. Sukadame	51,00



Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
	5. Bane	117,00
	6. Sigulang-gulang	58,00
	7. Kahean	45,00
6. Siantar Timur	1. Kebun Sayur	37,50
	2. Tomuan	91,00
	3. Pahlawan	42,00
	4. Siopat Suhu	187,00
	5. Merdeka	23,00
	6. Pardomuan	25,50
	7. Asuhan	46,00
7. Siantar Martoba	1. Sumber Jaya	222,60
	2. Nagapita	115,55
	3. Pondok Sayur	293,90
	4. Tambun Nabolon	383,00
	5. Nagapitu	67,25
	6. Tanjung Pinggir	504,50
	7. Tanjung Tengah	215,40
8. Siantar Sitalasari	1. Bah Kapul	356,55
	2. Gurilla	953,30
	3. Setia Negara	464,00
	4. Bukit Shofa	87,20
	5. Bah Sorma	411,25

Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032

2.1.1.2 Letak Wilayah

Kota Pematang Siantar terletak pada garis 2°53'20"- 3°01'00" Lintang Utara dan 99°1'00" - 99°6'35" Bujur Timur, berada di tengah Kabupaten Seimalungun dan jarak menuju ibukota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan sejauh ±128 Km.

2.1.1.3 Kondisi Geografis

a. Topografi

Kondisi topografi dan morfologi terdiri dari 2 (dua) yaitu datar dan landai, dan dapat dikatakan relatif datar secara keseluruhan, sehingga hampir seluruh lahan dapat dimanfaatkan sebagai lahan atau kawasan budidaya. Kondisi topografi dan kelerengan yang datar memberikan potensi untuk membangun ruang yang relatif mudah untuk dikembangkan berbagai aktifitas perkotaan. Berikut data topografi Kota Pematang Siantar.

Tabel 2.2
Topografi Kota Pematang Siantar Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Datar	Landai
		(Kemiringan 0-2%)	(kemiringan 2-8%)
1	Siantar Utara	304,449	93,951
2	Siantar Selatan	205,818	0,305
3	Siantar Barat	311,51	59,279
4	Siantar Timur	323,908	115,022



No	Kecamatan	Datar	Landai
		(Kemiringan 0-2%)	(kemiringan 2-8%)
5	Siantar Martoba	1.594,882	1.023,831
6	Siantar Sitalasari	802,479	774,056
7	Siantar Marihat	547,625	154,003
8	Siantar Marimbun	1.378,796	306,095
Jumlah		5.469,467	2.526,542
Persentase		68,5%	31,5 %

Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012–2032

b. Geologi

Wilayah Kota Pematang Siantar disusun oleh batuan berumur Tersier berupa batuan sedimen, batuan gunung api, dan endapan.

c. Hidrologi

Pola aliran sungai di wilayah Kota Pematang Siantar pada umumnya didominasi oleh pola aliran dendritik, namun pada beberapa bagian, terutama di bagian selatan wilayah ini tampak pola aliran trellis. Pola aliran ini pada umumnya dikontrol oleh struktur geologi di samping jenis litologi dan topografi permukaan di daerah aliran. Potensi hidrologi tersebut dimanfaatkan untuk sumber air baku untuk air bersih serta jaringan irigasi yang mengairi areal persawahan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Sungai Utama Di Kota Pematang Siantar

No	Nama Sungai	Kecamatan	Klasifikasi	Lintasan
1	Bah Bolon	Seluruh Wilayah Kota	Besar	Seluruh Kecamatan
2	Bah Kapul	Siantar Sitalasari	Besar	Kec. Sitalasari Kec.Martoba
3	Bah Sibarambang	Siantar Marimbun	Besar	Kec. Marimbun dan Kec.Siantar Selatan
4	Bah Sigulang-Gulang	Siantar Utara	Besar	Kec. Martoba, Utara, dan Kec.Barat

Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012–2032

Selain adanya sungai, di dalam suatu wilayah juga terdapat DAS (Daerah Aliran Sungai) ataupun WAS (Wilayah Aliran Sungai). DAS yang terdapat di Kota Pematang Siantar adalah DAS Bah Bolon. DAS ini pada dasarnya tidak hanya terdapat atau melalui Kota Pematang Siantar, karena DAS ini terdiri dari beberapa sungai yang terdapat di beberapa wilayah kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Sungai Kualau Tanjung, Sungai Suka, Sungai Kiri, dan Sungai Bah Bolon.

d. Klimatologi

Selama tahun 2021, kelembaban udara rata-rata berkisar 84 mm, sedangkan curah hujan rata-rata 201 hari serta suhu maksimum 30,65 °C dan suhu minimum 21,46 °C dengan suhu rata-rata 25,69°C.



Tabel 2.4
Suhu Udara, Rata-Rata Kelembaban dan Rata-rata Curah Hujan
di Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

Bulan	Suhu Udara (°C)			Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Terpanjang Tdk hujan (hari)
	Rata-rata	Max	Min			
Januari	24.35	28.71	20.52	241	15	4
Februari	26.35	31.66	22.01	56	6	17
Maret	25.43	31.02	21.19	357	14	5
April	26.04	31.09	21.68	141	13	5
Mei	26.35	31.48	21.45	411	21	3
Juni	25.90	30.85	21.76	273	15	3
Juli	25.81	31.00	21.30	321	12	7
Agustus	25.48	30.00	21.54	348	20	8
September	25.82	30.37	22.05	251	12	3
Oktober	26.33	31.39	21.42	347	14	11
Nopember	25.29	30.42	21.50	514	23	2
Desember	25.14	29.85	21.11	206	10	9
Rata-Rata Tahun 2021	25.69	30.65	21.46	84	201	6
2020	30.25	20.92	25.18	201	84	6
2019	25,18	30,41	21,02	246	84,77	15
2018	25	30,2	20,9	298	85	16
2017	25	30,2	20,9	298	85	16

Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

e. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kota Pematang Siantar sesuai dengan pola ruang sebagai berikut :

1. Badan Air 87,70 Ha
2. Badan Jalan 163,72 Ha
3. Jalur Hijau 26,14 Ha
4. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial 204,30 Ha
5. Kawasan Hortikultura 342,59 Ha
6. Kawasan Infrastruktur Perkotaan 12,67 Ha
7. Kawasan Pariwisata 5,61 Ha
8. Kawasan Perdagangan dan Jasa 781,03 Ha
9. Kawasan Perkantoran 58,18 Ha
10. Kawasan Perlindungan Setempat 187,84 Ha
11. Kawasan Pertahanan dan Keamanan 56,48 Ha
12. Kawasan Perumahan 3419,58 Ha
13. Kawasan Peruntukan Industri 200,26 Ha
14. Kawasan Tanaman Pangan 1622,31 Ha
15. Kawasan Transportasi 12,12 Ha
16. Pemakaman 57,40 Ha
17. Rimba Kota 314,14 Ha
18. Taman Kota 39,77 Ha



Terkait dengan aspek geografis, Kota Pematang Siantar sedang dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW yang baru periode Tahun 2021-2041, namun masih dalam proses penyelesaian tapal batas wilayah Kota Pematang Siantar. Saat ini sedang dilakukan peninjauan faktual dilapangan dalam rangka penentuan titik koordinat perbatasan dan perubahan berita acara kesepakatan perbatasan antara Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar serta Provinsi Sumatera Utara untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri.

2.1.2. Demografi

2.1.3.1 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Pada dasarnya penduduk adalah merupakan modal dasar pembangunan, oleh karena itu data statistik kependudukan mutlak diperlukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dengan segala aspeknya. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja, mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran. Pada tahun 2020 penduduk Kota Pematang Siantar mencapai 268,254 jiwa dengan kepadatan penduduk 3,354 jiwa per km². Pada tahun 2020 penduduk Kota Pematang Siantar yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 132.615 jiwa dan penduduk perempuan 135.639 jiwa. Dengan demikian sex ratio penduduk Kota Pematang Siantar sebesar 97,77 dengan kata lain jumlah penduduk perempuan di Kota Pematang Siantar lebih banyak dari penduduk laki-laki. Untuk mengetahui data penduduk Kota Pematang Siantar per Kecamatan, Jenis kelamin, Rasio dan Persentase dan laju pertumbuhan penduduk di pada tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kota Pematang Siantar Per Kecamatan
Menurut Jenis Kelamin, Rasio, Persentase Penduduk dan
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020

Kecamatan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Persentase Penduduk	LPP
Siantar Marihat	10 323	10 610	20 933	97,30	7,78	4,46
Siantar Marimbun	10 133	10 542	20 675	96,12	7,64	21,56
Siantar Selatan	8 309	9 138	17 447	90,93	6,27	-3,91
Siantar Barat	18 588	19 308	37 896	96,27	14,02	-1,13
Siantar Utara	24 725	25 161	49 886	98,27	18,64	0,00
Siantar Timur	17 956	18 788	36 744	95,57	13,54	-8,96
Siantar Martoba	25 262	25 088	50 350	100,00	19,05	16,12
Siantar Sitalasari	17 319	17 004	34 323	100,01	13,06	12,73
Pematang Siantar	132 615	135 639	268 254	97,77	100,00	4,03

Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2021 (Tahun 2022 Belum Rilis)

Dari data yang tersaji di atas, terlihat jumlah penduduk Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Siantar Martoba dengan jumlah penduduk sebanyak 50,350 jiwa atau sebesar 19.05%, sedangkan yang paling



rendah jumlah penduduknya adalah Kecamatan Siantar Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 17,477 Jiwa. Berdasarkan rasio jenis kelamin dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki di kecamatan Sitalasari lebih banyak di bandingkan dengan jumlah laki-laki di kecamatan lainnya dengan nilai sex rasio melebihi dari 100. Sebaran penduduk ini perlu diarahkan kepada wilayah tingkat kepadatan penduduk yang lebih rendah serta menciptakan aktivitas ekonomi pada wilayah tersebut dan untuk sebaran penduduk tingkat kepadatan tinggi diperlukan kebijakan pembangunan permukiman/perumahan secara vertikal (rumah susun/rumah bertingkat). Menelaah peta administrasi wilayah, bahwa sebaran penduduk cenderung di tengah kota atau inti kota dibandingkan wilayah pinggiran, hal ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di tengah kota. Tabel dibawah ini menggambarkan tingkat kepadatan penduduk per kecamatan tahun 2015-2020.

Tabel 2.6
Distribusi Penduduk dan Luas serta Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2016 - 2020

Kecamatan	Luas Areal (Km2)	Jumlah Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
Siantar Marihat	7.825	19.257	19.449	19.642	19 822	20 933
Siantar Marimbun	18.006	15.739	15.897	16.053	16 198	20 675
Siantar Selatan	2.020	18.010	18.125	18.240	18 339	17 447
Siantar Barat	3.205	37.439	37.784	38.122	38 440	37 896
Siantar Utara	3.650	48.950	49.277	49.598	49 886	49 886
Siantar Timur	4.520	40.542	40.811	41.078	41 316	36 744
Siantar Martoba	18.022	40.809	41.141	41.469	41 768	50 350
Siantar Sitalasari	22.723	28.759	29.029	29.298	29 548	34 323
Total	79.971	249.505	251.513	253.500	255 317	268 254
Kecamatan	Luas Areal (Km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
		2016	2017	2018	2019	2020
Siantar Marihat	7.825	2.463	2.485	2.510	2 533	2 675
Siantar Marimbun	18.006	873	882	892	899	1 148
Siantar Selatan	2.020	8.916	8.972	9.030	9 078	8 637
Siantar Barat	3.205	11.700	11.789	11.895	11 994	11 824
Siantar Utara	3.650	13.411	13.500	13.588	13 667	13 667
Siantar Timur	4.520	8.969	9.028	9.088	9 141	8 129
Siantar Martoba	18.022	2.265	2.282	2.301	2 317	2 793
Siantar Sitalasari	22.723	1.266	1.277	1.289	1 300	1 510
Total	79.971	3.120	3.145	3.170	3 193	3 354

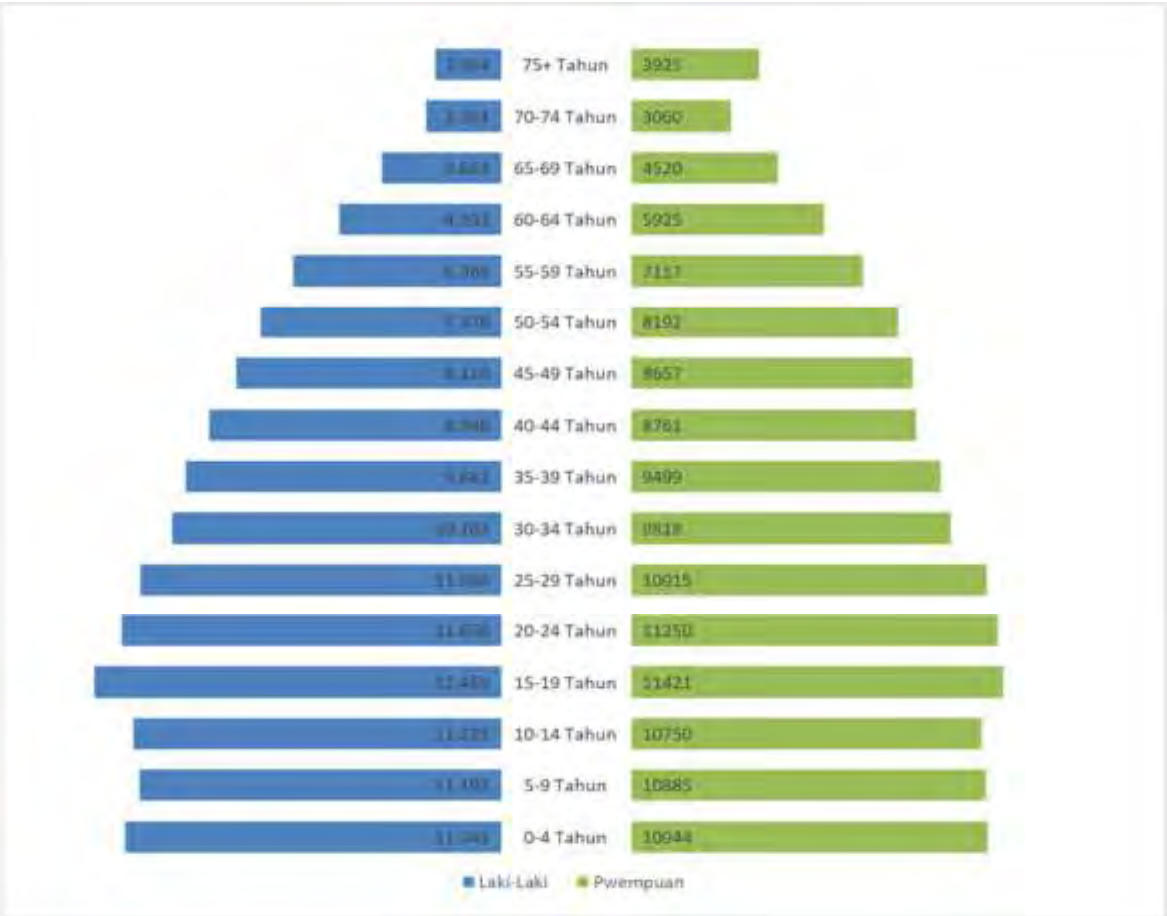
Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2021 (Tahun 2022 Belum Rilis)

Sebaran penduduk per-wilayah kecamatan masih terkonsentrasi di Kecamatan Siantar Utara, disusul Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Selatan, Kecamatan Siantar Marihat, Kecamatan Siantar Martoba, Kecamatan Sitalasari dan Siantar Marimbun



2.1.3.2 Struktur Penduduk

Pengelompokkan penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam penataan jumlah angkatan kerja penduduk yang umurnya adalah usia di atas 15 tahun sampai dengan di bawah 64 tahun atau yang dikenal dengan usia produktif. Pada gilirannya usia produktif tersebut akan berkurang perkembangannya tiap tahun karena sejumlah penduduk melanjutkan sekolah dan sejumlah penduduk terserap pada lapangan kerja, selisihnya dikenal dengan angka pengangguran. Perubahan struktur penduduk menurut umur mempengaruhi besarnya angka ratio ketergantungan. Angka rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk tidak produktif (65 tahun ke atas) dan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun).



Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2021 (Tahun 2022 Belum Rilis)

Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Kota Pematang Siantar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Tingkat keberhasilan pembangunan disuatu wilayah dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya rasio ketergantungan. Semakin tinggi rasio ketergantungan, beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif akan semakin besar. Hal ini diakibatkan hambatan atas upaya perkembangan daerah akan semakin besar



pula. Angka rasio ketergantungan Kota Pematang Siantar yang ditunjukkan dalam Gambar diatas, berdasarkan jumlah penduduk Tahun 2019 sebesar 49,16% sedangkan Tahun 2020 sebesar 47,16%, ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 orang penduduk tidak produktif dan proporsi penduduk usia produktif Kota Pematang Siantar Tahun 2020 sebesar 182,284 jiwa.

Berdasarkan pembahasan Aspek Geografi dan Demograsi diatas dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan pada Aspek Geografi dan Demografi
1. Penyusunan Perda tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2021-2041 belum selesai. <i>Data penduduk berdasarkan kecamatan dan kelompok umur belum rilis.</i>

- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
 - 2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) yang terdiri dari 17 lapangan usaha dan sebagian besar lapangan usaha dirinci lagi menjadi sub lapangan usaha. Pemecahan menjadi sub lapangan usaha atau sub lapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Pengertian PDRB adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi memiliki residen atau non residen. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah sedangkan PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Berikut PDRB ADHB Kota Pematang Siantar dari Tahun 2017-2021.

Tabel 2.7
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 - 2021

Kategori/Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	206,67	208,3	219,39	228,28	226,8
B, Pertambangan dan Penggalian	1,28	1,28	1,29	1,28	1,3



Kategori/Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
C, Industri Pengolahan	2800,31	2917,98	3014,93	2994,56	2974,0
D, Pengadaan Listrik dan Gas	38,96	40,55	42,23	43,14	45,4
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38,97	40,22	41,02	41,51	44,7
F, Konstruksi	1310,48	1412,56	1497,31	1412,89	1464,3
G, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3052,8	3260,18	3480,28	3518,53	3647,9
H, Transportasi dan Pergudangan	869,02	922,13	1002,44	1029,33	1039,4
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	724,01	774,04	821,28	783,53	783,0
J, Informasi dan Komunikasi	198,94	216,25	224,9	229,5	245,4
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	489,75	500,93	541,38	544,1	578,5
L, Real Estate	909,16	963,71	1011,9	1022,02	1052,5
M, N, Jasa Perusahaan	118,28	126,83	131,9	133,32	138,7
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	681,28	723,51	761,58	786,18	786,6
P, Jasa Pendidikan	790,37	840,96	899,83	914,12	938,7
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138,38	147,26	157,57	156,37	157,8
R, S, T, U, Jasa Lainnya	75,29	80,01	84,01	81,42	83,2
PDRB	12,443,96	13,176,71	13,933,25	13,920,09	14,208,2

Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Secara umum PDRB Kota Pematang Siantar selalu bertumbuh setiap tahunnya pada periode tahun 2017-2019. Namun akibat pandemi Covid-19 PDRB Kota Pematang Siantar atas dasar harga berlaku (ADHB) pada Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 13,610 milyar namun dapat bangkit kembali di tahun 2021 menjadi 14,208 trilyun. Lapangan usaha yang paling dominan adalah Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan lapangan usaha yang memegang andil terbesar dalam perekonomian Pematang Siantar dalam 5 tahun terakhir sebesar 3,518,53 trilyun atau 25%. Kemudian terbesar kedua adalah Industri Pengolahan yang peranannya mencapai 2,994,56 trilyun (22%) dan terakhir adalah sektor Konstruksi sebesar 1,412,89 trilyun (10%).



Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 - 2021

Kategori/Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	155,03	155,47	161,8	163,4	162,1
B, Pertambangan dan Penggalian	0,95	0,95	9,54	0,9	1,0
C, Industri Pengolahan	1924,91	1977,09	1989,31	1 944,1	1 915,0
D, Pengadaan Listrik dan Gas	26,95	27,85	28,68	29,3	30,6
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,59	27,25	27,27	27,4	29,3
F, Konstruksi	815,29	856,06	890,3	834,3	847,2
G, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2245,83	2377,14	2572,06	2 523,7	2606,6
H, Transportasi dan Pergudangan	625,57	658,24	710,52	706,2	707,6
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	497,9	530,21	557,68	532	531,2
J,Informasi dan Komunikasi	195,37	211,84	220,11	224,5	236,4
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	334,08	340,77	364,93	361,3	376,8
L, Real Estate	605,38	635,65	654,72	649,2	650,9
M, N, Jasa Perusahaan	76,99	81,92	84,38	83,6	84,2
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	419,88	443,39	459,03	456,3	456,9
P, Jasa Pendidikan	645,22	683,93	720,19	727,2	744,4
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,63	109,02	114,47	113,5	113,7
R, S, T, U, Jasa Lainnya	50,56	53,39	55,35	53	53,9
PDRB	8,750,15	9,170,19	9,611,74	9,430,0	9,547,7

Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Sementara, PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010), pada tahun tahun 2020 mencapai 9,430 trilyun, turun sebesar 181,74 milyar di dibandingkan tahun 2019 dan bangkit kembali menjadi 9,546 triyun.

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Pematang Siantar tahun 2020 mengalami kontraksi hingga -1,89%. Pada tabel berikut disajikan sektor-sektor yang mengalami perlambatan dan penurunan akibat aktivitas ekonomi dunia, nasional dan di Kota Pematang Siantar yang lesu akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia secara global.



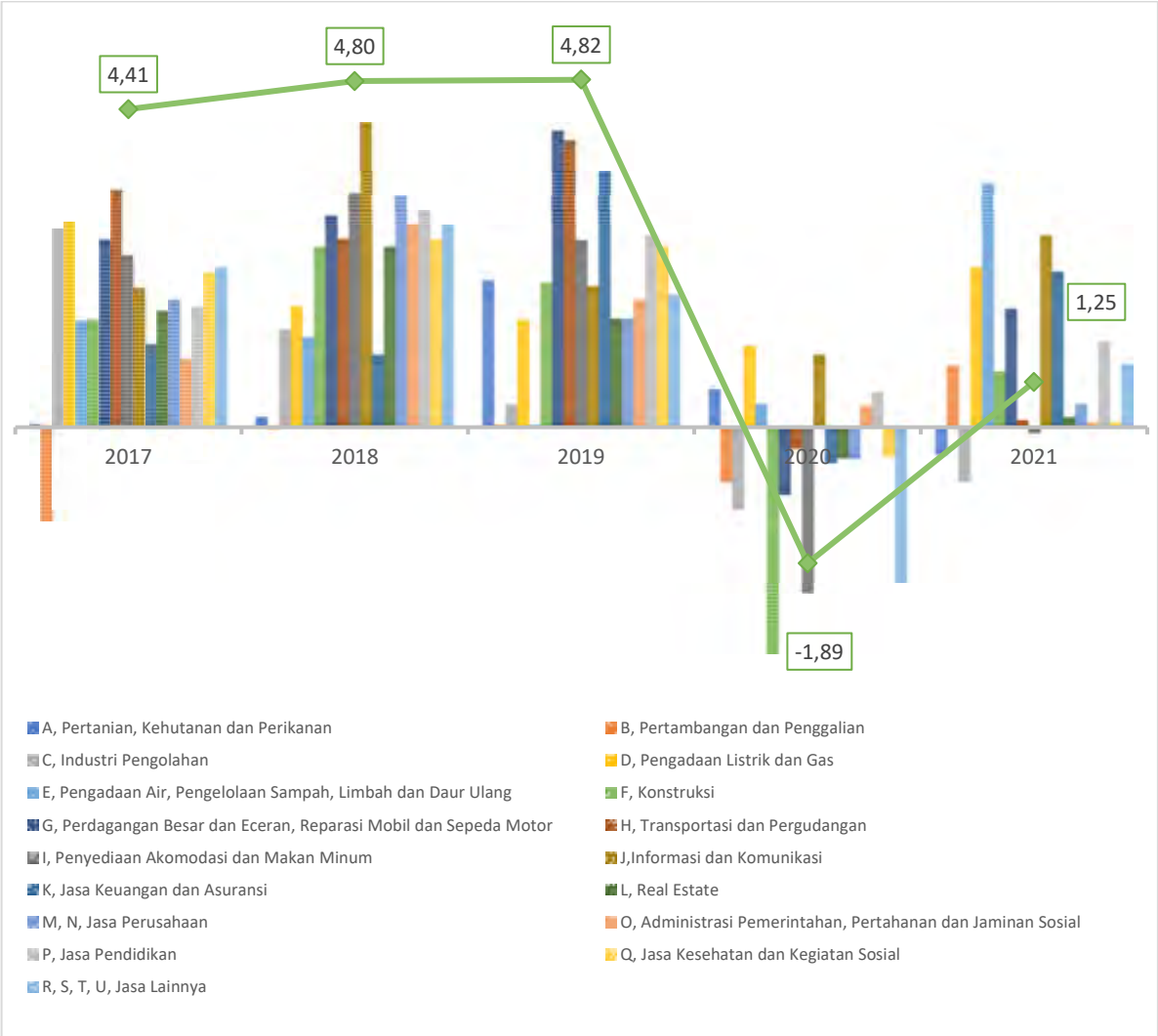
Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pematang Siantar Dirinci Menurut Sektor Atas
Dasar Konstan Tahun 2017-2021

Kategori/Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto				
	Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,09	0,28	4,07	1,05	-0,77
B, Pertambangan dan Penggalian	-2,59	-0,05	0,05	-1,52	1,70
C, Industri Pengolahan	5,5	2,71	0,62	-2,27	-1,49
D, Pengadaan Listrik dan Gas	5,68	3,34	2,97	2,24	4,41
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,96	2,5	0,05	0,64	6,76
F, Konstruksi	2,95	5	4	-6,29	1,54
G, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,2	5,85	8,2	-1,88	3,28
H, Transportasi dan Pergudangan	6,56	5,22	7,94	-0,6	0,19
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,75	6,49	5,18	-4,6	-0,16
J, Informasi dan Komunikasi	3,85	8,43	3,91	2	5,31
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	2,3	2	7,09	-1	4,30
L, Real Estate	3,2	5	3	-0,85	0,27
M, N, Jasa Perusahaan	3,52	6,4	3	-0,88	0,64
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1,89	5,6	3,53	0,59	0,13
P, Jasa Pendidikan	3,34	6	5,3	0,97	2,37
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,26	5,2	5	-0,81	0,13
R, S, T, U, Jasa Lainnya	4,42	5,6	3,67	-4,29	1,74
PDRB	4,41	4,8	4,82	-1,89	1,25

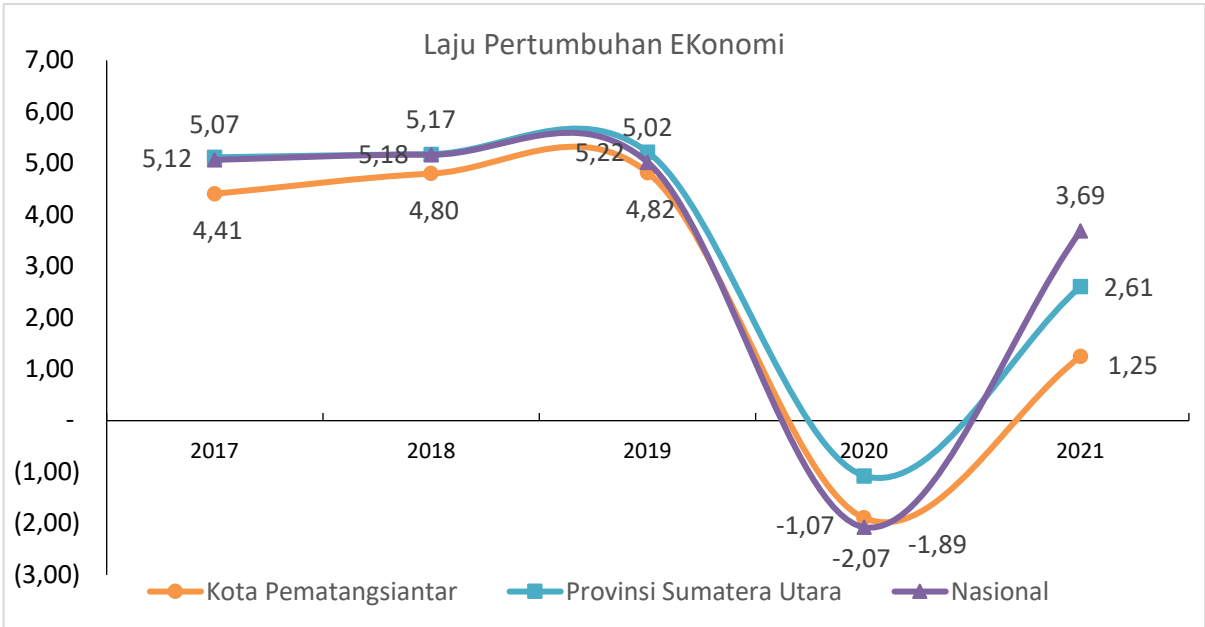
Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Pada tahun 2021 beberapa lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Pematangsiantar telah mengalami peningkatan seiring dengan melandainya wabah Covid-19. Pertumbuhan positif tertinggi dialami lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,76%, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 5,31% dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,31%.

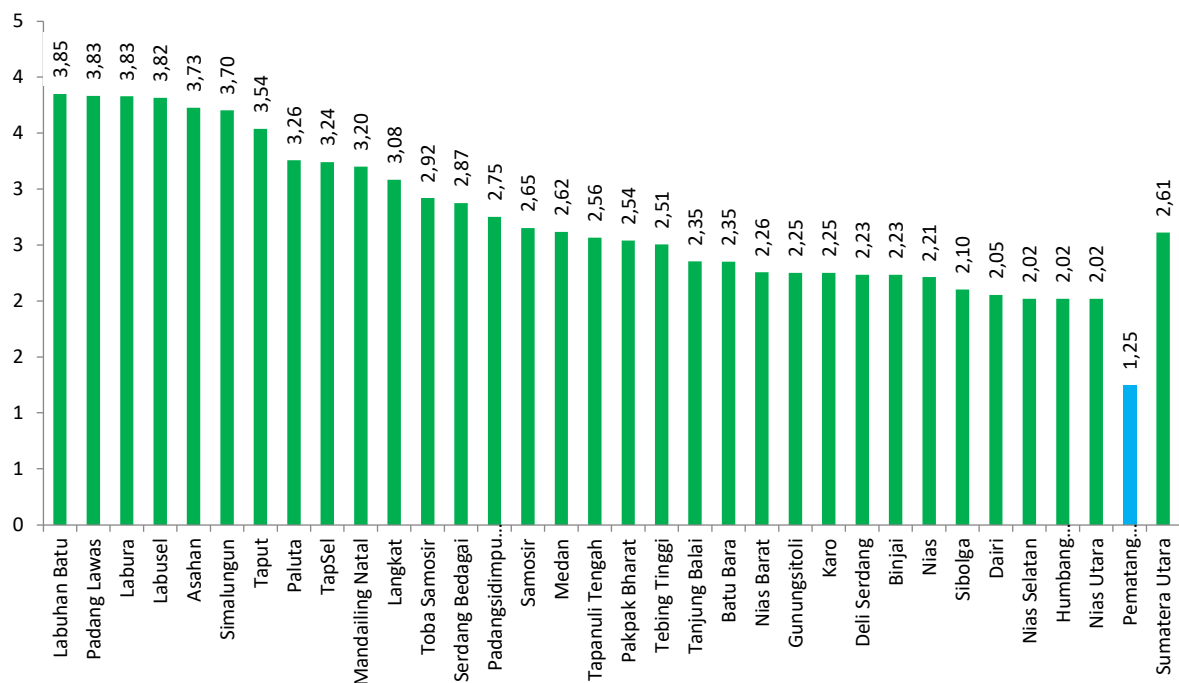
Struktur perekonomian Kota Pematang Siantar pada tahun 2021 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 25,67% ; Industri Pengolahan sebesar 20,93%; serta Konstruksi sebesar 10,31% persen. Peranan ke tiga lapangan usaha tersebut mencapai 56,91% terhadap total PDRB Pematang Siantar. Pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022
Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pematang Siantar Dirinci Menurut Sektor Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022
Gambar 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017 -2021



Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

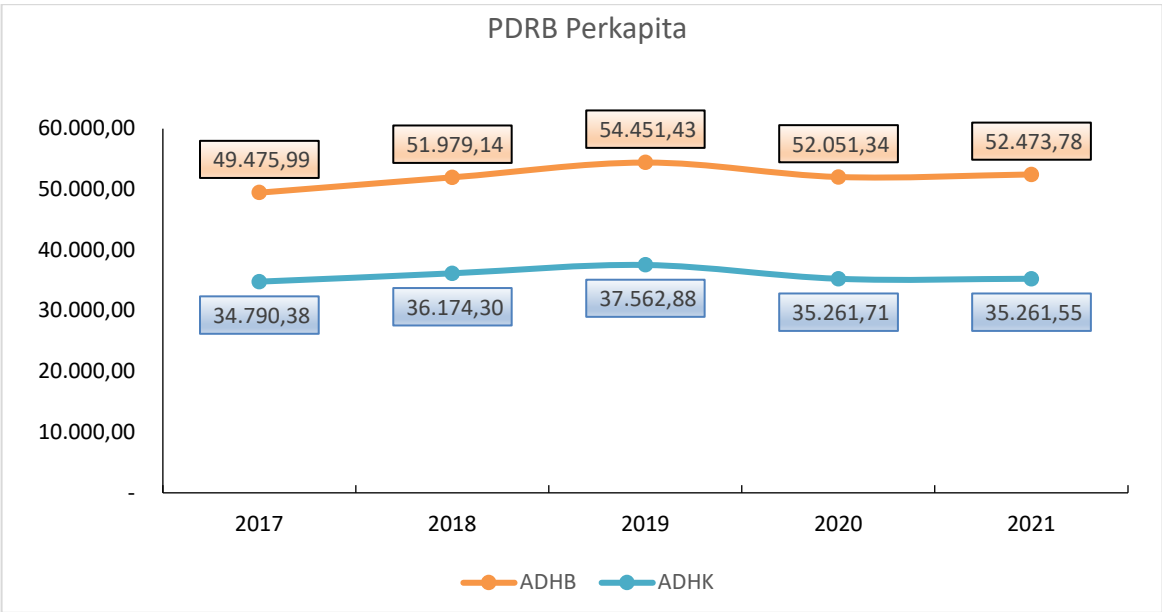
Gambar 2.6 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota
Se Sumatera Utara Tahun 2021

Secara umum pola laju pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar sama dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Pada saat sebelum Pandemi Covid-19, Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar selalu positif dan berkontraksi pada tahun 2020 dan kembali positif pada tahun 2021. Akan tetapi capaian pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar selalu di bawah Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Bahkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 merupakan pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kejenuhan perekonomian di Kota Pematang Siantar. Lapangan usaha unggulan ternyata tidak terlalu atraktif pertumbuhannya. Perekonomian Kota Pematang Siantar yang bertumpu pada Lapangan Usaha Perdagangan, Industri Pengolahan dan Konstruksi mulai tergerus dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan baru di sekitar Kota Pematang Siantar, seperti KSPN Danau Toba, KEK Sei Mangke. Oleh karena itu kedepannya perlu dilakukan berbagai inovasi agar perekonomian Kota Pematang Siantar lebih berkembang. Penguatan Kota Pematang Siantar sebagai sub pusat regional di Provinsi Sumatera Utara akan menjadi kebijakan utama. Kemudian sektor pariwisata dengan konsep “Destinasi Yes, Transit No” akan menjadi sektor andalan pada masa yang akan datang.



2.2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Nilai PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

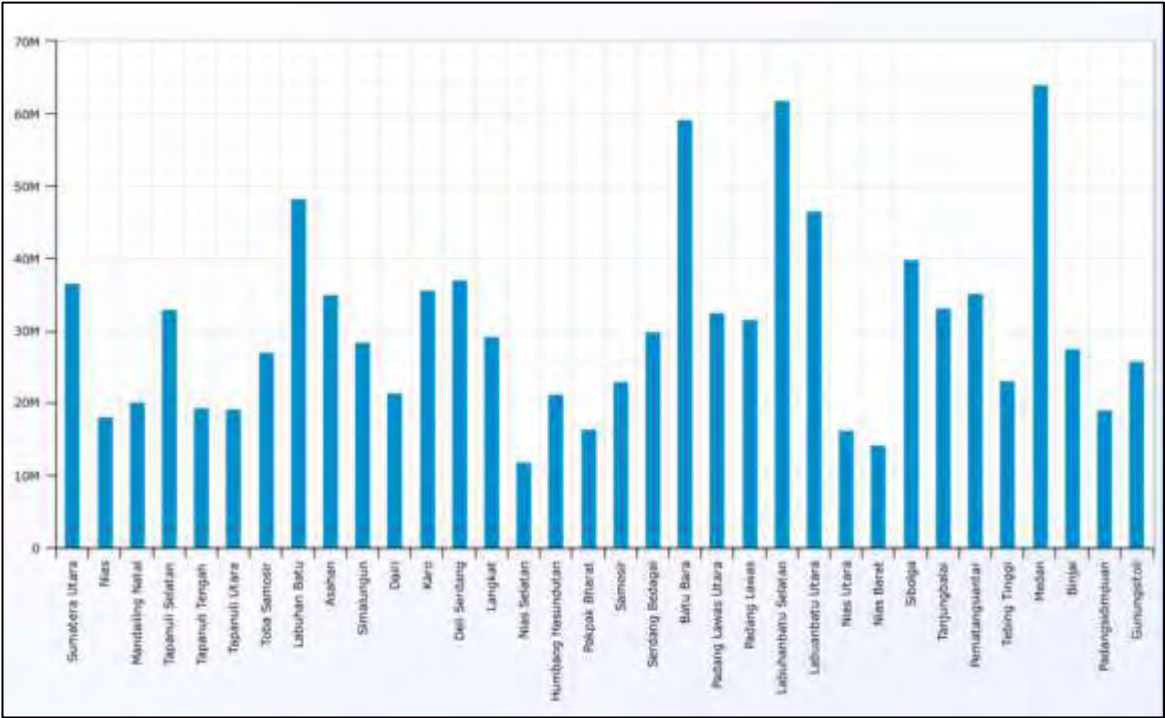


Sumber : BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Gambar 2.7 PDRB ADHB dan ADHK Per Kapita Kota Pematang Siantar Tahun 2017 -2021

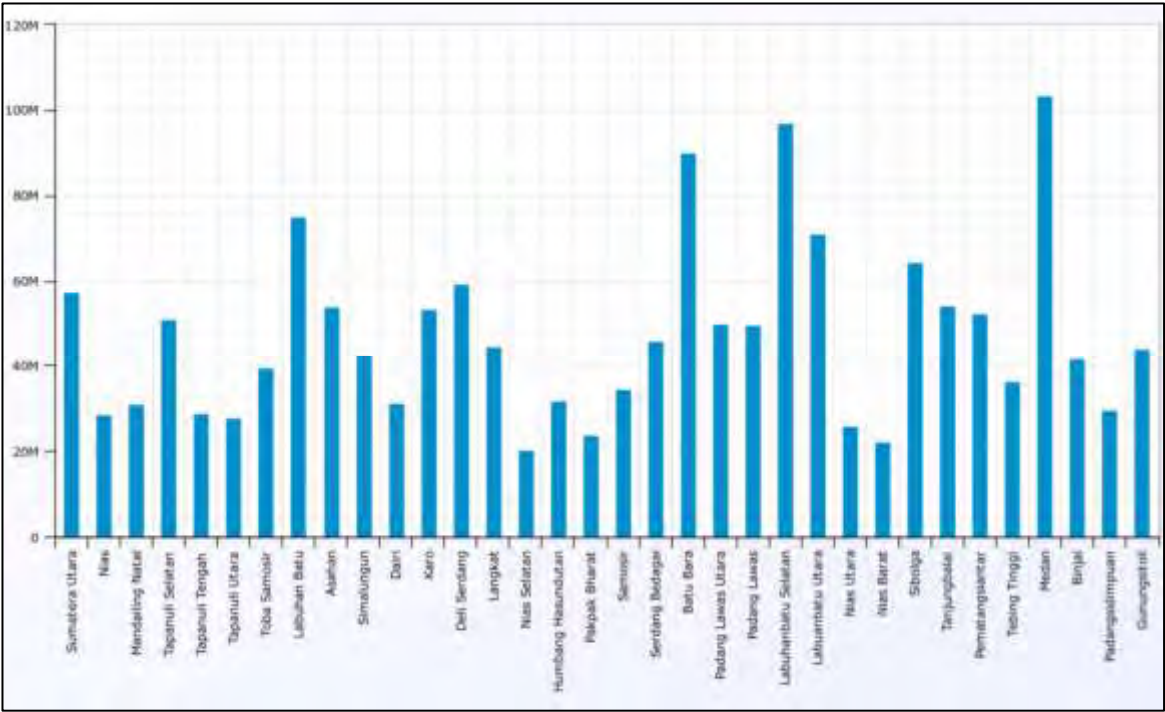
Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah, walaupun sebenarnya nilai PDRB Perkapita ini belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil.

Untuk meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan. Karena pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama sekali terhadap perkembangan pendapatan regional. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Lapangan Usaha dengan jumlah penduduk. Dibandingkan dengan tahun 2020, maka terjadi peningkatan di Tahun 2021 dengan total PDRB ADHB tahun 2021 sebesar 14,208 trilyun dan jumlah penduduk sebesar 270,768 Jiwa maka diperoleh PDRB Perkapita sebesar 52,473,779 Juta, meningkat 422,439 ribu



Sumber : BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Gambar 2.8
Perbandingan PDRB Perkapita Kab/Kota Atas Dasar Konstan
Se Sumatera Utara Tahun 2021



Sumber : BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Gambar 2.9
Perbandingan PDRB Perkapita Kab/Kota Atas Dasar Harga Berlaku
Se Sumatera Utara Tahun 2021

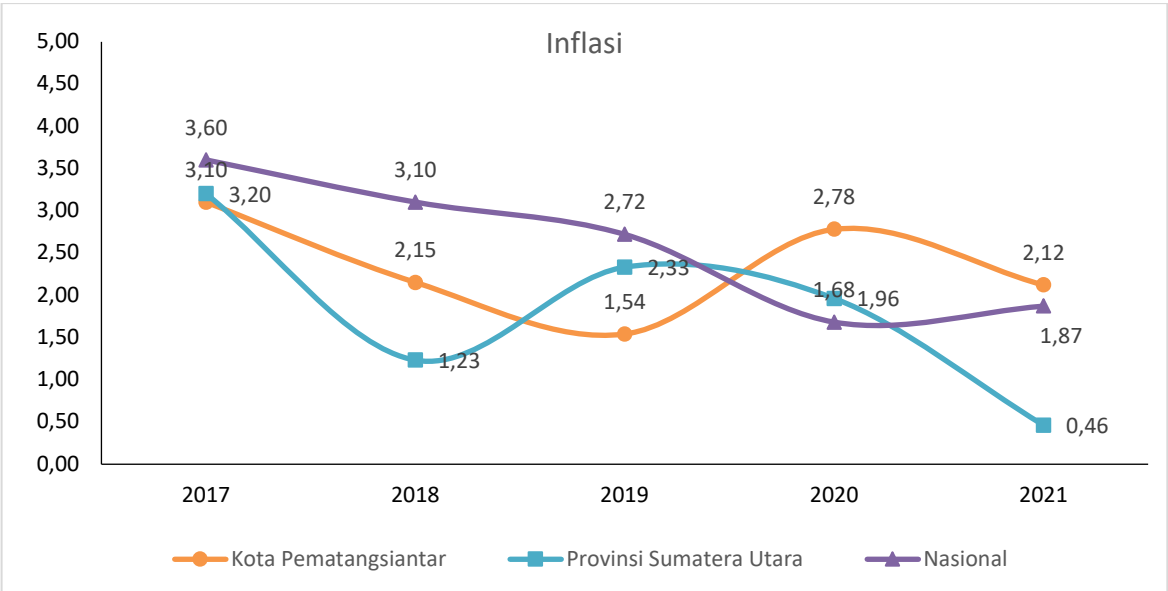
Pada gambar di atas terlihat perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku di tahun 2021 antara Kota Pematang Siantar dengan Kabupaten/kota lainnya. Capaian PDRB Perkapita Kota Pematang Siantar masih



lebih baik di bandingkan dengan beberapa daerah lainnya. Kondisi di atas merupakan gambaran perkembangan perekonomian Kota Pematang Siantar yang masih kurang akseleratif. Prlambatan pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Pematang Siantar dipengaruhi dengan lesunya aktivitas ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan tingginya laju pertumbuhan penduduk sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih kecil.

2.2.1.4 Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% pertahun; inflasi sedang antara 10% - 30% pertahun; berat antara 30% - 100% pertahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% pertahun.



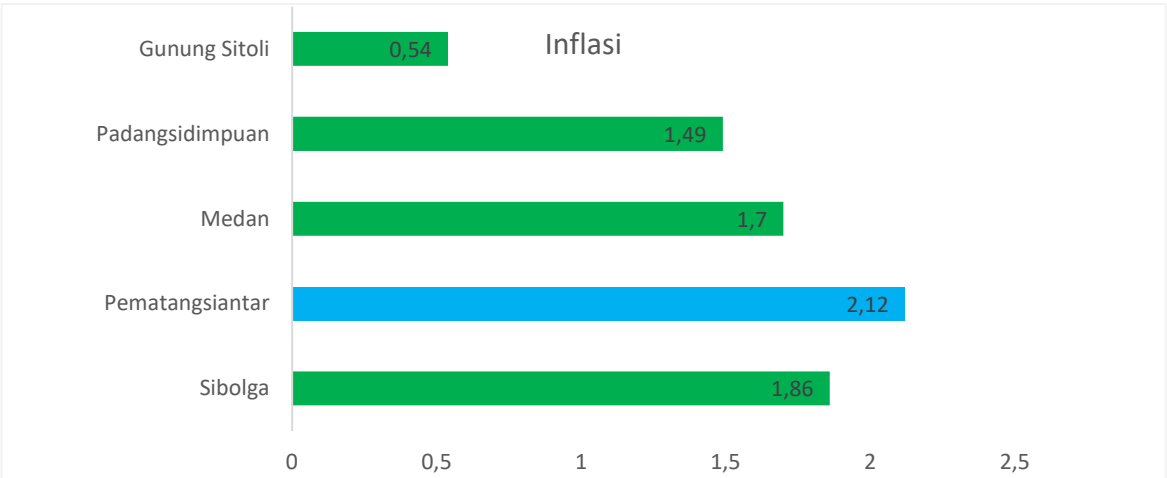
Sumber : BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Gambar 2.10
Laju Inflasi Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2017 2021

Namun pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif terhadap perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu dibawah sepuluh persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha, untuk lebih



meningkatkan produksinya. karena dengan kenaikan harga yang terjadi pengusaha mendapat keuntungan yang lebih banyak. Selain itu, peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen. Kota Pematang Siantar pada periode tahun 2021 berada pada 2.12% lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Inflasi di Kota Pematang Siantar terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau. Hal ini sesuai dengan karakteristik wilayah Kota Pematang Siantar yang perkotaan sehingga pasokan bahan pangan berasal dari luar daerah. Kondisi ini tentunya akan terus dimonitor dan dikendalikan oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Kerjasama dengan daerah produsen perlu dijajaki untuk menjamin keberlangsungan stock pangan di Kota Pematang Siantar.



Sumber : BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Gambar 2.11
Perbandingan Laju Inflasi 5 Kota Di Sumatera Utara Tahun 2021

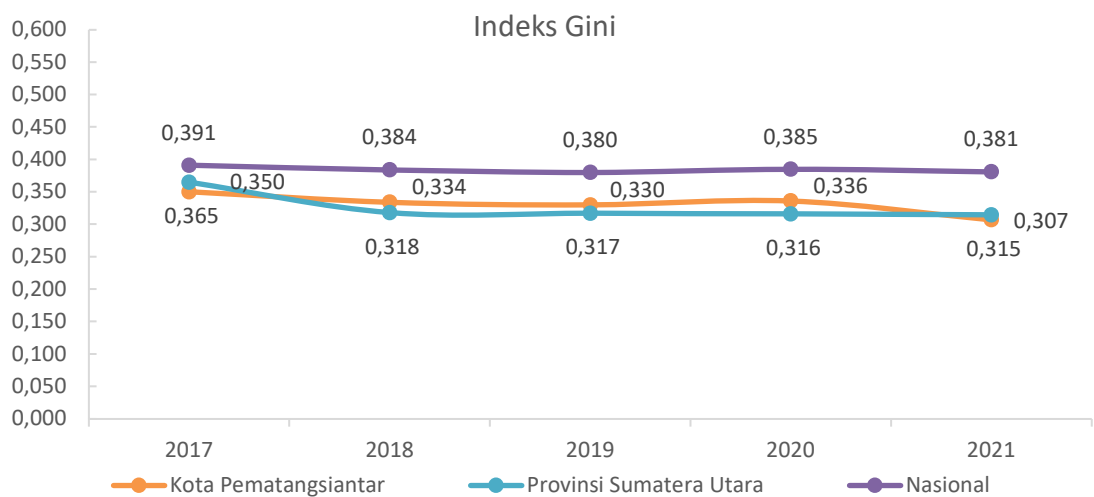
Dari gambar di atas terlihat capaian tingkat inflasi (*yoy*) 5 Kota di Sumatera Utara inflasi Kota Pematang Siantar merupakan yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara, walaupun masih di level yang rendah. Hal ini harus menjadi perhatian kedepannya untuk terus meningkatkan pengendalian laju inflasi di Kota Pematang Siantar.

2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau

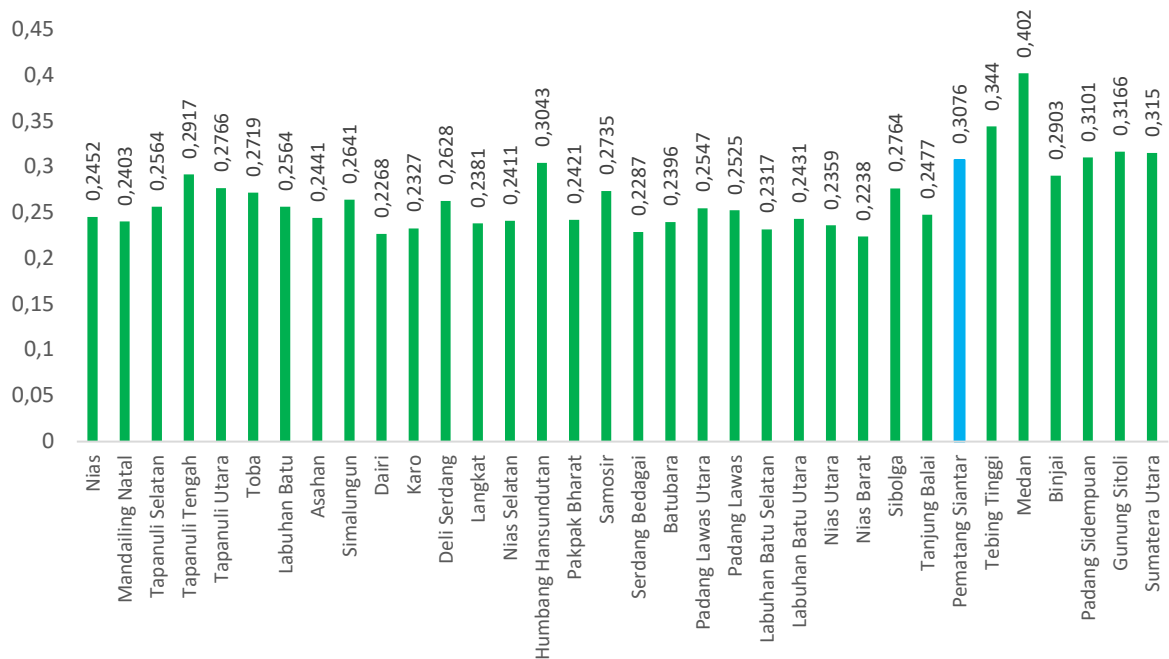


semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Nilai indeks Gini Kota Pematang Siantar tahun 2021 adalah angka perhitungan BPS kondisi bulan Maret sebesar 0,307. Capain sebesar 0,307 masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,315 namun lebih baik pada tingkat Nasional sebesar 0,381. Berdasarkan posisi peringkat indeks gini, dapat disimpulkan Kota Pematang Siantar berada pada ketimpangan rendah, yang artinya tidak terdapat kesenjangan yang besar terhadap distribusi pendapatan ekonomi masyarakat Kota Pematang Siantar ($0,307 \leq 0,4$: ketimpangan rendah).



Sumber : BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Gambar 2.12
Indeks Gini Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Gambar 2.13
Perbandingan Indeks Gini Kab/Kota Se Sumatera Utara Tahun 2021



Kondisi ketimpangan pendapatan Kota Pematang Siantar Tahun 2021 di bandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera menunjukkan angka positif yang cukup baik. Program-program perlindungan sosial juga menjadi tumpuan dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat.

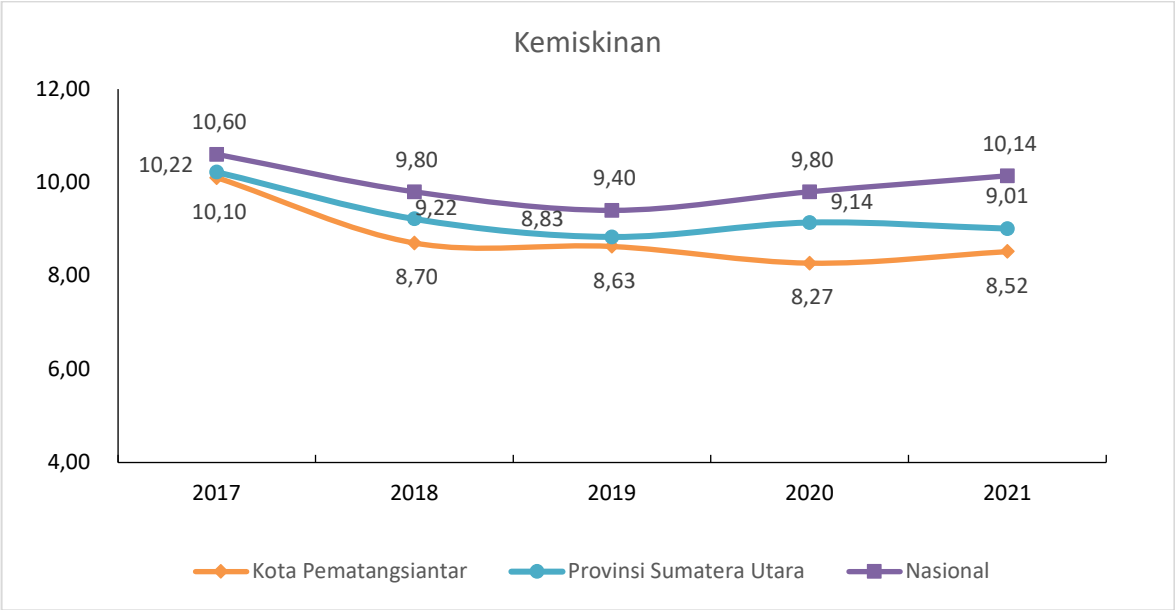
2.2.1.6 Kemiskinan

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya. Dalam upaya perumusan kebijakan dan intervensi program penanggulangan kemiskinan, secara nasional data yang digunakan adalah data hasil pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dengan hasil berupa Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 yang telah diserahkan kepada Kementerian Sosial dan dirilis oleh Tim Nasional Koordinasi Percepatan. Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. PBDT Tahun 2015 disepakati untuk digunakan sebagai *single data*/data tunggal dalam program penanggulangan kemiskinan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Konsep BPS untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Berikut perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Kota Pematang Siantar Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) P0	25,34	22,01	22,18	21,33	21,06
% Penduduk Miskin	10,1	8,7	8,63	8,27*	8,52**
Indeks Kedalaman Kemiskinan P1	1,3	1,69	0,7	1,1	1,12
Indeks Keparahan Kemiskinan P2	0,28	0,53	0,1	0,26	0,24

Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022



Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

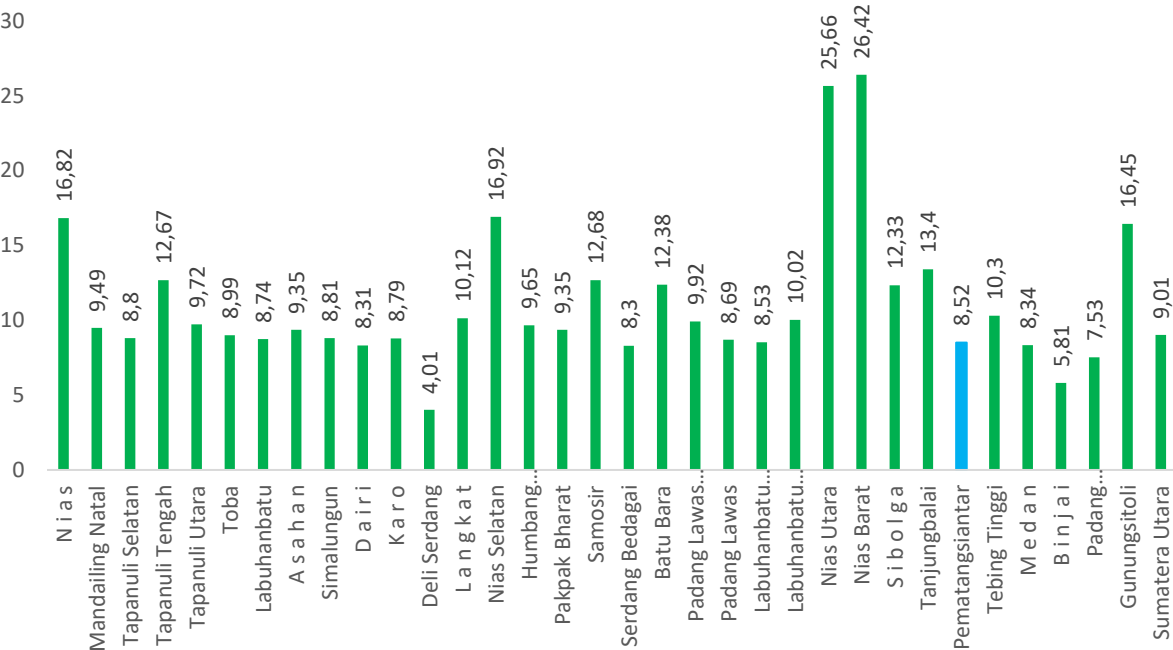
Gambar 2.14
Tingkat Kemiskinan Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2021

Berdasarkan data Hasil Susenas Maret Tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk miskin sebanyak 21,23 ribu dengan garis kemiskinan sebesar 536,49 ribu rupiah per kapita per bulan. Periode bulan Maret 2021, batas garis kemiskinan semakin meningkat dari 536.486 ribu perkapita perbulan pada Maret 2020 menjadi 583.588 ribu perkapita per bulan pada Maret 2021. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin meningkat seiring dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga di Pematang Siantar tahun 2021, dalam pemenuhan kebutuhan pokok minimumnya mencapai Rp. 583.588 perkapita perbulan, dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 4 jiwa. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Peningkatan P1 sebesar 0.02 menunjukkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin besar, sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Menurunnya P2 sebesar 0,02 menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin mengecil. Kemiskinan menjadi prioritas bersama seluruh pemerinthan daerah dan diperlukan upaya konkrit untuk penanganan masyarakat miskin di Kota Pematang Siantar.

Perbandingan tingkat Kemiskinan Kota Pematang Siantar bila dibandingkan dengan Daerah tetangga selama periode 2017-2021 menunjukkan bahwa perekonomian Kota Pematang Siantar masih mampu memberikan penghidupan



yang layak bagi masyarakatnya walaupun tingkat pertumbuhannya paling rendah di Provinsi Sumatera Utara.



Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Gambar 2.15
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Se Sumatera Utara
Tahun 2021

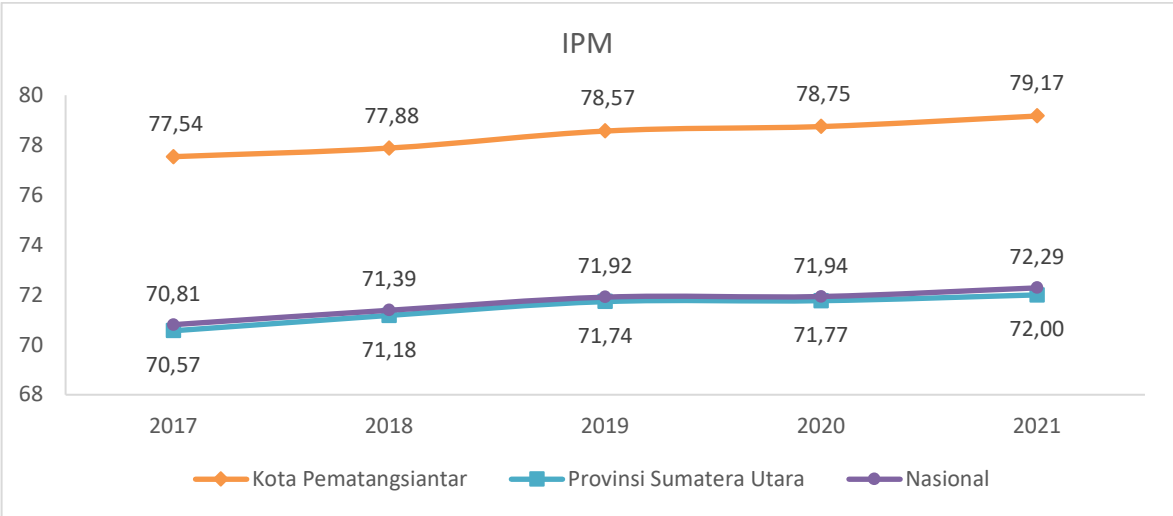
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai indikator komposit, jika IPM disajikan tersendiri maka hanya dapat menunjukkan status pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat IPM dapat diperluas jika dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Menurut BPS, manfaat IPM antara lain: IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan upayamembangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); IPM dapat menentukan peringkat/level pembangunan suatu wilayah/negara; IPM menjadi data strategis sebagai ukuran kinerja Pemerintah; IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan DAU. Kategori nilai poin IPM adalah Nilai < 60 Rendah, $60 \leq \text{IPM} < 70$ Sedang, $70 \leq \text{IPM} < 80$ Tinggi dan nilai ≥ 80 Sangat Tinggi. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, antara lain: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);(2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. IPM Kota Pematang Siantar Tahun 2021 tercatat sebesar 79,17, dengan capaian tersebut Kota Pematang Siantar berada pada status pembangunan manusia kategori “tinggi”



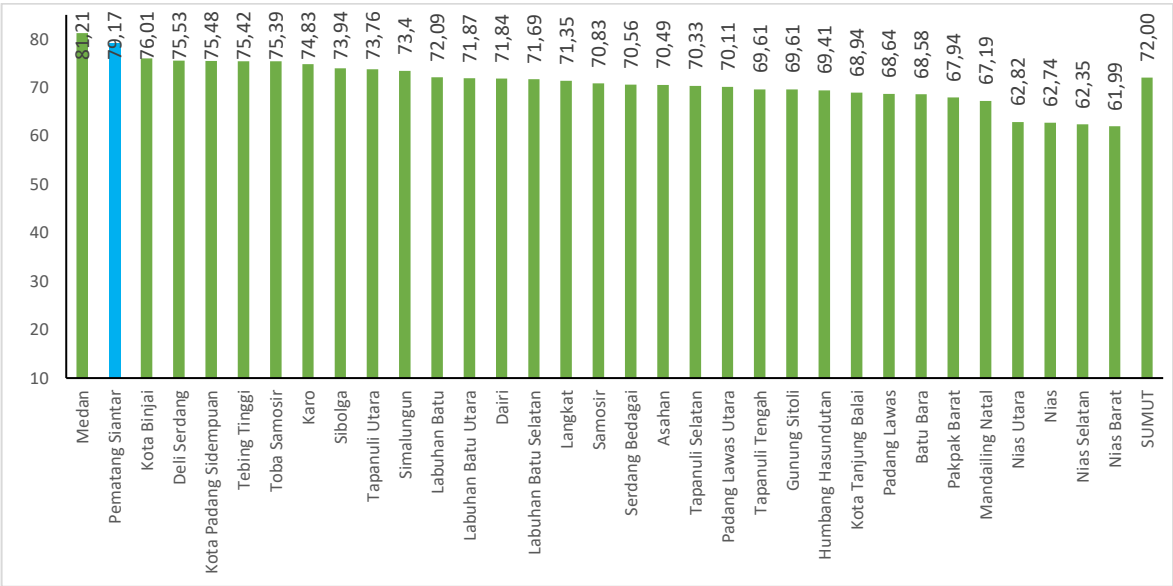
dan merupakan Capaian IPM nomor 2 tertinggi di Provinsi Sumatera Utara setelah Kota Medan.



Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Gambar 2.16
IPM Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2017-2021

Kondisi IPM yang cukup tinggi menggambarkan kualitas hidup yang sangat baik di Kota Pematang Siantar, baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu kekuatan Kota Pematang Siantar dalam menopang pembangunan yang dilakukan. Kedepannya target Kota Pematang Siantar adalah segera masuk ke dalam kategori IPM “sangat tinggi” seperti Kota Medan dengan arah kebijakan berupa peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan melalui penguatan perekonomian berbasis sektor perdagangan dan jasa.



Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

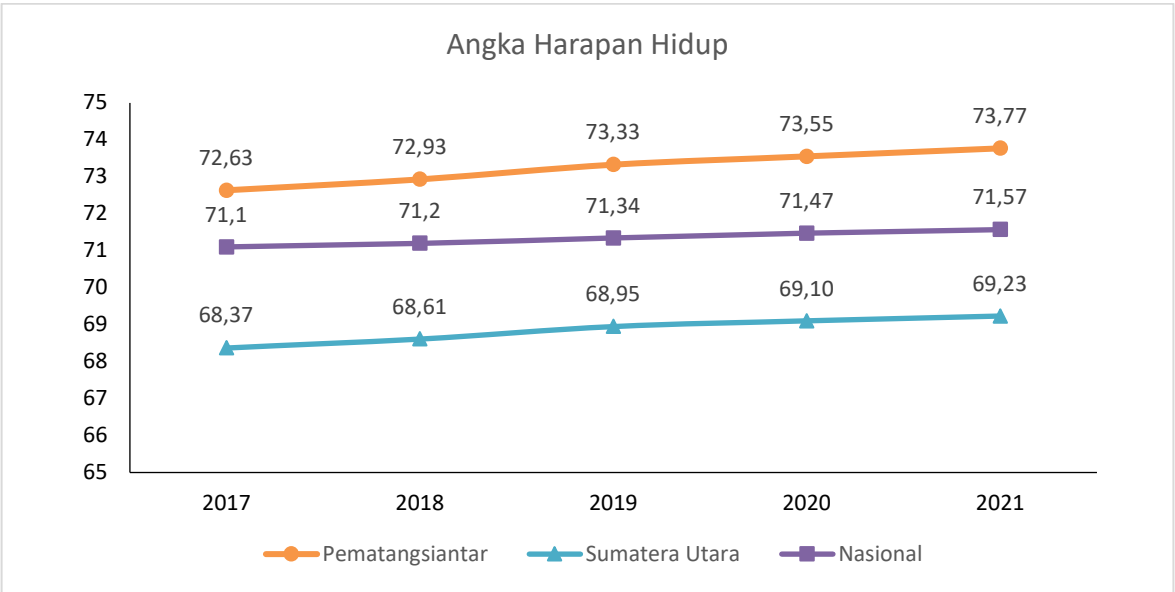
Gambar 2.17
Perbandingan IPM Kota Pematang Siantar dengan Kab/Kota
Se Sumatera Utara Tahun 2021



Perkembangan indeks pembentuk IPM Kota Pematang Siantar meliputi; angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita sebagai berikut:

2.2.2.2 Angka Harapan Hidup (AHH)

Perkembangan AHH Kota Pematang Siantar dari tahun ketahun mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan mencapai 73,77 tahun. Perkembangan tersebut relevan dengan meningkatnya AHH Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 69,23 tahun dan masih diatas tingkat nasional sebesar 71,57 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Gambar 2.18
AHH Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2017-2021

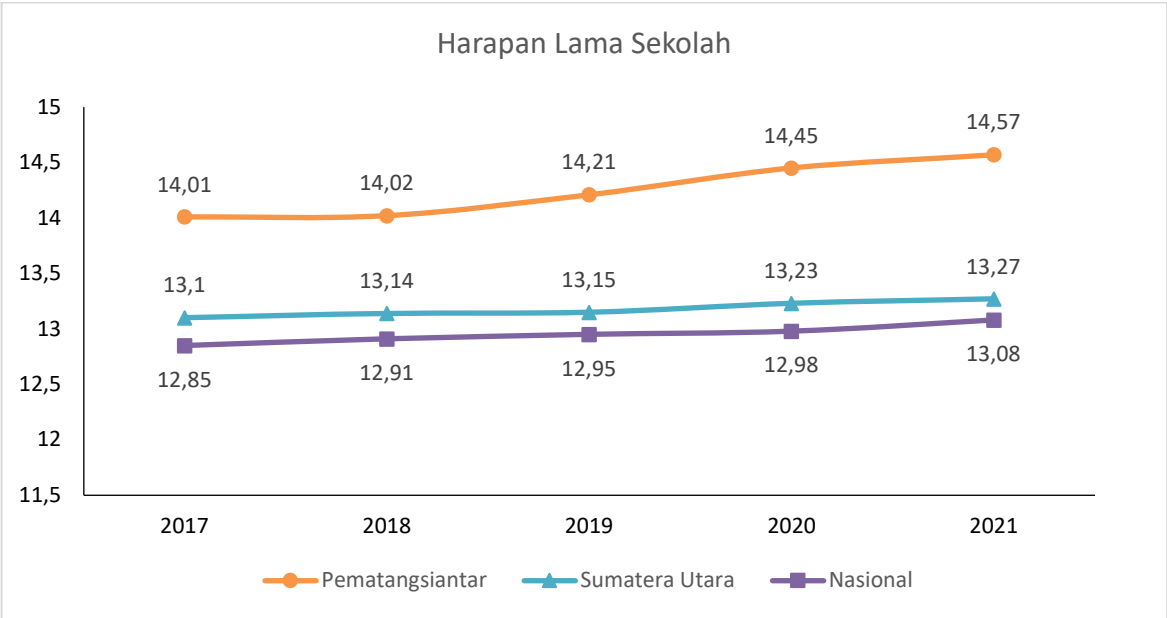
Angka Harapan Hidup Kota Pematang Siantar merupakan yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Derajat kesehatan masyarakat yang cukup baik tergambar dari ketersediaan sarana kesehatan, tenaga medis dan kualitas lingkungan yang masih baik di Kota Pematang Siantar. Untuk memperkuat capaian Angka Harapan Hidup ini, maka fokus utama kedepannya adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Pematang Siantar. Kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian seiring dengan semangat mengembalikan ADIPURA ke Kota Pematang Siantar.

2.2.2.3 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat



digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan Batasan yang dipakai sesuai kesepakatan *UNDP*. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0.



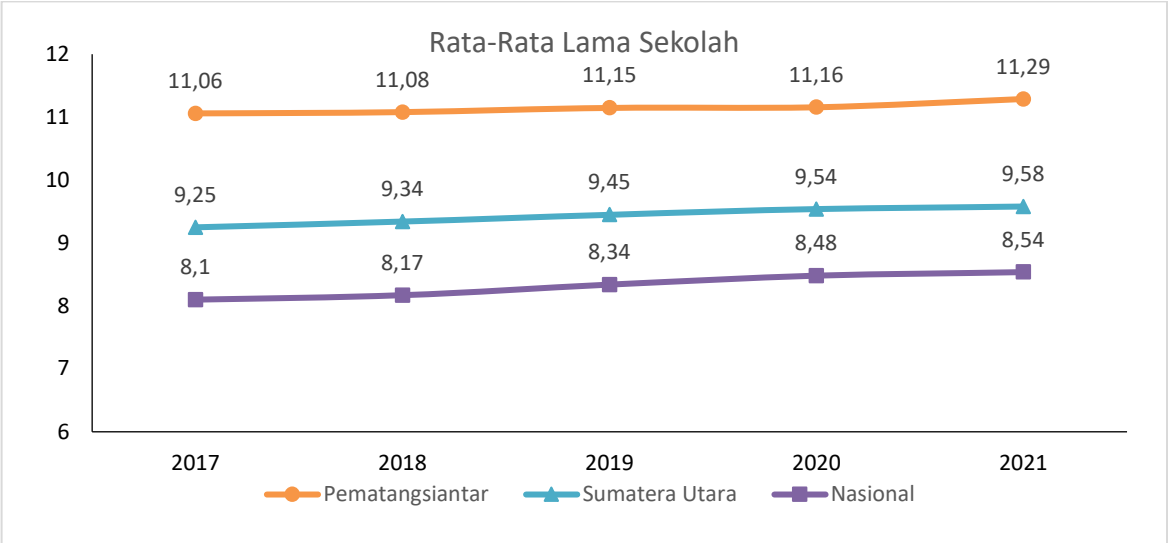
Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Gambar 2.19 HLS di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara Dan Nasional Tahun 2017-2021

HLS Kota Pematang Siantar berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. HLS Kota Pematang Siantar menempati urutan kedua setelah Kota Medan. Capaian ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sarana pendidikan sudah cukup memadai, sehingga kedepannya kebijakan pada Urusan Pendidikan adalah peningkatan kualitas pendidikan berupa peningkatan kualitas pendidik, kualitas lulusan dan prestasi dunia pendidikan Kota Pematang Siantar.

2.2.2.4 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan *UNDP*, Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 terus menunjukkan peningkatan. Rata-rata lama sekolah, pada tahun 2017 sebesar 11,06 tahun meningkat hingga 11,29 tahun pada tahun 2021.



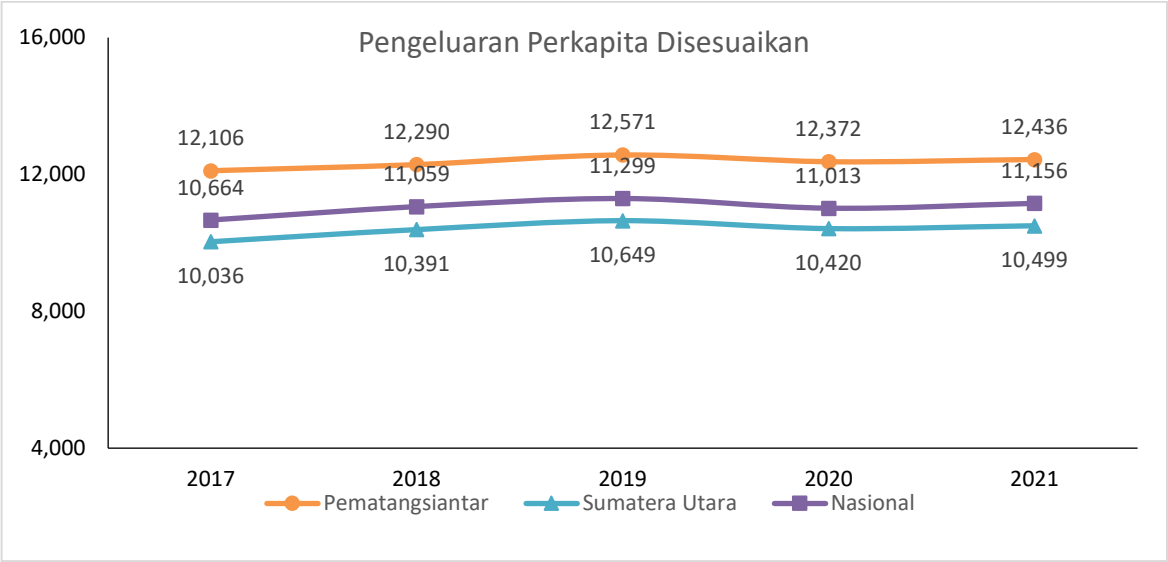
Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Gambar 2.20
Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2022

Sama hal nya dengan capaian HLS, RLS Kota Pematang Siantar juga menempati urutan kedua di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini kembali menunjukkan bahwa permasalahan akses pendidikan telah teratasi di Kota Pematang Siantar. Akan tetapi kegiatan bea siswa miskin tetap harus disiagakan karena masih terdapat angka putus sekolah di Kota Pematang Siantar. Kegiatan pendidikan non formal juga dapat menjadi pilihan kedepannya untuk terus meningkatkan capaian RLS Kota Pematang Siantar.

2.2.2.5 Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan

Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.



Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

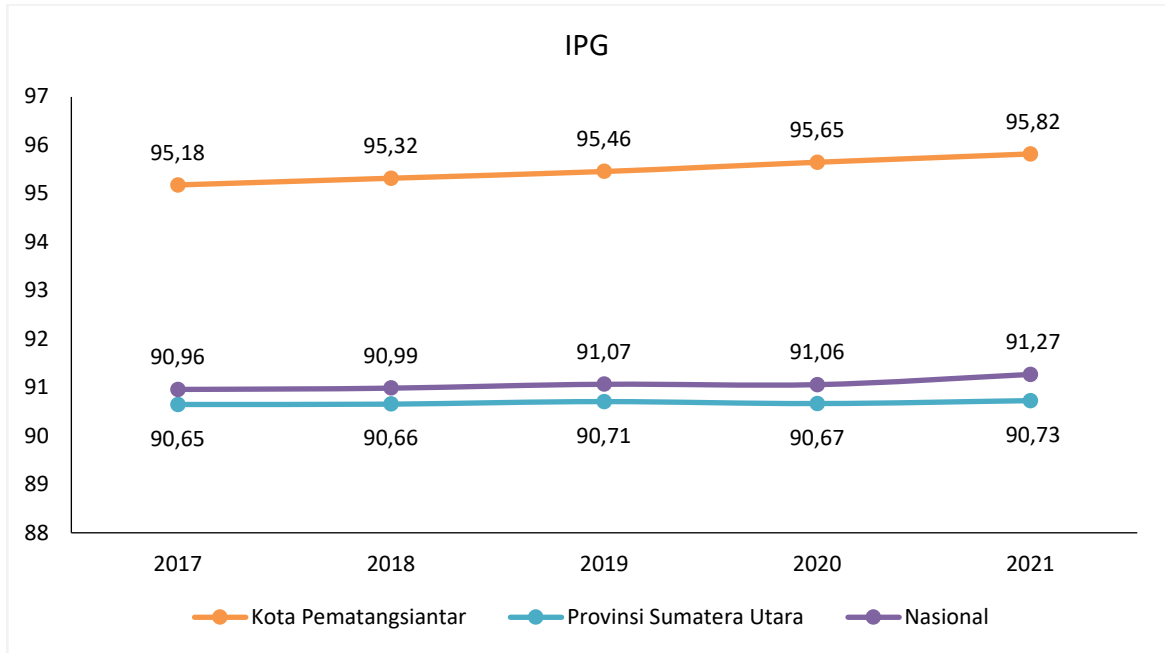
Gambar 2.21
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021



Kemampuan ini berbeda antar wilayah, karena nilai tukar antar wilayah juga berbeda bergantung kepada harga riil pada masing-masing wilayah. Pada tahun 2011 tingkat daya beli masyarakat yang disesuaikan Kota Pematang Siantar sebesar 12,436 juta pertahun, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 12,372 juta perkapita di tahun 2020. Pengeluaran perkapita masyarakat Kota Pematang Siantar masih berada di atas level Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Kota Pematang Siantar masih cukup baik. Untuk mempertahankan kondisi ini maka kebijakan pengendalian harga dan pengembangan perekonomian menjadi hal yang prioritas.

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan.



Sumber: BPS Tahun 2022

Gambar 2.22
Indeks Pembangunan Gender Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM. Pada kurun waktu 2017-2021 capaian IPG Kota Pematang Siantar mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 IPG Kota masih lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.



2.2.2.7 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi.



Sumber: BPS Tahun 2022

Gambar 2.23
Indeks Pemberdayaan Gender Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

Capaian IDG Kota Pematang Siantar dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami tren menurun, hal ini menunjukkan peran perempuan dalam pembangunan lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam kehidupan ekonomi dan politik.

2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, angkatan kerja yang masuk pada pasar kerja mengalami peningkatan. Permasalahan akan muncul ketika jumlah para pencari kerja tidak seimbang dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Mengingat urgensi dari aspek ketenagakerjaan, di mana manfaat langsung dari pembangunan dapat diukur melalui tingginya kesempatan kerja, setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja. Dengan kata lain, salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru untuk menyerap angkatan kerja. Pengangguran terbuka dibedakan atas 2 (dua) kelompok yaitu; pengangguran yang pernah bekerja dan pengangguran yang tidak bekerja.

TPT di Kota Pematang Siantar tahun 2017 adalah sebesar 8,80%, naik cukup tinggi pada tahun 2018 sebesar 12,14% atau mengalami kenaikan 3,34%,

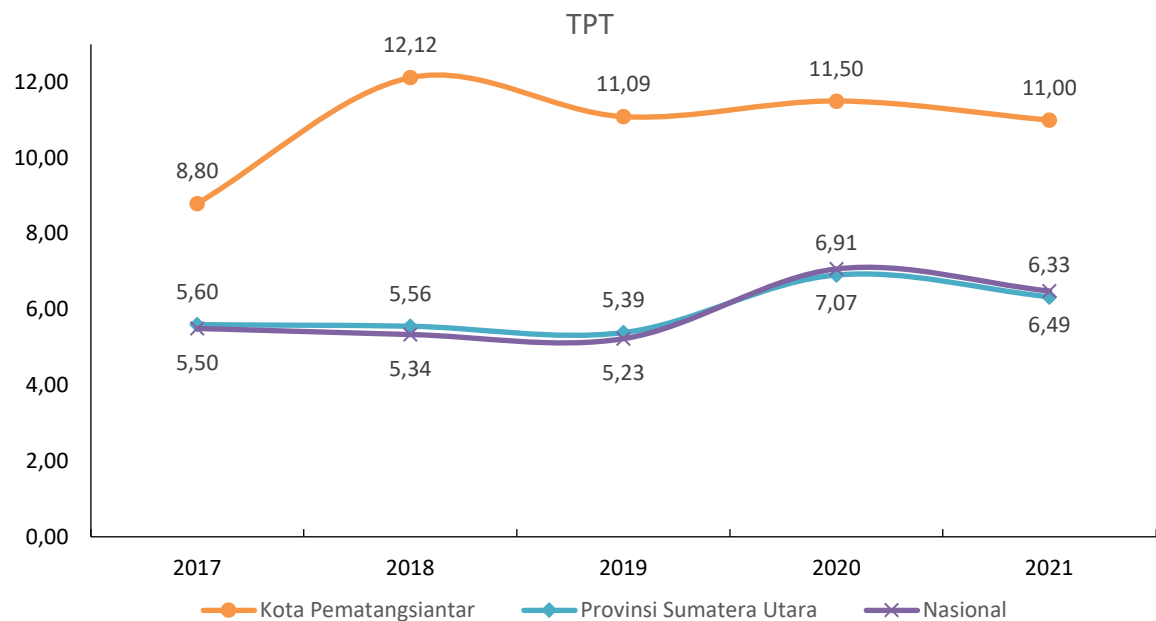


kemudian tahun 2019 turun menjadi 11,12% dan naik kembali di tahun 2020 sebesar 11.50%. Masa pandemi Covid-19, perekonomian mulai menurun dan berdampak pada kondisi ketenagakerjaan, berupa pengurangan jam kerja, pengurangan tenaga kerja bahkan pemberhentian seluruh pekerja dikarenakan operasional berhenti akibat permintaan yang terus menurun

Tabel 2.11
Statistik Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar Tahun 2017 - 2021

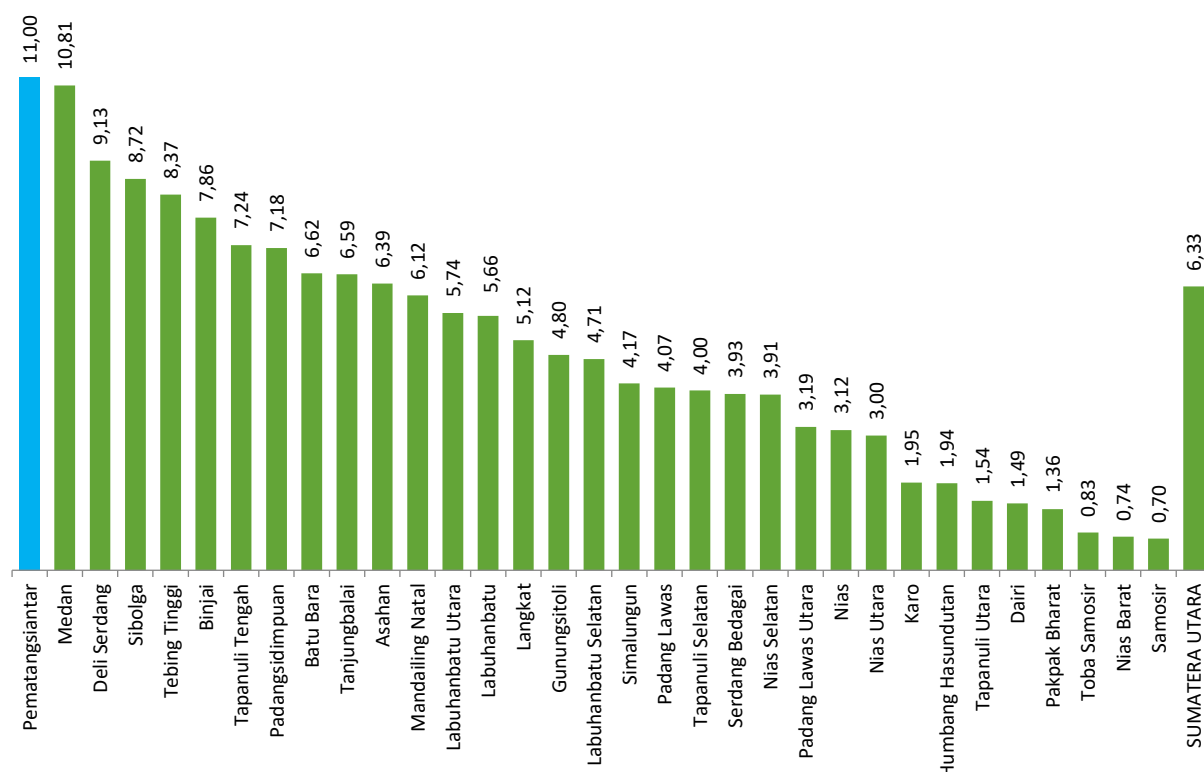
No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk Usia 15+	182 530	191,161	193,484	195,768	197,971
2	Angkatan Kerja	122.522	126,716	137,957	137,927	136.204
	Bekerja	111.746	111,362	122,622	122,063	121.228
	Pengangguran	10.776	15,354	15,335	15,864	14.984
3	Bukan Angkatan Kerja	60.008	64,445	55,527	57,841	61,759
4	TPAK	68,88	66,29	71,11	70.45	68.80
5	TPT	8.80	12,14	11,09	11,5	11,00

Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022



Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Gambar 2.24
TPT Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Gambar 2.25
Perbandingan TPT Kab/Kota Se-Sumatera Utara Tahun 2021

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat



pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2017-2021 cukup fluktuatif. Angka tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 12,12%. Komposisi penduduk bekerja

menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor.



Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Perdagangan dan Jasa sebesar 75,33% diikuti oleh Industri sebesar 16,59% dan Pertanian sebesar 8,08%. Dominasi lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja masih sama baik pada Agustus 2020.

Kategori lapangan pekerjaan Pertanian mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar dibandingkan dengan Agustus 2020, naik sebesar 1,23%. Diikuti oleh Industri naik sebesar 0,26%. Sebaliknya, penyerapan

tenaga kerja di lapangan pekerjaan Perdagangan dan Jasa turun sebesar 1,49%. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar). Pada Agustus 2021, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 67,82 ribu orang (55,94%), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 53,41 ribu orang (44,06%) Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2021 turun sebesar 2,34% jika dibandingkan Agustus 2020.. Tingkat Pengangguran Terbuka akan menjadi perhatian serius pada periode yang akan datang. Diharapkan TPT Kota Pematang Siantar tidak lagi menjadi yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Sektor Perdagangan dan Jasa (Pariwisata) kedepannya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang besar. Kemudian sektor Pertanian perkotaan (*Urban Farming*) yang dapat dikembangkan menjadi agrowisata juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang signifikan.



2.2.2.9 Angka Melek Huruf

Definisi Angka Melek Huruf adalah Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya,



tanpa harus mengerti apa yang di baca atau ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf dapat menjadi indikator melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan. Angka melek huruf di Kota Pematang Siantar tahun 2021 mencapai 100% dibandingkan tahun 2020 yang mengalami penurunan menjadi 99,7%

Tabel 2.12
Kondisi Melek Huruf Kota Pematang Siantar Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka melek huruf	99,90	99,98	100	99,7	100

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1 Seni Budaya

Pembangunan bidang seni budaya terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat.Kota Siantar yang memiliki slogan berbahasa Simalungun,"Sapanganbei Manotok Hitei" yang berarti Saling Bergotong Royong Untuk Satu Tujuan hidup damai dengan beragam suku/etnis dari Simalungun, Batak Toba, Suku Jawa dan sebagian kecil Tionghoa, Batak Karo dan suku lainnya.Sebagai pintu masuk ke objek pariwisata Danau Toba, dengan jarak tempuh kira-kira 46 Km, Kota Pematang Siantar perlu mengembangkan sarana dan prasana pendukung pariwisata.

Tabel 2.13
Kondisi Seni dan Budaya Kota Pematang Siantar Tahun 2017 – 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata	Unit	100	100	100	100	100
2	Jumlah Pameran Pariwisata	Keg	2	3	4	4	5
3	Jumlah Objek Wisata Alam	Unit	2	2	2	2	2
4	Jumlah Objek Wisata Buatan	Unit	7	10	10	10	10
5	Jumlah Objek Wisata Tirta	Unit	6	6	6	6	6
6	Jumlah Objek Wisata Sejarah	Unit	9	9	9	9	9
7	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya	Keg	13	13	13	13	13
8	Jumlah Grup Kesenian	Kel	10	14	14	14	14
9	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	1	1	1	1	1



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
10	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	0	4	4	4	4
11	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	1	2	2	2	2
12	Jumlah Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	0	1	1	1	1
13	Jumlah Kawasan Cagar Budaya	Kawasa n	13	13	13	13	13
14	Jumlah Benda Cagar Budaya	Unit	13	13	13	13	13
15	Jumlah Peningkatan Sarpras Objek Wisata Sejarah	Unit	1	5	5	5	5
16	Jumlah Wisatawan	Jiwa	611485	459614	459614	753000	753000
17	Jumlah Penginapan/Hotel	Unit	31	31	31	31	31

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Kota Pematang Siantar yang multi etnis memiliki kekuatan yang sangat besar dalam bidang Seni Budaya. Dengan mengunjungi Kota Pematang Siantar, maka wisatawan akan dapat melihat dan menikmati Seni Budaya yang beragam. Pada periode yang akan datang, bidang Seni Budaya akan dioptimalkan sebagai salah satu penarik kunjungan wisatawan ke Kota Pematang Siantar. Pagelaran Seni Budaya akan rutin digelar dari seluruh etnis yang ada. Wisata kota berbasis situs cagar budaya dan sejarah juga akan direncanakan dikembangkan pada periode selanjutnya.

2.2.3.2 Olahraga

Pemuda merupakan komponen bangsa yang sering dijadikan indikator keberhasilan suatu bangsa. Tidak salah apabila dikatakan bahwa pemuda merupakan agen pembawa perubahan (*transformation agent*) dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam struktur demografi Kota Pematang Siantar, kelompok usia muda merupakan bagian terbesar dari total penduduk. Itu berarti kurun waktu 5-10 tahun ke depan dimana terdapat lebih banyak kelompok penduduk usia muda (produktif) di banding usia tidak produktif. Pembinaan bakat dan pembibitan olahraga juga menjadi penting dan terus dilakukan, baik melalui event kompetisi maupun peningkatan SDM olahraga dan pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.14
Kondisi Keolahragaan Kota Pematang Siantar Tahun 2017 – 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Klub Olahraga	Klub	24	24	24	24	24
2	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	1	1	1	1	1
3	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	Organisa si	60	60	60	60	60



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
4	Jumlah Organisasi Olahraga	Organisasi	14	14	14	14	16
5	Jumlah Lapangan Olahraga	Unit	3	3	3	3	3

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Pematang Siantar merupakan satu-satunya Kota yang masuk dalam Wilayah Dataran tinggi bersama 8 (delapan) Kabupaten lainnya yaitu; Kabupaten Tapanuli Utara, Toba, Simalungun, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, dan Samosir. Capaian indikator makro Kabupaten/Kota daerah Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara sebagai berikut.

Tabel 2.15
Capaian Indikator Makro Kabupaten/Kota Wilayah
Dataran Tinggi Sumatera Utara Tahun 2021

Kabupaten/Kota	LPE (%)	IPM (Poin)	Tingkat Kemiskinan (%)	Gini Rasio	TPT (%)	PDRB Perkapita ADHK (Juta)	PDRB Perkapita ADHB (Juta)
Tapanuli Utara	3,54	73.76	9,72	0.2766	1.54	19.219.312	27.917.074
Toba	2,92	75.39	8,99	0.2719	0.83	27.061.051	39.597.467
Simalungun	3,70	73.40	8,81	0.2641	4.17	28.542.404	42.418.784
Dairi	2,05	71.84	8,31	0.2268	1.49	21.310.297	31.157.809
Karo	2,25	74.83	8,79	0.2327	1.95	35.646.915	53.349.721
HBG Hasundutan	2,02	69.41	9,65	0.3043	1.94	21.125.372	31.828.353
Pakpak Bharat	2,54	67.94	9,35	0.2421	1.36	16.363.174	23.834.097
Samosir	2,65	70.83	12,68	0.2735	0.70	22.964.364	34.534.288
Pematang Siantar	1,25	79.17	8,52	0.3076	11.00	35.261.545	52.473.799

Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Berdasarkan penyampaian data-data Aspek Kesejahteraan Sosial sebelumnya, maka dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar tahun 2020 berada pada -1,89 naik positif di 2021 menjadi 1,25% namun tingkat laju pertumbuhan berada di urutan terendah se Sumatera Utara
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai kontributor terbesar terhadap PDRB Kota Pematang Siantar mengalami perlambatan
3. Persentase penduduk miskin Kota Pematang Siantar tahun 2021 (berdasarkan perhitungan BPS bulan Maret) meningkat sebesar: 8,52% (jumlah pendduk miskin 22,060 rb) meningkat dibandingkan Tahun 2020



sebesar 8,27 % (jumlah penduduk miskin 21,230 ribu) dan berada pada urutan terendah ke 8 dari 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
Fokus Kesejahteraan Sosial
<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka IPM Kota Pematang Siantar berada di posisi nomor 2 tertinggi setelah kota Medan dengan angka 2021: 79,17 poin naik dari tahun 2020: 78,75. Komposit pembentuk IPM: Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah berada di posisi ke-2 dari Kota Medan dan Pendapatan perkapita yang disesuaikan berada di urutan ke-3 setelah Kota Medan dan Kota Tebing 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pematang Siantar menurun dari Tahun 2020 11,50% menjadi 11% di 2021 namun tetap menjadi urutan tertinggi TPT se-Sumatera Utara 3. Serapan tenaga kerja di dominasi oleh tingkat pendidikan SMA/MA/Paket C sebanyak 30,59% dan status pekerjaan terbesar di sektor informal sebesar 55,94%
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
<ol style="list-style-type: none"> 1. Data menunjukkan tidak ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap kondisi seni budaya dan olahraga di Kota Pematang Siantar kurun waktu 2017 – 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki nilai strategis bagi penciptaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. Kewenangan urusan pendidikan kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangannya antara lain:

- a. Pengelolaan pendidikan dasar.
- b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- c. Pengelolaan pendidikan non formal;
- d. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
- e. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota;
- f. Penerbitan izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- g. Penerbitan izin Pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan



h. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Berikut penyajian capaian indikator pendidikan disajikan menurut sub urusan kewenangan. Capaian indikator kinerja utama dan urusan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.16
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Sekolah Berakreditasi Minimal B (1)	Unit	65	73	87	164	201
	Jumlah Sekolah (2)	Unit	239	239	239	239	205
	Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B (3 = $(1/2)*100$)	%	27,20	30,54	36,40	68,62	98,05
2	Persentase Guru Kualifikasi D-III (1 = $(2/3)*100$)	%	9,93	5,68	6,42	6,89	1,35
	Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi D-III (2)	Jiwa	323	175	209	209	44
	Jumlah Seluruh Guru (3)	Jiwa	3253	3079	3257	3032	3259
3	Persentase Guru Kualifikasi S1/D-IV (1 = $(2/3)*100$)	%	87,52	92,04	91,34	90,90	96,41
	Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S1/D-IV (2)	Jiwa	2847	2834	2975	2756	3142
	Jumlah Seluruh Guru (3)	Jiwa	3253	3079	3257	3032	3259
4	Persentase Guru Kualifikasi S2-S3 (1 = $(2/3)*100$)	%	2,55	2,27	2,24	2,21	2,24
	Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S2-S3 (2)	Jiwa	83	70	73	67	73
	Jumlah Seluruh Guru (3)	Jiwa	3253	3079	3257	3032	3259
5	Jumlah Guru SD/MI (1)	Jiwa	1969	1883	1945	1812	1946
	Jumlah Siswa SD/MI (2)	Jiwa	33599	32678	31681	28018	29453
	Perbandingan Guru dan Siswa SD/MI (3 = $(1/2)*100$)	%	5,86	5,76	6,14	6,47	6,61
6	Jumlah Guru SMP/MTs (1)	Jiwa	1284	1196	1312	1220	1313
	Jumlah Siswa SMP/MTs (2)	Jiwa	20365	20349	20254	17785	19588
	Perbandingan Guru dan Siswa SMP/MTs (3 = $(1/2)*100$)	%	6,30	5,88	6,48	6,86	6,70
7	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang Tidak bersekolah Lagi (1)	Jiwa	n/a	63	6	38	29
	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang Pernah/Sedang Bersekolah (2)	Jiwa	n/a	31051	26192	29387	27179
	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI (3 = $(1/2)*100$)	%	n/a	0,20	0,02	0,13	0,11
8	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi (1)	Jiwa	n/a	113	85	13	22



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang Pernah /Sedang Bersekolah (2)	Jiwa	n/a	18149	20356	10663	11624
	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs ($3 = (1/2)*100$)	%	n/a	0,62	0,42	0,12	0,19
9	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,06	11,08	11,15	11,16	11,29
10	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,01	14,02	14,21	13,09	13,09
11	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bisa Membaca dan Menulis (1)	Jiwa	182347	184455	207550	204135	206574
	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (2)	Jiwa	182530	184492	207550	204758	206574
	Angka Melek Huruf (AMH) ($3 = (1/2)*100$)	%	99,90	99,98	100,00	99,70	100,00
12	Jumlah Siswa SD/MI (1)	Jiwa	33599	32678	31681	30780	29453
	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun (2)	Jiwa	31249	31116	27101	29652	29043
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI ($3 = (1/2)*100$)	%	107,52	105,02	116,90	103,80	101,41
13	Jumlah Siswa SMP/MTs (1)	Jiwa	20365	20349	20254	17785	19588
	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun (2)	Jiwa	22095	19094	18512	15291	15276
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs ($3 = (1/2)*100$)	%	92,17	106,57	109,41	116,31	128,23
14	Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun di Jenjang SD/MI (1)	Jiwa	28133	31051	27212	27356	27016
	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun (2)	Jiwa	31249	31116	27101	29652	29043
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI ($3 = (1/2)*100$)	%	90,03	99,79	100,41	92,26	93,02
15	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun di Jenjang SMP/MTs (1)	Jiwa	16569	18149	20050	10663	11624
	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun (2)	Jiwa	22095	19094	18512	15291	15276
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs ($3 = (1/2)*100$)	%	74,99	95,05	108,31	69,73	76,09
16	Jumlah Siswa PAUD (1)	Jiwa	6746	6112	5583	4442	4230
	Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun (2)	Jiwa	15483	15642	4322	8718	8420
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ($3 = (1/2)*100$)	%	43,57	39,07	129,18	50,95	50,24
17	Jumlah Siswa pada Jenjang PAUD (TK/RA/Penitipan Anak) (1)	Jiwa	6746	6112	5583	4442	4230
	Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun (2)	Jiwa	15483	15642	4322	8718	8420
	Rasio Siswa PAUD dengan Anak Usia 4-6 Tahun ($3 = (1/2)*100$)	%	43,57	39,07	129,18	50,95	50,24



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
18	Jumlah Pendidik PAUD yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (1)	Jiwa	410	180	273	188	456
	Jumlah Seluruh Pendidik PAUD (2)	Jiwa	779	476	411	388	620
	Persentase Pendidik PAUD yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (3 = $(1/2)*100$)	%	52,63	37,82	66,42	48,45	73,55
19	Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun (1)	Jiwa	28133	31051	27212	27356	27016
	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun (2)	Jiwa	31249	31116	27101	29652	29043
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (3 = $(1/2)*100$)	%	90,03	99,79	100,41	92,26	93,02
20	Jumlah Sekolah SD/MI (1)	Unit	176	176	176	175	176
	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun (2)	Jiwa	31249	31116	27101	29652	29043
	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Pendidikan Dasar (SD/MI)(3 = $(1/2)*100$)	%	0,56	0,57	0,65	0,59	0,61
21	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun (1)	Jiwa	22040	18149	20050	10663	11624
	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun (2)	Jiwa	22095	19094	18512	15291	15276
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (3 = $(1/2)*100$)	%	99,75	95,05	108,31	69,73	76,09
22	Jumlah Sekolah SMP/MTs (1)	Unit	63	63	63	50	50
	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun (2)	Jiwa	22095	19094	18512	15291	15276
	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Pendidikan Dasar (SMP/MTs) (3 = $(1/2)*100$)	%	0,29	0,33	0,34	0,33	0,33
23	Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI (1)	Jiwa	5636	5326	5215	5947	5433
	Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SD/MI pada Tahun Sebelumnya (2)	Jiwa	5495	5502	5790	5147	5426
	Angka Kelulusan Sekolah (AL) SD/MI (3 = $(1/2)*100$)	%	102,57	96,80	90,07	115,54	100,13
24	Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs (1)	Jiwa	6755	6863	6095	5798	3317
	Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SMP/MTs pada Tahun Sebelumnya (2)	Jiwa	6898	6737	6678	5896	3349
	Angka Kelulusan Sekolah (AL) SMP/MTs (3 = $(1/2)*100$)	%	97,93	101,87	91,27	98,34	99,04

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Kinerja Urusan Pendidikan di Kota Pematang Siantar secara umum terus meningkat pada periode 2017-2021. Hal ini tergambar secara makro melalui



pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang di atas level Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan utama pada periode selanjutnya adalah peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, terutama pada satuan pendidikan negeri. Peningkatan prestasi di bidang pendidikan juga menjadi target kedepannya.

2.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Bahkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak di bidang kesehatan, amandemen kedua UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) menetapkan:”Negara bertanggung jawab batas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”. Di era otonomi daerah amanat amandemen dimaksud, mempunyai makna penting bagi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi dan politik. Secara umum pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit. Pelayanan Puskesmas masih didukung oleh beberapa Puskesmas Pembantu untuk mengoptimalkan pelayanan bidang kesehatan. Selain itu juga terdapat Rumah Sakit Umum Daerah serta beberapa Rumah Sakit Swasta. Capaian indikator kinerja utama dan indikator urusan kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.17
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Persentase Peningkatan Manajemen, Penelitian, dan Sistem Informasi Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah Kelurahan UCI (1)	Kelurahan	35	36	46	33	31
	Jumlah Seluruh Kelurahan (2)	Kelurahan	53	53	53	53	53
	Persentase (Cakupan) Kelurahan yang Telah Mencapai UCI (<i>Universal Child Immunization</i>) (3 = (1/2)*100)	%	66,04	67,92	86,79	62,26	58,49
3	Jumlah Balita Gizi Buruk yang Ditangani (Mendapatkan Perawatan) (1)	Jiwa	1	2	2	3	5



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk (2)	Jiwa	1	2	2	3	5
	Persentase (Cakupan) Balita Gizi Buruk yang Ditangani (Mendapatkan Perawatan) (3 = $(1/2) \times 100$)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 Kelahiran Hidup	3,00	2,92	0,00	3,72	0,93
5	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100000 Kelahiran Hidup	112,60	72,96	109,14	87,45	185,87
6	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1000 Kelahiran Hidup	5,00	0,49	0,55	2,84	2,17
7	Jumlah Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular yang Ditangani (1)	Jiwa	n/a	7825	14740	12477	8600
	Jumlah Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular yang Ditemukan (2)	Jiwa	n/a	11879	16359	13145	12075
	Persentase Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular (3 = $(1/2) \times 100$)	%	n/a	65,87	90,10	94,92	71,22
8	Jumlah Penduduk yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan (1)	Jiwa	n/a	228241	228311	228141	232631
	Jumlah Seluruh Penduduk (2)	Jiwa	251513	253500	255317	268254	270768
	Persentase Penduduk yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan (3 = $(1/2) \times 100$)	%	n/a	90,04	89,42	85,05	85,92
9	Jumlah Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Unit	6	6	8	8	10
10	Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarana Kesehatan (Sarkes) Strata 1 (1)	Jiwa	7352	8087	7655	7468	8786
	Jumlah Seluruh Masyarakat Miskin (2)	Jiwa	50700	68130	74531	73430	87154
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (3 = $(1/2) \times 100$)	%	14,50	11,87	10,27	10,17	10,08
11	Cakupan Persalinan di Faskes	%	82,40	100,00	101,77	100,00	100,00
12	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	41,15	47,24	51,14	45,20	53,26
13	Jumlah Puskesmas Pembantu dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Unit	6	6	8	8	10



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
14	Jumlah Tenaga Medis (1)	Jiwa	215	223	223	221	329
	Jumlah Penduduk (2)	Jiwa	251513	253500	255317	268254	270768
	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (3 = $(1/2)*1000$)	per 1000 Penduduk	0,85	0,88	0,87	0,82	1,22
15	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (Persentase Persalinan yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan)	%	87,70	93,13	81,27	76,64	82,29
16	Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah yang Berakses Air Bersih (1)	Rumah Tangga	26268	28996	26363	25372	26268
	Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah (2)	Rumah Tangga	29850	29850	29850	29850	29850
	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih bagi Rumah Tangga 40% Penduduk yang Berpendapatan Rendah (3 = $(1/2)*100$)	%	88,00	97,14	88,32	85,00	88,00
17	Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah yang Bersanitasi (1)	Rumah Tangga	23880	28733	23584	23880	25402
	Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah (2)	Rumah Tangga	29850	29850	29850	29850	29850
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi bagi Rumah Tangga 40% Penduduk yang Berpendapatan Rendah (3 = $(1/2)*100$)	%	80,00	96,26	79,01	80,00	85,10
18	Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah yang Memiliki Rumah dan Bangunan dengan <i>Septic Tank</i> Standar (1)	Rumah Tangga	25969	25026	26566	16418	20924
	Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah (2)	Rumah Tangga	29850	29850	29850	29850	29850
	Persentase Rumah dan Bangunan yang	%	87,00	83,84	89,00	55,00	70,10



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	Memiliki <i>Septic Tank</i> Standar bagi Rumah Tangga 40% Penduduk yang Berpendapatan Rendah (3 = (1/2)*100)						
19	Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah yang Memiliki Rumah Layak Huni/Standar Kesehatan (1)	Rumah Tangga	17910	28626	23854	16418	20924
	Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah (2)	Rumah Tangga	29850	29850	29850	29850	29850
	Persentase Rumah Layak Huni/Standar Kesehatan bagi Rumah Tangga 40% Penduduk yang Berpendapatan Rendah (3 = (1/2)*100)	%	60,00	95,90	79,91	55,00	70,10
20	Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN3)	%	n/a	88,34	97,30	81,88	98,37
21	Cakupan Kunjungan Bayi	%	79,10	119,77	134,38	105,25	149,13
22	Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang Telah Memperoleh Imunisasi Dasar Secara Lengkap	%	82,30	82,21	90,14	93,92	96,05
23	Persentase Pelayanan <i>Antenatal Care</i> (K4)	%	n/a	82,00	85,00	75,00	77,00
24	Jumlah RSUD yang Menyelenggarakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) (1)	Unit	1	1	1	1	1
	Jumlah RSUD (2)	Unit	1	1	1	1	1
	Persentase RSUD yang Menyelenggarakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) (3 = (1/2)*100)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	BOR (<i>Bed Occupancy Rate</i>) RSUD Dr. Djasamen Saragih	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya	%	n/a	58,00	49,00	52,00	53,00



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
27	Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapatkan ASI Eksklusif	%	n/a	29,00	41,00	22,00	21,00
28	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (1)	Jiwa	n/a	13221	15897	13747	12333
	Jumlah Seluruh Usia Lanjut (2)	Jiwa	n/a	31985	25312	26504	29523
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (3 = (1/2)*100)	%	n/a	41,34	62,80	51,87	41,77
29	Jumlah Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (1)	Rumah Tangga	n/a	10455	24170	29625	27462
	Jumlah Seluruh Rumah Tangga (2)	Rumah Tangga	58803	69643	70177	65471	65471
	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (3 = (1/2)*100)	%	n/a	15,01	34,44	45,25	41,95
30	Jumlah Keluarga Menghuni Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan (1)	Keluarga	n/a	64355	64212	65543	65552
	Jumlah Seluruh Keluarga (2)	Keluarga	n/a	66331	66331	66214	66214
	Persentase Keluarga Menghuni Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan (3 = (1/2)*100)	%	n/a	97,02	96,81	98,99	99,00
31	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	%	90,80	95,00	97,00	95,00	92,00
32	Persentase RSUD yang Melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat Sesuai Standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33	Jumlah Rumah Sakit (1)	Unit	8	8	8	8	8
	Jumlah Penduduk (2)	Jiwa	251513	253500	255317	268254	270768
	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk (3 = (1/2)*1000)	Unit per 1000 Penduduk	0,032	0,032	0,031	0,030	0,030
33	Jumlah Dokter (1)	Jiwa	215	221	221	229	237
	Jumlah Penduduk (2)	Jiwa	251513	253500	255317	268254	270768
	Rasio Dokter per Satuan Penduduk (3 = (1/2)*1000)	per 1000 Penduduk	0,85	0,87	0,87	0,85	0,88
35	Jumlah Tenaga Paramedis (1)	Jiwa	1116	1116	1116	1116	1554
	Jumlah Penduduk (2)	Jiwa	251513	253500	255317	268254	270768
	Rasio Tenaga Paramedis per	per 1000 Penduduk	4,44	4,40	4,37	4,16	5,74



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	Satuan Penduduk (3 = (1/2)*1000)						
36	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA	%	37,10	46,00	53,00	33,00	42,00
38	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
39	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi (1)	Rumah Tangga	37693	61488	61488	61488	61488
	Jumlah Seluruh Rumah Tangga (2)	Rumah Tangga	58803	69643	70177	65471	65471
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (3 = (1/2)*100)	%	64,10	88,29	87,62	93,92	93,92
40	Jumlah Posyandu Aktif	Unit	247	247	252	245	245

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Kondisi pandemi Covid-19 di Kota Pematang Siantar dengan jumlah kasus yang terkonfirmasi sampai dengan bulan Maret 2022 yaitu suspect dirawat 0 orang, suspect meninggal 36 orang, konfirmasi dirawat 51 orang, konfirmasi sembuh 1932 orang dan konfirmasi yang meninggal 18 orang. Hal ini tentu menunjukkan hal yang sangat baik namun, tetap tetap harus menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas dan menjaga kondisi kesehatan tubuh.



Sumber: www.pematangsiantarkota.go.id

Gambar 2.26
Peta Sebaran Pandemi Covid-19 di Kota Pematang Siantar



Urusan Kesehatan mendapatkan tekanan yang cukup besar pada periode 2017-2021, khususnya pada saat Pandemi Covid-19. Akan tetapi sejak akhir tahun 2021 telah mulai berangsur-angsur pulih dan capaian Angka Harapan Hidup Kota Pematang Siantar tetap yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara dan di atas level Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap unit kesehatan telah mencukupi. Orientasi kedepannya adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kebersihan lingkungan sebagai upaya lebih meningkatkan derajat kesehatan di Kota Pematang Siantar.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi baik untuk memperlancar transportasi. Kewenangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 10 sub urusan meliputi Sumberdaya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang, namun sesuai Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pematang Siantar, khusus Pelayanan Dasar air minum, air limbah, ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pematang Siantar, Persampahan ditangani Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar, sebagaimana tersebut diatas melekat pada tugas pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pematang Siantar. Capaian indikator kinerja utama dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut:

Tabel 2.18
Capaian Indikator Kinerja Urusan PUPR Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap (1)	Km	356,45	316,29	303,57	316,89	306,38
	Panjang Seluruh Jalan (2)	Km	395,19	377,70	377,70	377,70	377,70
	Proporsi atau Rasio Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap (3 = (1/2)*100)	%	90,20	83,74	80,37	83,90	81,12
2	Panjang Saluran Irigasi	Meter	22186	22186	24614	24668	22386

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022



Secara umum kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada periode 2017-2021 kurang baik karena capaian Tahun 2021 lebih rendah daripada Tahun 2017. Hal ini disebabkan karena kemampuan dan pengelolaan anggaran yang kurang baik. Sehingga pada periode selanjutnya akan menjadi perhatian yang serius. Kebijakan infrastruktur kedepannya adalah pembangunan infrastruktur yang berorientasi peningkatan perekonomian dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan kota.

2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 5 sub urusan meliputi Perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sarana prasarana dan utilitas (PSU), Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembangunan prasarana dasar permukiman pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan menyediakan pelayanan dasar dan konsekuensi pertumbuhan penduduk dan seiring dengan perkembangan kemajuan zaman. Capaian indikator kinerja utama dan urusan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut.

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Urusan PRKP Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (1)	Rumah Tangga	50509	51488	51141	52430	58175
	Jumlah Seluruh Rumah Tangga (2)	Rumah Tangga	58803	58803	58333	59627	59627
	Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (3 = (1/2)*100)	%	85,90	87,56	87,67	87,93	97,56
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik (1)	Rumah Tangga	58656	58803	58333	59627	59627
	Jumlah Seluruh Rumah Tangga (2)	Rumah Tangga	58803	58803	58333	59627	59627
	Persentase atau Rasio Rumah Tangga Pengguna Listrik (3 = (1/2)*100)	%	99,75	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah Penanganan Lokasi Perumahan dan Kawasan	Lokasi	3	3	4	5	3



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	Permukiman Kumuh						
4	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi (1)	Rumah Tangga	37693	38187	38371	39229	39479
	Jumlah Rumah Tangga (2)	Rumah Tangga	58803	58803	58333	59627	59627
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (3 = $(1/2)*100$)	%	64,10	64,94	65,78	65,79	66,21
5	Jumlah Rumah Layak Huni/Standar Kesehatan (1)	Unit	57034	57168	56770	58190	58594
	Jumlah Seluruh Rumah (2)	Unit	58803	58803	58333	59627	59627
	Persentase Rumah Layak Huni/Standar Kesehatan (3 = $(1/2)*100$)	%	97,00	97,22	97,32	97,59	98,27
6	Jumlah Rumah dan Bangunan yang Memiliki Septic Tank Standar (1)	Unit	n/a	4175	5295	5495	5870
	Jumlah Seluruh Rumah dan Bangunan (2)	Unit	n/a	58803	58333	59627	59627
	Persentase Rumah dan Bangunan yang Memiliki Septic Tank Standar (3 = $(1/2)*100$)	%	n/a	7,10	9,08	9,22	9,84
7	Luas Permukiman Kumuh	Ha	188,00	164,53	157,82	157,82	154,94
8	Berkurangnya Jumlah Lokasi Kumuh	Kelurahan	3	3	4	5	3
9	Luas Taman Kota pada Tahun Tertentu (Tahun Ke-n) (1)	Meter Persegi	143296	143296	143296	143296	143296
	Luas Taman Kota pada Tahun Sebelumnya (Tahun Ke-n-1) (2)	Meter Persegi	147029	147029	147029	147029	147029
	Persentase Peningkatan Taman Kota (3 = $((1-2)/2)*100$)	%	-2,54	-2,54	-2,54	-2,54	-2,54
10	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman terus meningkat sepanjang periode 2017-2021, terutama terkait ketersediaan air bersih dan rumah yang layak huni. Perhatian kedepannya adalah terkait sanitasi,



kebersihan kawasan dan pengurangan kawasan kumuh.

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kamtibmas di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan keamanan di masyarakat dapat diwujudkan. Terciptanya dan terpenuhinya rasa tentram dan aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Capaian utama dan kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan sebagai berikut.

Tabel 2.20
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Keamanan Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Rasio Penertiban Perda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Rasio Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	72,00	78,93	80,00	65,00	23,11
3	Jumlah Polisi Pamong Praja (1)	Jiwa	212	212	219	219	219
	Jumlah Penduduk (2)	Jiwa	251513	253500	255317	268254	270768
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10000 Penduduk (3 = (1/2)*10000)	per 10000 Penduduk	8,43	8,36	8,58	8,16	8,09
4	Jumlah Petugas Patroli K3	Jiwa	117	117	117	117	117
5	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda (1)	Perda	n/a	665	698	630	1260
	Jumlah Pelanggaran Perda (2)	Perda	n/a	24	24	24	18
	Rasio Penyelesaian Penegakan Perda (3 = (1/2)*100)	%	n/a	2770,83	2908,33	2625,00	7000,00

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Cakupan target pelayanan Bencana Kebakaran di wilayah Kota Pematang Siantar tahun 2021 mencapai 100 %, Indikator pelayanan bencana kebakaran langsung



ditangani sesuai dengan pengaduan dan respon tanggap penanggulangan bencana kebakaran sehingga capaian SPM terhadap pelaksanaannya terealisasi 100 %. Untuk Tingkat Waktu Tanggap yang ditargetkan sebesar 100 % hanya mencapai 91,7%. Hal ini disebabkan dari respon tanggap yang dihadapi masih mengalami kendala kemacetan jalan dan kerumunan masyarakat yang menonton. Dari 36 kejadian kebakaran, 29 diwilayah Kota Pematang Siantar dan 7 di wilayah Kabupaten Simalungun. Dari 7 diwilayah Kabupaten Simalungun ada 3 yang tidak masuk waktu tanggap dikarenakan jangkauan jarak. Jumlah Mobil pemadam kebakaran sesuai dengan standar nasional ditargetkan sebesar 65 % dikarenakan kondisi mobil pemadam kebakaran kurang baik dan tidak memiliki skylift, sehingga kurang maksimal dalam penerapan SPM, sehingga indikator realisasi juga memiliki 65 %.

2.3.1.6 Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PMKS merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi masyarakat dan dunia swasta. Berikut indikator kinerja urusan sosial.

Tabel 2.21
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi	Unit	17	17	17	17	18
2	Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial per KPS	Jiwa	12882	13583	13200	15236	13893

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Penanganan PMKS menjadi hal yang sangat penting dalam mengurangi penduduk miskin di Kota Pematang Siantar karena PMKS merupakan salah satu penyumbang angka kemiskinan. Data yang valid dan pemberian bantuan yang tepat sasaran menjadi kunci utama dalam penanganan PMKS.



2.3.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan tenaga kerja juga ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan ketenagakerjaan terutama diarahkan pada pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja ditujukan untuk meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja agar dapat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dunia industri melalui peningkatan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Melalui pelatihan kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, etos kerja dan kemampuan manajemen. Tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan diharapkan sudah siap diterima di pasar kerja sesuai dengan kompetensinya. Indikator kinerja utama dan urusan ketenagakerjaan sebagai berikut.

Tabel 2.22
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Daya Serap Tenaga Kerja per Tahun	Jiwa	780	644	925	253	327
2	Jumlah Penduduk yang Bekerja (1)	Jiwa	111746	106515	117892	122063	122063
	Jumlah Angkatan Kerja (2)	Jiwa	122522	121537	132604	137927	137927
	Rasio Penduduk yang Bekerja (3 = $(1/2) \times 100$)	%	91,20	87,64	88,91	88,50	88,50
3	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (1)	Jiwa	122522	121537	132604	137927	137927
	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun) (2)	Jiwa	168447	184492	186483	192768	190755
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (3 = $(1/2) \times 100$)	%	72,74	65,88	71,11	71,55	72,31
4	Jumlah Lulusan S1/S2/S3 (1)	Jiwa	180	226	319	38	1
	Jumlah Penduduk (2)	Jiwa	251513	253500	255317	268254	270768



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (3 = (1/2)*100)	%	0,07	0,09	0,12	0,01	0,00
5	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1)	Jiwa	69423	62955	53879	57841	74196
	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun (2)	Jiwa	168447	184492	186483	192768	190755
	Rasio Ketergantungan (3 = (1/2)*100)	%	41,21	34,12	28,89	30,01	38,90

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Seiring dengan TPT Kota Pematang Siantar yang paling tinggi di Provinsi Sumatera Utara, maka diperlukan terobosan besar dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Pengangguran di Kota Pematang Siantar tidak sepenuhnya masyarakat miskin, hal ini terlihat dari data bahwa angka kemiskinan lebih kecil dari angka pengangguran. Sehingga pengangguran di Kota Pematang Siantar lebih kepada penundaan ataupun pemilihan pekerjaan dari para pencari kerja. Oleh karena itu, perlu dianalisis sektor yang dimintai oleh para penganggur terdidik dan muda ini. Sehingga mereka berminat untuk segera bekerja. Oleh karena itu kedepannya pelatihan keterampilan tenaga kerja diarahkan pada bidang-bidang yang sedang diminati oleh kaum milenial dengan tingkat pendidikan yang sudah baik. Konsep magang bagi calon tenaga kerja juga menjadi inovasi yang akan dilakukan melalui kerjasama dengan industri dan usaha yang telah maju.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT dan lain sebagainya). Indikator kinerja utama dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut.

Tabel 2.23
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA
Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	IPM Gender	%	95,18	95,32	95,46	95,65	95,82
2	Jumlah KDRT (1)	Kasus	2	2	3	9	13



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	Jumlah Rumah Tangga (2)	Rumah Tangga	58803	58803	58333	59627	59627
	Rasio KDRT (3 = $(1/2) \times 100$)	Kasus per 100 RT	0,003	0,003	0,005	0,015	0,022
3	Jlh Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	Kasus	9	4	4	74	75

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Pembangunan gender di Kota Pematang Siantar telah memberikan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari pencapaian IPM Gender yang lebih baik dari Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Adapun fokus kedepannya adalah perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap tindakan KDRT. Dari data tahun 2017-2021 telah terjadi peningkatan kasus KDRT yang cukup signifikan walaupun penanganan yang dilakukan sudah cukup baik.

2.3.2.3 Pangan

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Kecukupan pangan merupakan hak azasi yang layak dipenuhi. Berdasar kenyataan tersebut, masalah pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah mestinya menjadi sasaran utama kebijakan suatu negara. Ketahanan pangan juga sangat penting karena mendukung pertahanan keamanan. Bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, pangan merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik nasional maupun global. Untuk itulah ketahanan pangan mempunyai pengaruh yang penting terhadap keamanan. Masalah ketahanan pangan perlu secara serius ditangani oleh Pemerintah karena menyangkut keberlangsungan kehidupan generasi penerus bangsa. Jika krisis pangan terjadi, stabilitas akan terganggu. Dampak kekurangan pangan dapat dirasakan langsung karena dapat memicu kelaparan, kemiskinan, dan kurangnya gizi pada penerus muda. Generasi muda menjadi kekurangan gizi sehingga tidak dapat tumbuh optimal. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi suatu daerah. Diharapkan kemandirian pangan dapat terwujud antara lain dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan kearifan lokal. Pembangunan bidang urusan pangan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berpedoman pada Peraturan Menteri/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama



pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Penyelenggaraan pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi secara merata dan berkelanjutan sesuai dengan regulasi kebijakan pangan nasional. Indikator urusan pangan Kota Pematang Siantar sebagai berikut.

Tabel 2.24
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Tersedianya Regulasi (Perkada) Ketahanan Pangan / Banyaknya	-	Tidak Ada / 0	Tidak Ada / 0	Tidak Ada / 0	Tidak Ada / 0	Tidak Ada / 0

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Kinerja Urusan Pangan pada periode 2017-2021 kurang berorientasi hasil, sehingga sulit menggambarkan kondisi yang diharapkan. Akan tetapi sesuai karakteristik wilayah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Urusan Pangan di Kota Pematang Siantar masih bergantung dengan wilayah sekitar dalam memenuhi kebutuhan pangan.

2.3.2.4 Pertanahan

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi:

1. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/Kota,
2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah,
3. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten/kota
4. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota,
5. Penerbitan izin membuka tanah
6. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

Untuk urusan pertanahan diampu oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar, namun target kinerja urusan pertanahan tidak ada di dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Kewenangan urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 6 sub urusan meliputi Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,



Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Tabel 2.25
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Sampah yang Tertangani (1)	Meter Kubik	136058	150488	254180	248452	281116
	Total Jumlah Timbulan Sampah (2)	Meter Kubik	186884	206148	275116	267153	299665
	Persentase Penanganan Sampah (3 = $(1/2)*100$)	%	72,80	73,00	92,39	93,00	93,81
2	Persentase Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah TPS (1)	Unit	473	583	646	689	742
	Jumlah Penduduk (2)	Jiwa	251513	253500	255317	268254	270768
	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk (3 = $1/2$)	Unit per Penduduk	0,002	0,002	0,003	0,003	0,027

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Secara umum, kinerja Urusan Lingkungan Hidup terus meningkat pada periode 2017-2021. Penanganan sampah juga semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pengendalian pencemaran dan penegakan hukum lingkungan juga telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terwujud karena sosialisasi dan penyuluhan yang intens dilakukan instansi terkait.

Pada periode selanjutnya, fokus urusan Lingkungan Hidup adalah pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan memakai konsep *reduce waste*. Pemberdayaan masyarakat ataupun komunitas akan menjadi strategi dalam implementasi rencana penanganan sampah di Kota Pematang Siantar pada masa yang akan datang.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang



dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelayanan dokumen kependudukan diantaranya meliputi Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, dan Akta Kematian, Penerbitan Akte Kelahiran, Akte Kematian serta surat keterangan terkait lainnya; Capain kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi indikator kinerja utama dan urusan sebagai berikut.

Tabel 2.26
Capain Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap Sesuai Usia (1)	Jiwa	n/a	219354	237942	269297	271414
	Jumlah Seluruh Penduduk (2)	Jiwa	251513	284628	271942	273398	273723
	Rasio Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan (3 = (1/2)*100)	%	n/a	77,07	87,50	98,50	99,16
2	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun yang Ber-KTP Elektronik (1)	Jiwa	173363	185141	190559	194012	197614
	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun atau Telah Menikah (2)	Jiwa	208570	210645	197328	199524	201497
	Persentase Penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP) (3 = (1/2)*100)	%	83,12	87,89	96,57	97,24	98,07
3	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun yang Ber-KTP (1)	Jiwa	173363	185141	190559	194012	197614
	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun atau Telah Menikah (2)	Jiwa	208570	210645	197328	199524	201497
	Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk (3 = 1/2)	-	0,83	0,88	0,97	0,97	0,98
4	Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran (1)	Jiwa	93035	110786	123148	129237	136678
	Jumlah Penduduk (2)	Jiwa	251513	284628	271942	273398	273723
	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk (3 = (1/2)*1000)	per 1000 Penduduk	369,90	389,23	452,85	472,71	499,33



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
5	Jumlah Bayi Berakta Kelahiran (1)	Jiwa	1002	975	1192	1211	1051
	Jumlah Bayi (2)	Jiwa	1245	1260	1366	1228	1134
	Rasio Bayi yang Memiliki Akta Kelahiran (3) = $(1/2) \times 100$	%	80,48	77,38	87,26	98,62	92,68

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil secara umum cukup baik pada periode 2017-2021 walaupun terdapat realisasi indikator yang menurun pada tahun 2021 tapi masih dalam kategori baik karena capaiannya masih di atas 90 %. Kedepannya untuk lebih meningkatkan capaian kinerja, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan dokumen kependudukan menjadi target utama. Penggunaan teknologi informasi diharapkan akan mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Memandirikan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat adalah dengan menciptakan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok sehingga tercipta kemandirian dan peningkatan kesejahteraan. Pengembangan konsep *community empowerment*(pemberdayaan masyarakat) diperlukan agar masyarakat tidak terjebak pada konsep lama *community development* (pembangunan masyarakat), yang menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Beberapa indikator yang dijadikan tolok ukur keberdayaan dan kemandirian masyarakat adalah meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat, meningkatnya kemampuan ekonomi keluarga, dan meningkatnya peran dari lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan. Berikut indikator Kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Tabel 2.27
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Program Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Lokasi	n/a	42	107	87	30
2	Ketersediaan Buku Profil Kelurahan	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Jumlah Musyawarah Pembangunan	Kelurahan	53	53	53	53	53



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	Kelurahan yang Dapat Difasilitasi						
4	Jumlah Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang Terlaksana	Kegiatan	n/a	193	191	184	174
5	Jumlah Kader Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Jiwa	257	257	257	257	257
6	Jumlah Kelompok Binaan LPM	Kelompok	62	62	62	62	62
7	Jumlah Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kelurahan	4	4	4	4	4

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan terlihat stagnan pada periode 2017-2021. Hal ini terlihat dari capaian hampir seluruh indikator yang ada. Kedepannya pemberdayaan masyarakat akan dijadikan salah satu strategi dalam mengatasi setiap permasalahan yang dialami Kota Pematang Siantar. Peningkatan keterlibatan masyarakat pada setiap program pembangunan akan menambah kesuksesan pelaksanaan program tersebut. *Sense of belonging* dari masyarakat atas hasil pembangunan juga akan tinggi jika pelibatan masyarakat tinggi dalam proses pembangunan.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) menurut UU No 10 Tahun 1992 adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera sedangkan pengendalian penduduk adalah terjadi keseimbangan antara penduduk yang meninggal, penduduk yang lahir, penduduk yang masuk dan penduduk yang keluar. Berikut indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Tabel 2.28
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga per Keluarga	Jiwa	7	7	5	5	4
2	Jumlah Akseptor KB (1)	Pasangan	30678	31897	34621	34824	34812
	Jumlah Pasangan Usia Subur (2)	Pasangan	39766	40532	41682	41183	42653
	Rasio Akseptor KB (3 = (1/2)*100)	%	77,15	78,70	83,06	84,56	81,62



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
3	Cakupan atau Jumlah Peserta KB Aktif	Jiwa	29871	30541	31241	31521	32285
4	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	Keluarga	248	270	269	251	265

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada periode 2017-2021 cukup baik, hal ini terlihat dari menurunnya rata-rata jumlah anggota keluarga per keluarga yang menurun dari 5 anggota keluarga pada tahun 2020 menjadi 4 anggota keluarga pada tahun 2021. Capaian ini tentunya sebagai akibat dari sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi (KB) kepada pasangan usia subur (PUS) di Kota Pematang Siantar. Kedepannya kinerja Urusan ini akan terus dipertahankan demi terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera dan berkualitas di Kota Pematang Siantar.

2.3.2.9 Perhubungan

Urusan Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 4 sub urusan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan, namun sub urusan yang ditangani hanya pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan perkeretaapian. Berikut Indikator urusan perhubungan yang menjadi IKU daerah dan indikator urusan.

Tabel 2.29
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Panjang Jalan (1)	Km	395,19	377,70	377,70	377,70	377,70
	Jumlah Kendaraan (2)	Unit	65887	54285	40141	37365	33250
	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan (3 = (1/2)*100)	%	0,60	0,70	0,94	1,01	1,14
2	Jumlah Terminal Tipe C	Unit	1	0	0	0	0
3	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (1)	Km	356,45	329,61	316,81	306,38	344,96
	Panjang Seluruh Jalan (2)	Km	395,19	377,70	377,70	377,70	377,70
	Rasio Jalan dalam Kondisi Baik (3 = (1/2)*100)	%	90,18	87,27	83,88	81,12	91,33
4	Jumlah Penumpang yang Terangkut oleh Angkutan Kereta Api	Jiwa	n/a	56241	56241	50712	50712
5	Jumlah Izin Trayek	Izin	n/a	69	28	22	50

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Kinerja urusan Perhubungan pada periode 2017-2021 telah menggambarkan



posisi Kota Pematang Siantar sebagai pusat sub regional di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah penumpang pada moda transportasi dan adanya peningkatan izin trayek yang beroperasi. Pada periode yang akan datang, Urusan Perhubungan akan fokus pada peningkatan keselamatan dan kenyamanan moda transportasi, kelayakan dan modernisasi sarana dan prasarana LLAJ, penataan perpakiran, serta ketertiban pengendara di jalan raya.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Pembentukan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah serta cepat merupakan sebagai salah satu ciri khas masyarakat yang sejahtera dan memiliki daya saing. Urusan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kota Pematang Siantar meliputi sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika. Adapun capaian indikator kinerja utama dan urusan untuk komunikasi dan informatika Kota Pematang Siantar tahun 2018-2021 sebagai berikut.

Tabel 2.30
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah OPD yang Memiliki Website dan Melakukan Updating (1)	OPD	0	0	0	0	6
	Jumlah Seluruh OPD (2)	OPD	33	33	33	33	33
	Persentase OPD yang Memiliki Website dan Melakukan Updating (3 = (1/2)*100)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18
2	Ketersediaan Sarana Penerimaan Keluhan/Aduan Masyarakat (Membangun Siantar Smart City)	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Jumlah Surat Kabar Nasional / Lokal	Media Cetak	11	11	11	11	11
4	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	Stasiun	15	15	15	13	11
5	Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah	Website	0	1	1	2	2
6	Jumlah Pameran/Expo	Kali	0	0	0	0	0
7	Jumlah Jaringan Komunikasi	Buah	72	72	72	124	124

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022



Sebagai daerah pusat sub regional di Provinsi Sumatera Utara, Urusan Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu bidang yang sangat strategis. Urusan ini semakin penting pada saat Pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Kota Pematang Siantar. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pencapaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika terus dipacu, terutama dalam memberikan informasi yang terkini dari masing-masing perangkat daerah. Kedepannya Urusan Komunikasi dan Informatika akan semakin dipacu terutama dalam hal mendukung transformasi digital penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembuatan aplikasi yang terintegrasi akan menjadi fokus utama sebagai upaya perwujudan *Smart City* Pematang Siantar.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat lima kewenangan yang diampu pemerintah Kabupaten/Kota pada urusan koperasi dan UKM. Pertama, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam Izin Usaha Simpan Pinjam. Lingkup kewenangan pada perijinan meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. Kedua, kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan. Kewenangan ini meliputi pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi. Ketiga, kewenangan dalam penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Lingkup kewenangan ketiga ini ada pada pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Keempat, kewenangan dalam pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, meliputi:

- 1) Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota,
- 2) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM),
- 3) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- 4) Kewenangan dalam pengembangan UMKM, yaitu pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Berikut indikator urusan kinerja utama dan urusan Dinas Koperasi dan UMKM.



Tabel 2.31
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Koperasi Seluruh	Unit	371	373	375	375	375
2	Jumlah UKM	Unit	17474	17647	18677	23290	26869
3	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	100	110	84	84	111

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu pendukung perekonomian Kota Pematang Siantar khususnya yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Walaupun Pandemi Covid-19 melanda pada pertengahan periode 2017-2021, perkembangan kinerja Urusan ini tetap meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi dan UKM sangat tangguh menghadapi berbagai krisis. Kedepannya Urusan Koperasi dan UKM akan lebih ditingkatkan kiprahnya dalam perekonomian Kota Pemantangsiantar. Pembinaan akan lebih intens dilakukan dan pengenalan penggunaan teknologi informasi akan lebih ditingkatkan Selain bidang usaha jasa akan menjadi perhatian serius terutama yang diminati kaum millennial.

2.3.2.12 Penanaman Modal

Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia sedangkan urusan Penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 meliputi 4 sub urusan antara lain: 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Kerja Sama Penanaman Modal; 3) Promosi Penanaman Modal; 4) Pelayanan Penanaman Modal. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

Untuk mendukung kemudahan berinvestasi dan berusaha di Kota Pematang Siantar, salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat proses perijinan. Standar waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengurus perijinan usaha di Kota Pematang Siantar adalah 7 hari kerja. Kinerja urusan penanaman modal menjadi bagian indikator kinerja utama daerah sebagai berikut.



Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Lama Waktu Perizinan	Hari	7	7	7	7	7
2	Jumlah Investor Berskala PMA	Unit	6	6	5	5	6
3	Jumlah Investor Berskala PMDN	Unit	210	232	232	230	240
4	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Unit	216	238	237	235	246
5	Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Miliar Rp	n/a	439,05	293,33	678,84	2308,79

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Urusan Penanaman Modal juga mengalami tekanan di saat Pandemi Covid-19, karena para investor banyak menunda investasinya atau bahkan menutup usahanya. Akan tetapi di Kota Pematang Siantar, dari data kinerja yang tersaji di atas, investor cenderung bertambah walaupun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik Kota Pematang Siantar masih baik di kalangan para investor. Kondisi yang kondusif menjadi salah satu penyebab keberhasilan hal ini. Kedepannya pelayanan penanaman modal akan lebih ditingkatkan kualitasnya sehingga akan mempermudah investor. Promosi potensi Kota Pematang Siantar juga akan semakin gencar dilakukan dan terfokus pada pameran-pameran yang potensial memberikan dampak positif bagi dunia investasi di Kota Pematang Siantar.

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kinerja urusan pemuda dan olahraga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 2.33
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Klub Olahraga	Klub	24	24	24	24	24
2	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	1	1	1	1	1
3	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	Organisasi	60	60	60	60	60
4	Jumlah Organisasi Olahraga	Organisasi	14	14	14	14	16
5	Jumlah Lapangan Olahraga	Unit	3	3	3	3	3

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada periode 2017-2021 terkesan stagnan dan tidak menggambarkan prestasi yang dicapai. Hal ini disebabkan karena indikator yang ditetapkan hanya bersifat keluaran dan fisik semata. Kedepannya orientasi Urusan ini akan diarahkan kepada peningkatan keterampilan pemuda dan prestasi olah raga. Pembangunan sarana olah raga yang layak akan diupayakan pada periode selanjutnya guna mendukung prestasi dan menjadikan Kota Pematang Siantar siap menjadi tuan rumah kegiatan olah raga.

2.3.2.14 Statistik

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha. Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan statistik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik menyebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistic terdiri atas: (1) statistik dasar; (2) statistik sektoral dan; (3) statistik khusus. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-



ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. Statistik penting artinya bagi penyelenggaraan pembangunan, karena memberikan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan. Selanjutnya agar keakuratan data dapat selalu terjaga maka diperlukan perbaikan tata kelola data, melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Daerah. Untuk mewujudkan SDI tersebut maka perlu disusun peraturan Walikota Pematang Siantar tentang penyelenggaraan SDI di Kota Pematang Siantar. Kondisi saat ini penyediaan data statistik daerah Kota Pematang Siantar masih statistik dasar yang ditangani oleh BPS Kota Pematang Siantar. Berikut indikator urusan statistik daerah Kota Pematang Siantar.

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2017-2021

	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Tersedianya Buku Kota Pematang Siantar Dalam Angka	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Buku PDRB Kota Pematang Siantar	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

2.3.2.15 Persandian

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah maka ruang lingkup persandian saat ini tidak hanya sekedar pengiriman dan penerimaan surat melalui radiogram atau sejenisnya saja tapi lebih luas lagi ke arah pengamanan informasi. Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah, meliputi:

1. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsidan kabupaten/kota, yaitu:



- a. Penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi;
 - b. Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
 - c. Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik;
 - d. Penyediaan layanan Keamanan Informasi
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan jaring komunikasi sandi internal pemerintah daerah, antara lain:
- a. Jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah
 - b. Jaring komunikasi sandi internal perangkat daerah; dan
 - c. Jaring komunikasi sandi pimpinan daerah

Urusan persandian melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar. Target kinerja urusan persandian tidak ada dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022.

2.3.2.16 Kebudayaan

Dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, menjadi jelas bahwa kebudayaan memegang peranan penting dalam segala lini pembangunan. Undang-Undang ini mengamanatkan agar kebudayaan yang ada diperlakukan dengan sebaik-baiknya melalui tindakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Berdasar Undang-Undang tersebut pula, tiap daerah memiliki kebijakan masing-masing terkait pengelolaan objek-objek kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan dalam masyarakat harus tetap dijaga dan lestarikan karena seni dan budaya merupakan identitas suatu bangsa, selain menjaga dan melestarikan kita juga harus mempromosikannya kepada masyarakat luas. Cagar budaya merupakan warisan budaya suatu bangsa, dengan menjaga dan melestarikannya kita bisa menjaga sejarah bangsa. Pelestarian cagar budaya merupakan sebuah usaha dinamis yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan nilai serta keberadaan cagar budaya melalui cara pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan terhadap cagar budaya tersebut. Pembangunan kebudayaan di Kota Pematang Siantar ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut.

Tabel 2.35
Capaian Indikator Kinerja Urusan Budaya Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Objek Wisata Alam	Unit	2	2	2	2	2
2	Jumlah Objek Wisata Buatan	Unit	7	10	10	10	10
3	Jumlah Objek Wisata Tirta	Unit	6	6	6	6	6
4	Jumlah Objek Wisata Sejarah	Unit	9	9	9	9	9



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
5	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya	Keg	13	13	13	13	13
6	Jumlah Grup Kesenian	Kel	10	14	14	14	14
7	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	1	1	1	1	1
8	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	0	4	4	4	4
9	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	1	2	2	2	2
10	Jumlah Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	0	1	1	1	1
11	Jumlah Kawasan Cagar Budaya	Kawasan	13	13	13	13	13
12	Jumlah Benda Cagar Budaya	Unit	13	13	13	13	13
13	Jumlah Peningkatan Sarpras Objek Wisata Sejarah	Unit	1	5	5	5	5

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

2.3.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan menyebarluaskan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Kondisi kinerja urusan perpustakaan dirinci pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.36
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Perpustakaan	Unit	302	305	302	302	311
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Jiwa	9417	31915	51420	20695	0
3	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Eksemplar	19235	24086	33070	33070	30161

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022



Dari sisi sarana perpustakaan, telah terjadi peningkatan jumlah perpustakaan selama periode 2017-2021, akan tetapi dari sisi pengunjung perpustakaan, terjadi penurunan yang lumayan tinggi. Hal ini disebabkan oleh pembatasan yang dilakukan selama Pandemi Covid-19. Kedepannya perangkat daerah yang melaksanakan urusan perpustakaan akan didorong untuk mewujudkan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Penambahan koleksi akan terus dilakukan terutama dalam memenuhi kebutuhan para mahasiswa di Kota Pematang Siantar. Kerja sama antar berbagai perpustakaan juga akan diupayakan untuk menambah jejaring dan pengayaan koleksi.

2.3.2.18 Arsip

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebuktian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kebuktian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Berikut capain urusan kearsipan.

Tabel 2.37
Capaian Indikator Kinerja Urusan Arsip Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Ketersediaan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Ketersidaan pengelolaan arsip secara baku yang telah ada di Kota Pematang Siantar akan ditingkatkan implementasinya di seluruh Perangkat Daerah.

2.3.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1 Perikanan

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kota pada urusan kelautan dan perikanan mencakup sub urusan Perikanan Tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan



Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan. Berdasarkan kondisi geografis Kota Pematang Siantar, jenis kegiatan perikanan yang ada di kota ini adalah berupa perikanan darat yang dibudidayakan. Berikut Indikator Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2018-2021.

Tabel 2.38
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Balai Benih Ikan (BBI)	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Peningkatan Produksi Benih Ikan	Juta Ekor	3041000	4562000	4730000	4810000	4850000
3	PDRB Sektor Perikanan (1)	Miliar Rp	206,67	208,30	219,24	228,28	226,80
	PDRB Kota Pematang Siantar (2)	Miliar Rp	12443,96	13176,71	13933,25	13920,09	14208,23
	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB ($3 = (1/2) \times 100$)	%	1,66	1,58	1,57	1,64	1,60

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Sektor perikanan terus memberikan kontribusi yang positif terhadap PDRB Kota Pematang Siantar, bahkan terus tumbuh positif di masa Pandemi Covid-19 kemaren. Sebagai salah satu sektor penyedia pangan, maka sektor perikanan khususnya budidaya akan terus dioptimalkan produksinya, sehingga akan mengurangi ketergantungan Kota Pematang Siantar dengan daerah lain. Ketersediaan stock yang cukup juga akan mengurangi kemungkinan inflasi di Kota Pematang Siantar.

2.3.3.2 Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi keamanan. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Pematang Siantar. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Selain nilai PDRB, cara lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan sektor pariwisata dalam mendongkrak perekonomian Kota Pematang Siantar adalah dengan melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan. Berikut indikator kinerja urusan pariwisata yang menjadi Indikator kinerja utama dan indikator kinerja urusan.



Tabel 2.39
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata	Unit	100	100	100	100	100
2	Jumlah Pameran Pariwisata	Keg	2	3	4	4	5
3	Jumlah Wisatawan	Jiwa	611485	459614	459614	753000	753000
4	Jumlah Penginapan/Hotel	Unit	31	31	31	31	31

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Jumlah kunjungan wisatawan di Kota Pematang Siantar terus meningkat seiring dengan mulai melandainya Pandemi Covid-19. Kedepannya sektor pariwisata ini akan menjadi andalan di Kota Pematang Siantar. Orientasinya akan diubah dari daerah transit menjadi daerah destinasi. Pembinaan destinasi akan menjadi prioritas utama serta menggali potensi lainnya yang ada di wilayah Kota Pematang Siantar.

2.3.3.3 Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Pertanian mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Berikut indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama dan indikator kinerja urusan pertanian dan peternakan dalam RPJMD 2017-2022.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Panjang Saluran Irigasi	Meter	22186	22186	24614	24668	22386
2	Persentase Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)	%	n/a	-0,73	-0,60	4,01	0,68
3	Panjang Jalan Usaha Tani	Km	2,00	4,84	4,84	4,84	4,84
4	Luas Lahan Irigasi Kota dalam Kondisi Baik	Ha	1712,00	1683,00	1519,72	1519,72	1519,72
5	Luas Panen Produksi Padi Sawah	Ha	3825,30	3117,20	2361,50	2391,00	2483,40
6	Luas Panen Produksi Padi Jagung	Ha	1039,80	557,40	579,00	930,00	855,30
7	Luas Panen Produksi Ubi Kayu	Ha	304,00	290,00	214,90	301,00	216,00
8	Jumlah Produksi Daging Sapi	Kg	122475	195424	207961	168139	303751
9	Jumlah Produksi Daging Kambing	Kg	23968	8284	6644	8101	18250



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
10	Jumlah Produksi Daging Babi	Kg	845340	479076	497222	381016	460059
11	Jumlah Produksi Daging Ayam Buras	Kg	122000	65730	66360	66115	88985
12	Jumlah Produksi Telur Ayam Buras	Butir	242700	210200	248300	221050	123642
13	Jumlah Produksi Daging Itik	Kg	1570	9173	9762	9701	15509
14	Jumlah Produksi Telur Itik	Butir	17820	22970	29780	22030	12083

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Kinerja Urusan Pertanian pada periode 2017-2021 terlihat mirip dengan Urusan Perikanan. Kebijakan pada periode selanjutnya akan sama dengan Urusan Perikanan. Urusan Pertanian akan diperkuat sebagai pendukung stock pangan di Kota Pematang Siantar. Kemudian pertanian perkotaan (*urban farming*) akan menjadi ikon pertanian baru dengan melibatkan para kaum milenial dan berorientasi agrowisata.

2.3.3.4 Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, definisi dari perdagangan adalah tatanan kegiatan yangterkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri danmelampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atasbarang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 5 kewenangan yang wajib dilaksanakan, yaitu perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan standardisasi perlindungan konsumen. Khusus kewenangan dalam perijinan dan pendaftaran perusahaan ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pematang Siantar. Sedangkan Urusan perindustrian pada lingkup pemerintahan daerah meliputi perencanaan pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi industri nasional. Berikut capaian indikator kinerja urusan perdagangan dan perindustrian yang menjadi indikator kinerja utama dan indikator kinerja urusan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pematang Siantar.

Tabel 2.41
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan dan Perindustrian
Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Pertambahan Pasar-Pasar	Unit	7	7	7	7	7



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	Tradisional di Kecamatan						
2	Jumlah Pertumbuhan Industri Kecil	Unit	583	688	688	688	565
3	Jumlah Pertumbuhan Industri Menengah	Unit	23	13	13	13	12
4	Jumlah Pertumbuhan Industri Besar	Unit	6	6	6	6	5
5	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (1)	Miliar Rp	3052,80	3260,18	3480,43	3518,53	3647,94
	Jumlah PDRB (2)	Miliar Rp	12443,96	13176,71	13933,25	13920,09	14208,23
	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB (3 = (1/2)*100)	%	24,53	24,74	24,98	25,28	25,67
6	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri (1)	Miliar Rp	2800,31	2917,98	3014,93	2994,56	2973,96
	Jumlah PDRB (2)	Miliar Rp	12443,96	13176,71	13933,25	13920,09	14208,23
	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (3 = (1/2)*100)	%	22,50	22,14	21,64	21,51	20,93

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Urusan Perdagangan dan Perindustrian merupakan salah satu sektor penyumbang PDRB yang penting di Kota Pematang Siantar. Akan tetapi seiring dengan terjadinya Pandemi Covid-19, sektor ini termasuk yang terkena dampak yang cukup besar. Sektor ini kedepannya akan diupayakan untuk semakin dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian Kota Pematang Siantar, terutama untuk Industri Kecil dan Menengah.

2.3.4 Unsur Pendukung

2.3.4.1 Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan. efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman budaya, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Unsur pendukung urusan pemerintahan dilaksanakan oleh 2



perangkat daerah (1) Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar, (2) Sekretariat DPRD Kota Pematang Siantar.

1. Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar:

Berikut capaian indikator kinerja unsur pendukung administrasi pemerintahan yang menjadi indikator kinerja utama daerah dalam RPJMD Tahun 2017-2022 dilaksanakan sekretariat daerah Kota Pematang Siantar.

Tabel 2.42
Capaian Indikator Kinerja Urusan Unsur Pemerintahan Setdako
Tahun 2018-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat/Skor	n/a	n/a	n/a	C (40,47)	C (42,39)
2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Predikat/Skor	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Belum Rilis	belum rilis
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat/Skor	C 33,79	C 30,29	C 30,56	C (40,14)	C (40,57)
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	C (72,12)	n/a	n/a	C (73,36)	B (81,81)
5	Persentase Pelaksanaan <i>e-Procurement</i>	%	n/a	92,00	88,00	29,00	11,00
6	Jumlah OPD yang Memiliki SOP Pelayanan Publik (1)	OPD	n/a	28	27	n/a	17
	Jumlah Seluruh OPD (2)	OPD	33	33	33	33	33
	Persentase OPD yang Memiliki SOP Pelayanan Publik (3 = $(1/2) \times 100$)	%	n/a	84,85	81,82	n/a	51,52
7	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (3 = $(1/2) \times 100$)	%	n/a	58,39	76,42	76,42	83,70
8	Jumlah Ruang Kantor Kelurahan/Kecamatan yang Memadai (1)	Unit	n/a	48	50	38	26
	Jumlah Seluruh Ruang Kantor Kelurahan/Kecamatan (2)	Unit	53	53	53	53	53
	Persentase Ruang Kantor Kelurahan/Kecamatan yang Memadai (3 = $(1/2) \times 100$)	%	n/a	90,57	94,34	71,70	49,06
9	Jumlah Sosialisasi Produk Hukum	Produk Hukum	n/a	2	3	1	3
10	Jumlah Penerbitan Produk Hukum	Produk Hukum	n/a	1298	715	684	778

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022



Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar pada periode 2017-2021 memang terus mengalami peningkatan, walaupun bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Sumatera Utara, kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pematang Siantar masih berada di bawah rata-rata. Adapun kinerja yang telah baik, Antara lain adalah opini BPK terhadap LKPD yang telah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Tingkat kepatuhan pelayanan public yang telah masuk zona hijau. Kedepannya kinerja Sekretariat Daerah akan terus ditingkatkan, terutama dalam hal manajemen kinerja, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.

2. Sekretariat DPRD Kota Pematang Siantar:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD merupakan perwakilan yang telah diberi mandat oleh rakyat dalam urusan pemerintahan. DPRD merupakan mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Jumlah anggota DPRD Kota Pematang Siantar tahun 2020 sebanyak 30 orang dari 10 sepuluh Partai Politik (Parpol) yang berpartisipasi dalam Pemilu sebagai berikut.

Tabel 2.43
Partai Politik dan Anggota DPRD Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Partai	Total
1. Partai Demokrat	3
2. Partai Golongan Karya	5
3. Partai PDI- Perjuangan	8
4. Partai Amanat Nasional	2
5. Partai Gerindra	3
6. Partai Nasdem	4
7. Partai Hanura	4
8. Partai PKPI	1
9. Partai PPP	0
10. Partai PKS	0
Jumlah	30

Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Dalam melaksanakan fungsinya DPRD di bantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi



kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak, tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam rangka mendukung fungsi DPRD, yaitu fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran, Indikator kinerja unsur pendukung sekretariat DPRD tidak ada dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022.

2.3.4.2 Unsur Penunjang Perencanaan

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional yang disebut Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun, dimana dokumen perencanaan tersebut disusun secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bappeda Kota Pematang Siantar juga melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan. Indikator kinerja urusan perencanaan yang menjadi indikator kinerja utama dan indikator kinerja urusan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 sebagai berikut.



Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RTRW/RPJPD /RPJMD/RKP D)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Persentase Pelaksanaan <i>e-Planning</i>	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Program	5	5	5	5	5
5	Tersedianya Dokumen RTRW (Perda)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda / Banyaknya	Ada/ Tidak	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1
7	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada / Banyaknya	Ada/ Tidak	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1
8	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan Perkada / Banyaknya	Ada/ Tidak	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1
9	Persentase Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD	%	43,47	57,00	87,00	78,00	26,00

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Kinerja Urusan perencanaan kurang menggambarkan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena tidak dilakukannya penyesuaian terhadap dokumen perencanaan terdahulu. Kedepannya Urusan perencanaan diarahkan dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan yang akuntabel dan aplikatif.



2.3.4.3 Unsur Penunjang Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penyusunan, penatausahaan, pelaksanaan anggaran yang harus dilaksanakan secara transparan, dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Pelaksanaan Urusan Keuangan Kota Pematang Siantar memegang peranan penting dalam memberikan kebijakan perencanaan keuangan dalam pelaksanaan program-program untuk meningkatkan pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Indikator kinerja urusan keuangan menjadi indikator kinerja utama dalam RPJMD 2017-2022 sebagai berikut.

Tabel 2.45
Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Opini BPK	-	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP
2	Total PAD (1)	Ribu Rp	105.445.990	137.052.839	125.018.503	140.047.128	87.373.180
	Total APBD (Realisasi Pendapatan Daerah) (2)	Ribu Rp	869.993.440	978.915.421	1.005.078.666	890.248.010	649.541.452
	Rasio PAD Terhadap APBD (3 = (1/2)*100)	%	12,12	14,00	12,44	15,73	13,45
3	Belanja Bantuan Sosial (1)	Ribu Rp	1.089.940	1.637.600	8.104.593	1.509.783	4.682.578
	Total Realisasi Belanja Daerah (2)	Ribu Rp	934.471.600	994.512.015	934.784.427	911.986.217	790.249.187
	Rasio Belanja Bantuan Sosial (3 = (1/2)*100)	%	0,12	0,16	0,87	0,17	0,59
4	Jumlah Kegiatan pada RKPD (1)	Kegiatan	1048	1037	1190	1075	990
	Jumlah Kegiatan pada APBD (2)	Kegiatan	n/a	1291	1203	1152	1462
	Persentase Kesesuaian RKPD dan APBD (3 = (1/2)*100)	%	n/a	80,33	98,92	93,32	67,72

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022



Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah juga terus meningkat pada periode 2017-2021. Capaian ini akan terus ditingkatkan dengan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD.

2.3.4.4 Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Target kinerja unsur penunjang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 sebagai berikut.

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pend dan.Pelatihan
Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (1)	Jiwa	150	141	141	167	178
	Jumlah Total ASN (2)	Jiwa	4658	4674	4464	4338	4084
	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (3 = (1/2)*100)	%	3,22	3,02	3,16	3,85	4,36
2	Tersedianya Prosedur Penyelenggaraan Lelang Jabatan untuk Pemilihan Pejabat Struktural	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Peraturan Wali Kota Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Aparatur Pemerintahan Kota Pematang Siantar	-	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terus meningkat pada periode 2017-2021 walaupun tidak signifikan. Kedepannya Urusan ini diarahkan pada peningkatan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar.

2.3.4.5 Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Litbang memegang peranan



penting dan menjadi indikator kemajuan dari suatu organisasi. Salah satu wujud penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan Bappeda Kota Pematang Siantar adalah menerbitkan jurnal Kebijakan yang yang berisikan karya tulis ilmiah dalam berbagai bidang untuk memberikan referensi/input dalam pengambilan kebijakan di Kota Pematang Siantar. Jurnal Kebijakan tersebut terbit 2 kali dalam satu tahun. Target kinerja urusan penelitian dan pengembangan tidak ada di dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022. Disamping itu pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), merupakan bentuk pelayanan Bappeda Kota Pematang Siantar kepada mahasiswa/mahasiswi yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Lembaga yang akan melaksanakan penelitian/survei di Kota Pematagsiantar. Indikator kinerja penelitian dan pengembangan tidak ada dalam RPJMD 2017-2022.

2.3.4.6 Unsur Pengawasan

Fungsi pengawasan internal pemerintahan memiliki peran yang penting dalam rangka mengendalikan dan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun. Melalui pengawasan ini diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menghasilkan hasil yang maksimal dengan biaya yang sesuai. Target kinerja unsur pengawasan dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 menjadi bagian indikator kinerja utama daerah yaitu rasio penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dengan ralisasi tahun 2020 adalah 100%.

Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Rasio Penyampaian LHKPN	%	n/a	97,44	92,00	100,00	100,00

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

2.3.4.7 Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh 8 Kecamatan di Kota Pematang Siantar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah sekaligus penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum. Camat melaksanakan sebagian kewenangan walikota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Umum secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintah daerah di wilayah kecamatan. Dengan kedudukan tersebut kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusianya dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri.



Pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah di kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Camat dalam memimpin kecamatan menurut Peraturan Pemerintah ini bertugas diantaranya :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perwa.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menurut PP tersebut, camat mendapat pelimpahan sebagian kewenangan walikota yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota dan melaksanakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan. Pelayanan perizinan dimaksud dilaksanakan dengan kriteria :

1. Prosesnya sederhana
2. Obyek perizinan berskala kecil
3. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks
4. Tidak memerlukan teknologi tinggi.

Sebagai bagian dari kecamatan, kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun kelurahan adalah perangkat kecamatan. Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dialokasikan anggaran untuk kelurahan di daerah kota yang tidak ada desanya paling sedikit 5% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Target kinerja Kecamatan dalam dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 menjadi bagian Indikator Kinerja Utama daerah sebagai berikut.

Tabel 2.48
Indikator Kinerja Kewilayahan Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Usulan Masyarakat yang Ditampung APBD (1)	Kegiatan	n/a	42	313	394	165



No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	Jumlah Seluruh Usulan Masyarakat (dalam RKPD) (2)	Kegiatan	n/a	261	462	453	792
	Persentase Usulan Masyarakat yang Ditampung dalam APBD (3 = $(1/2) \times 100$)	%	n/a	16,09	67,75	86,98	20,83
2	Jumlah LPM yang Berpartisipasi dalam Pembangunan (1)	Lembaga	61	61	61	61	61
	Jumlah Seluruh LPM Aktif (2)	Lembaga	61	61	61	61	61
	Tingkat Partisipasi LPM dalam Pembangunan (3 = $(1/2) \times 100$)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah Kelompok PKK Aktif (1)	Kelompok	61	61	61	61	61
	Jumlah Seluruh Kelompok PKK (2)	Kelompok	61	61	61	61	61
	Persentase Kelompok PKK Aktif (3 = $(1/2) \times 100$)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Kinerja urusan pengawasan pada periode 2017-2021 telah tercapai. Hal ini disebabkan karena kerjasama yang baik antar perangkat daerah di Kota Pematang Siantar. Kedepannya urusan pengawasan akan diarahkan pada penjaminan kualitas (*quality assurance*) penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fokus selanjutnya adalah peningkatan tingkat kematangan SPIP, Kapabilitas APIP dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

2.3.4.8 Unsur Pemerintahan Umum

Sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang bergabung dengan Urusan Pemerintahan lain dalam bentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkan menjadi badan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan terpisah dari Urusan Pemerintahan lain. Dengan tugas dan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan



- antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

Target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar tidak ada di dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan pada Aspek Pelayanan Umum
1. Belum seluruhnya urusan konkuren yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pematang Siantar memiliki indikator kinerja
2. Indikator kinerja yang digunakan belum sepenuhnya berbasis Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time-bound (SMART)
3. Data yang terbatas dan pengolahan data yang belum optimal



2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Konsumsi Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Tabel 2.49
Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Kota Pematang Siantar
Tahun 2017-2021

No.	Jenis Pengeluaran	Tahun (Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Non Makanan	481.028	673.506	566.979	663.572	613,364
2	Makanan	536.649	697.987	528.283	662, 849	627,821
3	Total	1.017.677	1.371.493	1.095.262	1.326,421	1,241,185

Sumber : BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran konsumsi perkapita masyarakat kota Pematang Siantar pada tahun 2021 menurun dibandingkan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 1.241.185 juta, dan pengeluaran terbesar terjadi pada kelompok makanan yang dapat diasumsikan sebagian dari masyarakat Kota Pematang Siantar semakin menurun tingkat perekonomiannya.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas infrastruktur dalam satu wilayah kota sangat penting dan diperlukan bagi daya tarik dan perkembangan gerak perekonomian daerah tersebut. Berikut fasilitas daerah yang diharapkan dapat meningkatkan aktifitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pematang Siantar.



2.4.2.1 Aksesibilitas

Luas Daerah Kota Pematang Siantar adalah 79,971 Km² dengan wilayah administratif terdiri dari 8 kecamatan dan 53 kelurahan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang jalan 306,38 Km dari jumlah tersebut sebagian besar jenis permukaannya aspal. Kondisi jalan di Kota Pematang Siantar pada tahun 2021 sebesar 81,12% dalam kondisi baik/mantap.

2.4.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas infrastruktur dalam satu wilayah kota sangat penting dan diperlukan bagi daya tarik dan perkembangan gerak perekonomian daerah tersebut. Berikut fasilitas daerah yang diharapkan dapat meningkatkan aktifitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pematang Siantar.

2.4.3.1 Ketersediaan Lahan

Kawasan Tanjung Pinggir seluas 573 Hektar ini merupakan kawasan yang direncanakan sebagai kawasan industri pada rencana pola ruang dalam dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012–2032. Kawasan ini memiliki nilai strategis karena memiliki prospek pengembangan yang sangat besar untuk ke depannya, disamping cukup luas, kawasan ini juga masih merupakan lahan eks-HGU PTPN III di Kecamatan Siantar Martoba dan dekat dengan Terminal Tanjung Pinggir. Rencana pembelian lahan eks-HGU PTPN III akan segera direalisasikan di Tahun 2022.

2.4.3.2 Jumlah Hotel dan Restoran

Jumlah hotel Berbintang di Kota Pematang Siantar Tahun 2021 berjumlah 11 unit dan Hotel Non Bintang sebanyak 43 unit dengan jumlah kamar sebanyak unit (Bintang) dan 905 unit (Non Bintang) dan jumlah tempat tempat tidur 861 buah (Bintang) dan 1054 buah (Non Bintang). Kontraksi ekonomi tahun 2020 sampai dengan 2021 memberikan dampak yang cukup besar pada kegiatan jasa akomodasi, tingkat penghunian kamar hotel dan akomodasi lainnya lebih rendah dari tahun 2019, yakni 32,57% dan semakin menurun di tahun 2021 sebesar 32,44% dan didominasi oleh tamu nusantara. Pendukung lainnya adalah ada 5 jasa pelayanan wisata dan Restoran/Rumah Makan berjumlah 120 unit. Dengan adanya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Ripparda) Kota Pematang Siantar, kedepan pengelolaan pariwisata Kota Pematang Siantar akan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah Kota Pematang Siantar.



Tabel 2.50
Tingkat Hunian Kamar

Rata-rata inap (hari)	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tamu Nusantara (hari)	1,22	1,27	1,12	1,06	1,09
Tamu Mancanegara (hari)	4,48	2,10	1,32	12,43	0
Tingkat Penghunian Kamar (%)	34,62	33,73	35,43	32,57	32,44

Sumber: BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2022

2.4.3.3 Ketersediaan Air Bersih

Penyediaan dan pengelolaan air bersih dilaksanakan oleh Perumda Tirtauli Kota Pematang Siantar. Jumlah pelanggan air bersih dari Perumda Tirta Uli di Kota Pematang Siantar ada sebanyak 829.511 pelanggan. Dari jumlah tersebut 794.994 adalah pelanggan rumah tangga, 19.331 adalah pelanggan perusahaan/hotel dan lain-lain, dan 7.133 adalah pelanggan tempat ibadah/sosial, dan 8.053 pelanggan dari instansi.

2.4.3.4 Ketersediaan Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar. Jumlah pelanggan PLN Cabang Pematang Siantar pada tahun 2020 sebanyak 103.491 pelanggan. Jumlah KWH yang terjual sebesar 235.641.253 KWh dan penyaluran KWH listrik terbesar kepada pelanggan rumah tangga sebesar 126.352.691 KWh. Rasio rumah tangga pengguna listrik di Kota Pematang Siantar sebesar 99.85%.

2.4.3.5 Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan Keputusan Walikota Pematang Siantar No. 500/580/IX/Wk.Tahun 2017 menyatakan bahwa produk unggulan Kota Pematang Siantar adalah ;

1. Tenun Ulos : Merupakan ciri khas Kota Pematang Siantar, perlu dijaga, dilestarikan dan ditingkatkan mutu produknya agar mampu berdaya saing di pasar lokal maupun Nasional
2. Batik Tenun Ulos : Sebuah inovasi baru dalam pembuatan tenun karena motifnya menunjukkan kearifan lokal Kota Pematang Siantar dan memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi salah satu produk batik tenun ulos unggulan yang berciri khas di Kota Pematang Siantar
3. Roti Ketawa : Sebuah jajanan/oleh-oleh khas Kota Pematang Siantar yang sudah variatif dan inovatif yang berdaya saing dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi



- 4. Bawang Goreng : Merupakan produk diversifikasi terbuka dan berdaya saing. Jenis produk antara lain bawang goreng original, bawang goreng ikan teri, bawang goreng ebi, dan bawang goreng jengkol.
- 5. Keripik Opak : Bahan bakunya mudah di dapat dan sangat digemari masyarakat serta menjadi makanan khas Kota Pematang Siantar.

Kelima produk unggulan diatas masih menggunakan teknologi tradisional/manual. Modal usaha yang digunkan masih bersifat modal pribadi dan sebagian berasal dari bantuan Pemerintah maupun pinjaman Bank. Kontribusi industri kecil yang menghasilkan produk tersebut masih tergolong kecil terhadap PAD Kota Pematang Siantar. Saat ini dukungan pemerintah terhadap produk unggulan tersebut adalah pembinaan. Pangsa pasar produk unggulan tersebut masih terbatas di dalam negeri

2.4.4 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.4.1 Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban merupakan aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat menggunakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas. Angka kriminalitas menjadi salah satu pertimbangan yang digunakan oleh pihak luar, seperti wisatawan dan investor untuk melakukan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Sehingga aktivitas yang dilakukan akan memberikan keuntungan di masa depan bagi pihak Investor dan menciptakan rasa aman tenteram bagi Wisatawan. Disamping itu adalah jumlah demonstrasi/unjukrasa yang merupakan salah satu hal yang perlu dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif. Pemerintah Kota Pematang Siantar` bersama dengan instansi vertikal (Kepolisian dan Kejaksaan) terus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat.

Tabel 2.51
Angka Kriminalitas di Kota Pematangsintar Tahun 2017-2021

No	TINDAK PIDANA	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021*
1	TP Narkoba	132	133	157	117	115
2	TP Pembunuhan	0	1	2	1	0
3	TP Pencabulan	2	5	4	4	4
4	TP Penganiayaan	33	54	43	107	100
5	TP Pencurian	82	93	100	100	100
6	TP Penipuan	33	59	102	47	47
7	TP Pemalsuan uang	0	0	0	1	0
Total Jumlah Tindak Pidana		282	345	408	377	366
Total Jumlah Penduduk		251.513	253.500	255.317	268254	270768
Persentase Kriminalitas		0,11%	0,14%	0,16%	0,14%	0,14%*

Sumber: Satpol PP Kota Pematang Siantar Tahun 2022, *) Angka Sangat Sementara



Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah tindak pidana di Kota Pematang Siantar menunjukkan angka penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun secara persentase capaian yang dihasilkan adalah sama dengan tahun sebelumnya yaitu 0,14%. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar. Beberapa faktor yang mempengaruhi tindak pidana tersebut antara lain permasalahan ekonomi, keluarga, pengaruh media sosial dan pergaulan. Perlunya upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia, menambah lapangan pekerjaan dan sosialisasi atau penyuluhan bahaya narkoba dan sosialisasi pencegahan penyakit masyarakat. Untuk jumlah demonstrasi di Kota Pematang Siantar tahun 2017-2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.52
Jumlah Demonstrasi di Kota Pematangsintar Tahun 2017-2021

No	URAIAN	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021*
1	Bidang Politik	0	0	0	1	1
2	Bidang Sosial	26	46	19	13	12
3	Bidang Ekonomi	4	5	5	6	5
Total Jumlah Demonstrasi		30	51	24	20	18*

Sumber: Satpol PP Kota Pematang Siantar Tahun 2022 *) Angka Sangat Sementara

Jumlah demonstrasi dari tahun 2018-2021 menunjukkan trend menurun terutama pada bidang sosial, dengan semakin rendahnya jumlah demonstrasi dapat mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif.

2.4.4.2 Perizinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kota Pematang Siantar terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat. Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Kemudahan proses perijinan merupakan prasyarat bagi pengusaha untuk berinvestasi, karena perijinan merupakan titik kritis usaha akan dibangun. Jika perijinan tidak mampu menarik investor terdapat kecenderungan iklim usaha menjadi surut. Untuk kemudahan perizinan Kota Pematang Siantar, maka Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya memberikan pelayanan perijinan menjadi lebih singkat dan cepat. Dalam perkembangannya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single submission-OSS). Sistem ini memungkinkan investor dan calon investor mengurus izin usaha secara online tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan.

Penyederhanaan pelayanan dan efisiensi waktu penyelesaian izin dapat diselesaikan paling lama 3 hari kerja jika syarat yang diperlukan lengkap, jelas, dan benar. Data rekapitulasi perizinan sebagai berikut.

Tabel 2.53
Rekapitulasi Perizinan di Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

No.	Jenis Izin	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Permohonan izin	3318	2353	2290	1627	2019
2	Izin diterbitkan	3205	2305	2213	1627	2019
3	Izin ditolak	113	48	77	0	0
4	Izin dalam proses	0	0	0	0	0

Sumber: DPM dan PTSP Kota Pematang Siantar Tahun 2022

Realisasi di tahun 2021 menunjukkan peningkatan jumlah izin yang diterbitkan dibandingkan tahun 2020 yang turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan mulainya pandemi Covid-19 diawal tahun 2020.

2.4.5 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.5.1 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang pencari kerja sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang pencari kerja akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Pendidikan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja agar dapat lebih produktif. Hal ini dimaksudkan untuk



meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena pendidikan baik formal maupun non formal seseorang diharapkan memiliki kemampuan untuk lebih memahami dalam mengadaptasi perubahan-perubahan di lingkungan kerja dengan lebih cepat.



Sumber : BPS Kota Pematang Siantar 2022

Gambar 2.27
Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Pematang Siantar yang Bekerja

Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan Pendidikan Tahun 2020 Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama Agustus 2021 dibanding dengan Agustus 2020. Namun, pada Agustus 2021, penduduk bekerja dengan pendidikan menengah pertama kebawah (SMP/MTS/Paket B dan SD kebawah) sedikit berkurang. Kondisi Agustus 2021, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan menengah atas, yaitu SMA/MA/Paket C sebanyak 30,59 % dan SMK/MAK sebanyak 19,56 %. Tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas cukup besar yaitu 16,90 %. Penduduk yang bekerja pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor adalah yang terbanyak, sebesar 37,560 ribu penduduk.

2.4.5.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non



produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Tabel 2.54
Rasio Ketergantungan Kota Pematang Siantar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	69.463	69.423	69.357	69.181	66.507
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	13.099	13.643	14.264	14.970	19.463
3	Jumlah penduduk usia usia tidak produktif (1+2)	82.562	83.066	83.621	84.151	85.970
4	Jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun	166.943	168.500	169.879	171.166	182.284
Rasio ketergantungan		49,46%	49,30%	49,22%	49,16%	47,16%

Sumber : BPS Kota Pematang Siantar 2021 / (Tahun 2022 Belum Rilis)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak produktif. Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa Kota Pematang Siantar dalam rasio ketergantungan dengan kategori tinggi, namun rasio ketergantungan di Kota Pematang Siantar dari tahun 2015-2020 menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2020 sebesar 47,16%, yang menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif di Kota Pematang Siantar harus menanggung 47 orang penduduk yang non produktif. Melihat tren penurunan rasio ketergantungan, maka diperkirakan Kota Pematang Siantar dalam beberapa tahun kedepan mengalami bonus demografi. Perubahan struktur umur penduduk usia kerja akan semakin meningkat dan hal ini tentu mendorong perekonomian daerah. Kota Pematang Siantar dapat memanfaatkan fenomena bonus demografi ini disertai upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja di Kota Pematang Siantar.

Berdasarkan data yang disampaikan diatas, dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut:



Permasalahan pada Aspek Daya Saing Daerah
1. Serapan Tenaga Kerja di Kota Pematang Siantar adalah Pendidikan Setingkat SMA/SMK/Paket C sebesar 30,59%
2. Diperlukan Pemutahiran data terbaru sebagai gambaran aspek daya saing daerah yang merupakan potensi unggulan daerah Kota Pematang Siantar <i>Data penduduk berdasarkan kelompok umur belum rilis</i>

2.5 **Capaian Kinerja Utama Daerah**

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dari Bab 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah RPJMD Kota Pematang Siantar tahun 2017-2022, terdapat 94 indikator kinerja utama (setelah dikurangi dengan indikator kewenangan provinsi dan indikator yang sama). Pencapaian kinerja tersebut disandingkan antara target kinerja tahun 2021 dan capaian di tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Tahun 2017-2021, menunjukkan capaian indikator kinerja utama yang belum mencapai target sebanyak (<) 52 indikator atau 56%, yang sesuai target sebesar (=) 19 indikator atau 20% dan melampaui target sebanyak (>) 22 indikator atau sebesar 23% dan terdapat 1 indikator yaitu predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2021 yang belum diperoleh hasil penilaiannya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau (1%) indikatornya yang tidak diketahui hasilnya. Dengan jumlah indikator utama yang sangat banyak menyulitkan untuk dapat dicapai dan dianalisis, namun secara general faktor-faktor yang menyebabkan IKU RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 tidak tercapai target dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Komponen IKU tidak dapat dihitung, karena tidak dilengkapi dengan formula perhitungan.
2. Target IKU ditetapkan terlalu tinggi tanpa melihat kemampuan keuangan dan SDM pendukung.
3. IKU tidak didukung oleh program dan kegiatan di OPD.
4. Pandemi covid yang menyebabkan relokasi anggaran ke program dan kegiatan penanggulangan pandemi. Selain itu pandemi juga mempengaruhi sektor perekonomian dan sosial di masyarakat.
5. Dokumen perencanaan yang belum berbasis kinerja.
6. Kurangnya dorongan instansi pembina terhadap OPD yang di koordinasinya.
7. Ketersediaan anggaran yang terbatas jika dibandingkan dengan target yang harus dicapai.
8. Pertumbuhan pasar kerja yang relatif lambat jika dibandingkan dengan



pertumbuhan pencari kerja.

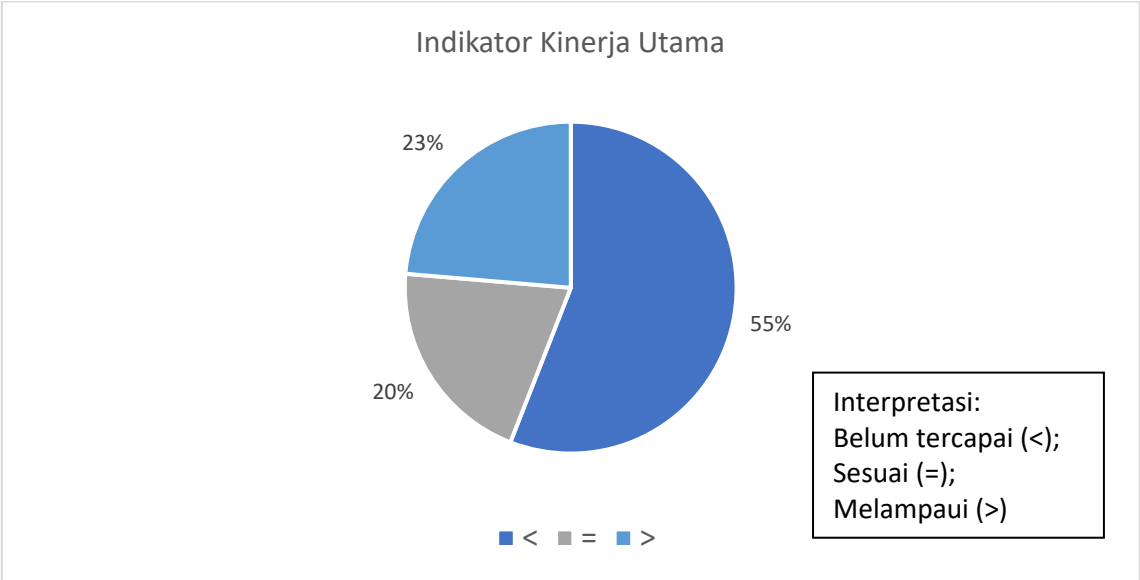
9. Dukungan dan stimulus yang diberikan pemerintah terhadap pelaku industri kecil dan menengah masih belum optimal (tidak ada stimulus dan dukungan, ketika ada dukungan dan stimulus tidak tepat sasaran).

Untuk IKU RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 yang mencapai target didapat hasil sebagai berikut :

1. Komponen IKU merupakan prioritas kepala daerah yang langsung mendukung visi dan misi.
2. Adanya regulasi pusat yang mendukung pencapaian IKU.
3. Target IKU ditetapkan sesuai dengan proporsi kemampuan keuangan dan SDM pendukung.
4. IKU didukung oleh program dan kegiatan di OPD.
5. Tidak terpengaruh oleh pandemi covid-19.
6. Instansi pembina berperan aktif mendorong capaian OPD yang di koordinasinya.
7. Adanya alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Untuk IKU RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 yang melampaui target didapat hasil sebagai berikut :

1. Komponen IKU merupakan prioritas kepala daerah yang langsung mendukung visi dan misi.
2. Adanya regulasi pusat yang mendukung pencapaian IKU.
3. Target IKU ditetapkan terlalu rendah tanpa melihat kemampuan keuangan dan SDM.
4. IKU didukung oleh program dan kegiatan di OPD.
5. Tidak terpengaruh oleh pandemi covid-19.
6. Instansi pembina berperan aktif mendorong capaian OPD yang di koordinasinya.
7. Adanya alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
8. Penafsiran formulasi penghitungan data yang rancu.
9. Indikator kinerja utama merupakan prioritas bagi instansi vertikal.



Sumber : Evaluasi RPJMD Kota Kota Pematang Siantar 2017-2022

Gambar 2.28
Capaian IKU Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

Realisasi capaian indikator kinerja utama Tahun 2017-2021 ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.



Tabel 2.55
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Perencanaan 2017	Target Kinerja				Relisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	C	C	B	B	n/a	n/a	n/a	C (40,47)	C (42,39)	<
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	=
Nilai LPPD	n/a	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	belum rilis	belum rilis	
Nilai AKIP	C	C	B	B	B	C	C	C	C (40,14)	C (40,57)	<
Rasio Penyampaian LHKPN	n/a	70%	75%	80%	100%	n/a	97,44%	92,00%	100,00%	100,00%	=
Rasio Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (%)	82%	74,92%	85%	85,92%	86,92%	n/a	77,07%	87,50%	98,50%	99,16%	>
Rasio/Indeks bayi yang memiliki akte kelahiran (%)	80,56%	74,27%	85%	85,92%	86,92%	80,48%	77,38%	87,26%	98,62%	92,68%	>
Lama waktu Perizinan(hari)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	=
Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	n/a	40%	45%	45%	50%	C (72,12%)	n/a	n/a	n/a	C 73,36 %	<
Persentase OPD yang memiliki SOP pelayanan publik (%)	n/a	50%	60%	70%	80%	n/a	84,85%	81,82%	n/a	51,52%	<
Persentase kepatuhan	n/a	70%	80%	80%	85%	n/a	58,39%	76,42%	76,42%	83,70%	<



Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Perencanaan 2017	Target Kinerja				Relisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
pelaksanaan UU Pelayanan Publik											
Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
Tersedianya sistem Informasi Pembangunan daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
Persentase OPD memiliki website dan melakukan updating (%)	n/a	50%	70%	90%	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,18%	<
Persentase Pelaksanaan E-planning (%)	n/a	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	=
Persentase Pelaksanaan e-Procurement (%)	n/a	80%	80%	80%	85%	n/a	92,00%	88,00%	29,00%	11,00%	<
Persentase Usulan Masyarakat yang ditampung dalam APBD (%)	n/a	45%	50%	55%	60%	n/a	16,09%	67,75%	86,98%	20,83%	<
Tingkat Partisipasi LPM dalam pembangunan (%)	100%	75%	75%	80%	80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	>



Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Perencanaan 2017	Target Kinerja				Relisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
Jumlah kelompok PKK aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	=
Jumlah Program Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (lokasi)	n/a	8	16	24	32	n/a	42	107	87	30	<
Persentase Sekolah akreditasi minimal B	n/a	10%	20%	30%	35%	27,20%	30,54%	36,40%	68,62%	98,05%	>
Persentase guru Kualifikasi D3	1,63%	3,15%	2,85%	2,55%	2,25%	9,93%	5,68%	6,42%	6,89%	1,35%	<
Persentase guru Kualifikasi S1/D4	83,37%	84,92%	85,71%	86,5%	87,9%	87,52%	92,04%	91,34%	90,90%	96,41%	>
Persentase guru Kualifikasi S2-S3	1,4%	3,24%	3,45%	3,66%	3,87%	2,55%	2,27%	2,24%	2,21%	2,24%	<
Perbandingan guru dan siswa SD/MI (%)	7,34%	6,2%	6,46%	6,72%	6,98%	5,86%	5,76%	6,14%	6,47%	6,61%	<
Perbandingan guru dan siswa SMP/MTs (%)	18%	7,51%	7,88%	8,25%	8,62%	6,30%	5,88%	6,48%	6,86%	6,70%	<
Angka Putus Sekolah SD/MI	0,19%	0%	0%	0%	0%	n/a	0,20%	0,02%	0,13%	0,11%	<
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,41%	0%	0%	0%	0%	n/a	0,62%	0,42%	0,12%	0,19%	<
Angka harapan lama sekolah	14,01	14,88	15,28	15,67	16,09	14,01	14,02	14,21	13,09	13,09	<
Angka melek huruf	99,90%	99,96%	99,97%	99,98%	99,90%	99,90%	99,98%	100,00%	99,70%	100,00%	>



Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Perencanaan 2017	Target Kinerja				Relisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
Rata-rata lama sekolah	11,06	11,28	11,48	11,78	11,98	11,06	11,08	11,15	11,16	11,29	<
APK PAUD	88,36%	76%	77%	78%	79%	43,57%	39,07%	129,18%	50,95%	50,24%	<
APK SD	107,52%	110,08%	114,41%	114,60%	114,80%	107,52%	105,02%	116,90%	103,80%	101,41%	<
APK SMP	92,17%	114,82%	115,45%	116,09%	116,78%	92,17%	106,57%	109,41%	116,31%	128,23%	>
APM SD	100,59%	89,81%	89,75%	90,19%	90,63%	90,03%	99,79%	100,41%	92,26%	93,02%	>
APM SMP	90,03%	89,81%	89,75%	88,82%	89,22%	74,99%	95,05%	108,31%	69,73%	76,09%	<
Rasio Murid PAUD dengan anak usia 4-6 thn (%)	n/a	49,71%	50,71%	51,71%	52,71%	43,57%	39,07%	129,18%	50,95%	50,24%	<
Persentase Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	n/a	84,92%	88,71%	86,5%	87,9%	52,63%	37,82%	66,42%	48,45%	73,55%	<
Meningkatnya manajemen, penelitian, dan sistem informasi kesehatan	0%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	=
Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) (%)	66%	70%	75%	92,2%	90%	66,04%	67,92%	86,79%	62,26%	58,49%	<
Persentase balita gizi buruk yang ditangani (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	=



Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Perencanaan 2017	Target Kinerja				Relisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
Persentase keberhasilan pengobatan TB (%)	95%	93,60%	93,80%	95%	94%	90,80%	95,00%	97,00%	95,00%	92,00%	<
Angka Kematian Bayi / 1000 Kelahiran Hidup	4/1000 KH	4/1000 KH	3/1000 KH	3/1000 KH	2/1000 KH	3,00/1000 KH	2,92/1000 KH	0,00/1000 KH	3,72/1000 KH	0,93/1000 KH	>
Angka Kematian Ibu / 100.000 Kelahiran Hidup	5/100.000 KH	5/100.000 KH	5/100.000 KH	4/100.000 KH	4/100.000 KH	112,60/100.000 KH	72,96/100.000 KH	109,14/100.000 KH	87,45/100.000 KH	185,87/100.000 KH	<
AKABA per 1000 balita	4/1000	4/1000	4/1000	3/1000	3/1000	5,00/1000	0,49/1000	0,55/1000	2,84/1000	2,17/1000	>
IPM	77,54	77,34	77,84	78,34	78,84	77,54	77,88	78,57	78,75	79,17	>
IPM gender	95,18%	50%	50%	50%	50%	n/a	95,32%	95,46%	95,65%	95,82%	>
Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	65,87%	90,10%	94,92%	71,22%	<
Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	83%	100%	100%	100%	100%	n/a	90,04%	89,42%	85,05%	85,92%	<
Jumlah Puskesmas dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar	3 unit	19 unit	19 unit	6 unit	19 unit	6 unit	6 unit	8 unit	8 unit	10 unit	<
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	0%	100%	100%	100%	100%	14,50%	11,87%	10,27%	10,17%	10,08%	<



Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Perencanaan 2017	Target Kinerja				Relisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
pasien masyarakat miskin											
Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	83%	89%	90%	91%	92%	82,40%	100,00%	101,77%	100,00%	100,00%	>
Cakupan imunisasi dasar lengkap	82,3%	93%	95%	97%	98%	41,15%	47,24%	51,14%	45,20%	53,26%	<
Jumlah Puskesmas pembantu dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar	3 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	6 unit	6 unit	8 unit	8 unit	10 unit	>
Rasio Tenaga medis	7,3	5,34	5,34	5,34	5,34	0,85	0,88	0,87	0,82	1,22	<
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	87,70%	92%	92%	92%	92%	87,70%	93,13%	81,27%	76,64%	82,29%	<
Persentase akses air bersih bagi RT 40% penduduk berpendapatan rendah	n/a	98,5%	100%	100%	100%	88,00%	97,14%	88,32%	85,00%	88,00%	<



Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Perencanaan 2017	Target Kinerja				Relisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
Persentase RT bersanitasi 40% penduduk berpendapatan rendah	n/a	98,72%	100%	100%	100%	80,00%	96,26%	79,01%	80,00%	85,10%	<
Jumlah rumah dan bangunan yang memiliki septic tank standar 40% penduduk berpendapatan rendah	n/a	87,98%	100%	100%	100%	87,00%	83,84%	89,00%	55,00%	70,10%	<
Persentase Rumah Layak Huni/standar kesehatan 40% penduduk berpendapatan rendah	60%	98,72%	100%	100%	100%	60,00%	95,90%	79,91%	55,00%	70,10%	<
Jumlah investor skala PMA	n/a	5	5	6	6	6	6	5	5	6	=
Jumlah investor skala PMDN	n/a	228	230	232	232	210	232	232	230	240	>
PDRB ADHK per kapita (juta)	34.790.380,00	36.302.193,34	38.480.324,94	40.789.144,44	43.236.493,11	34.790.380,00	36.174.302,56	37.646.298,76	36.677.061,76	35.261.545,00	<
PDRB ADHB per kapita (juta)	49.475.993,05	47.982.395,66	50.861.339,40	53.913.019,76	57.147.800,95	49.475.993,05	51.979.135,31	54.572.350,00	54.140.600,40	52.473.799,00	<
Indeks Gini Ratio	0,3500	0,3579	0,3579	0,3579	0,3579	0,3500	0,3340	0,3300	0,3360	0,3070	>



Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Perencanaan 2017	Target Kinerja				Relisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
Jumlah daya serap tenaga kerja (orang/tahun)	655	1320	1316	1315	1297	780	644	925	253	327	<
Rasio penduduk yang bekerja	n/a	91,48%	91,78%	92,08%	92,33%	91,20%	87,64%	88,91%	88,50%	88,50%	<
Jumlah Pertambahan pasar-pasar tradisional di Kecamatan	7	4	5	6	7	7	7	7	7	7	=
Jumlah Pertumbuhan industri kecil	547	553	556	560	565	583	688	688	688	565	=
Jumlah Pertumbuhan industri menengah	23	25	25	26	27	23	13	13	13	12	<
Jumlah Pertumbuhan industri besar	6	7	7	8	8	6	6	6	6	5	<
Jumlah Koperasi	374	390	400	410	420	371	373	375	375	375	<
Jumlah UKM	727	18638	18638	18638	19138	17474	17647	18677	23290	26869	>
Laju pertumbuhan ekonomi	4,41	5,31	5,34	5,40	5,48	4,41	4,80	4,82	-1,89	1,25	<
Jumlah Pameran pariwisata	5	3	4	4	5	2	3	4	4	5	=
Jumlah Pemeliharaan dan pengembangan	17	13	13	13	13	13	13	13	13	13	=



Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Perencanaan 2017	Target Kinerja				Relisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
kawasan cagar budaya											
Rasio jalan dalam keadaan baik (%)	n/a	91,4%	92,8%	93,2%	94,1%	90,20%	83,74%	80,37%	83,90%	81,12%	<
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	n/a	0,95%	1,04%	1,18%	1,22%	0,60%	0,70%	0,94%	1,01%	1,14%	<
Rasio RT menggunakan air bersih	85,89%	98,5%	100%	100%	100%	85,90%	87,56%	87,67%	87,93%	97,56%	<
Rasio RT yang menggunakan listrik	99,75%	97,75%	98,15%	98,55%	98,95%	99,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	>
Penanganan lokasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh	n/a	3	3	3	3	3	3	4	5	3	=
Panjang saluran irigasi (km) kondisi baik	n/a	18,40 km	18,40 km	18,40 km	18,40 km	22,19 km	22,19 km	24,61 km	24,67 km	22,39 km	>
Adanya dokumen RTRW	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
Meningkatnya persentase Nilai tukar petani	n/a	90%	90%	90%	90%	n/a	-0,73%	-0,60%	4,01%	0,68%	<
Ketersediaan Sarana Penerimaan	n/a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=



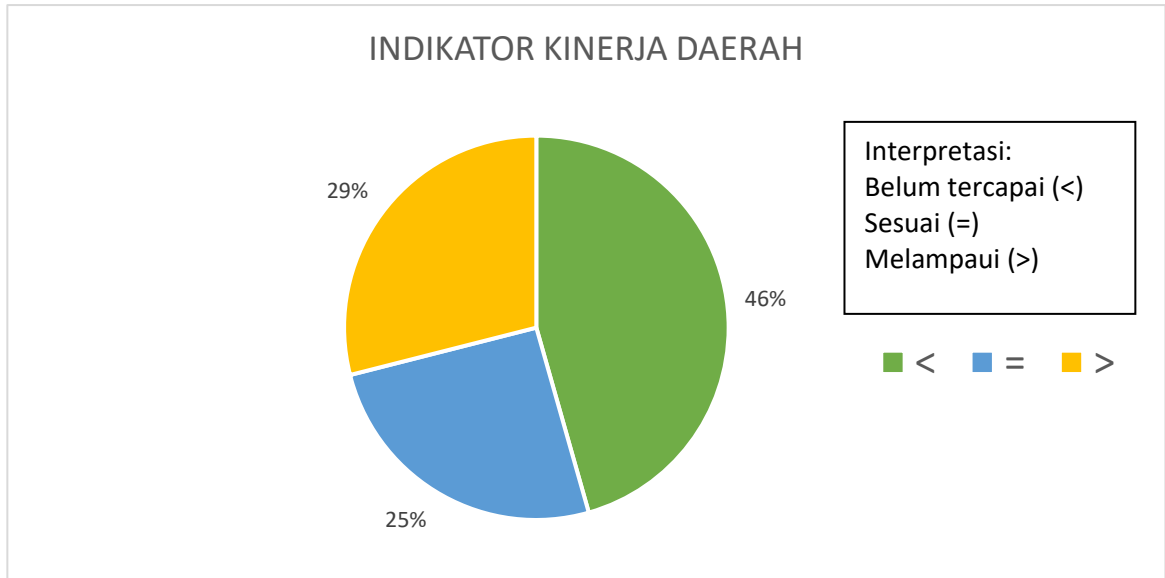
Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Perencanaan 2017	Target Kinerja				Relisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
Keluhan/Aduan Warga (Membangun siantar smart city)											
Jumlah ruangan kantor kelurahan/kecamatan yang memadai	80%	75%	80%	85%	90%	n/a	90,57%	94,34%	71,70%	49,06%	<
Rasio penertiban perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
Jumlah Penerbitan produk hukum	42	30	30	30	30	n/a	1298	715	684	778	>
Sosialisasi produk hukum	5	3	3	3	3	n/a	2	3	1	3	=
Rasio penyelesaian pelanggaran K3	100%	100%	100%	100%	100%	72,00%	78,93%	80,00%	65,00%	23,11%	<
Indeks pembangunan hukum	n/a	50%	50%	55%	55%	0%	0%	0%	0%	0%	<
Persentase Kesesuaian RKPD, KUA-PPAS, dan APBD	n/a	85%	90%	95%	100%	n/a	80,33%	98,92%	93,32%	67,72%	<
Rasio Belanja Bantuan Sosial	0,13%	0,30%	0,33%	0,36%	0,39%	0,12%	0,16%	0,87%	0,17%	0,59%	>
Rasio PAD terhadap APBD	12,12%	13,2%	13,8%	14,4%	15%	12,12%	14,00%	12,44%	15,73%	13,45%	<

Sumber : Evaluasi RPJMD Kota Kota Pematang Siantar 2017-2022



2.6 Capaian Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah atau sering disebut Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan daerah. Berikut realisasi indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun sampai dengan tahun 2021.



Sumber : Evaluasi RPJMD Kota Kota Pematang Siantar 2017-2022

Gambar 2.29
Capaian IKD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar diatas ditunjukkan indikator kinerja daerah dengan jumlah sebanyak 228 indikator, yang belum mencapai target sebanyak (<) 104 indikator atau 46%, yang sesuai target sebesar (=)58 indikator atau 25% dan melampaui target sebanyak (>) 66 indikator atau sebesar 29% indikator. Senada dengan IKU yang dibahas sebelumnya, indikator kinerja daerah juga berjumlah sangat banyak, dari hasil evaluasi dapat disampaikan penyebab IKD RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 tidak tercapai target sebagai berikut :

1. Target IKD ditetapkan terlalu tinggi tanpa melihat kemampuan keuangan dan SDM pendukung.
2. IKD tidak didukung oleh program dan kegiatan di OPD.
3. Pandemi covid yang menyebabkan relokasi anggaran ke program dan kegiatan penanggulangan pandemi. Selain itu pandemi juga mempengaruhi sektor perekonomian dan sosial di masyarakat.
4. Kurangnya dorongan instansi pembina terhadap OPD yang di koordinasinya.
5. Ketersediaan anggaran yang terbatas jika dibandingkan dengan target yang harus dicapai.
6. Pertumbuhan pasar kerja yang relatif lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pencari kerja.



7. Dukungan dan stimulus yang diberikan pemerintah terhadap pelaku industri kecil dan menengah masih belum optimal (tidak ada stimulus dan dukungan, ketika ada dukungan dan stimulus tidak tepat sasaran).
8. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat hanya untuk program yang mendukung prioritas pusat.

IKD RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 yang mencapai target dapat dianalisis hasilnya sebagai berikut :

1. Komponen IKD merupakan prioritas kepala daerah yang langsung mendukung visi dan misi.
2. Adanya regulasi pusat yang mendukung pencapaian IKD.
3. Target IKD ditetapkan sesuai dengan proporsi kemampuan keuangan dan SDM pendukung.
4. IKD didukung oleh program dan kegiatan di OPD.
5. Tidak terpengaruh oleh pandemi covid-19.
6. Instansi pembina berperan aktif mendorong capaian OPD yang di koordinasinya.
7. Adanya alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Untuk IKD RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 yang melampaui target didapat hasil sebagai berikut:

1. Komponen IKD merupakan prioritas kepala daerah yang langsung mendukung visi dan misi.
2. Adanya regulasi pusat yang mendukung pencapaian IKD.
3. Target IKD ditetapkan terlalu rendah tanpa melihat kemampuan keuangan dan SDM.
4. IKD didukung oleh program dan kegiatan di OPD.
5. Tidak terpengaruh oleh pandemi covid-19.
6. Instansi pembina berperan aktif mendorong capaian OPD yang di koordinasinya.
7. Adanya alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Realisasi capaian indikator kinerja daerah Tahun 2017-2021 ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.



Tabel 2.56
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2017-2021

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat											
1	Pertumbuhan Ekonomi ADHK (%)	5,27	5,31	5,34	5,40	5,48	4,41	4,80	4,82	-1,89	1,25	<
2	Laju inflasi (%)	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	3,10	2,15	1,54	2,78	2,12	>
3	PDRB ADHK (miliar)	7.992.321,10	8.471.860,37	8.894.171,99	9.518.982,31	10.090.121,25	8.750.232,80	9.170.185,70	9.611.738,78	9.430.039,35	9.547.700,00	<
4	PDRB ADHB (miliar)	10.565.479,30	11.199.408,06	11.871.372,54	12.583.654,89	13.338.674,19	12.443.855,40	13.176.710,84	13.933.249,49	13.920.089,77	14.208.200,00	>
5	PDRB per kapita ADHK (juta)	34.247.352,21	36.302.193,34	38.480.324,94	40.789.144,44	43.236.493,11	34.790.380,00	36.174.302,56	37.646.298,76	36.677.061,76	35.261.545,00	<
6	PDRB per kapita ADHB (juta)	45.266.411,00	47.982.395,66	50.861.339,40	53.913.019,76	57.147.800,95	49.475.993,05	51.979.135,31	54.572.350,00	54.140.600,40	52.473.799,00	<
7	Angka Kemiskinan (%)	10,00	9,65	9,30	8,95	8,60	10,10	8,70	8,63	8,27	8,52	>
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,02	8,57	8,12	7,67	7,22	8,80	12,14	11,09	11,50	11,00	<
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,84	77,34	77,84	78,34	78,84	77,54	77,88	78,57	78,75	79,17	>
10	Indeks Gini	0,3579	0,3579	0,3579	0,3579	0,3579	0,3500	0,3340	0,3300	0,3360	0,3070	>
II	Aspek Pelayanan Umum											
	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
1	Pendidikan											
	Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B (%)	n/a	10,00	20,00	30,00	35,00	27,20	30,54	36,40	68,62	98,05	>



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	Persentase Guru Kualifikasi D-III (%)	3,45	3,15	2,85	2,55	2,25	9,93	5,68	6,42	6,89	1,35	<
	Persentase Guru Kualifikasi S1/D-IV (%)	84,13	84,92	85,71	86,50	87,90	87,52	92,04	91,34	90,90	96,41	>
	Persentase Guru Kualifikasi S2-S3 (%)	3,03	3,24	3,45	3,66	3,87	2,55	2,27	2,24	2,21	2,24	<
	Perbandingan Guru dan Siswa SD/MI (%)	5,94	6,20	6,46	6,72	6,98	5,86	5,76	6,14	6,47	6,61	<
	Perbandingan Guru dan Siswa SMP/MTs (%)	7,14	7,51	7,88	8,25	8,62	6,30	5,88	6,48	6,86	6,70	<
	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a	0,20	0,02	0,13	0,11	<
	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a	0,62	0,42	0,12	0,19	<
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,98	11,28	11,48	11,78	11,98	11,06	11,08	11,15	11,16	11,29	<
	Angka Harapan Lama Sekolah	14,41	14,88	15,28	15,67	16,09	14,01	14,02	14,21	13,09	13,09	<
	Angka Melek Huruf (AMH) (%)	99,95	99,96	99,97	99,98	99,99	99,90	99,98	100,00	99,70	100,00	>
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	108,65	110,08	114,41	114,60	114,80	107,52	105,02	116,90	103,80	101,41	<
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	114,18	114,82	115,45	116,09	116,78	92,17	106,57	109,41	116,31	128,23	>
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	88,87	89,81	89,75	90,19	90,63	90,03	99,79	100,41	92,26	93,02	>
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	87,62	88,02	88,42	88,82	89,22	74,99	95,05	108,31	69,73	76,09	<
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	43,57	39,07	129,18	50,95	50,24	<



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	Rasio Siswa PAUD dengan Anak Usia 4-6 Tahun (%)	48,70	49,71	50,71	51,71	52,71	43,57	39,07	129,18	50,95	50,24	<
	Persentase Pendidik PAUD yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	84,13	84,92	85,71	86,50	87,90	52,63	37,82	66,42	48,45	73,55	<
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (%)	88,89	89,34	89,79	90,24	90,69	90,03	99,79	100,41	92,26	93,02	>
	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Pendidikan Dasar (SD/MI) (%)	0,64	0,72	0,80	0,88	0,96	0,56	0,57	0,65	0,59	0,61	<
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	90,15	90,54	90,93	91,32	91,71	99,75	95,05	108,31	69,73	76,09	<
	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Pendidikan Dasar (SMP/MTs) (%)	0,45	0,64	0,83	1,02	1,21	0,29	0,33	0,34	0,33	0,33	<
	Angka Kelulusan Sekolah (AL) SD/MI (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	102,57	96,80	90,07	115,54	100,13	>
	Angka Kelulusan Sekolah (AL) SMP/MTs (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,93	101,87	91,27	98,34	99,04	<
2	Urusan Kesehatan											
	Persentase Peningkatan Manajemen, Penelitian, dan Sistem Informasi Kesehatan (%)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	Persentase (Cakupan) Kelurahan yang Telah Mencapai UCI (Universal Child Immunization) (%)	66,04	70,00	75,00	80,00	90,00	66,04	67,92	86,79	62,26	58,49	<
	Persentase (Cakupan) Balita Gizi Buruk yang Ditangani (Mendapatkan Perawatan) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 KH)	4,00	4,00	3,00	3,00	2,00	3,00	2,92	0,00	3,72	0,93	>
	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	112,60	72,96	109,14	87,45	185,87	<
	Angka Kematian Balita (AKABA) (per 1000 balita)	4,00	4,00	4,00	3,50	3,00	5,00	0,49	0,55	2,84	2,17	>
	Persentase Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	65,87	90,10	94,92	71,22	<
	Persentase Penduduk yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan (%)	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	90,04	89,42	85,05	85,92	<
	Jumlah Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (unit)	19	19	19	19	19	6	6	8	8	10	<
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	14,50	11,87	10,27	10,17	10,08	<



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	Cakupan Persalinan di Faskes (%)	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	82,40	100,00	101,77	100,00	100,00	>
	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%)	90,00	93,00	95,00	97,00	98,00	41,15	47,24	51,14	45,20	53,26	<
	Jumlah Puskesmas Pembantu dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (unit)	8	8	8	8	8	6	6	8	8	10	>
	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	0,85	0,88	0,87	0,82	1,22	<
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (Persentase Persalinan yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan) (%)	87,81	92,00	92,00	92,00	92,00	87,70	93,13	81,27	76,64	82,29	<
	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih bagi Rumah Tangga 40% Penduduk yang Berpendapatan Rendah (%)	97,40	98,50	100,00	100,00	100,00	88,00	97,14	88,32	85,00	88,00	<
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi bagi Rumah Tangga 40% Penduduk yang Berpendapatan Rendah (%)	96,72	98,72	100,00	100,00	100,00	80,00	96,26	79,01	80,00	85,10	<



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	Persentase Rumah dan Bangunan yang Memiliki Septic Tank Standar bagi Rumah Tangga 40% Penduduk yang Berpendapatan Rendah (%)	84,98	87,98	100,00	100,00	100,00	87,00	83,84	89,00	55,00	70,10	<
	Persentase Rumah Layak Huni/Standar Kesehatan bagi Rumah Tangga 40% Penduduk yang Berpendapatan Rendah (%)	96,72	98,72	100,00	100,00	100,00	60,00	95,90	79,91	55,00	70,10	<
	Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN3) (%)	56,01	60,00	65,00	70,00	75,00	n/a	88,34	97,30	81,88	98,37	>
	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	85,17	84,17	83,17	82,17	81,17	79,10	119,77	134,38	105,25	149,13	>
	Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang Telah Memperoleh Imunisasi Dasar Secara Lengkap (%)	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	82,30	82,21	90,14	93,92	96,05	>
	Persentase Pelayanan Antenatal Care (K4) (%)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	n/a	82,00	85,00	75,00	77,00	<
	Persentase RSUD yang Menyelenggarakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD Dr. Djasamen Saragih (%)	40,40	40,40	45,00	50,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<
	Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (%)	92,00	92,00	92,00	94,00	94,00	n/a	58,00	49,00	52,00	53,00	<
	Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapatkan ASI Eksklusif (%)	17,40	20,00	30,00	35,00	40,00	n/a	29,00	41,00	22,00	21,00	<
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	n/a	41,34	62,80	51,87	41,77	<
	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (%)	8,10	15,00	20,00	25,00	35,00	n/a	15,01	34,44	45,25	41,95	>
	Persentase Keluarga Menghuni Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan (%)	96,72	97,50	98,00	98,50	99,00	n/a	97,02	96,81	98,99	99,00	=
	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (%)	93,94	93,60	93,80	94,00	94,00	90,80	95,00	97,00	95,00	92,00	<
	Persentase RSUD yang Melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat Sesuai Standar (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk (per 1000 penduduk)	0,028	0,028	0,028	0,025	0,025	0,032	0,032	0,031	0,030	0,030	>



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	Rasio Dokter per Satuan Penduduk (per 1000 penduduk)	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,85	0,87	0,87	0,85	0,88	>
	Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk (per 1000 penduduk)	4,77	4,76	4,75	4,74	4,73	4,44	4,40	4,37	4,16	5,74	>
	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani (%)	68,19	68,19	68,19	68,19	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA (%)	43,06	50,00	65,00	80,00	90,00	37,10	46,00	53,00	33,00	42,00	<
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	10,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	>
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	64,10	64,94	65,78	65,79	66,21	<
	Jumlah Posyandu Aktif	241	241	241	241	241	247	247	252	245	245	>
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	Proporsi atau Rasio Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap (%)	90,50	91,40	92,80	93,20	94,10	90,20	83,74	80,37	83,90	81,12	<
	Panjang Saluran Irigasi (meter)	39165	39165	39165	39165	39165	22186	22186	24614	24668	22386	<
	Panjang Jalan yang Dapat Dilalui Roda 4 (km)	347,00	350,00	356,00	368,00	390,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	>
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	97,40	98,50	100,00	100,00	100,00	85,90	87,56	87,67	87,93	97,56	<
	Persentase atau Rasio Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	97,35	97,75	98,15	98,55	98,95	99,75	100,00	100,00	100,00	100,00	>
	Jumlah Penanganan Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3	3	3	3	3	3	3	4	5	3	=
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)	96,72	98,72	100,00	98,36	99,18	64,10	64,94	65,78	65,79	66,21	<
	Persentase Rumah Layak Huni/Standar Kesehatan (%)	96,72	98,72	100,00	100,00	100,00	97,00	97,22	97,32	97,59	98,27	<
	Persentase Rumah dan Bangunan yang Memiliki Septic Tank Standar (%)	84,98	87,98	100,00	100,00	100,00	n/a	7,10	9,08	9,22	9,84	<
	Luas Permukiman Kumuh (Ha)	150,00	139,68	104,76	69,84	34,92	188,00	164,53	157,82	157,82	154,94	<
	Berkurangnya Jumlah Lokasi Kumuh	3	3	3	3	3	3	3	4	5	3	=
	Persentase Peningkatan Taman Kota (%)	60,00	60,00	70,00	80,00	90,00	-2,54	-2,54	-2,54	-2,54	-2,54	<
	Rasio Ketersediaan Daya Listrik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum											
	Rasio Penertiban Perda (%)	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	Rasio Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	95,55	100,00	100,00	100,00	100,00	72,00	78,93	80,00	65,00	23,11	<
	Jumlah Polisi Pamong Praja	131	131	131	131	131	212	212	219	219	219	>
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10000 Penduduk	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	8,43	8,36	8,58	8,16	8,09	>
	Jumlah Petugas Patroli K3	49	49	49	49	49	117	117	117	117	117	>
	Rasio Penyelesaian Penegakan Perda (%)	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	n/a	2770,83	2908,33	2625,00	7000,00	>
6	Urusan Sosial											
	Jumlah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	>
	Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial per KPS	961	961	1061	1161	1261	12882	13583	13200	15236	13893	>
	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar											
1	Urusan Tenaga Kerja											
	Jumlah Daya Serap Tenaga Kerja per Tahun	1295	1320	1316	1315	1297	780	644	925	253	327	<
	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	91,18	91,48	91,78	92,08	92,33	91,20	87,64	88,91	88,50	88,50	<



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	44,66	44,64	44,62	44,60	44,58	72,74	65,88	71,11	71,55	72,31	>
	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	27000	31823	35005	42006	45506	180	226	319	38	1	<
	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (%)	31,49	41,49	51,49	61,49	71,49	0,07	0,09	0,12	0,01	0,00	<
	Rasio Ketergantungan (%)	48,60	47,60	46,60	45,60	44,60	41,21	34,12	28,89	30,01	38,90	>
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	IPM Gender (%)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	n/a	95,32	95,46	95,65	95,82	>
	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta	4275	4294	4723	5196	5715	3797	2263	2263	n/a	n/a	<
	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	52000	58753	64629	71092	74592	52014	53895	61045	n/a	n/a	<
	Rasio KDRT (Kasus per 100 RT)	0,120	0,120	0,120	0,120	0,100	0,003	0,003	0,005	0,015	0,022	>
	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	4	4	3	3	2	9	4	4	74	75	>
3	Pangan											
	Tersedianya Regulasi (Perkada) Ketahanan Pangan/Banyaknya	Ada / 3	Ada / 3	Ada / 3	Ada / 3	Ada / 3	Tidak Ada / 0	Tidak Ada / 0	Tidak Ada / 0	Tidak Ada / 0	Tidak Ada / 0	<
4	Pertanahan											



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	-											
5	Lingkungan Hidup											
	Persentase Penanganan Sampah (%)	83,00	85,00	85,00	85,00	90,00	72,80	73,00	92,39	93,00	93,81	>
	Persentase Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	Persentase Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	0,830	0,820	0,810	0,800	0,790	0,002	0,002	0,003	0,003	0,027	<
6	Adm Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
	Rasio Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan (%)	70,92	74,92	85,00	85,92	86,92	n/a	77,07	87,50	98,50	99,16	>
	Persentase Penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP) (%)	95,47	95,47	96,00	96,00	97,00	83,12	87,89	96,57	97,24	98,07	>
	Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,83	0,88	0,97	0,97	0,98	>
	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk	3,73	3,73	3,75	3,75	3,80	369,90	389,23	452,85	472,71	499,33	>



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	Rasio Bayi yang Memiliki Akta Kelahiran (%)	66,92	74,93	85,00	85,92	86,92	80,48	77,38	87,26	98,62	92,68	>
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
	Jumlah Program Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (lokasi)	0	8	16	24	32	n/a	42	107	87	30	<
	Ketersediaan Buku Profil Kelurahan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	<
	Jumlah Musyawarah Pembangunan Kelurahan yang Dapat Difasilitasi	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	=
	Jumlah Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang Terlaksana	1	1	1	1	5	n/a	193	191	184	174	>
	Jumlah Kader Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	=
	Jumlah Kelompok Binaan LPM	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	=
	Jumlah Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)	53	53	53	53	53	4	4	4	4	4	<
8	Pengendalian Penduduk dan KB											



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga per Keluarga	4	4	4	4	4	7	7	5	5	4	=
	Rasio Akseptor KB (%)	70,28	73,00	76,00	79,00	82,00	77,15	78,70	83,06	84,56	81,62	<
	Cakupan atau Jumlah Peserta KB Aktif	27746	28578	29435	30318	31227	29871	30541	31241	31521	32285	>
	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	411	371	371	334	334	248	270	269	251	265	>
9	Perhubungan											
	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan (%)	0,77	0,95	1,04	1,18	1,22	0,60	0,70	0,94	1,01	1,14	<
	Jumlah Terminal Tipe C	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	<
	Rasio Jalan dalam Kondisi Baik (%)	89,60	90,50	91,40	92,30	93,20	90,18	87,27	83,88	81,12	91,33	<
	Jumlah Penumpang yang Terangkut oleh Angkutan Kereta Api (orang)	54257	54357	54457	54557	54700	n/a	56241	56241	50712	50712	<
	Jumlah Izin Trayek	167	167	167	167	167	n/a	69	28	22	50	<
10	Komunikasi dan Informatika											
	Persentase OPD yang Memiliki Website dan Melakukan Updating (%)	30,00	50,00	70,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	<
	Ketersediaan Sarana Penerimaan Keluhan/Aduan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	(Membangun Siantar Smart City)											
	Jumlah Surat Kabar Nasional / Lokal	60 / 7	60 / 7	60 / 7	60 / 7	60 / 7	11	11	11	11	11	<
	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	12	12	12	12	12	15	15	15	13	11	<
	Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah	1	1	1	2	3	0	1	1	2	2	<
	Jumlah Pameran/Expo	2	3	3	3	3	0	0	0	0	0	<
	Jumlah Jaringan Komunikasi	7	7	7	7	7	72	72	72	124	124	>
11	Koperasi dan UMKM											
	Jumlah Seluruh Koperasi	380	390	400	410	420	371	373	375	375	375	<
	Jumlah UKM	15138	18638	18638	18638	19138	17474	17647	18677	23290	26869	>
	Jumlah Koperasi Aktif	380	390	400	410	420	100	110	84	84	111	<
	Jumlah BPR/LKM	141	144	147	150	153	0	0	0	0	0	<
12	Penanaman Modal											
	Lama Waktu Perizinan (hari)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	=
	Jumlah Investor Berskala PMA	4	5	5	5	4	6	6	5	5	6	>
	Jumlah Investor Berskala PMDN	228	228	228	230	230	210	232	232	230	240	>
	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	232	233	233	235	234	216	238	237	235	246	>
	Jumlah Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	2,90	5,00	2,00	3,00	1,00	n/a	439,05	293,33	678,84	2308,79	>



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
13	Kepemudaan dan Olahraga											
	Jumlah Klub Olahraga	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	=
	Jumlah Gedung Olahraga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	=
	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	=
	Jumlah Organisasi Olahraga	14	14	14	14	16	14	14	14	14	16	=
	Jumlah Lapangan Olahraga	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	=
14	Statistik											
	Tersedianya Buku Kota Pematang Siantar Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
	Tersedianya Buku PDRB Kota Pematang Siantar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
15	Persandian											
	-											
16	Kebudayaan											
	Jumlah Objek Wisata Alam	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	=
	Jumlah Objek Wisata Buatan	10	10	10	10	10	7	10	10	10	10	=
	Jumlah Objek Wisata Tirta	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6	=
	Jumlah Objek Wisata Sejarah/Budaya	-	-	-	-	9	9	9	9	9	9	=



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	=
	Jumlah Grup Kesenian	14	14	14	14	14	10	14	14	14	14	=
	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	=
	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	=
	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	=
	Jumlah Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	=
	Jumlah Kawasan Cagar Budaya	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	=
	Jumlah Benda Cagar Budaya	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	=
	Jumlah Peningkatan Sarpras Objek Wisata Sejarah	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	=
17	Perpustakaan											
	Jumlah Perpustakaan	48	48	48	48	48	302	305	302	302	311	>
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	25853	25953	26053	26153	26253	9417	31915	51420	20695	0	<
	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	27522	27622	27722	27822	28000	19235	24086	33070	33070	30161	>



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
18	Arsip											
	Ketersediaan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
	Fokus Layanan Urusan Pilihan											
19	Perikanan											
	Jumlah Balai Benih Ikan (BBI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	=
	Jumlah Peningkatan Produksi Benih Ikan	5300000	5400000	5500000	5600000	5700000	3041000	4562000	4730000	4810000	4850000	<
	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	1,90	1,92	1,92	1,95	1,98	1,66	1,58	1,57	1,64	1,60	<
20	Pariwisata											
	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
	Jumlah Pameran Pariwisata	3	3	4	4	5	2	3	4	4	5	=
	Jumlah Wisatawan	31000	31500	32000	32250	32750	611485	459614	459614	753000	753000	>
	Jumlah Penginapan/Hotel	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	=
21	Pertanian											
	Panjang Saluran Irigasi (meter)	39165	39165	39165	39165	39165	22186	22186	24614	24668	22386	<
	Persentase Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) (%)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	n/a	-0,73	-0,60	4,01	0,68	<



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	Panjang Jalan Usaha Tani (km)	3,20	3,70	4,50	5,20	5,70	2,00	4,84	4,84	4,84	4,84	<
	Luas Lahan Irigasi Kota dalam Kondisi Baik (Ha)	1848,00	1898,00	1948,00	1998,00	2048,00	1712,00	1683,00	1519,72	1519,72	1519,72	<
	Luas Panen Produksi Padi Sawah (Ha)	4436,00	4661,00	5111,00	5336,00	5561,00	3825,30	3117,20	2361,50	2391,00	2483,40	<
	Luas Panen Produksi Padi Jagung (Ha)	998,00	1038,00	1078,00	1118,00	1158,00	1039,80	557,40	579,00	930,00	855,30	<
	Luas Panen Produksi Ubi Kayu (Ha)	496,00	504,00	512,00	520,00	528,00	304,00	290,00	214,90	301,00	216,00	<
	Jumlah Produksi Daging Sapi (kg)	89600	91680	93760	95840	97920	122475	195424	207961	168139	303751	>
	Jumlah Produksi Daging Kambing (kg)	48041	48832	49623	50414	51205	23968	8284	6644	8101	18250	<
	Jumlah Produksi Daging Babi (kg)	1082500	1082850	1083200	1083550	1083900	845340	479076	497222	381016	460059	<
	Jumlah Produksi Daging Ayam Buras (kg)	315700	317700	319700	321700	323700	122000	65730	66360	66115	88985	<
	Jumlah Produksi Telur Ayam Buras (butir)	280500	290500	300500	310500	320500	242700	210200	248300	221050	123642	<
	Jumlah Produksi Daging Itik (kg)	22500	22750	23000	23250	23500	1570	9173	9762	9701	15509	<
	Jumlah Produksi Telur Itik (butir)	200400	200500	200600	200700	200800	17820	22970	29780	22030	12083	<
22	Kehutanan											
	-											
23	Energi dan Sumberdaya Mineral											
	-											
24	Perdagangan											



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	Jumlah Pertambahan Pasar-Pasar Tradisional di Kecamatan	4	4	5	6	7	7	7	7	7	7	=
25	Perindustrian											
	Jumlah Pertumbuhan Industri Kecil	550	553	556	560	565	583	688	688	688	565	=
	Jumlah Pertumbuhan Industri Menengah	24	25	25	26	27	23	13	13	13	12	<
	Jumlah Pertumbuhan Industri Besar	7	7	7	8	8	6	6	6	6	5	<
	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)	24,50	24,60	24,70	24,90	25,01	24,53	24,74	24,98	25,28	25,67	>
	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	22,45	22,55	22,65	22,75	22,85	22,50	22,14	21,64	21,51	20,93	<
26	Transmigrasi											
	-											
	Fokus Layanan Urusan Penunjang											
27	Unsur Pemerintahan											
	Sekretariat Daerah											
	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	C	B	B	n/a	n/a	n/a	C (40,47)	C (42,39)	<
	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Sangat Memuaskan	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	belum rilis	
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja	CC	C	B	B	B	C	C	C	C (40,14)	C (40,57)	<



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	Instansi Pemerintahan (SAKIP)											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	40,00	40,00	45,00	45,00	50,00	C (72,12)	n/a	n/a	C (73,36)	B (81,81)	>
	Persentase Pelaksanaan e-Procurement (%)	80,00	80,00	80,00	80,00	85,00	n/a	92,00	88,00	29,00	11,00	<
	Persentase OPD yang Memiliki SOP Pelayanan Publik (%)	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	n/a	84,85	81,82	n/a	51,52	<
	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (%)	0,00	70,00	80,00	80,00	85,00	n/a	58,39	76,42	76,42	83,70	<
	Persentase Ruangan Kantor Kelurahan/ Kecamatan yang Memadai (%)	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	n/a	90,57	94,34	71,70	49,06	<
	Jumlah Sosialisasi Produk Hukum	3	3	3	3	3	n/a	2	3	1	3	=
	Jumlah Penerbitan Produk Hukum	30	30	30	30	30	n/a	1298	715	684	778	>
	Sekretariat DPRD											
	-											
28	Unsur Penunjang Perencanaan											
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RTRW/RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
	Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
	Persentase Pelaksanaan e-Planning (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	=
	Tersedianya Dokumen RTRW (Perda)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda / Banyaknya	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	=
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada / Banyaknya	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	=
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan Perkada / Banyaknya	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	=
	Persentase Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	43,47	57,00	87,00	78,00	26,00	<



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
29	Penelitian dan Pengembangan											
	-											
30	Keuangan											
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	belum rilis	
	Rasio PAD Terhadap APBD (%)	12,60	13,20	13,80	14,40	15,00	12,12	14,00	12,44	15,73	13,45	<
	Rasio Belanja Bantuan Sosial (%)	0,27	0,30	0,33	0,36	0,39	0,12	0,16	0,87	0,17	0,59	>
	Persentase Kesesuaian RKPD dan APBD (%)	85,00	85,00	90,00	95,00	100,00	n/a	80,33	98,92	93,32	67,72	<
31	Kepegawaian											
	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (%)	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	3,22	3,02	3,16	3,85	4,36	<
	Tersedianya Prosedur Penyelenggaraan Lelang Jabatan untuk Pemilihan Pejabat Struktural	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
	Tersedianya Peraturan Wali Kota Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Aparatur Pemerintahan Kota Pematang Siantar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	=
32	Pengawasan											
	Rasio Penyampaian LHKPN (%)	50	70	75	80	100	n/a	97,44	92,00	100,00	100,00	=



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
33	Unsur Kewilayahan											
	Kecamatan											
	Persentase Usulan Masyarakat yang Ditampung dalam APBD (%)	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	n/a	16,09	67,75	86,98	20,83	<
	Tingkat Partisipasi LPM dalam Pembangunan (%)	70,00	75,00	75,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	>
	Persentase Kelompok PKK Aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
34	Pemerintahan Umum											
	-											

Sumber : Evaluasi RPJMD Kota Kota Pematang Siantar 2017-2022



2.7 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pelayanan dasar masyarakat adalah capaian SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang mengamanatkan bahwa urusan wajib dasar sebagai dasar penyusunan SPM ada enam bidang meliputi:

1. Bidang Pendidikan; 2. Bidang Kesehatan; 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5. Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 6. Bidang Sosial.

Materi muatan SPM meliputi

- a. **Jenis pelayanan dasar;** Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.. Jenis pelayanan dasar berbeda-beda pada masing-masing jenis SPM (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial). Setiap jenis pelayanan dasar memiliki mutu pelayanan dasar yang ditetapkan oleh kementerian teknis.
- b. **Mutu pelayanan dasar;** Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Terkait.
- c. **Penerima layanan dasar;** Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar adalah warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasarnya. Pemenuhan SPM pada masing-masing bidang dapat menggunakan indikator dalam peraturan kementerian teknis masing- masing bidang. Berikut hasil capaian standar pelayanan minimal Kota Pematang Siantar.

Berikut disajikan Tabel 2.57 capain SPM Kota Pematang Siantar dari tahun 2019-2021.



Tabel 2.57
Capaian SPM Kota Pematang Siantar Tahun 2019-2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Target Penerima	Jumlah Penerima	Realisasi Capaian SPM		
							Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019
1.	BIDANG PENDIDIKAN	Pedoman : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan							
	1. Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	1. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Standar jumlah dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Tata cara pemenuhan standar	Usia 7-15tahun	53.142	44.319	119,91 %	104,19 %	94,08 %
	2. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.		Usia 7-18 tahun	672	672	100 %	100 %	
	3. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		Usia 5-6 tahun	8.420	4,457	52,93 %	56,02 %	91,90 %
2	BIDANG KESEHATAN	Pedoman : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan							
	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	1. Standar Jumlah Kualitas Barang 2. Standar Jumlah Kualitas Personil/SDM Kesehatan 3. Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemenuhan Pelayanan Dasar	Ibu hamil	4.334	3.326	76,74 %	75 %	85,22 %
	2. Ibu Bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)		Ibu bersalin	4.139	3.378	81,61 %	80,3 %	89,54 %
	3.Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar		Bayi baru lahir	3.937	3.064	77 %	82 %	90,00 %



	4.Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Balita	15.166	11.865	78 %	56,3 %	101,40 %
	5.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	Usia pendidikan dasar	14.235	11.737	82 %	1,51%	45,92 %
	6.Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	Usia Produktif	197.631	49.883	25,24 %	16,84 %	29,35 %
	7.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	Usia lanjut	29.529	24.000	81 %	52 %	100 %
	8.Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	Penderita hipertensi	60.673	7.707	12,70 %	18, 03 %	27,99 %
	9.Pelayanan Kesehatan Penderita Diabet Melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	Penderita Diabetes Melitus	4941	2.814	56,95 %	100 %	100 %
	10.Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG) Berat	Jumlah orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	Orang dengan gangguan jiwa berat	363	312	85,95 %	59,17 %	66,94 %
	11.Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	Orang terduga tuberkulosis	4.925	3,125	63,44 %	82,13 %	17,94 %
	12.Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus (Hiv)	Jumlah orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	Orang dengan resiko terinfeksi virus HIV	6.216	4.876	78,44 %	85,74 %	74,15 %
3	BIDANG PEKERJAAN UMUM	Pedoman : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.						



	1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. Mutu Pelayanan Dasar Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rumah Tangga terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin/kurang mampu dan berdimisili pada daerah rawan air yang akan dilayani melalui system penyediaan air minum	83.156	82.349	99,03 %	94,47 %	87,67 %
	2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Mutu Pelayanan Dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.(prioritas masyarakat miskin- psl 7 Permen PUPR 29/2018	Rumah tangga dalam wilayah pelayanan (terutama masyarakat miskin) dan berdomisili pada area beresiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air	250	250	100 %	100 %	98 %
4	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	Pedoman : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.							
	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Standar Jumlah dan Kualitas Pelayanan Dasar	Rumah Tangga korban bencana yang memenuhi kriteria	0	0	100 %	100 %	0
	2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.		Rumah Tangga yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria	0	0	100 %	100 %	0
5	BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM	Pedoman : Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota							



	DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota							
	1.Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	1. SOP Satpol PP 2. Standar Sarpras Satpol PP 3. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Linmas 4. Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat Penegakan hokum terhadap pelanggaran Perda (Pelayanan Kerugian dan Pelayanan Pengobatan)	Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda	0	0	100 %	100 %	Capaian 100 % Tidak ada masyarakat yang keberatan dan dirugikan dalam penegakan hukum Perda/Perkada
	2.Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1. Prosedur operasional penanggulangan bencana 2. Sarana prasarana penanggulangan bencana 3. Peningkatan kapasitas personil/SDM 4. Pelayanan warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.	Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana daerah	Adanya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Tersedia	100 %	100 %	1, 86 %
	3.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Adanya RPB dan Pelaksanaan kegiatan Pencegahan terhadap bencananya	Terlaksana	100 %	100 %	4,65 %



	4.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			Adanya: 1.Respon Cepat 2.Aktivasi sistim Komando Darurat 3. Kegiatan Pencarian, Pertolongan korban bencana	Terlaksana	100 %	100 %	
	5.Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	1. Tingkat waktu tanggap (respon time) 15 menit sejak diterima informasi 2. Prosedur operasional penanganan 3. Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi 4. Kapasitas aparatur/SDM 5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga yang menjadi korban 6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang terdampak kebakaran.	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	36 Kejadian di Pematang Siantar : 29 Kasus dan di wilayah Simalungun : 7 Kasus	36	100 %	100 %	- Tanggap Respon Kebakaran 15 menit - Kapasitas Kualifikasi aparatur pemadam 31 % - Mobil Pemadam : 5 unit (memenuhi standar minimal yang harus dimiliki Pemko) Capaian penanganan 100 %
6	BIDANG SOSIAL	Pedoman : Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota							
	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang	Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas yang	1. Standar Jumlah dan Kualitas barang/atau	Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti	5	5	100 %	100 %	Data Penerima SPM tidak ada



	disabilitas telantar diluar panti	memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	jasa (Kebutuhan Dasar, data dan pengaduan, kedaduratan) 2. Standar jumlah dan kualitas SDM Kesejahteraan social (Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial, Relawan Sosial) 3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar						
	2.Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		Anak Terlantar di luar panti	25	25	100 %	100 %	
	3.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti		Lanjut usia terlantar di luar panti	5	5	100 %	100 %	
	4.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		Gelandangan dan pengemis di luar panti	5	5	100 %	100 %	
	5.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social		Korban Bencana Kota:					
				1. Bencana Alam	11 KK	11 KK	100 %	100 %	
				Bencana Sosial (Bantuan Bencana Sosial Terdampak Covid-19:)	4.197	4.197	100 %		

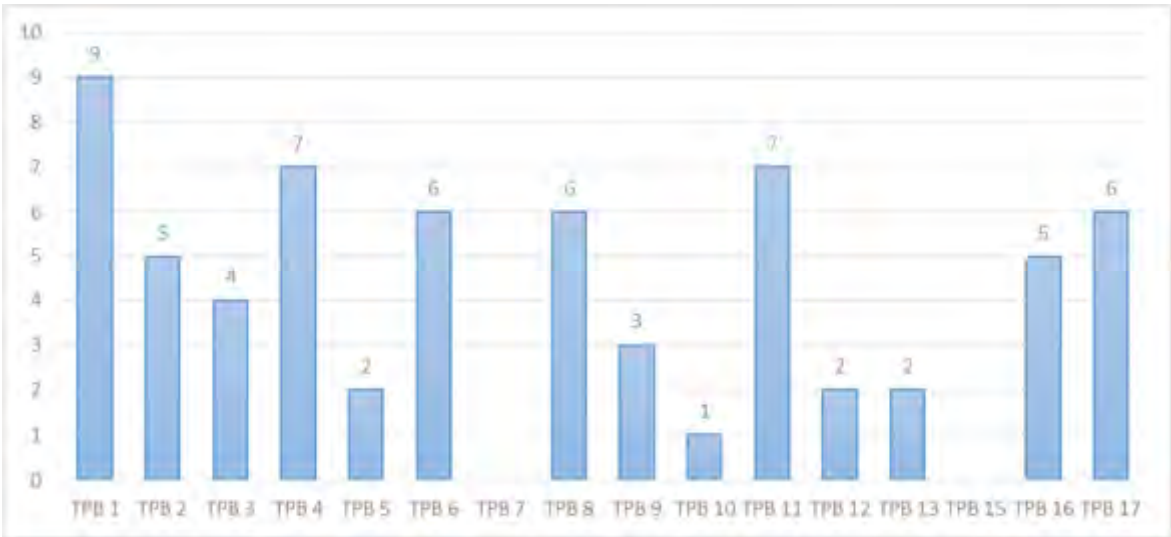
Sumber : Laporan SPM
Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota
Pematang Siantar Tahun
2022



2.8 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Dari keseluruhan indikator TPB untuk Kota Pematang Siantar yang berjumlah 213 indikator, dari indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional berjumlah 67 indikator terdiri atas pencapaian TPB berikut :

- 1. Mengakhiri Kemiskinan (9 indikator)
- 2. Menghilangkan Kelaparan (5 indikator)
- 3. Kehidupan yang Sehat (4 indikator)
- 4. Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata (7 indikator)
- 5. Kesetaraan Gender (2 indikator)
- 6. Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (6 indikator)
- 7. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja (6 indikator)
- 8. Infrastruktur, Industri, Inovasi (3 indikator)
- 9. Kota dan Permukiman (7 indikator)
- 10. Pola Produksi dan Konsumsi (2 indikator)
- 11. Perubahan Iklim dan Dampaknya (2 indikator)
- 12. Perdamaian dan Kelembagaan (5 indikator), dan
- 13. Kemitraan Global (6 indikator).



Sumber: KLHS RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Gambar 2.30 TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Uraian indikator-indikator TPB di Kota Pematang Siantar yang telah memenuhi target dapat dilihat pada Tabel 2.58 berikut.



Tabel 2.58
Capaian Indikator TPB Kota Pematang Siantar yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (Kategori SS)

NO TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GAP	OPD
1	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	%	Meningkat menjadi 17,12%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	82,88	DINSOS
1	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	%	Menurun	87,40	87,04	64,71	100,00	61,71	61,71	-25,69	DINSOS
1	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	%	Meningkat menjadi 63%.	73,40	82,30	82,20	90,10	57,40	73,70	10,70	DINKES
1	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	Meningkat menjadi 65%	72,67	73,25	75,65	76,70	76,75	76,75	11,75	DINKES
1	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	%	Meningkat menjadi 18,6 juta				16,50	6,10	12,81	-5,79	PRKP
1	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	%	Meningkat menjadi 82,2%	87,22	74,99	95,05	108,31	69,73	76,58	(5,6)	DIKJAR
1	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	Meningkat menjadi 77,4%.	80,92	89,16	83,90	87,10	87,79	87,79	10,4	CAPIL
1	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	lokasi	Meningkat	1,00	1,00	1,00	1,00	21,00	28,00	27,00	BPBD
1	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	%	Meningkat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	DINSOS
1	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BPBD
1	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	%	Meningkat	NA	37,26	42,70	41,04	41,98	47,42	10,16	BAPPEDDA
2	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	%	Menurun	8,54	8,26	7,95	7,66	7,51	7,40	-1,14	KETAHANAN
2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	Menurun menjadi 17%	0,10	0,10	1,69	1,30	0,90	1,50	-15,50	DINKES



NO TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GAP	OPD
2	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%	Menurun	9,00	8,66	6,86	5,42	5,01	4,87	-4,13	KETAHANAN
2	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	%	Menurun	0,03	0,01	0,01	0,10	0,01	0,01	-0,02	DINKES
2	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	juta rp	Meningkat	47,07	56,12	59,73	60,41	70,50	78,25	31,18	KETAHANAN
3	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	org	Menurun		5,00	4,10	1,90		0,12	-4,88	DINKES
3	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	%	Menurun menjadi <0,5%	0,04	0,05	0,03	0,04	0,01	0,01	-0,49	DINKES
3	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	Meningkat menjadi 65%	72,67	73,25	75,65	76,70	76,75	76,75	11,75	DINKES
3	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	%	Meningkat	65,00	67,00	84,00	87,00	93,00	83,00	18,00	DINKES
4	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	%	Meningkat	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	DIKJAR
4	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	Meningkat menjadi 106,94%	113,5 5	92,17	106,5 7	109,4 1	116,3 1	128,2 3	21,29	DIKJAR
4	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	%	Meningkat menjadi 8,8 tahun	10,73	10,75	11,06	11,15	13,09	13,09	4,29	DIKJAR
4	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	%	Meningkat menjadi 96,1%	99,94	99,90	99,98	100,0 0	99,70	100,0 0	3,90	DIKJAR
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	%	Meningkat	99,94	99,90	99,98	100,0 0	99,75	100,0 0	0,06	DIKJAR



NO TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GAP	OPD
4	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	%	Meningkat	54,45	42,98	47,40	89,01	98,60	98,75	44,30	DIKJAR
5	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	%	Meningkat menjadi 70%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	30,00	DINSOS
5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	%	Meningkat	23,30	23,30	23,30	23,30	10,00	10,00	-13,30	DINAS SOSIAL
5	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	%	Meningkat	52,30	57,04	62,39	68,79	74,55	80,03	27,73	DISKOMINFO
6	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	kel	Meningkat	53,00	53,00	53,00	53,00	7,00	53,00	0,00	DINKES
6	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	kel	Meningkat	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	6,00	6,00	DINKES
6	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.		Meningkat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	PRKP
6	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	rt	Meningkat	800,00	1.250,00	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.100,00	PRKP
6	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).		Meningkat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	PRKP
6	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	%	Meningkat	0,00	0,00	0,00	3,49	3,59	3,05	3,05	PRKP



NO TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GAP	OPD
8	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	jt/kap	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	46,41	49,48	51,98	54,45	52,05	52,47	2,47	BPS
8	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	%	Meningkat				4,60	4,63	4,65	0,05	KETENAGAKERJAAN
8	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	jt/kap	Meningkat				40,56	41,56	42,96	2,40	KETENAGAKERJAAN
8	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	org	Meningkat	11.593	11.593	10.776	15.022	14.712	11.978	385	KETENAGAKERJAAN
8	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	org	Meningkat	137	147	190	270	350	2.244	2.107	DINAS PARIWISATA
8	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	org	Meningkat	43.800	48.320	73.584	89.547	98.900	747.000	703.200	DINAS PARIWISATA
9	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	%	Meningkat	49,32	52,12	56,13	66,05	76,49	77,05	24,93	DISKOMINFO
9	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	%	Meningkat	52,30	57,04	62,39	68,79	74,51	80,03	22,99	DISKOMINFO
9	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	%	Meningkat	55,11	61,13	68,74	74,28	78,87	82,43	21,30	DISKOMINFO
10	10.1.1*	Koefisien Gini.		Menurun menjadi 0,36	0,36	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	-0,02	BPS
11	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	%	3,7 juta rumah tangga	96,72	97,02	97,22	97,32	97,32	98,07	1,35	PRKP
11	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	%	Meningkat menjadi 32%	71,00	65,00	62,00	57,00	57,00	57,00	25,00	DISHUB
11	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.		Meningkat	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	1,00	BAPPEDDA
11	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	org	Menurun	0,00	90,00	84,00	79,00	6,00	9,00	-81,00	BPBD
11	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		ada	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	Ada	BPBD



NO TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GAP	OPD
11	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.		Meningkat/ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BPBD
11	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BPBD
12	12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	%	20 ton per hari (skala nasional)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	DLH
12	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.		Meningkat				2,00	2,00	2,00	2,00	PRKP
13	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BPBD
13	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orrg	Menurun	0,00	90,00	84,00	79,00	6,00	9,00	-81,00	BPBD
16	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Org	Menurun	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	KESBANGPOL
16	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	Meningkat	82,18	80,56	77,38	87,26	90,62	90,62	8,44	CAPIL
16	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	%	Meningkat menjadi 77,4%	80,92	89,16	83,90	87,10	87,79	87,79	10,39	CAPIL
16	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	%	Meningkat menjadi 85%	82,18	80,56	77,38	87,26	90,62	90,62	13,22	CAPIL
16	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	%	Meningkat	47,00	50,00	59,00	62,00	67,00	67	20,00	DISKOMINFO
17	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.		Meningkat	NA	3,67	3,90	4,55	4,67	5,58	1,92	BAPPEDDA
17	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	%	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps)	24,53	33,57	43,44	59,75	71,29	71,29	0,29	DISKOMINFO



NO TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GAP	OPD
				71% rumah tangga dan 30% populasi;								
17	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	%	Meningkat	55,11	61,13	74,28	74,28	78,87	80,36	-19,64	DISKOMINFO
17	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	%	Meningkat	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	25	BAPPEDDA
17	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	CAPIL
17	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	%	Meningkat	0,51	0,54	0,65	0,65	85,82	86,8	86,3	DISKOMINFO

Sumber: KLHS RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027



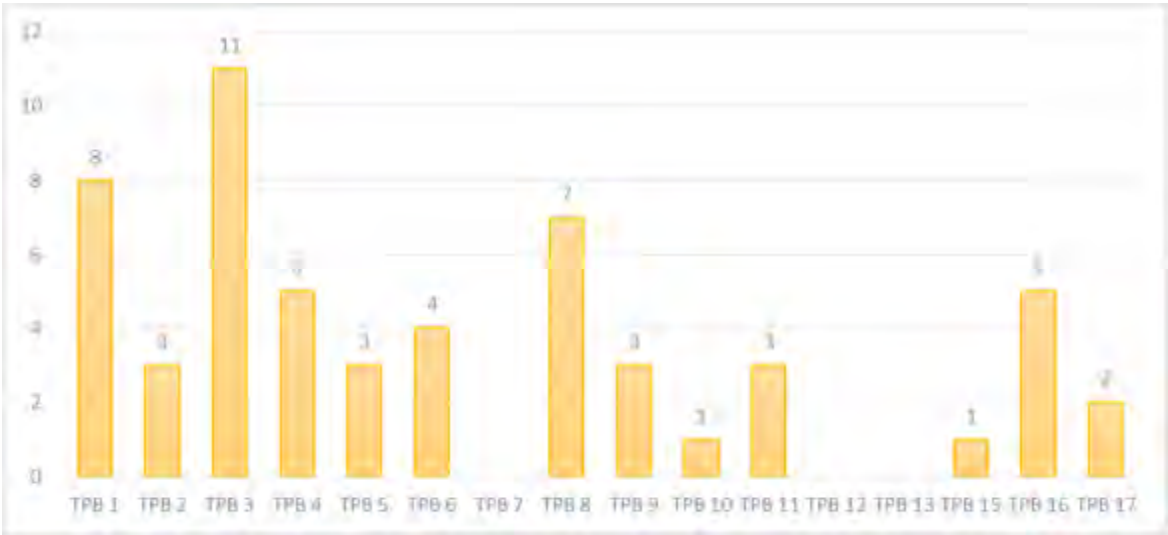
Pencapaian indikator TPB tidak selalu memenuhi target nasional. Jumlah indikator TPB yang belum mencapai target lebih sedikit daripada yang sudah mencapai target. Terdapat 56 indikator target yang termasuk dalam kategori Sudah Dilaksanakan tetapi Belum mencapai target, terdiri dari atas TPB berikut:

1. Mengakhiri Kemiskinan (8 indikator)
2. Menghilangkan Kelaparan (3 indikator)
3. Kehidupan yang Sehat (11 indikator)
4. Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata (7 indikator)
5. Kesenjaraan Gender (2 indikator)
6. Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (6 indikator)
7. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja (6 indikator)
8. Infrastruktur, Industri, Inovasi (3 indikator)
9. Kesenjangan (1 indikator)
10. Kota dan Permukiman (7 indikator)
11. Pola produksi dan konsumsi (2 indikator)
12. Perdamaian dan Kelembagaan (5 indikator)
13. Kemitraan global (6 indikator)

Terdapat tiga permasalahan utama yang menyebabkan indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum dapat mencapai target nasional adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran dalam mengimplementasikan indikator TPB
2. Skala prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan baik di tingkat OPD atau tingkat Pemerintahan Kota Pematang Siantar.
3. Penetapan target program dan kegiatan secara terukur (output dan outcome) tidak menggambarkan ukuran keberhasilan
4. Keberhasilan program dan kegiatan lebih fokus pada penyerapan anggaran
5. Kurangnya koordinasi antar OPD dalam melaksanakan indikator TPB, terutama indikator TPB yang pelaksanaannya melibatkan beberapa OPD

Pada Gambar berikut, ditampilkan target-target TPB yang belum dicapai dalam pembangunan Kota Pematang Siantar melalui indikator-indikator terkait. Selanjutnya, Tabel 2.59 menampilkan rincian perkembangan capaian indikator TPB yang belum mencapai target tersebut dari tahun 2016 hingga 2021, serta OPD pelaksananya.



Sumber: KLHS RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Gambar 2.30 TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional



Tabel 2.59
Capaian Indikator TPB Kota Pematang Siantar yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (Kategori SB)

NO TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GAP	OPD
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	Menurun menjadi 7-8%	9,99	10,10	8,70	8,38	11,34	11,34	3,34	DINSOS
1	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	Meningkat menjadi 95%	80,90	82,70	89,78	87,50	91,75	91,75	-3,25	DINKES
1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	Meningkat menjadi 100%	84,21	85,89	87,56	87,67	90,92	99,03	-0,97	PRKP
1	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	Meningkat menjadi 100%	63,26	64,10	64,94	65,78	90,92	99,19	-0,81	PRKP
1	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	Meningkat menjadi 94,78%	88,43	90,03	99,79	100,41	92,26	93,02	-1,76	DIKJAR
1	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	%	Meningkat menjadi 100%		39,37	37,36	35,72	34,13	34,13	-65,87	PLN
2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	Menurun	0,00	0,00	0,75	0,50	1,10	1,29	1,29	DINKES
2	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%	Meningkat menjadi 50%	16,80	26,70	29,39	40,60	22,60	21,20	-28,80	DINKES
2	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.		Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 Kg/ kapita /tahun	91,30	91,50	92,01	92,05	92,05	92,10	-0,40	KETAHANAN
3	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	per 1000 pddk	Menurun	4,00	1,00	5,00	5,00	1,00	7,00	3,00	DINKES
3	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	Meningkat menjadi 85 %	93,40	82,40	94,60	89,40	59,20	81,71	-13,29	DINKES



NO TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GAP	OPD
3	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Org	Menurun	4,00	3,00	2,70	2,90	9,00	7,00	3,00	DINKES
3	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Org	Menurun menjadi 24	4,00	3,00	2,70	2,90		5,12	5,10	DINKES
3	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%	Meningkat menjadi 95%	73,40	82,30	82,20	90,10	59,20	73,70	-21,30	DINKES
3	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Org	Menurun menjadi 245	235,00	237,00	271,00	307,00	164,00	248,00	3,00	DINKES
3	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Org	Menurun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	DINKES
3	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	%	Menurun menjadi 24,3%	2,08	2,27	3,27	5,07		40,89	16,59	DINKES
3	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Org	Menurun	68,00	132,00	133,00	157,00			89,00	KESBANGPOL
3	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	%	Menurun menjadi 2,28	2,90	2,70	2,60	2,40	2,40	2,40	0,12	DINKES
3	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	Meningkat menjadi minimal 95%	80,90	82,70	89,78	87,50	91,70	85,01	-9,99	DINKES
4	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	Meningkat menjadi 84,2%	49,10	27,84	29,55	39,93	36,93	72,57	-11,63	DIKJAR
4	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	Meningkat menjadi 81%	82,08	74,71	75,12	75,24	52,00	50,00	-31,00	DIKJAR
4	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	Meningkat menjadi 114,09%	108,28	107,52	105,02	116,90	103,80	110,17	-3,92	DIKJAR
4	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	Meningkat menjadi 77,2%	30,25	43,75	39,07	129,18	50,95	65,26	-11,94	DIKJAR
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	%	Meningkat	105,54	93,24	102,97	97,36	104,94	119,91	14,37	DIKJAR
4	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	%	Meningkat	79,82	71,69	69,92	70,04	70,02	52,19	-27,63	DIKJAR



NO TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GAP	OPD
5	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	%	bertambah sebanyak 16	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00		-0,01	DINSOS
5	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	%	Menurun	0,01	0,01	0,00	0,01			0,00	DINSOS
6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	Meningkat menjadi 100%	84,21	85,89	87,56	87,67	90,92	95,83	-4,17	PDAM
6	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	m3	Meningkat	3.641,08	3.535,75	3.466,58	3.211,22	2.929,94	3.500,00	-141,08	PDAM/PRKP
6	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	Meningkat menjadi 100%	84,21	85,89	87,56	87,67	90,92	95,83	-4,17	PDAM/PRKP
6	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	Meningkat menjadi 100%	63,26	64,10	64,94	65,78	90,92	99,19	35,93	PRKP
8	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	%/thn	Meningkat	8,67	6,61	5,06	4,76	4,41	0,81	-7,86	BPS
8	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	%	Meningkat	88,00	77,40	50,00	77,27	10,02	10,08	-77,92	KETENAGAKERJAAN
8	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Org	Meningkat	110.785,00	110.785,00	111.746,00	106.990,00	117.892,00	51.766,00	-59.019,00	KETENAGAKERJAAN
8	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	25%				0,04	0,19		-25,00	DINAS KOPERASI
8	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	Menurun	9,47	8,80	12,36	14,72	14,62	14,51	5,04	KETENAGAKERJAAN/BPS
8	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	%	Menurun		8,80	12,14	11,09	11,06	11,00	2,20	KETENAGAKERJAAN
8	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	%	Meningkat menjadi 8%	5,67	5,69	5,78	5,80	4,58	5,88	-2,12	DINAS PARIWISATA
9	9.1.1.(c)	Panjang Jalur kereta api	Km	Meningkat							0	DINAS PERHUBUNGAN
9	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	%/thn	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	0,74	1,25	0,56	0,62	-2,27	-1,49	13,99	DINAS KOPERASI/BPS
9	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.		Meningkat	NA	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	-0,03	BAPPEDDA



NO TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GAP	OPD
10	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	Menurun menjadi 7-8%	9,99	10,10	87,00	8,38	11,34	11,34	3,34	DINSOS
11	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.		Paling sedikit 20 kota sedang dan 10 kota baru (skala nasional)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	BAPPEDA
11	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.		Ada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BAPPEDDA
11	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).		Menurun menjadi 30%	91,20	91,20	91,20	63,84	48,22	48,22	18,22	BPBD
15	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BAPPEDDA
16	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus	Menurun	0,00	0,00	2,00	2,00		2,00	0,00	KESBANGPOL
16	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Status	Meningkat menjadi: Kementerian/Lemba ga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%				WDP	WDP	WDP	WDP	INSPEKTORAT
16	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	%	Meningkat menjadi: Kementerian/Lemba ga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%		C	C	C			C	INSPEKTORAT
16	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	%	Menjadi 80%	39,00	33,00	88,00	29,00	11,00	16,00	-64,00	BARANG/JASA
16	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		Meningkat	23,30	23,30	23,30	23,30	10,00	10,00	-13,30	DINAS SOSIAL
17	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		Di atas 12%	NA	0,19	0,30	0,36	0,34	0,37	-11,63	BAPPEDDA



NO TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GAP	OPD
17	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	%	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi;	49,32	52,12	56,13	66,05	79,49	79,49	-20,51	DISKOMINFO

Sumber: KLHS RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

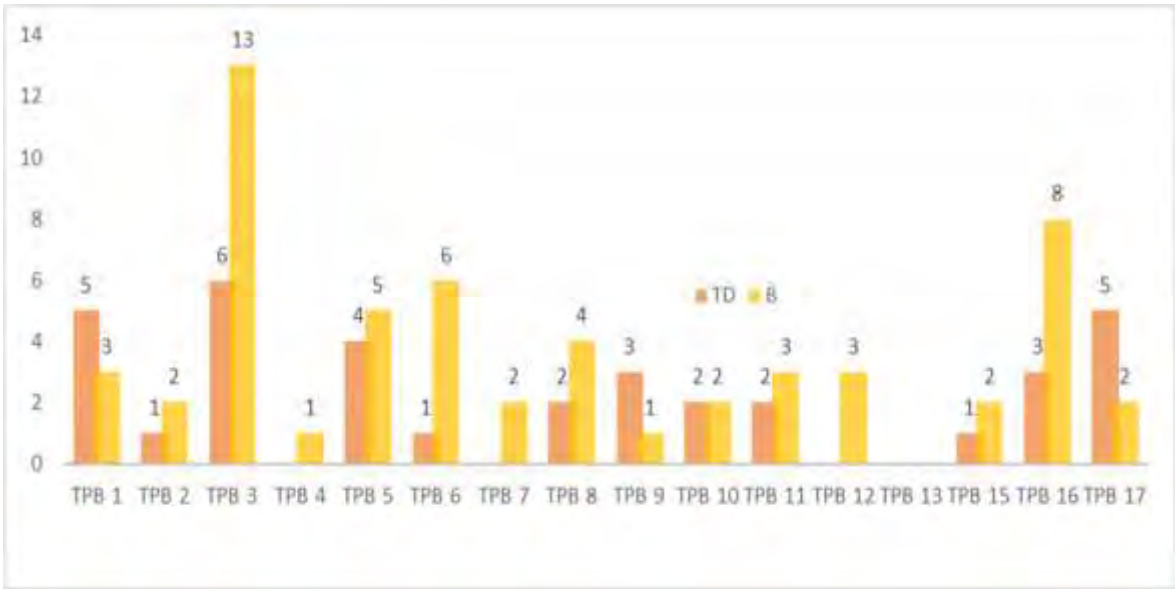


Dari 213 indikator yang menjadi ukuran pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kota Pematang Siantar, 92 indikator (43 %) yang tidak diperoleh data. Ketidakadaan data ini dapat berupa :

- 1. Belum dilaksanakan, sehingga belum mencapai target nasional (kategori TD), atau
- 2. Telah dilaksanakan tetapi belum ada datanya (kategori B).

Ke-92 indikator yang belum memiliki data tersebut, terdiri atas indikator-indikator dari TPB berikut:

- 1. Mengakhiri Kemiskinan (8 indikator)
- 2. Menghilangkan Kelaparan (3 indikator)
- 3. Kehidupan yang Sehat (19 indikator)
- 4. Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata (1 indikator)
- 5. Kesetaraan Gender (9 indikator)
- 6. Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (7 indikator)
- 7. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja (6 indikator)
- 8. Infrastruktur, Industri, Inovasi (4 indikator)
- 9. Kesenjangan (4 indikator)
- 10. Kota dan Permukiman (5 indikator)
- 11. Pola produksi dan konsumsi (3 indikator)
- 12. Ekosistem daratan (3 indikator)
- 13. Perdamaian dan Kelembagaan (11 indikator), dan
- 14. Kemitraan global (7 indikator)



Sumber: KLHS RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Gambar 2.31 TPB Yang Belum Memiliki Data



Tabel 2.60
Perkembangan Indikator TPB Yang Belum Memiliki Data
(Belum Dilaksanakan, Belum Memenuhi Target - TD & Sudah Dilaksanakan,
Belum Ada Data - B) dan OPD Pelaksananya

NO TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target	OPD	CAPAIAN
1	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	DINKES	TD
1	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	Meningkat menjadi 70%	DINSOS	B
1	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	jiwa	Menurun	DINSOS	TD
1	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	jlh	Meningkat	DINSOS	TD
1	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	daerah	Meningkat	BPBD	B
1	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.		Menurun menjadi 118,6	BPBD	B
1	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	juta rp	Menurun	BPBD	TD
1	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	%	Meningkat	DINSOS	TD
2	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	%	Menurun menjadi 8,5 %	DINKES	B
2	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%	Menurun menjadi 28%	DINKES	TD
2	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	%	Menurun menjadi 28%	DINKES	B
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	Meningkat menjadi 95%	DINKES	B
3	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.		Meningkat menjadi 300	DINKES	B
3	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	%	Meningkat	DINKES	B
3	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).		Menurun	DINKES	B
3	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.		Meningkat menjadi 34 provinsi	DINKES	B
3	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).		Meningkat menjadi 35.	DINKES	B
3	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	%	Menurun menjadi 5,4%	DINKES	B



NO TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target	OPD	CAPAIAN
3	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	%	Menurun	DINKES	B
3	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	org	Menurun	DINSOS	TD
3	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.		Meningkat menjadi 280	DINKES	TD
3	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	ltr	Menurun	DINKES	B
3	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	%	Meningkat menjadi 66%	DINKES	TD
3	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	Meningkat menjadi 23,5%	DINKES	TD
3	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	%	Menurun menjadi 38	DINKES	TD
3	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	%	Menurun menjadi 9,91%	DINKES	B
3	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	%	Meningkat	DINKES	B
3	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	%	Menurun	DINKES	B
3	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	%	Menurun	DINKES	B
3	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	org	Meningkat	DINKES	TD
4	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	%	Meningkat	DIKJAR	B
5	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		Menurun menjadi kurang dari 20,48%	DINSOS	B
5	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	%	Menurun	DINSOS	B
5	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	%	Menurun	DINSOS	B
5	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	%	Meningkat menjadi 21 tahun	DINSOS	B
5	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	%	Menurun menjadi 38 tahun	DINKES	TD
5	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	%	Meningkat	DINAS SOSIAL	B



NO TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target	OPD	CAPAIAN
5	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	%	Meningkat	DINAS SOSIAL	TD
5	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	Menurun menjadi 9,9%	DINKES	TD
5	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	%	Meningkat menjadi 85%	DINKES	TD
6	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%	Meningkat	PRKP	B
6	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.		Meningkat	DLH	TD
6	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.		Ada	BAPPEDA	B
6	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).		Ada	BAPPEDA	B
6	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.		8 WS	PUPR	B
6	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.		10 WS (skala nasional)	PUPR	B
6	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		Ada	PUPR	B
7	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.		10-16%	PLN	B
7	7.3.1*	Intensitas energi primer.		Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	PLN	B
8	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	%/thn	Meningkat	BPS	TD
8	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	%	Meningkat	DINAS PARIWISATA	B
8	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Persen	Meningkat	DINAS PARIWISATA	B
8	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	kantor	Meningkat	BANK INDONESIA	B
8	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).		Menurun (mendekat)	BANK INDONESIA	B
8	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	%	Meningkat	DINAS KOPERASI	TD
9	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	%	Meningkat	BPS	TD
9	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.		Meningkat	DINAS KOPERASI/BPS	TD



NO TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target	OPD	CAPAIAN
9	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Meningkat	BPS	TD
9	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.		Meningkat	DINAS KOPERAS I/BI	B
10	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	%	Menurun	BPS	B
10	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.		Meningkat menjadi 87	KESBANG POL	B
10	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		ada	BAGIAN HUKUM	TD
10	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	DINKES	TD
11	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.		ada	DINAS PARIWISATA	TD
11	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.		Meningkat	BPBD	B
11	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	juta rp	Menurun	BPBD	B
11	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	Meningkat menjadi 80%	DLH	TD
11	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.		Meningkat/ada	DLH	B
12	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	M3	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	DLH	B
12	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		Meningkat	DLH	B
12	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Meningkat	DLH	B
15	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	%		DLH	TD
15	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	%		DLH	B
15	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.			DLH	B
16	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%	Menurun	KESBANG POL	B
16	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	%	Meningkat	KESBANG POL	B



NO TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target	OPD	CAPAIAN
16	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	%	Menurun	DINAS SOSIAL	B
16	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	%	Menurun	DINAS SOSIAL	B
16	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	%	Menurun	DINAS SOSIAL	B
16	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).		Meningkat menjadi 4,0	INSPEKTORAT	B
16	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	%	Meningkat	KEUANGAN DAERAH	B
16	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).		Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/ Kota: 45%	INSPEKTORAT	TD
16	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).		Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/ Kota: 80%	INSPEKTORAT	TD
16	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		Meningkat	DINAS SOSIAL	B
16	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		ada	BAGIAN HUKUM	TD
17	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.		Meningkat	KEUANGAN	TD
17	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	proyek	ada	BAPPEDDA	B
17	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	%	ada	BAPPEDDA	B
17	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	%	Meningkat	BPS	TD
17	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan	%	Meningkat	BPS	TD



NO TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target	OPD	CAPAIAN
		informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.				
17	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	%	Meningkat	BPS	TD
17	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	%	Meningkat	BPS	TD

Sumber: KLHS RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum dapat dilihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Pematang Siantar dari tahun ke tahun. Secara umum APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. APBD digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan prioritas pembangunan dalam perencanaan daerah serta untuk memenuhi kebutuhan rutin maupun hal mendesak dalam satu tahun anggaran bersangkutan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka APBD ditetapkan setiap tahunnya melalui peraturan daerah. Dimana kebutuhan dana untuk pembangunan yang terlihat dari jumlah belanja daerah selalu berada di atas kemampuan keuangan daerah/pendapatan daerah. Oleh sebab itu dengan mempertimbangkan keterbatasan keuangan tersebut maka perlu mempertimbangkan azas-azas pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dari aspek efektif, pembelanjaan daerah diharapkan mampu untuk mendanai program/kegiatan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan. Sedangkan aspek efisien lebih mengukur memenuhi kebutuhan belanja dan jenis belanja yang benar-benar dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan. Pada azas transparan lebih kepada melihat keterbukaan informasi publik untuk mengakses informasi terkait dengan pendanaan pembangunan daerah. Sedangkan dari sisi akuntabel lebih pengelolaan keuangan daerah yang mampu mengelola keuangan daerah secara terukur berdasarkan sumber-sumber pendanaan sesuai dengan perkembangan potensi ekonomi daerah. Untuk menyesuaikan antara kebutuhan pembangunan dalam periode RPJMD ini dengan kemampuan daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka proyeksi-proyeksi tersebut perlu didasarkan perkembangan kinerja keuangan masa lalu, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah ke depan terlebih dahulu harus memahami potensi yang ada serta kemampuan daerah dalam mengelolanya pada masing-masing jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Pembahasan tentang gambaran umum keuangan daerah berhubungan dengan analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis ini dimaksudkan untuk menilai tentang sumber pendapatan



daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk memahami kemampuan keuangan daerah tersebut, perlu analisis kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa datang.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, serta kondisi Aset, Kewajiban (Utang), dan Ekuitas (Modal). Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah. Dari Laporan Realisasi Anggaran dapat dinilai perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, termasuk kebijakan dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut. Dari Neraca Pemerintah Daerah dapat dianalisis kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi Utang melalui analisis perkembangan elemen utama Aset Daerah, Kewajiban Daerah, dan Ekuitas Daerah serta menggunakan rasio-rasio keuangan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelumnya. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Jumlah dan laju pertumbuhan rata-rata per tahun dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.



Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (dalam jutaan)

URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
PENDAPATAN DAERAH	869.993,44	978.915,42	1.005.078,67	890.248,01	898.120,43	(3,00)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	105.445,99	137.052,84	125.018,50	114.671,76	128.588,19	5,77
Pajak Daerah	46.253,30	46.460,21	53.802,27	47.625,22	59.267,66	11,73
Retribusi Daerah	6.716,92	10.998,23	11.183,36	8.920,46	9.225,64	7,18
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.162,49	11.209,96	9.566,07	9.127,84	8.333,09	(6,89)
Lain-lain PAD yang Sah	42.313,29	68.384,44	50.466,80	48.998,23	51.761,80	6,05
Pendapatan Transfer	764.547,45	822.000,32	854.741,87	748.712,88	734.719,68	(3,81)
<i>Transfer Pemerintah Pusat</i>	<i>727.984,05</i>	<i>796.804,96</i>	<i>808.453,42</i>	<i>712.231,46</i>	<i>690.917,61</i>	<i>(1,56)</i>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.694,26	25.332,21	19.548,53	28.182,91	37.011,84	8,01
Dana Alokasi Umum	583.106,21	583.106,21	616.197,68	565.804,26	556.772,16	(1,17)
Dana Alokasi Khusus	119.183,58	188.366,54	150.268,90	103.324,47	97.133,61	(1,45)
Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	22.438,31	14.919,83	-	-
<i>Transfer Antar Daerah</i>	<i>36.563,40</i>	<i>25.195,36</i>	<i>46.288,45</i>	<i>36.481,42</i>	<i>43.802,07</i>	<i>(5,02)</i>
Pendapatan Bagi Hasil	36.563,40	25.195,36	46.288,45	36.481,42	43.802,07	(5,02)
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	0,00	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	19.862,26	25.318,29	26.863,37	34.812,56	-
Hibah	-	-	25.318,29	1.488,00	1.746,00	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-



URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Lain-lain Pendapatan	-	19.862,26	-	25.375,37	33.066,56	-
BELANJA DAERAH	934.471,60	994.512,02	934.784,43	911.986,22	876.636,63	(1,30)
Belanja Operasi	668.874,30	700.067,56	723.900,99	697.715,87	717.400,77	(0,44)
Belanja Pegawai	493.744,78	501.051,00	504.672,89	480.303,68	442.246,79	(5,10)
Belanja Barang dan Jasa	165.337,43	180.305,41	178.361,71	176.470,15	234.707,30	10,60
Belanja Bunga	3,15	46,39	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	35.764,10	-
Belanja Hibah	8.699,00	17.027,15	32.761,79	39.432,25	-	17,88
Belanja Bantuan Sosial	1.089,94	1.637,60	8.104,59	1.509,78	4.682,58	116,17
Belanja Modal	262.835,99	287.958,99	204.959,07	159.563,47	103.469,96	(8,97)
Belanja Tanah	4.706,94	3.132,34	11.536,84	14.915,72	-	187,99
Belanja Peralatan dan Mesin	78.932,73	42.316,59	45.757,60	29.913,60	21.361,90	(8,72)
Belanja Bangunan dan Gedung	30.324,66	32.498,24	21.975,85	17.810,40	32.118,58	56,19
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	140.333,51	198.914,38	114.492,43	85.778,70	49.417,59	(12,80)
Belanja Aset Tetap Lainnya	8.538,15	11.097,45	11.196,35	11.145,06	571,88	(1,90)
Belanja Tidak Terduga	1.887,10	5.611,26	5.057,86	54.706,88	55.765,91	250,33
Belanja Tak Terduga	1.887.102.062,00	5.611.256.899,00	5.057.857.000,00	54.706.876.839,28	55.765.947.094,00	250,33
Belanja Transfer	874,21	874,21	866,51	-	-	(20,18)
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	874,21	874,21	866,51	-	-	(20,18)
Surplus (Defisit)	(64.478,16)	(15.596,59)	70.294,24	(21.738,21)	21.483,79	(220,30)



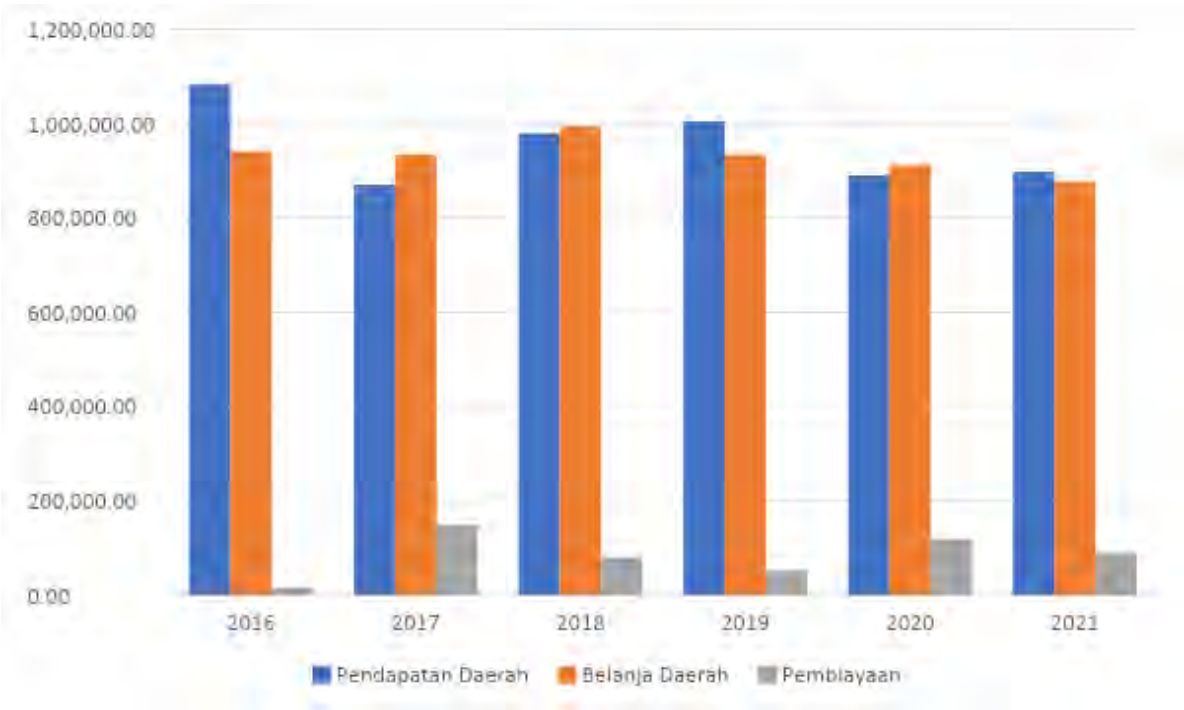
URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Pembiayaan						
Penerimaan Pembiayaan	158.256,06	85.512,69	65.646,92	122.522,51	97.446,67	22,78
Penggunaan SILPA Tahun Lalu	158.256,06	85.004,45	65.646,92	122.522,51	97.446,67	22,80
SILPA BOS Tahun Lalu	-	508,23	-	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Pinjaman - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	8.773,45	4.269,17	13.418,65	3.337,64	8.270,08	30,19
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8.723,22	4.269,17	-	3.337,64	8.270,08	-
Pembayaran Pokok Pinjaman - Lembaga Keuangan Bank	50,23	-	13.418,65	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman - Lainnya	-	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Neto	149.482,61	81.243,51	52.228,27	119.184,87	89.176,58	175,58
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	85.004,45	65.646,92	122.522,51	97.446,67	110.660,38	2,13

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)



3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan, aspek belanja, dan aspek pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kinerja pelaksanaan APBD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Pematang Siantar dari tahun ke tahun naik turun secara fluktuatif, seperti terlihat pada Gambar 3.1 berikut.



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)

Gambar 3.1
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (dalam jutaan)



3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas. Berikut disajikan jenis, objek dan rincian objek Pendapatan daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 :

Tabel 3.2.
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Kode	PP No. 58 Tahun 2005	Kode	PP No. 12 Tahun 2019
1.	Pendapatan Daerah	1.	Pendapatan Daerah
1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.1.1.	Pajak Daerah	1.1.1.	Pajak Daerah
1.1.2.	Retribusi Daerah	1.1.2.	Retribusi Daerah
1.1.3.	Lain-Lain PAD yang Sah	1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah
1.2.	Dana Perimbangan	1.2.	Pendapatan Transfer
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.2.1.2.	Dana Alokasi Umum
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.2.1.3.	Dana Alokasi Khusus
1.3.1.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	1.2.1.4.	Dana Insentif Daerah
1.3.2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.2.1.5.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.3.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	1.2.1.6.	Dana desa
1.3.4.	Pendapatan Lainnya	1.2.2.	Transfer Antar Daerah
1.3.5.	Pendapatan Hibah	1.2.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil
		1.2.2.2.	Bantuan Keuangan
		1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
		1.3.1.	Hibah
		1.3.2.	Dana Darurat
		1.3.3.	Lain-Lain Pendapatan

Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun relatif rendah. Pendapatan Daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,07% per tahun, yaitu dari Rp1.082.765.291.218,78 pada tahun 2016 menjadi Rp898.120.429.202,90 tahun



2021 dengan tingkat realisasi pendapatan daerah selama tahun 2017-2021 dibandingkan dengan target secara rata-rata mencapai 82,22%.

Laju pertumbuhan yang rendah tersebut dipengaruhi 2 perubahan, penurunan kewenangan daerah dan dampak kebijakan pemotongan DAU. Pengurangan kewenangan daerah karena implementasi UU 23 tahun 2004 mengakibatkan penurunan jumlah alokasi DAU dari Pemerintah Pusat tahun 2017. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 dengan mengurangi Dana Perimbangan, mengakibatkan tahun 2020 terjadi penurunan Pendapatan Daerah dari Rp1.005.078.666.256,76 tahun 2019 menjadi Rp890.248.009.809,42 tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan penerimaan DAU dan PAD, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak banyak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 pendapatan daerah naik menjadi Rp898.120.429.202,90 atau sebesar 0,88%.

Tabel 3.3.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar
Tahun 2017-2021

Tahun	Target Pendapatan (Rp.)	Realisasi Pendapatan (Rp.)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	1.056.938.986.464,10	1.082.765.291.218,78	102,44		
2017	934.906.237.858,40	869.993.438.966,23	93,06	-11,55	-19,65
2018	977.912.719.161,00	978.915.421.073,78	100,10	4,60	12,52
2019	1.038.184.986.262,98	1.005.078.666.256,76	96,81	6,16	2,67
2020	895.901.102.120,00	890.248.009.809,42	99,37	-13,71	-11,43
2021	863.835.064.316,00	898.120.429.202,90	103,97	-3,58	0,88

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)

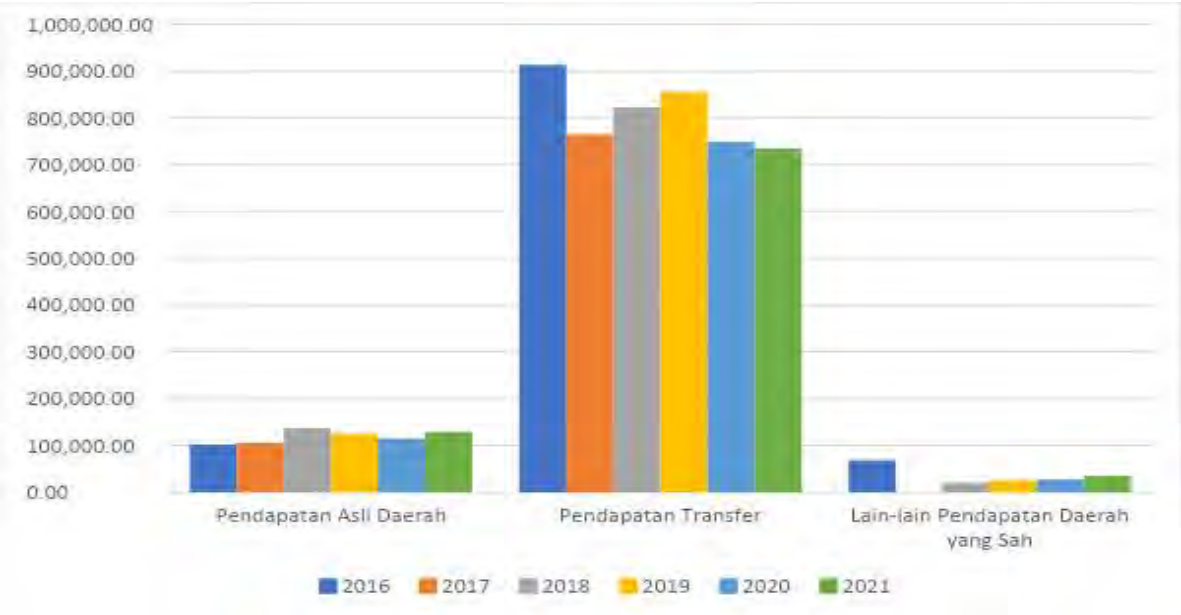
Secara umum laju pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Pematang Siantar tahun 2017-2021 berada dalam posisi negatif dengan rata-rata -6,30. Penurunan terjadi di tahun 2020, dan penurunan sangat significant terjadi pada tahun 2021 akibat dari pandemi *Covid-19*. Rata-rata realisasi pendapatan tahun 2017-2021 hanya tercapai 78,30%, di mana pada tahun 2017, 2019, 2020 dan tahun 2021 realisasi pendapatan tidak mencapai target, tapi pada tahun 2016 dan 2018 realisasi pendapatan melebihi angka 100%. Salah satu penyebab tingkat pencapaian target tidak tercapai adalah dana perimbangan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk diprediksi pencapaiannya disamping tidak tercapainya target pendapatan asli daerah. Untuk itu, beberapa rekomendasi untuk peningkatan pendapatan asli daerah adalah:

1. Mengoptimalkan peran dan kontribusi Perusahaan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah;



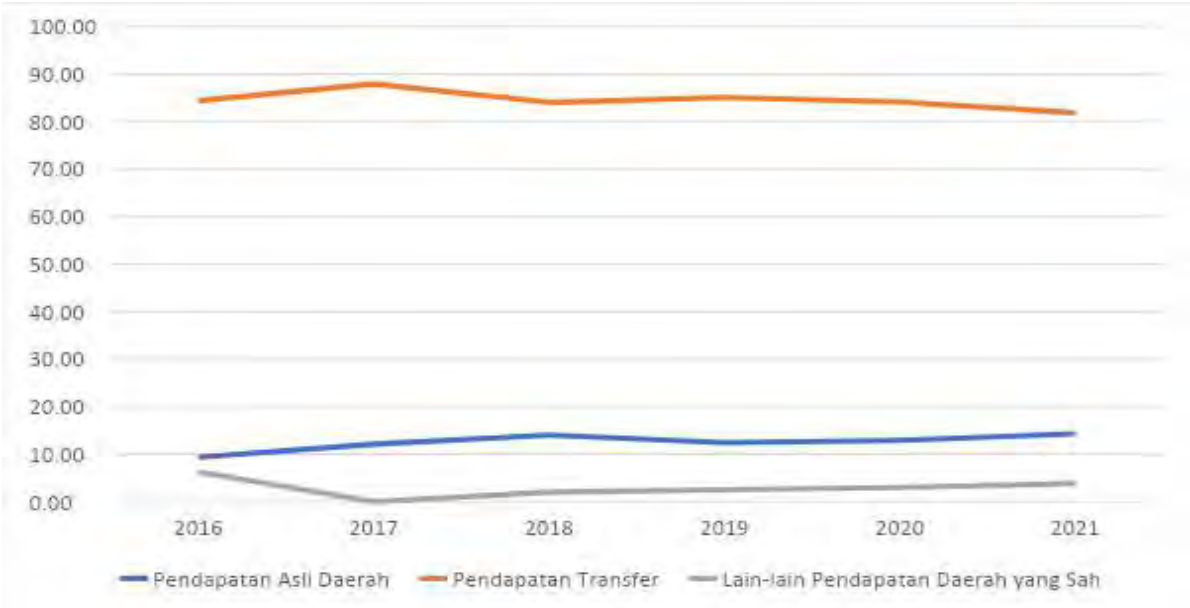
- 2. Mengoptimalkan aktualisasi potensi pendapatan daerah pada beberapa objek pajak dan retribusi daerah;
- 3. Mengoptimalkan penegakan hukum melalui peraturan daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Berikut disajikan grafik realisasi Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021.



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)

Gambar 3.2.
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar
Tahun 2017-2021 (Rp. Juta)



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)

Gambar 3.3.
Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar
Tahun 2017-2021 (%)



Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2017-2021 didominasi oleh sumber dana Pendapatan Transfer dengan proporsi rata-rata sebesar 84,52%, disusul Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,52% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 2,96%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum kokoh, karena tingkat ketergantungan terhadap sumber Pendapatan Transfer dari Pusat masih sangat tinggi. Berikut ini disajikan secara lengkap realisasi Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 :



Tabel 3.4.
Realisasi Pendapatan Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (sesuai PP 12 Tahun 2019)

URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) (2017-2021)
	2017	2018	2019	2020	2021	
PENDAPATAN DAERAH	869.993.438.966,23	978.915.421.073,78	1.005.078.666.256,76	890.248.009.809,42	898.120.429.202,90	(3,00)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	105.445.993.204,23	137.052.839.192,78	125.018.502.647,54	114.671.755.373,57	128.588.193.819,90	5,77
Pajak Daerah	46.253.296.639,20	46.460.214.440,08	53.802.273.943,00	47.625.224.492,88	59.267.661.331,56	11,73
Retribusi Daerah	6.716.916.980,00	10.998.225.550,00	11.183.361.150,00	8.920.457.500,00	9.225.642.008,00	7,18
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.162.494.442,00	11.209.961.923,00	9.566.070.942,55	9.127.841.676,00	8.333.087.739,00	(6,89)
Lain-lain PAD yang Sah	42.313.285.143,03	68.384.437.279,70	50.466.796.611,99	48.998.231.704,69	51.761.802.741,34	6,05
Pendapatan Transfer	764.547.445.762,00	822.000.324.272,00	854.741.873.651,00	748.712.881.456,00	734.719.678.933,00	(3,81)
<i>Transfer Pemerintah Pusat</i>	<i>727.984.049.610,00</i>	<i>796.804.963.671,00</i>	<i>808.453.423.363,00</i>	<i>712.231.459.177,00</i>	<i>690.917.607.553,00</i>	(1,56)
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.694.258.173,00	25.332.212.286,00	19.548.529.650,00	28.182.906.083,00	37.011.836.441,00	8,01
Dana Alokasi Umum	583.106.207.000,00	583.106.207.000,00	616.197.680.000,00	565.804.258.000,00	556.772.164.000,00	(1,17)
Dana Alokasi Khusus	119.183.584.437,00	188.366.544.385,00	150.268.899.713,00	103.324.466.094,00	97.133.607.112,00	(1,45)
Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	22.438.314.000,00	14.919.829.000,00	-	-
<i>Transfer Antar Daerah</i>	<i>36.563.396.152,00</i>	<i>25.195.360.601,00</i>	<i>46.288.450.288,00</i>	<i>36.481.422.279,00</i>	<i>43.802.071.380,00</i>	(5,02)
Pendapatan Bagi Hasil	36.563.396.152,00	25.195.360.601,00	46.288.450.288,00	36.481.422.279,00	43.802.071.380,00	(5,02)
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	19.862.257.609,00	25.318.289.958,22	26.863.372.979,85	34.812.556.450,00	-
Hibah	-	-	25.318.289.958,22	1.488.000.000,00	1.746.000.000,00	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan	-	19.862.257.609,00	-	25.375.372.979,85	33.066.556.450,00	-

Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan Pendapatan Daerah mengalami kenaikan dengan angka 3,00%, Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 12,14% dari tahun 2020 dengan rata-rata laju pertumbuhan yang positif sebesar 5,77%. Kenaikan PAD bersumber dari kenaikan Pendapatan Pajak Daerah sebesar 24,45% dan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 3,42%.

3.1.1.1.1. Analisis Rasio Pendapatan Daerah

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis ini dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja pendapatan dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Dalam kajian ini digunakan rasio kemandirian daerah dan derajat desentralisasi.

A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah di harapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ratio Kemandirian = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat}}$

Tabel 3.5.
Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Ratio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber : Halim (2007)

Menurut Hersey dan Blanchard (dalam Halim 2007 :169) dikemukakan hubungan tentang pemerintahan pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan



undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu :

1. Pola hubungan Instruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola hubungan konsultatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan etonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
4. Pola hubungan delegatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Tabel 3.6.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Pendapatan Transfer (Rp)	Ratio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
2017	105.445.993.204,23	764.547.445.762,00	13,79
2018	137.052.839.192,78	822.000.324.272,00	16,67
2019	125.018.502.647,54	854.741.873.651,00	14,63
2020	114.671.755.373,57	748.712.881.456,00	15,32
2021	128.588.193.819,90	734.719.678.933,00	17,50
RATA-RATA			14,84

Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)

Rasio kemandirian keuangan Daerah Kota Pematang Siantar masuk dalam kategori Rendah Sekali atau berada dalam Pola Hubungan Instruktif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).

B. Rasio Desentralisasi Fiskal

Dengan prinsip otonomi daerah, undang-undang mewajibkan daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan prinsip



peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah dalam hal ini dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam pengelolaan urusan rumah tangganya sendiri, yaitu dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif di sisi penerimaan dan peranannya dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. PAD hanya merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan di samping penerimaan lainnya berupa bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU, DAK dan lain-lain penerimaan yang sah. Mencermati struktur hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat diketahui dengan menggunakan indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Selanjutnya ukuran ini dinyatakan sebagai Rasio Derajat Desentralisasi fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal dapat digunakan sebagai indikator kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan. Pelaksanaan desentralisasi dalam perencanaan dan pembangunan di daerah terutama dalam hubungannya dengan tingkat kemandirian suatu daerah akan membawa konsekuensi terhadap posisi kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dan pembiayaan penyelenggaraan pembangunan di daerah. Karena itu untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonominya terutama dalam hal keuangan daerah, dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal sebagai ukuran. Derajat desentralisasi fiskal diukur dengan membandingkan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah, rasio dana transfer pusat terhadap total penerimaan daerah, dan rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah.

Berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Fisipol UGM bekerjasama dengan Badan Litbang Depdagri pada tahun 1991 (Tan, 2010) tolak ukur derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut :

1. Nilai rasio antara 0,00% s/d 10% dikategorikan kriteria sangat kurang
2. Nilai rasio antara 10,1 s/d 20% dikategorikan kriteria kurang
3. Nilai rasio antara 20,1% s/d 30% dikategorikan kriteria sedang
4. Nilai rasio antara 30,1% s/d 40% dikategorikan kriteria cukup
5. Nilai rasio antara 40,1% s/d 50% dikategorikan kriteria baik
6. Nilai rasio di atas 50% dikategorikan sangat baik.



Tabel 3.7.
Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Derajat Desentralisasi Fiskal (%)
2017	105.445.993.204,23	869.993.438.966,23	12,12
2018	137.052.839.192,78	978.915.421.073,78	14,00
2019	125.018.502.647,54	1.005.078.666.256,76	12,44
2020	114.671.755.373,57	890.248.009.809,42	12,88
2021	128.588.193.819,90	898.120.429.202,90	14,32
RATA-RATA			12,52

Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)

Dalam rentang waktu tahun 2017-2021, derajat desentralisasi fiskal tertinggi berada di angka 14,32% di tahun 2021 dan terendah di angka 9,38% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Kota Pematang Siantar untuk menghasilkan PAD masih kurang bila melihat rata-rata derajat desentralisasi fiskal di angka 12,52% yang mengindikasikan bahwa besarnya PAD masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih relatif rendah. Ketergantungan pembiayaan daerah Kota Pematang Siantar terhadap pusat dapat pula dilihat dari rasio dana transfer Pusat terhadap total penerimaan daerah. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya penggalan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah sehingga ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat maupun provinsi tidak terlalu besar. Beberapa rekomendasi untuk peningkatan pendapatan asli daerah adalah:

1. Mengoptimalkan peran dan kontribusi Perusahaan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah;
2. Mengoptimalkan aktualisasi potensi pendapatan daerah pada beberapa objek pajak dan retribusi daerah;
3. Mengoptimalkan penegakan hukum melalui peraturan daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi



ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (*Performance Budgeting*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Belanja daerah sampai dengan tahun 2021 dikelompokkan kedalam dua kelompok belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung, namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 secara nomenklatur sudah berubah, seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.8.
Sumber-Sumber Belanja Daerah

Kode	PP No. 58 Tahun 2005	Kode	PP No. 12 Tahun 2019
2.	Belanja Daerah	2.	Belanja Daerah
2.1.	Belanja Tidak Langsung	2.1.	Belanja Operasi
2.1.1.	Belanja Pegawai	2.1.1.	Belanja Pegawai
2.1.2.	Belanja Hibah	2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa
2.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	2.1.3.	Belanja Bunga
2.1.4.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.1.4.	Belanja Subsidi
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.1.5.	Belanja Hibah
2.1.6.	Belanja Tidak Terduga	2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial
2.2.	Belanja Langsung	2.2.	Belanja Modal
2.2.1.	Belanja Pegawai	2.3.	Belanja Tidak Terduga
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.4.	Belanja Transfer



Kode	PP No. 58 Tahun 2005	Kode	PP No. 12 Tahun 2019
2.2.3.	Belanja Modal	2.4.1.	Belanja Bagi Hasil
		2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan

Memperhatikan hal tersebut agar terjamin keterukuran yang linier, maka kami telah menkonversinya ke dalam struktur sesuai dengan regulasi terbaru. Perkembangan realisasi terkonversi belanja daerah Kota Pematang Siantar tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut.



Tabel 3.9.
Realisasi Belanja Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
BELANJA DAERAH	934.471.598.872,85	994.512.015.480,57	934.784.426.978,51	911.986.217.295,02	876.636.634.255,31	(1,30)
Belanja Operasi	668.874.303.134,85	700.067.556.993,55	723.900.986.274,07	697.715.868.897,03	717.400.766.739,12	(0,44)
Belanja Pegawai	493.744.781.911,00	501.050.995.543,00	504.672.885.773,75	480.303.680.982,25	442.246.791.690,08	(5,10)
Belanja Barang dan Jasa	165.337.430.054,73	180.305.414.854,13	178.361.713.707,71	176.470.153.656,90	234.707.300.871,23	10,60
Belanja Bunga	3.147.969,12	46.394.596,42	-	-	-	-
Belanja Hibah	8.699.000.000,00	17.027.152.000,00	32.761.793.992,61	39.432.251.257,88	35.764.096.177,81	-
Belanja Bantuan Sosial	1.089.943.200,00	1.637.600.000,00	8.104.592.800,00	1.509.783.000,00	4.682.578.000,00	116,17
Belanja Modal	262.835.986.784,00	287.958.994.695,02	204.959.071.624,44	159.563.471.558,71	103.469.956.422,19	(8,97)
Belanja Tanah	4.706.937.700,00	3.132.338.960,00	11.536.840.000,00	14.915.716.000,00	-	187,99
Belanja Peralatan dan Mesin	78.932.728.473,00	42.316.586.702,00	45.757.603.557,30	29.913.600.937,76	21.361.904.847,00	(8,72)
Belanja Bangunan dan Gedung	30.324.660.529,00	32.498.240.058,06	21.975.847.563,98	17.810.396.676,52	32.118.584.550,51	56,19
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	140.333.505.342,00	198.914.382.379,96	114.492.430.606,70	85.778.702.675,31	49.417.585.124,68	(12,80)
Belanja Aset Tetap Lainnya	8.538.154.740,00	11.097.446.595,00	11.196.349.896,46	11.145.055.269,12	571.881.900,00	(1,90)
Belanja Tidak Terduga	1.887.102.062,00	5.611.256.899,00	5.057.857.000,00	54.706.876.839,28	55.765.911.094,00	250,33
Belanja Tak Terduga	1.887.102.062,00	5.611.256.899,00	5.057.857.000,00	54.706.876.839,28	55.765.911.094,00	250,33
Belanja Transfer	874.206.892,00	874.206.893,00	866.512.080,00	-	-	(20,18)
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	874.206.892,00	874.206.893,00	866.512.080,00	-	-	-

Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)



Selama periode tahun 2017-2021, realisasi belanja belum mencapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari data target dan realisasi belanja daerah sebagai berikut.

Tabel 3.10.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

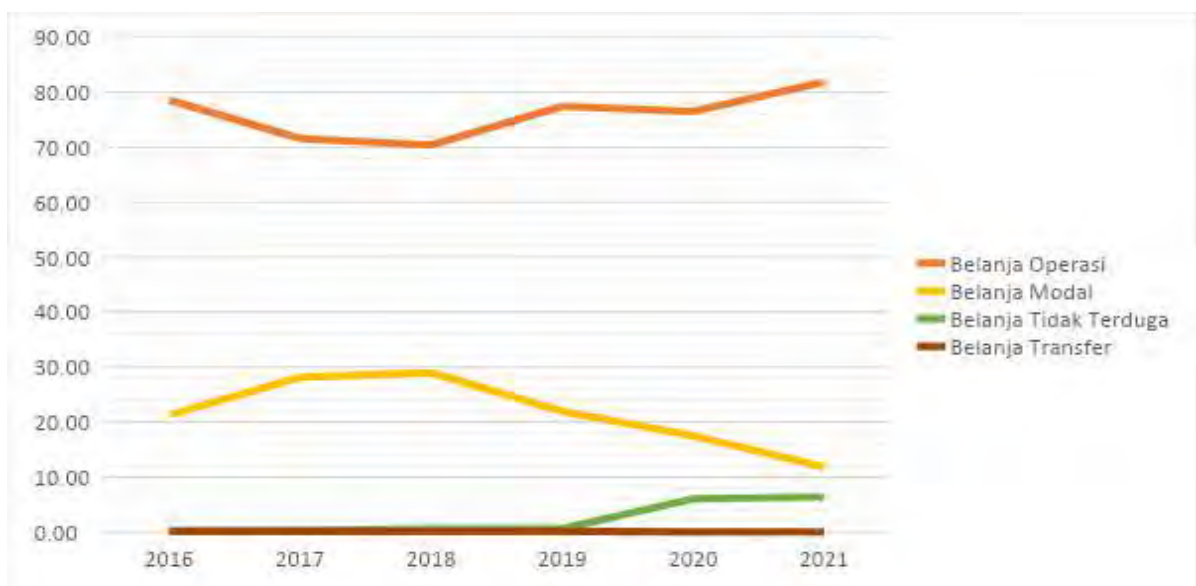
Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Selisih
2017	1.083.339.076.573,96	934.471.598.872,85	86,26	(148.867.477.701,11)
2018	997.384.585.393,82	994.512.015.480,57	99,71	(2.872.569.913,25)
2019	1.090.413.256.601,00	934.784.426.978,51	85,73	(155.628.829.622,49)
2020	1.015.004.962.679,27	911.986.217.295,02	89,85	(103.018.745.384,25)
2021	953.011.645.182,00	876.636.634.255,31	91,99	(76.375.010.926,69)

Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian realisasi belanja tahun 2017-2021 tidak ada yang mencapai angka 100% dengan rata-rata capaian sebesar 90,20%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program dan kegiatan yang dilakukan masih belum optimal yang ditunjukkan dengan capaian realisasi keuangan yang tidak mencapai target, sehingga tingkat pengendalian belanja daerah masih harus ditingkatkan.

Bila dilihat dari laju pertumbuhan, dalam kurun 6 (enam) tahun terakhir tahun 2017-2021 realisasi belanja daerah mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan -1,30% pertahun dari Rp. 940.141.429.606,79 di tahun 2016 menjadi Rp. 876.636.634.255,31 di tahun 2021. Fluktuasi belanja operasi sangat dipengaruhi oleh meningkatnya belanja hibah dan belanja bantuan sosial dan menurunnya belanja pegawai. Belanja Modal mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan -8,97% pertahun dari Rp.199.557.080.622,00 di tahun 2016 menjadi Rp103.469.956.422,19 di tahun 2021. Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan yang sangat tinggi dengan rata-rata 250,33% pertahun dari Rp.1.044.850.000,00 di tahun 2016 menjadi Rp.55.765.911.094,00 di tahun 2021. Penurunan sebesar -20,18% pertahun ditemukan pada Belanja Transfer dari Rp.874.206.004,00 di tahun 2016 dan menjadi Rp 0,00 di tahun 2021.

Berikut disajikan kontribusi dari masing-masing komponen belanja terhadap total belanja daerah :



Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)

Gambar 3.4.
Peranan Komponen Belanja terhadap Total Belanja Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

Jika dilihat lebih rinci, Belanja Operasi pada kurun waktu tersebut mengalami sedikit fluktuasi dengan rata-rata penurunan mencapai -0,44,% pertahun dari Rp738.665.292.092,79 di tahun 2016 menjadi Rp717.400.766.739,12 di tahun 2021.

Pada pos Belanja Modal yang merupakan alokasi pengeluaran untuk perolehan Asset Tetap dan Asset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, mengalami peningkatan pada tahun 2016-2018, perlahan menurun pada tahun 2019 dan mencapai titik terendah di tahun 2021 dengan rata-rata penurunan -8,97% Kenaikan yang sangat tinggi pada pos Belanja Tak Terduga yang pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp68.982.637.343,65 dengan realisasi sebesar Rp54.706.876.839,28 atau 79,31% dari anggaran. Realisasi belanja tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp49.649.019.839,28 atau 981,62% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) pada TA 2019 sebesar Rp5.057.857.000.00. Pada tahun 2021, pos Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp59.244.198.298,00 dengan realisasi sebesar Rp55.765.911.094,00 atau 94,13%.

Realisasi belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam dan sosial, pengembalian atas kelebihan penerimaan, pengeluaran tidak terduga lainnya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Pematang Siantar TA. 2021 serta penanganan bencana non-alam pandemi Covid-19. Belanja Tak Terduga TA 2021 yang diperuntukkan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dianggarkan sebesar Rp40.656.474.388,00 dengan realisasi sebesar Rp35.611.181.094,00 atau 87.59%. BTT Penanganan Covid-19



dianggarkan pada PPKD, namun realisasi pelaksanaan kegiatannya diselenggarakan oleh 10 SKPD teknis terkait dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.11.
Realisasi BTT Penanganan Covid-19 TA. 2021

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan (Dinkes)	
	a. Dinkes	2.544.858.949,00
	b. RSUD Djasamen Saragih	11.365.034.405,00
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)	1.212.254.364,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	14.249.376.996,00
4	Dinas Perhubungan (Dishub)	567.286.700,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	1.507.215.000,00
6	Dinas Ketenaga Kerjaan	125.615.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)	553.000.000,00
8	Kecamatan Siantar Selatan	303.874.000,00
9	Dinas Koperasi dan UKM (DKUKM)	424.716.000,00
10	Kecamatan Siantar Marihat	318.702.180,00
11	Kecamatan Siantar Utara	587.390.800,00
12	Kecamatan Siantar Barat	555.633.300,00
13	Kecamatan Siantar Timur	428.286.000,00
14	Kecamatan Siantar Martoba	379.116.400,00
15	Kecamatan Siantar Sitalasari	230.522.500,00
16	Kecamatan Siantar Marimbun	258.298.500,00
	Jumlah	35.611.181.094,00

Belanja Transfer yang dianggarkan sebesar Rp0,00 pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan karena belanja bantuan yang diperuntukkan kepada parpol, dianggarkan dan direalisasikan pada pos belanja hibah.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan



dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD.

Kondisi penerimaan pembiayaan daerah di Kota Pematang Siantar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah untuk penyertaan modal (Investasi) pemerintah, pembayaran pokok utang dan investasi dana bergulir bagi pelaku UKM.

Secara umum tidak terjadi perubahan pada Pembiayaan Daerah dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut disajikan data pengelolaan Pembiayaan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021.



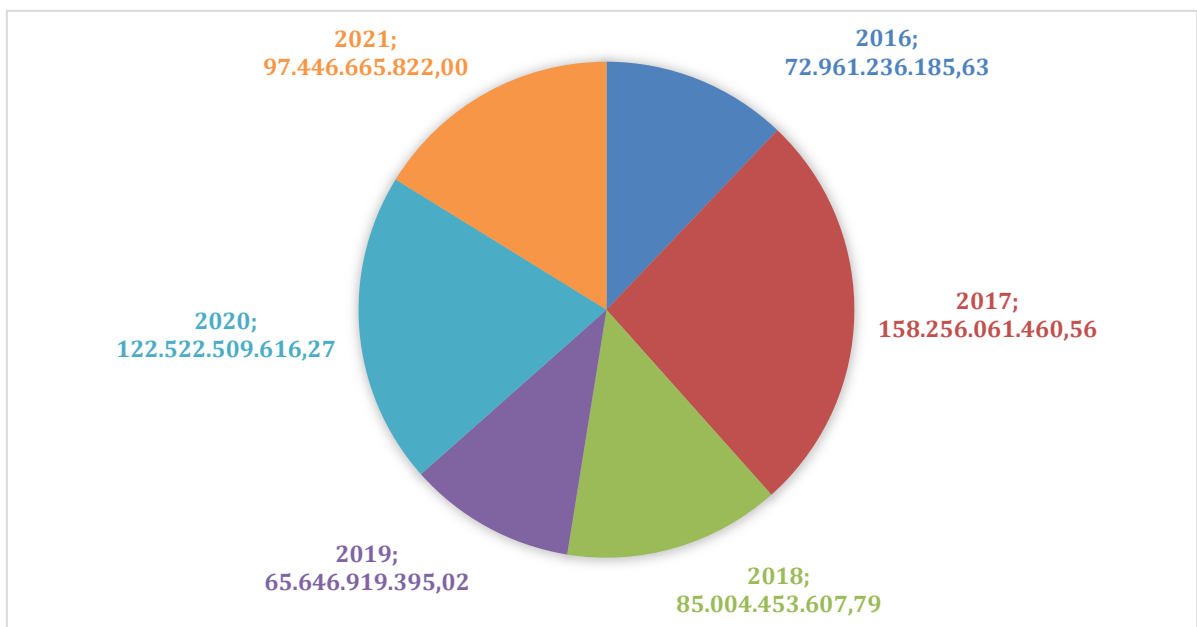
Tabel 3.12.
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

URAIAN	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penerimaan Pembiayaan	158.256.061.460,56	85.512.687.888,81	65.646.919.395,02	122.522.509.616,27	97.446.665.822,67
Penggunaan SILPA Tahun Lalu	158.256.061.460,56	85.004.453.607,79	65.646.919.395,02	122.522.509.616,27	97.446.665.822,67
SILPA BOS Tahun Lalu	-	508.234.281,02	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Pinjaman - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	8.773.447.946,58	4.269.174.087,00	13.418.649.057,00	3.337.636.308,00	8.270.084.956,00
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8.723.222.745,00	4.269.174.087,00	-	3.337.636.308,00	8.270.084.956,00
Pembayaran Pokok Pinjaman - Lembaga Keuangan Bank	50.225.201,58	-	13.418.649.057,00	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman - Lainnya	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	149.482.613.513,98	81.243.513.801,81	52.228.270.338,02	119.184.873.308,27	89.176.580.866,67

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)



Selama tahun 2017-2021, realisasi pembiayaan daerah cenderung meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2021 mencapai Rp 89.176.580.866,67, atau secara rata-rata meningkat 175,58%. Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (Silpa) selama periode tersebut secara rata-rata tumbuh sebesar 22,80%. Kondisi tersebut disebabkan diantaranya berasal dari adanya pelampuan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan. Perkembangan SiLPA di Kota Pematangsintar pada tahun 2017-2021 menunjukkan angka yang fluktuatif dari sebesar Rp72.961.236.185,63 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp97.446.665.822,00 pada tahun 2021, angka silpa tertinggi ada pada tahun 2020 sebesar Rp122.522.509.616,27. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik sehingga perlu menjadi perhatian.



Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)

Gambar 3.5.
Perkembangan SiLPA Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

3.1.2. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. **Neraca** daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan



aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan Ekuitas suatu pemerintah daerah. **Aset** memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. **Kewajiban** memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya membutuhkan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. **Ekuitas** adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Neraca daerah Kota Pematang Siantar tahun 2015–2021 sebagai berikut.



Tabel 3.13.
Neraca Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) (2017-2021)
	2017	2018	2019	2020	2021	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	84.796.757.982,10	65.199.369.055,43	119.192.661.447,81	89.839.892.341,49	96.481.993.062,59	(0,40)
Kas di Bendahara Pengeluaran	84.300.170,00	-	24.080.000,00	-	3.800.000,00	334,92
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.398.850,00	-	76.728.100,00	88.200.982,00	9.757.383,00	(13,84)
Kas di Bendahara Penerimaan	3.015.000,00	31.338.479,00	14.421.610,00	72.669.610,00	14.421.610,00	(26,83)
Kas di BLUD	120.380.455,69	76.536.424,57	2.064.310.887,83	7.333.980.732,83	13.997.619.805,83	561,81
Kas di Bendahara BOS	508.234.281,02	371.013.915,02	1.241.457.280,63	513.200.748,35	176.962.945,84	16,69
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	0,00	
Piutang Pajak	33.127.322.974,89	38.994.692.958,55	36.789.085.172,43	37.394.575.240,03	40.300.648.122,47	4,73
Piutang Retribusi	2.047.048.901,00	1.883.448.901,00	1.813.448.901,00	1.797.448.901,00	1.789.448.901,00	(0,28)
Piutang Transfer	11.326.589.955,60	22.427.109.790,42	11.572.385.615,30	14.598.496.942,60	0,00	9,48
Penyisihan Piutang	(34.518.625.299,28)	(53.558.819.144,47)	(60.456.590.794,71)	(61.003.219.377,04)	(46.907.523.854,10)	9,81
Beban Dibayar Dimuka	300.709.960,58	21.500.000,00	157.598.099,30	14.500.000,00	121.510.666,67	265,71
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	8.086.240.906,28	10.429.475.720,90	17.000.626.673,71	17.000.626.673,71	18.036.617.658,97	19,62
Piutang Lainnya	3.606.536.527,40	25.600.841.160,74	26.686.042.593,11	27.204.811.382,29	47.036.134.988,50	155,13
Persediaan	10.066.700.164,54	12.009.520.320,41	11.609.744.877,00	13.831.312.556,24	13.050.704.665,99	17,51
JUMLAH ASET LANCAR	119.560.610.829,82	123.486.027.581,58	167.786.000.463,41	148.686.496.733,50	184.112.095.956,76	3,38
INVESTASI JANGKA PANJANG						
<i>Investasi Non Permanen</i>						
Investasi Non Permanen Lainnya	7.548.041.010,00	7.548.041.010,00	7.548.041.010,00	7.548.041.010,00	7.548.041.010,00	0,00
Jumlah Investasi Non Permanen	7.548.041.010,00	7.548.041.010,00	7.548.041.010,00	7.548.041.010,00	7.548.041.010,00	0,00



URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) (2017-2021)
	2017	2018	2019	2020	2021	
<i>Investasi Permanen</i>						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	449.948.030.471,00	449.813.930.180,25	468.153.675.357,00	471.294.819.705,00	487.837.293.872,00	1,71
Jumlah Investasi Permanen	449.948.030.471,00	449.813.930.180,25	468.153.675.357,00	471.294.819.705,00	487.837.293.872,00	1,71
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	457.496.071.481,00	457.361.971.190,25	475.701.716.367,00	478.842.860.715,00	495.385.334.882,00	1,68
ASET TETAP						
Tanah	1.424.700.897.471,00	1.431.821.483.788,75	1.443.390.976.098,75	1.452.902.471.635,75	1.452.902.471.635,75	(0,62)
Peralatan dan Mesin	270.444.728.292,00	293.250.577.630,00	332.091.906.183,46	365.696.540.496,22	389.199.843.769,22	13,39
Gedung dan Bangunan	399.315.630.382,00	431.633.763.955,00	473.793.888.499,64	493.316.831.731,36	529.161.856.370,38	3,90
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.127.373.384.918,00	1.269.090.688.667,63	1.407.442.193.526,67	1.525.378.271.669,68	1.410.134.154.392,80	8,53
Aset Tetap Lainnya	40.580.187.362,00	41.703.434.235,00	45.353.106.865,00	47.806.916.244,00	46.297.822.484,00	1,29
Konstruksi dalam Pengerjaan	19.349.825.749,00	54.902.141.924,05	34.419.708.393,90	18.871.436.298,51	19.872.095.352,90	61,81
Akumulasi Penyusutan	(942.464.165.677,00)	(1.040.624.223.533,00)	(1.152.535.685.705,00)	(1.209.835.508.251,00)	(1.257.524.740.062,29)	7,05
JUMLAH ASET TETAP	2.339.300.488.497,00	2.481.777.866.667,43	2.583.956.093.862,42	2.694.136.959.824,52	2.590.043.503.942,76	2,83
ASET LAINNYA						
Piutang BOT (Jangka Panjang)	596.112.000,00	579.240.000,00	500.436.360,00	451.360.320,00	399.532.280,00	(9,06)
Tuntutan Ganti Rugi	6.007.736.500,00	6.007.736.500,00	6.007.736.500,00	6.007.736.500,00	41.535.432.118,08	118,27
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	27.045.134.000,00	27.045.134.000,00	27.045.134.000,00	27.045.134.000,00	27.045.134.000,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	3.313.168.700,00	3.508.968.700,00	3.661.978.700,00	3.661.978.700,00	3.512.378.700,00	2,48
Aset Kondisi Rusak Berat	3.087.098.670,00	1.931.664.507,92	1.560.861.515,00	1.431.342.941,00	1.427.925.861,00	(22,55)
Aset Lain-lain	4.377.497.234,00	4.312.000.000,00	4.312.000.000,00	4.312.000.000,00	135.618.874.881,00	606,93
JUMLAH ASET LAINNYA	44.426.747.104,00	43.384.743.707,92	43.088.147.075,00	42.909.552.461,00	209.539.277.840,08	75,67
JUMLAH ASET	2.960.783.917.911,82	3.106.010.609.147,18	3.270.531.957.767,83	3.364.575.869.734,02	3.479.080.212.621,60	3,40
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek						



URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) (2017-2021)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.398.850,00	-	-	386.856.982,00	9.757.383,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	21.208.627.248,96	12.962.398.818,47	16.394.587.388,67	7.718.873.407,47	0,00	(33,06)
Utang Belanja	4.748.560.860,00	7.983.404.889,00	7.347.421.609,00	16.724.726.511,00	22.533.241.571,00	44,57
Utang Bunga	4.665.938.578,46	-	-	-	0,00	(20,02)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	0,00	(20,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	58.044.978.946,77	9.786.278.973,75	4.875.450.376,91	5.387.611.698,40	3.355.502.057,50	29,24
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	88.673.504.484,19	30.732.082.681,22	28.617.459.374,58	30.218.068.598,87	25.898.501.011,50	5,01
Kewajiban Jangka Panjang						
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	-	-	-	-	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	88.673.504.484,19	30.732.082.681,22	28.617.459.374,58	30.218.068.598,87	25.898.501.011,50	5,01
EKUITAS	2.872.110.413.427,63	3.075.278.526.465,96	3.241.914.498.393,25	3.334.357.801.135,15	3.453.181.711.610,10	3,57
JUMLAH EKUITAS	2.872.110.413.427,63	3.075.278.526.465,96	3.241.914.498.393,25	3.334.357.801.135,15	3.453.181.711.610,10	3,57
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.960.783.917.911,82	3.106.010.609.147,18	3.270.531.957.767,83	3.364.575.869.734,02	3.479.080.212.621,60	3,72

Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)



Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Pada Tahun 2021, Kota Pematang Siantar memiliki aset senilai Rp3.479.080.212.621,60 dengan tingkat pertumbuhan 3,72 % per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada Tahun 2021 mencapai Rp2.590.043.503.942,76 dan rata-rata tumbuh 2,83 % per tahun. Aset tetap ini meliputi 74,45% dari seluruh aset Pemerintah Kota Pematang Siantar.

Pada aset lancar, terdapat kecenderungan naik dan turun secara fluktuatif setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan aset lancar pada periode 2017-2021 adalah sebesar 3,38% per tahun.

Komponen investasi jangka panjang, pada periode yang sama, untuk sub komponen investasi jangka panjang non permanen tidak berubah dari tahun 2016. Investasi Non Permanen ditujukan untuk Pengelolaan dana bergulir diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dikelola pada UPTD Dinas Koperasi dan UMKM. Sementara itu pada sub komponen investasi jangka panjang permanen terdapat pertumbuhan positif yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 1,71%. Penyertaan modal diberikan pada PT. Bank Sumut, PDAM Tirta Uli, PD Pasar dan Pasar Horas dan PD Pembangunan dan Aneka Usaha.

Komponen aset tetap cenderung stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,83% per tahun. Pada tahun 2016 terjadi pengurangan atas aset tetap tanah dengan luas 171.589 m² senilai Rp82.368.080.600,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengurangan aset tetap tanah berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengalihan kewenangan dan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Pematang Siantar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sesuai Berita Acara Serah Terima Aset dan Dokumen SMA/SMK Negeri Kota Pematang Siantar dari Pemerintah Kota Pematang Siantar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 028/13047/2017 dan Nomor 032/1046/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 senilai Rp78.267.207.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah), Jl. Parsoburan Kelurahan Sukamakmur Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang



- Siantar pada SMA Negeri 1, dengan luas 15.618 m² senilai Rp5.551.137.000,00
- b. Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah), Jl. Patuan Anggi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar pada SMA Negeri 2, dengan luas 17.000 m² senilai Rp6.800.000.000,00
 - c. Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah), Jl. Pane Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar pada SMA Negeri 3, dengan luas 5.405 m² senilai Rp2.162.000.000,00
 - d. Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah), Jl. Pattimura Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar pada SMA Negeri 4, dengan luas 22.711 m² senilai Rp48.147.320.000,00
 - e. Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah), Jl. Bali Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar pada SMK Negeri 1, dengan luas 18.326 m² senilai Rp5.955.950.000,00
 - f. Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah), Jl. Asahan Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar pada SMK Negeri 2, dengan luas 37.447 m² senilai Rp7.538.300.000,00
 - g. Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah), Jl. Raya Medan Km.10,5 Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun pada SMK Negeri 3, dengan luas 21.125 m² senilai Rp2.112.500.000,00
2. Pengurangan aset tetap tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengalihan kewenangan sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan bidang perhubungan pada terminal tipe A Pematang Siantar, sesuai dengan berita acara serah terima barang inventaris milik daerah dan dokumen atas pengalihan kewenangan sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan bidang perhubungan pada terminal tipe A Pematang Siantar dari Pemerintah Kota Pematang Siantar kepada Kementerian Perhubungan Nomor 032/10112/XII/2017 dan Nomor 001/BPTD-II/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, yaitu Tanah Bangunan Terminal Darat, Jl. AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar pada Dinas Perhubungan, dengan luas 32.891 m² senilai Rp3.567.733.600,00;
3. Pengurangan aset tetap tanah atas koreksi dan penghapusan pencatatan tanah akibat double catat pada TK Negeri Pembina 2, Jl. Laguboti Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, dengan luas 1.066 m² senilai Rp533.140.000,00
- Pada tahun 2017 terjadi pertambahan atas aset tetap tanah dengan luas 16.833 m² senilai Rp6.716.963.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



1. Tanah jalan outer ringroad dengan luas 9.159 m² senilai Rp4.184.543.000,00 yang diperoleh dari Belanja Modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar.
2. Tanah Bangunan Rumah Potong Hewan dengan luas 7.674 m² senilai Rp2.532.420.000,00 yang diperoleh dari PD. Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematang Siantar sebagai pengganti Tanah dan Bangunan Rumah Potong Hewan yang terletak di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, sesuai dengan Berita Acara Nomor 006/BA-PAUS/XII/2017 dan Nomor 032/9630/XII/2017, tanggal 13 Desember 2017.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2017 senilai Rp1.424.700.897.471,00 mengalami penurunan senilai Rp75.651.117.600,00 atau 5,04% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2016 senilai Rp1.500.352.015.071,00.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp17.363.955.395,00. Dari tahun 2017 hingga 2021, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2021 dan tertinggi tahun 2017. Karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Pematang Siantar Tahun 2021 mencapai Rp3.453.181.711.610,00 dan mengalami pertumbuhan dari 2017-2021 dengan rata-rata 3,57%.

Informasi dari Neraca Daerah dapat digunakan untuk analisis keuangan, yaitu rasio likuiditas (rasio lancar dan *Quick Ratio*) dan rasio solvabilitas (rasio total hutang dan rasio hutang/modal).

Rasio Lancar digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kota Pematang Siantar dalam melunasi hutang (kewajiban) jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin tinggi kemampuan dalam pembayaran kewajiban



jangka pendeknya. *Quick Ratio* lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick Ratio* memperhitungkan persediaan (aset lancar) dalam pembayaran kewajiban jangka pendek.

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah dalam memenuhi semua kewajibannya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban (hutang) terhadap aset dan rasio kewajiban (hutang) terhadap ekuitas. Rasio kewajiban (hutang) terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai rasio yang tidak stabil menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Nilai *Quick Ratio* neraca keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar menunjukkan bahwa nilai aset lancar persediaan mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rasio total hutang terhadap aset dan modal secara rata-rata relatif kecil, tetapi sangat fluktuatif dari tahun ke tahun.

Tabel 3.14.
Analisa Rasio Neraca Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

Rasio	Rumus	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	119.560,61	123.486,03	167.786,00	148.686,50	184.112,10	
	Kewajiban Jangka Pendek	88.673,50	30.732,08	28.617,46	30.218,07	25.898,50	
	Rasio Lancar	1,35	4,02	5,86	4,92	7,11	4,59
	Aset Lancar	119.560,61	123.486,03	167.786,00	148.686,50	184.112,10	
	Persediaan	10.066,70	12.009,52	11.609,74	13.831,31	13.050,70	
	Kewajiban Jangka Pendek	88.673,50	30.732,08	28.617,46	30.218,07	17.363,96	
	Rasio Cepat	1,23	3,63	5,46	4,46	9,85	4,79
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	88.673,50	30.732,08	28.617,46	30.218,07	25.898,50	
	Total Aset	2.960.783,92	3.106.010,61	3.270.531,96	3.364.575,87	3.479.080,21	
	Rasio Total Hutang (%)	2,99	0,99	0,88	0,90	0,74	1,33
	Total Hutang	88.673,50	30.732,08	28.617,46	30.218,07	25.898,50	
	Total Ekuitas	2.872.110,41	3.075.278,53	3.241.914,50	3.334.357,80	3.453.181,71	



Rasio	Rumus	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
	Rasio Total Hutang/Modal (%)	3,09	1,00	0,88	0,91	0,75	1,35

Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 49 menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan Bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Selanjutnya, belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara itu, belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran Kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung



(*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*). Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan yang mencakup:

3.2.1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kota Pematang Siantar pada periode sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang. Berikut disajikan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja :

Tabel 3.15
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Pematang Siantar
Tahun 2017-2021

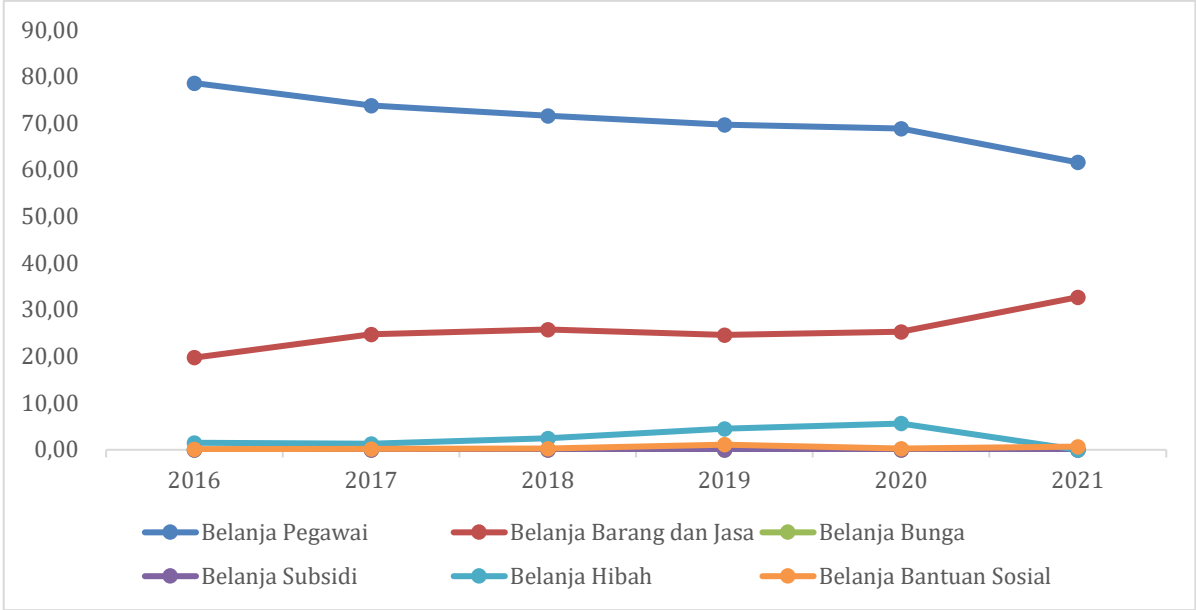
URAIAN	TAHUN					RATA- RATA (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Belanja Operasi	71,58	70,39	77,44	76,51	81,84	76,05
Belanja Pegawai	52,84	50,38	53,99	52,67	50,45	53,68
Belanja Barang dan Jasa	17,69	18,13	19,08	19,35	26,77	19,43
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Belanja Hibah	0,93	1,71	3,50	4,32	0,00	1,94
Belanja Bantuan Sosial	0,12	0,16	0,87	0,17	0,53	0,33
Belanja Modal	28,13	28,95	21,93	17,50	11,80	21,59
Belanja Tanah	0,50	0,31	1,23	1,64	0,00	0,62
Belanja Peralatan dan Mesin	8,45	4,26	4,89	3,28	2,44	4,77
Belanja Bangunan dan Gedung	3,25	3,27	2,35	1,95	3,66	2,57
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	15,02	20,00	12,25	9,41	5,64	12,77
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,91	1,12	1,20	1,22	0,07	0,85
Belanja Tidak Terduga	0,20	0,56	0,54	6,00	6,36	2,30
Belanja Tak Terduga	0,20	0,56	0,54	6,00	6,36	2,30
Belanja Transfer	0,09	0,09	0,09	-	-	0,06
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	0,09	0,09	0,09	-	-	0,06

Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)

Selama periode tahun 2017-2021, proporsi terhadap keseluruhan belanja Daerah, Belanja Operasi masih di atas 50% meskipun terdapat trend yang menurun;



Belanja Modal, Belanja Tak Terduga naik turun secara fluktuatif namun masih tetap di bawah 50%. Komponen-komponen dalam Belanja Operasi adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Dari beberapa komponen itu, Belanja Pegawai mengambil porsi terbesar dengan rata-rata proporsi per tahun selama 2017-2021 adalah 53,68% dari keseluruhan belanja daerah. Sementara itu, komponen lain dalam Belanja Operasi mengambil proporsi yang tidak terlalu besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)

Gambar 3.6.
Proporsi Komponen Belanja Operasi Kota Pematang Siantar
Tahun 2017-2021

Belanja Pegawai dalam Belanja Operasi cukup menyedot anggaran dikarenakan dalam Belanja Pegawai itu dibayarkan gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH, penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan belanja pegawai BLUD. Belanja aparatur, selain dari pos Belanja Pegawai, juga berasal dari Pos Belanja honorarium PNS dan non PNS, Belanja uang Lembur, Belanja beasiswa pendidikan PNS, Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja Premi asuransi Kesehatan, Belanja makanan dan minuman pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bahan habis pakai, belanja bahan/material, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan.

3.2.2. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan overhead cost bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya. Dalam



konteks penganggaran daerah, *overhead cost* pemerintah ini diletakkan pada berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berikut disajikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Tahun 2017-2021.



Tabel 3.16
Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja Pegawai	533.888.607.520,00	435.666.756.978,00	434.559.650.131,00	438.526.136.958,00	419.868.448.700,08
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	377.274.606.705,00	313.484.996.266,00	268.575.370.793,00	270.135.357.819,00	288.627.954.136,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	152.580.940.223,00	118.342.785.088,00	114.134.050.640,00	113.248.789.650,00	124.620.886.304,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.922.733.000,00	2.319.360.000,00	2.991.880.000,00	4.316.077.747,00	4.531.942.950,00
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.784.503.837,00	1.236.465.140,00	1.919.999.547,00	3.098.202.578,00	1.907.585.317,08
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	325.823.755,00	283.150.484,00	459.112.040,00	458.972.739,00	180.079.993,00
6	Tunjangan Hari Raya	0,00	0,00	23.284.490.693,00	23.762.049.600,00	0,00
7	Gaji Ketiga belas	0,00	0,00	23.194.746.418,00	23.506.686.825,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	93.330.382.409,00	113.106.680.382,00	134.764.599.836,00	136.689.002.088,00	127.009.590.044,82
1	Honorarium PNS	14.960.530.404,00	15.930.258.333,00	13.762.082.182,00	15.872.738.646,00	15.073.155.289,50
2	Honorarium Non PNS	24.423.626.500,00	32.112.815.600,00	38.439.653.980,00	40.209.597.890,00	47.970.399.423,00
3	Uang Lembur	7.022.523.600,00	9.111.357.700,00	10.735.969.750,00	10.030.069.000,00	11.174.072.242,00
4	Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00		3.553.639.500,00	69.000.000,00	289.800.000,00
5	Belanja Premi Asuransi	665.285.880,00	886.823.957,00	2.139.092.000,00	2.881.215.063,00	5.189.779.646,00
6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.596.164.113,00	8.133.494.346,00	8.307.594.873,00	7.716.249.277,00	4.561.757.563,00
7	Belanja Makanan dan Minuman	10.414.452.200,00	10.076.813.664,00	14.846.065.211,00	15.308.662.878,00	11.267.641.907,00
8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	454.019.250,00	557.226.500,00	422.625.625,00	727.557.378,00	652.460.000,00
9	Belanja Pakaian Kerja	541.546.000,00	750.085.575,00	845.386.100,00	517.891.600,00	81.000.000,00



No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
10	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.974.972.600,00	779.780.700,00	638.592.500,00	1.276.298.600,00	441.850.000,00
11	Belanja Perjalanan Dinas	23.942.922.827,00	30.541.582.938,00	36.960.635.474,00	40.468.587.353,00	27.721.440.774,32
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	110.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.224.339.035,00	4.106.441.069,00	3.963.262.641,00	1.611.134.403,00	2.586.233.200,00
	Belanja Modal	27.885.096.820,00	32.717.522.570,00	16.423.777.317,00	19.198.255.751,55	13.415.790.498,00
1	Belanja Modal	27.885.096.820,00	32.717.522.570,00	16.423.777.317,00	19.198.255.751,55	13.415.790.498,00
Total Belanja Aparatur		611.909.779.196,00	526.169.869.965,00	483.066.806.790,00	495.536.852.705,00	560.293.829.242,90

Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2016-2021 (Audited)



Kebijakan pengelolaan keuangan daerah selama kurun 5 tahun, masih berorientasi kepada aparatur, oleh karena itu pada masa yang akan datang, belanja daerah agar semakin difokuskan untuk belanja pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, dan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur supaya semakin ditekankan pada fungsi-fungsi pemerintah sebagai fasilitator pembangunan. Kondisi pandemi COVID-19 yang mulai melanda awal tahun 2020 yang kemudian berimbas kepada kemampuan keuangan daerah tahun 2020 dan yang seterusnya, sehingga belanja dialokasikan kepada kepentingan masyarakat sedangkan belanja untuk aparatur dibatasi hanya pada hal-hal yang bersifat wajib mengikat, essensial serta mendesak. Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari Tahun 2017-2021 ddapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Persentase (%)
2017	611.909.779.196,00	934.471.598.872,85	65,48
2018	526.169.869.965,00	994.512.015.480,57	52,91
2019	483.066.806.790,00	934.784.426.978,507	51,68
2020	495.536.852.705,00	911.986.217.295,019	54,34
2021	560.293.829.242,90	876.636.634.255,31	63,91
RATA-RATA			58,45

Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021 (Audited)

Berdasarkan Tabel 3.17 dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2017-2021, total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur mengalami pertumbuhan yang cenderung rendah dengan rata-rata pertumbuhan 0,016 pertahun.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah

Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan untuk memproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada lima tahun mendatang yaitu Tahun 2023-2027. Proyeksi didasarkan pada realisasi capaian kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan selama Tahun 2017-2021 yang telah disampaikan pada sub bab sebelumnya. Secara umum kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan bergerak cukup fluktuatif selama Tahun 2017-2021. Khususnya pada Tahun 2020 dimana terjadi Pandemi Covid-19 yang mengganggu seluruh sendi kehidupan, tidak terkecuali nilai pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut Proyeksi dimaksud.



Tabel 3.18
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2023-2027

KODE REKENING		JUMLAH (Rp)					
		APBD TA. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	935.742.825.920,00	964.404.082.066,00	971.746.895.107,00	983.748.929.700,50	993.921.353.517,00	1.002.008.582.714,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	136.072.687.739,00	143.489.075.815,00	150.905.463.891,00	158.321.851.967,00	165.738.240.043,00	173.154.628.119,00
4 . 1 . 01	Pendapatan Pajak Daerah	68.200.000.000,00	73.441.583.000,00	78.683.166.000,00	83.924.749.000,00	89.166.332.000,00	94.407.915.000,00
4 . 1 . 02	Hasil Retribusi Daerah	25.769.600.000,00	25.920.690.000,00	26.071.780.000,00	26.222.870.000,00	26.373.960.000,00	26.525.050.000,00
4 . 1 . 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.833.087.739,00	8.910.648.815,00	8.988.209.891,00	9.065.770.967,00	9.143.332.043,00	9.220.893.119,00
4 . 1 . 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.270.000.000,00	35.216.154.000,00	37.162.308.000,00	39.108.462.000,00	41.054.616.000,00	43.000.770.000,00
4 . 2	DANA TRANSFER	788.231.955.381,00	809.476.823.451,00	809.403.248.416,00	813.988.894.933,50	816.744.930.674,00	817.415.771.795,00
4 . 2 . 1	Transfer Pemerintah Pusat :	747.429.884.000,00	763.984.544.000,00	766.256.073.000,00	769.669.167.500,00	773.011.479.250,00	773.389.182.375,00
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.583.550.000,00	26.772.304.000,00	26.677.927.000,00	26.725.115.500,00	26.701.521.250,00	26.713.318.375,00
4.2.1.02	Dana Alokasi Umum	556.772.164.000,00	567.138.070.000,00	567.503.976.000,00	567.869.882.000,00	568.235.788.000,00	568.601.694.000,00
4.2.1.03	Dana Alokasi Khusus	164.074.170.000,00	170.074.170.000,00	172.074.170.000,00	175.074.170.000,00	178.074.170.000,00	178.074.170.000,00
4.2.1.04	Dana Insentif Daerah Tambahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 2 . 2	Transfer Antar Daerah :	40.802.071.381,00	45.492.279.451,00	43.147.175.416,00	44.319.727.433,50	43.733.451.424,00	44.026.589.420,00
4.2.2.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Utara	40.802.071.381,00	45.492.279.451,00	43.147.175.416,00	44.319.727.433,50	43.733.451.424,00	44.026.589.420,00
4.2.2.02	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.438.182.800,00	11.438.182.800,00	11.438.182.800,00	11.438.182.800,00	11.438.182.800,00	11.438.182.800,00
4 . 3 . 01	Pendapatan Hibah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
4 . 3 . 02	Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	9.938.182.800,00	9.938.182.800,00	9.938.182.800,00	9.938.182.800,00	9.938.182.800,00	9.938.182.800,00
5	BELANJA	999.032.274.041,00	999.404.082.066,00	1.006.746.895.107,00	1.018.748.929.700,50	1.028.921.353.517,00	1.037.008.582.714,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	839.030.477.724,00	861.308.878.210,00	861.974.348.872,00	864.644.578.540,50	869.256.004.617,00	867.450.291.564,00
5 . 1 . 01	Belanja Pegawai	477.194.531.106,00	477.110.753.317,00	477.289.286.600,00	476.287.457.000,00	475.287.457.000,00	465.287.457.000,00
5 . 1 . 02	Belanja Barang dan Jasa	303.096.089.725,00	322.349.676.545,00	324.390.909.652,00	327.285.821.057,50	333.285.821.067,00	341.285.821.054,00



KODE REKENING		JUMLAH (Rp)					
		APBD TA. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
5 . 1 . 03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 05	Belanja Hibah	55.040.606.893,00	57.363.448.344,00	56.202.027.618,00	56.782.737.980,00	56.492.382.800,00	56.637.560.390,00
5 . 1 . 06	Belanja Bantuan Sosial	3.699.250.000,00	4.485.000.004,00	4.092.125.002,00	4.288.562.503,00	4.190.343.750,00	4.239.453.120,00
5 . 2	BELANJA MODAL	97.795.388.104,00	104.095.203.856,00	120.772.546.235,00	130.104.351.160,00	135.665.348.900,00	145.558.291.150,00
5 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	62.206.408.213,00	34.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00
5 . 3 . 01	Belanja Tidak Terduga	62.206.408.213,00	34.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00
5 . 4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4 . 01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4 . 02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(63.289.448.121,00)	(35.000.000.000,00)	(35.000.000.000,00)	(35.000.000.000,00)	(35.000.000.000,00)	(35.000.000.000,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	67.859.533.077,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
6 . 1 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	67.859.533.077,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.570.084.956,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6 . 2 . 02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.570.084.956,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	63.289.448.121,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKD Kota Pematang Siantar Tahun 2023-2027



Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan. Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- 1) Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
- 2) Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah juga termasuk hal tersebut.
- 3) Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.19
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Pematang Siantar Tahun 2023-2027

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2027 (Rp)
1	Prioritas I	210.917.331.500	213.783.043.403	218.984.589.080	223.453.558.607	230.688.450.286
2	Prioritas II	184.552.665.062	187.060.162.977	191.611.515.445	195.521.863.781	201.852.394.000
3	Prioritas III	131.823.332.187	133.614.402.127	136.865.368.175	139.658.474.129	144.180.281.429
Total		527.293.328.749	534.457.608.507	547.461.472.701	558.633.896.517	576.721.125.714

Sumber : BPKD Kota Pematang Siantar Tahun 2023-2027 data di olah

3.3.1.1. Kebijakan Pendapatan

Berdasarkan angka 5 tahun yang lalu, pendapatan dilaksanakan melalui:

- a. Melaksanakan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Untuk merespon Pasca Pandemi COVID - 19, dengan ancaman penurunan PAD Tahun 2021, maka strategi yang akan di tempuh pada tahun 2021-2026, antara lain:
 - Review Perda Retribusi Daerah yang bertujuan untuk menyesuaikan tarif retribusi;
 - Asumsi dana transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021-hingga 2023 menerapkan kebijakan kehati-hatian (*prudent*), yang ditandai dengan trend *fiscal tightening* (peralatan kebijakan fiskal) mempedomani kebijakan APBN.



- c. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- d. Penerapan dan penggunaan digitalisasi peta melalui *one map policy* untuk mengoptimalkan pendapatan daerah (*Fiscal Cadaster Policy*);
- e. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemasangan alat deteksi transaksi dan monitoring berkelanjutan terhadap wajib pajak daerah;
- f. Penegakan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya dan fasilitasi kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak daerah;
- g. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat terkait pajak daerah;
- h. Peningkatan integritas SDM perpajakan dan wajib pajak untuk meminimalkan pengelakan pajak (*tax evasion*);
- i. Perubahan regulasi yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah;
- j. Koordinasi intensif dengan OPD terkait yang berkorelasi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah; dan
- k. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

3.3.1.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yang diarahkan:

- a. Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah, serta program dan kegiatan terkait pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19
- b. Mengacu Standar Pelayanan Minimal;
- c. Mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- d. Memenuhi alokasi minimal mandatory spending yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan;
- e. Mengakomodir aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota;



- f. Mengimplementasikan ketentuan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan, serta memanfaatkan sistem informasi dalam mengimplementasikannya.
- g. Komposisi Struktur Belanja APBD Tahun anggaran 2021 hingga RPJMD berakhir di tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian
 - Belanja Operasi
 - Belanja Modal
 - Belanja Tidak Terduga
 - Belanja Transfer
- h. Belanja prioritas RPJMD 2022-2027, meliputi :
 - Pemulihan kondisi pasca pandemi covid 19, mencakup :
 - 1) Penguatan Penanganan Kesehatan, terutama berbasis masyarakat
 - 2) Penanganan Dampak Ekonomi berbasis inovasi, khususnya terhadap UMKM, IKM dan pedagang sector informal
 - 3) Penanganan Dampak Sosial berbasis inovasi dan rekayasa sosial
 - SDG's (pengurangan kemiskinan) dan sinkronisasi prioritas program/ kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
 - Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada 6 urusan wajib pelayanan dasar.
 - Pendanaan pencapaian target target RPJMD 2022-2027
- i. Mendorong reformasi belanja dalam rangka rangka penyehatan fiskal sekaligus penguatan efektifitas belanja dalam menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3.3.1.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Pematang Siantar yaitu memperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Pematang Siantar diarahkan untuk meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan



kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Selain Penyertaan Modal kepada BUMD, Pemerintah Kota Pematang Siantar menempatkan modal disetor ke dalam PT. Bank Sumut guna meningkatkan Struktur permodalan dan meningkatkan sharing kepemilikan saham Pemerintah Kota Pematang Siantar pada PT. Bank Sumut dan BUMD lainnya sehingga pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Pematang Siantar tidak mengalami penurunan.



BAB IV

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Perumusan analisis permasalahan pembangunan daerah didasarkan pada analisis masa lalu dan masa datang. Berdasarkan gambaran umum pada Bab 2, berikut permasalahan dan tantangan yang dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Pematang Siantar.

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan
 1. Belum seluruhnya SD/MI dan SMP/MTs berakreditasi.
 2. Masih adanya angka putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs.
 2. APK PAUD menurun akibat pandemi Covid-19
 3. Guru bersertifikasi pada PAUD masih rendah.
2. Urusan Kesehatan
 1. Terjadi pandemi Covid-19
 2. Capaian kelurahan yang telah Universal Child Immunization (UCI) 58.49%
 3. Masih ditemukan Balita Gizi Buruk, Stunting, Angka kematian anak, ibu dan balita
 4. Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular masih 71,22%
 5. Penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan masih 85.92%
 6. Jumlah Puskesmas dengan tenaga kesehatan yang sesuai standar masih 10 PKM dari 19 PKM
 7. Capaian pelayanan kesehatan usia lanjut masih 41,77%
 8. Capaian RT berperilaku hidup sehat dan bersih (PHBS) 41.95%
 9. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap masih 53,20%
 10. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi 93.92%
 11. Cakupan Penanganan penyakit TBC masih 42%
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 1. Persentase kondisi jalan dalam kondisi mantap/baik masih 81,12%.
 2. Masih ditemukan kawasan yang tergenang air yang disebabkan kondisi drainase yang belum baik



3. Perda RT/RW belum selesai
4. Pengendalian dan pemanfaatan ruang belum optimal
5. Proyek Pembangunan jalan outer ringroad, Stadion Sangnawaluh belum selesai
6. Terjadi alih kewenangan penyelenggaraan urusan dari dinas PUPR ke dinas PRKP (air bersih)
7. Penyediaan data terkait urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum optimal.
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 1. Belum sepenuhnya Penduduk berakses air bersih Rasio RT pengguna air bersih masih 97.56%
 2. Rasio rumah tangga bersanitasi masih rendah 66,21%.
 3. Jaringan penerangan jalan umum semakin menurun.
 4. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani kawasan kumuh 152,94 Ha
5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - a. SatPol PP
 1. Pelaksanaan penegakan perda masih belum optimal.
 2. Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) belum optimal.
 3. Sarana dan prasarana pemadaman masih kurang.
 4. Belum ada kelurahan tanggap bencana alam/kebakaran.
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Indikator kinerja untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak ada dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022
6. Urusan Sosial
 1. Tingkat kemiskinan di Kota Pematang Siantar masih tinggi
 2. Belum sepenuhnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani

II. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

7. Urusan Tenaga Kerja
 1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Pematang Siantar, paling tinggi di Sumatera Utara Tahun 2021 sebesar 11%
 2. Jumlah pen dan duduk usia kerja meningkat sedangkan daya serap tenaga kerja masih rendah
 3. Lapangan kerja yang terbatas
 4. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar



5. Pelatihan tenaga kerja tidak berbasis kompetensi dan ketrampilan.
6. Tingkat Pengangguran Terbuka di dominasi lulusan SMA
7. Perlindungan tenaga kerja belum optimal
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Masih ditemukannya kasus kekerasan perempuan dan anak.
9. Urusan Pangan
Indikator kinerja urusan pangan menunjukkan kinerja yang tidak dapat terukur, namun dapat diidentifikasi untuk kebutuhan pangan Kota Pematang Siantar masih tergantung dari Kabupaten Simalungun, harga kebutuhan pangan belum stabil dan pengawasan keamanan pangan belum optimal
10. Urusan Pertanahan
Target kinerja dan Indikator urusan pertanahan belum ada dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022, namun dapat diidentifikasi rencana Pembebasan lahan Ex-PTPN IV 573 HA dan Outer ringroad belum selesai, serta belum seluruhnya lahan milik Pemerintah Kota Pematang Siantar bersertifikasi
11. Urusan Lingkungan Hidup
 1. Penanganan sampah belum optimal
 2. Terjadi penimbunan sampah yang tidak terolah
 3. Belum adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar
 4. Pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang perlu dioptimalkan untuk menjaga rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah kota.
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 1. Rasio Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan belum 100%
 2. Persentase Penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP) 98,07%
 3. Masih rendah persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak
 4. Masih adanya penduduk yang belum mempunyai akta kelahiran, Akta Nikah
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
Belum optimalnya terkait monitoring dan evaluasi penggunaan dana kelurahan
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 1. Angka Total Fertility Rate masih tinggi, rata-rata jumlah anggota keluarga 4 per Keluarga
 2. Rasio Akseptor KB masih 81,62%
 3. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera mencapai 265



15. Urusan Perhubungan

1. Kebutuhan pembangunan terminal tipe C milik Kota Pematang Siantar yang dapat mengkoneksikan wilayah kota dengan transportasi massal
2. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu/marka)
3. Penataan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan umum belum optimal kemacetan, terminal bayangan dan penertiban parkir liar kendaraan bermotor

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Belum ada rencana induk/strategik plan/masterplan/blue print teknologi informasi di Kota Pematang Siantar
2. Penerapan Keterbukaan Informasi Publik dan e-Government belum ditindaklanjuti dengan kebijakan/aturan hukum daerah
3. Website Pemerintah Kota masih belum terintegrasi dengan aplikasi milik daerah
4. Belum sepenuhnya Perangkat Daerah di Kota Pematang Siantar memiliki website
5. Pengelolaan aplikasi daerah Smartcity tidak aktif

17. Urusan Koperasi dan UMKM

1. Pembinaan kepada Koperasi belum optimal yang ditandai dengan semakin menurunnya jumlah Koperasi Aktif di Kota Pematang Siantar
2. UMKM belum dapat menyerap tenaga kerja
3. Penyediaan data terkait jumlah UMKM belum optimal

18. Urusan Penanaman Modal

1. Ketidakpastian ruang untuk investasi disebabkan RTRW belum selesai
2. Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Pematang Siantar

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1. Penyediaan data urusan kepemudaan dan olahraga belum optimal
2. Sarana dan prasarana olahraga belum optimal
3. Pembinaan kepada atlet muda belum optimal

20. Urusan Statistik

1. Penyediaan data statistik daerah masih bersifat statistik dasar yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Pematang Siantar
1. Penyediaan data statistik sektoral belum tersedia
2. Sumberdaya aparatur dengan jabatan Statistisi belum ada
3. Belum ditindaklanjutinya Satu Data Indonesia sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019



21. Urusan Persandian

1. Indikator kinerja urusan persandian tidak ada dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022. Urusan persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
2. Sumberdaya aparatur dengan jabatan Sandiman belum ada.

22. Urusan Kebudayaan

1. Belum melaksanakan amanat UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
2. Pengembangan dan pembinaan pelaku seni dan budaya masih belum optimal
3. Urusan kebudayaan yang semula ditangani Dinas Pariwisata beralih pada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, sehingga penyediaan data terkait urusan kebudayaan belum optimal

23. Urusan Perpustakaan

1. Sumberdaya aparatur dengan jabatan Pustakawan masih 1 orang
2. Peningkatan teknologi informasi yang berkembang pesat, terjadi kecenderungan pergeseran dari membaca buku secara konvensional ke digital (e-book)

24. Urusan Kearsipan

1. Belum ada arsip daerah (arsip sejarah) yang dilestarikan dan diselamatkan/dialihmediakan
2. Sumberdaya aparatur dengan jabatan Arsiparis belum ada.
3. Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku masih belum optimal
4. Sarana dan prasarana kearsipan belum optimal.

III. Urusan Pemerintahan Pilihan

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Produksi budidaya ikan semakin menurun
2. Pembinaan terhadap kelompok budidaya ikan tentang pengetahuan, teknik cara budidaya ikan yang baik belum optimal
3. Tingkat konsumsi ikan, dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai nilai gizi ikan

26. Urusan Pariwisata



1. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Riparda) Kota Pematang Siantar belum selesai
2. Promosi pariwisata melalui pelaksanaan event Pariwisata masih rendah
1. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB belum optimal
2. Peningkatan sarana dan prasarana wisata alam dan wisata buatan
3. Belum ada pemandu wisata bersertifikasi
4. Penyediaan data terkait urusan pariwisata belum optimal
27. Urusan Pertanian
 1. Luas Panen Padi yang semakin menurun
 2. Jumlah kelompok tani semakin menurun
 3. Nilai Tukar Petani $N < 100$ yang menunjukkan pendapatan petani menurun (defisit)
 4. Jumlah Penyuluh Pertanian yang bersertifikasi semakin menurun
 5. Produksi peternakan semakin menurun
28. Urusan Perdagangan dan Perindustrian
 1. Penyediaan data terkait urusan perdagangan dan perindustrian belum optimal
 2. Pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan belum optimal
 3. Pengembangan industri kecil menjadi industri menengah belum optimal
 4. Belum adanya rencana induk pembangunan industri kota sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian.
29. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
 1. Sekretariat Daerah
 1. Indikator kinerja urusan unsur pendukung belum ada dalam dokumen RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022.
 2. Belum terintegrasinya perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang ditunjukkan dengan nilai SAKIP yang rendah.
 3. Belum tersedianya Roadmap Reformasi Birokrasi sesuai amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015
 2. Sekretariat DPRD

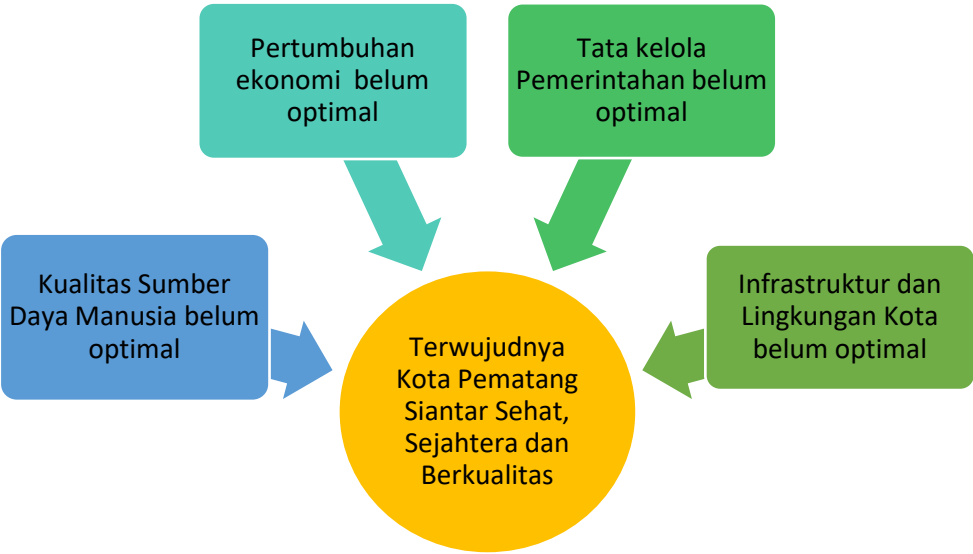
Untuk Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Pematang Siantar, Indikator kinerja belum ada dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022
30. Urusan Perencanaan
 1. Perencanaan pembangunan belum berbasis kinerja
 2. Sinkronisasi perencanaan baik program kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing perangkat daerah belum optimal
 3. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan belum optimal



4. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan, pengendalian dan evaluasi masih belum optimal
 5. Berlakunya Peraturan terbaru tentang nomenklatur program kegiatan yang berdampak pada dokumen perencanaan daerah.
31. Urusan Keuangan
1. Hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dengan opini WDP (wajar dengan pengecualian (Tahun 2019 dan 2020)
 2. Realisasi pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk menunjang kemandirian fiskal daerah.
 3. Realisasi belanja daerah hanya mencapai 91,99%
 4. Realisasi SilPA masih tinggi
 5. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah.
32. Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan
1. Pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan formal sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS masih belum optimal.
 2. Belum sepenuhnya kebutuhan jabatan fungsional pada perangkat daerah tertentu terpenuhi
33. Urusan Penelitian dan Pengembangan
1. Indikator kinerja urusan penelitian dan pengembangan tidak ada dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022, namun kinerja urusan penelitian dan pengembangan ditunjukkan dengan adanya Jurnal Kebijakan yang terbit per semester yang berisi kajian/penelitian singkat dari para akademisi.
 2. Sumberdaya aparatur dengan jabatan fungsional peneliti belum ada.
34. Urusan Pengawasan
- Indikator kinerja Pengawasan urusan pengawasan dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 hanya capaian pelaporan LHKPN, namun dapat diidentifikasi bahwa pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) pada seluruh perangkat daerah belum optimal (maturitas SPIP Level 2)
35. Unsur Kewilayahan
- Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kecamatan belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai PMDN Nomor 4 Tahun 2010.
36. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Target kinerja urusan Kesbangpol tidak ada di dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022.



Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan diklasifikasikan menjadi masalah utama, masalah pokok, masalah dan akar masalahnya. Permasalahan utama dijawab dengan Visi dan permasalahan pokok dijawab dengan Misi, oleh karena itu telaah visi misi kepala daerah terpilih dijadikan dasar perumusan permasalahan dipadukan dengan hasil evaluasi dari kinerja pelayanan umum pada Gambaran Umum Kondisi Daerah sebagaimana telah disajikan pada Bab 2. Berikut dirumuskan permasalahan pokok daerah yang diprioritaskan:



Sumber : Analisis tim penyusun

Gambar 4.1

Permasalahan Pembangunan Kota Pematang Siantar dari Telaah Visi Misi

Selanjutnya akan dipetakan permasalahan pokok pembangunan dengan mengintegrasikan data capaian evaluasi urusan pembangunan dan akar masalahnya.

Tabel 4.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sumber Daya Manusia	Kualitas Kesehatan masyarakat belum optimal	Pandemi Covid-19
			Capaian kelurahan yang telah Universal Child Immunization (UCI) 58.49%
			Masih ditemukan Balita Gizi Buruk, Stunting, Angka kematian anak, ibu dan balita
			Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular masih 71,22%
			Penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan masih 85.92%
			Jumlah Puskesmas dengan tenaga kesehatan yang sesuai standar masih 10 PKM dari 19 PKM



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Capaian pelayanan kesehatan usia lanjut masih 41,77%
			Capaian RT berperilaku hidup sehat dan bersih (PHBS) 41.95%
			Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap masih 53,20%
			Persentase Rumah Tangga Bersanitasi 93.92%
			Cakupan Penanganan penyakit TBC masih 42%
		Kualitas Pendidikan masyarakat belum optimal	APK Paud hanya mencapai 50,24%
			Tingkat Kualifikasi pendidik PAUD masih 73.55%
			Masih ditemukan angka putus sekolah SD dan SMP
			Kualifikasi guru pendidikan S1/D4 menurun dengan capaian 87,50%
			Akibat Pandemi Covid-19 pembelajaran yang dilakukan secara daring
		Keamanan dan ketertiban belum optimal	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) belum optimal.
			Perda tentang ketertiban belum ada
			Angka kriminalitas dan demonstrasi
		Kesejahteraan masyarakat menurun	Angka kemiskinan meningkat
			Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka
			Lapangan kerja yang terbatas
			Daya beli masyarakat menurun
			Jumlah penduduk usia kerja meningkat
			Kompetensi tenaga kerja dan Ketrampilan nya belum optimal
			Tingkat Serapan tenaga kerja tertinggi adalah tamatan SMA
2	Pertumbuhan ekonomi	Pengelolaan potensi ekonomi masyarakat belum optimal	Akibat Pandemi Covid-19 sehingga harus dilakukan PPKM
			Manajemen UMKM belum optimal
			Jumlah koperasi aktif menurun
			Akses terhadap sumberdaya modal terbatas
		Pengembangan sektor ekonomi potensial lainnya belum optimal	Laju pertumbuhan ekonomi tumbuh positif namun paling rendah se Sumatera Utara
			Ekonomi daerah bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
			Nilai investasi rendah
			Belum ada regulasi pendukung kemudahan investasi daerah
			Keterbatasan lahan
3	Tatakelola Pemerintahan	Pelayanan publik belum optimal	Survei kepuasan masyarakat masih perlu ditingkatkan Skor IKM C (73,36)
			Pemerintahan berbasis elektronik belum berjalan sepenuhnya ditandai capaian SPBE kategori Kurang (1,53)
			Pelayanan smart city tidak aktif



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Akuntabilitas kinerja belum optimal	Perencanaan yang tidak berbasis kinerja dengan capaian Indek RB C dan SAKIP C
			Pengendalian dan monitoring perencanaan belum optimal
			Konsistensi perencanaan dan penganggaran belum optimal ditandai hasil capaian IPKD C
			Belum optimalnya keterisian jabatan, formasi ASN untuk jabatan Fungsional
			Realisasi silpa cukup tinggi
		Pendapatan Asli daerah Menurun	Pengelolaan sumber pendapatan asli daerah belum optimal
			Kontribusi Badan Usaha Daerah rendah belum optimal
4	Infrastruktur dan Lingkungan	Kualitas Infrastruktur belum optimal	Jalan dalam kondisi baik masih 81,12%
			Rasio RT pengguna air bersih masih 97,56%
			Rumah Tangga bersanitasi masih 66,21%
			Masih ditemukan kawasan kumuh 152,94 Ha
			Perda RT/RW belum selesai
			Pengendalian dan pemanfaatan ruang belum optimal
			Pengendalian transportasi belum optimal (kemacetan, sarana rambu/marka jalan, terminal bayangan)
			Pembebasan lahan 573 belum teralisasi
			Proyek Pembangunan jalan outer ringroad, Stadion Sangnawaluh belum selesai
			Masih ditemukan kawasan yang tergenang air yang disebabkan kondisi drainase yang belum baik
		Kualitas Lingkungan belum optimal	Persentase Penanganan Sampah masih 94,81%
			Penimbunan sampah yang tidak terolah

Sumber: Anilisa tim penyusun

4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan pernyataan mengenai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan/dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia international, nasional maupun regional. Kriteria isu strategis sebagai berikut :



1. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dikelompokkan menjadi satu kesatuan, jika ditangani/dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan, sebagai dasar perumusan pernyataan isu strategis;
2. Pernyataan isu memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
3. Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah(kewenangan)
4. Luasnya dampak yang ditimbulkannya untuk memecahkan permasalahan pembangunan guna meningkatkan pembangunan daerah;
5. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
6. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
7. Prioritas utk memenuhi janji politik Kepala Daerah yang perlu diwujudkan.

4.2.1. Isu strategis RPJPD Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025

Dalam RPJPD Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025, isu-isu strategis diproyeksikan sebagai berikut:

1. Kesehatan;

Perubahan komposisi penduduk dalam hal pendidikan dan status sosial yang menghuni Kota Pematang Siantar akan bermasalah apabila generasi baru penduduk Kota Pematang Siantar yang berpendidikan rendah dan atau mempunyai status sosial ekonomi yang lemah. Tumbuhnya kawasan industri atau permukiman yang kurang memenuhi syarat-syarat kesehatan akan menyebabkan pencemaran air, udara maupun tanah

2. Pariwisata;

Dalam pengembangan pariwisata sifat paling mendasar dari investasi pada industri pariwisata adalah "*High Investment, Not Quick Yield*" artinya investasi di bidang pariwisata membutuhkan investasi yang besar dengan tingkat pengembalian yang lama (jangka panjang). Kondisi ini sungguh tidak menarik bagi kebanyakan stakeholders kepariwisataan yang masih memiliki budaya "*Instant and Shortcut*" dimana mereka lebih menyukai melakukan investasi yang dapat segera memberikan keuntungan. Sehingga para investor tidak tertarik menanamkan modalnya dalam mengembangkan usaha pariwisata. Dalam konteks ini diperlukan integrasi usaha pariwisata (*tourism business integration*) yang merupakan sinergi pelaku kepariwisataan secara horizontal maupun vertikal dan memberikan keuntungan atau manfaat bagi masing-masing pihak. Oleh karenanya diperlukan bentuk-bentuk insentif yang mampu merangsang timbulnya investasi di bidang kepariwisataan dengan



menggunakan manajemen partisipatoris dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, baik masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan, pemerintah Kota, dan Provinsi, serta Pemerintah Pusat. Selanjutnya masalah keamanan global menjadi perhatian serius. Masalah keamanan sangat terkait dengan aksi terorisme yang pada faktanya telah menjadi salah satu ancaman serius pada saat ini. Masalah keamanan global ternyata telah menciptakan citra yang sangat kurang menguntungkan bagi industri pariwisata global, dimana keselamatan wisatawan yang menjadi faktor utama telah terusik akibat aksi bom di daerah tujuan maupun fasilitas pariwisata (hotel dan pesawat terbang) serta didorong dengan adanya pandangan bahwa saat ini tidak ada daerah tujuan yang aman untuk berwisata. Apabila sentimen ini sudah masuk dalam benak wisatawan, maka hal ini akan menjadi permasalahan yang cukup serius bagi perkembangan pariwisata global di masa depan.

3. Sarana dan Prasarana Kota (Perhubungan, Drainase, Pengairan, Komunikasi, Listrik, Air bersih dan Penataan Ruang);
Sulitnya relokasi penataan kawasan kumuh terutama di kawasan bantaran sungai. Kurang layaknya sarana transportasi massal sehingga menyebabkan tingginya penggunaan mobil dan sepeda motor, hal ini menimbulkan potensi kemacetan dan polusi udara. Masalah perencanaan tata ruang perkotaan yang disebabkan oleh keterbatasan dana dan lemahnya koordinasi berbagai pihak yang terkait.
4. Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Investasi;
Lapangan usaha di Kota Pematang Siantar masih didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, dan sebagian penduduknya adalah PNS. Kelompok ini umumnya berpenghasilan tetap. Unit-unit usaha masih sebagian besar adalah dalam skala kecil dan mikro sehingga masih menghadapi kendala-kendala teknis.
5. Geomorfologi Dan Lingkungan Hidup;
Permasalahan yang dihadapi oleh Kota Pematang Siantar dalam hubungannya dengan kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup dapat diuraikan sebagai berikut: Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup masih belum mempertimbangkan secara baik prinsip kelestarian dan kehati-hatian yang bisa saja akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Belum meratanya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat. Masih akan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan sebagai akibat penurunan



kualitas lingkungan baik yang terjadi karena peralihan fungsi lahan, sungai dan juga akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah. Semakin besarnya keinginan untuk membuka kawasan pemukiman/pertokoan akan menyebabkan semakin menipisnya kawasan hutan kota yang mengelilingi Kota Pematang Siantar, tanpa diimbangi dengan meningkatnya ruang terbuka hijau dan hutan kota akan menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan yang dapat berdampak pada tidak terkendalinya polusi udara, air dan tanah. Belum terbentuknya secara luas motivasi dan kesadaran untuk memanfaatkan lahan untuk tujuan produktif.

6. Sosial, Budaya Dan Politik;

Permasalahan di bidang sosial, budaya dan politik, antara lain: Peredaran dan jaringan narkoba dan Napza yang masih sulit diberantas. Degradasi nilai-nilai budaya daerah berhadapan dengan arus globalisasi. Penegakan dan kesadaran hukum akan menjadi masalah yang dapat mengganggu rasa keadilan masyarakat. Eksklusivisme yang berlebihan pada golongan/agama dapat memicu konflik dan kontra produktif bagi pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Lunturnya nilai-nilai budaya dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak terkait.

7. Pemerintahan Kota

Penataan kelembagaan pemerintah Kota Pematang Siantar belum secara optimal menjalankan kewenangan, urusan dan fungsi yang diamanatkan undang-undang. Profesionalisme, kualifikasi dan kompetensi SDM aparatur birokrasi yang belum optimal. Pelayanan administrasi umum pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam menegakkan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, lebih-lebih dengan ditetapkan Kota Pematang Siantar sebagai salah-satu daerah Pusat Kegiatan Wilayah di sekitarnya.

Sasaran pokok untuk perencanaan pembangunan periode ke 4 (empat) untuk perencanaan Tahun 2020-2025, adalah memantapkan pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan Dasar masyarakat yang mantap;
2. Pengembangan lanjut kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Pengembangan daya saing Regional dan Internasional Sektor Unggulan;
4. Pemeliharaan dan pengembangan lanjut Infrastruktur sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang unggul dan berdaya saing.

Dengan target pembangunan daerah adalah :



1. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dasar;
2. Kesiapan SDM dan infrastruktur memasuki era kemajuan teknis dan professional.

4.2.2. Isu strategis RPJMN Tahun 2020-2024

Dari tingkat nasional hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah adalah sinkronisasi dengan Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia 2045. Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang akan menjadi landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, adalah:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur



Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; untuk mengatasi isu keberlanjutan, sumber daya alam, efektifitas tata kelola sumberdaya ekonomi, transformasi struktural ekonomi berjalan lambat, revolusi 4.0 dan ekonomi digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; untuk mengatasi isu ketimpangan antar wilayah di Indonesia
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; untuk mengatasi isu pengendalian penduduk perlindungan sosial, pemenuhan layanan dasar, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, dan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; untuk mengatasi isu melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan buday dan bangsa, pemajuan budaya belum optimal, pendidikan karakter dan budi pekerti, nilai, nilai agama melemah, toleransi dan kerukunan dan peningkatan peran keluarga.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; untuk mengatasi isu infrastruktur pelayanan dasar, penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman, keselamatan dan keamanan transportasi, penyediaan akses perumahan dan permukiman layak.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; untuk mengatasi isu peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dan rendah karbon.



7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik: untuk mengatasi isu demokrasi, kebijakan luar negeri, penegakan hukum dan reformasi birokrasi dan tata kelola serta menurunkan tindakan kriminal dan radikal.

Target Pemerintah Pusat untuk Provinsi Sumatera utara :

Tabel 4.2
Target Pembangunan Wilayah Sumatera 2020-2024

Indikator Pembangunan	Target Pembangunan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	6,40	6,90	7,40	8,00
Tingkat Kemiskinan (%)	8,43	7,95	7,25	6,80	6,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,50	5,30	5,20	4,70	4,40
Investasi (Rp Triliun)	269,70	296,68	329,17	366,63	431,45

Sumber : RPJMN 2020-2024

Sedangkan Proyek Prioritas Nasional di Sumatera Utara yang berada di wilayah di Kota Pematang Siantar adalah pembangunan jalan tol wilayah Koridor V Tebing Tinggi - Sibolga (Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Prapat-Tarutung-Sibolga).

4.2.3. Isu strategis PRPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Isu strategis Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disebutkan dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagai berikut;

1. Pendidikan

Pemenuhan sumber daya manusia yang berdaya saing dan dapat memenuhi tantangan perkembangan zaman masih dihadapkan kepada belum optimalnya kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan sumber daya manusia pada sektor Pendidikan memiliki tantangan antara lain; belum maksimalnya aksesibilitas dan sarana prasarana sekolah, belum optimalnya kualitas tenaga pendidik; yang berakibat kepada belum maksimalnya capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Utara.

2. Kesehatan

Peningkatan Usia Harapan Hidup, pengurangan angka kematian ibu dan anak, angka kesakitan, serta peningkatan status gizi di Provinsi Sumatera Utara memerlukan upaya peningkatan layanan Rumah Sakit, puskesmas, ketersediaan obat, Gerakan masyarakat Sehat (Germas) dan jaminan kesehatan pada masyarakat miskin. Selanjutnya, penurunan prevalensi stunting juga menjadi hal yang penting, selain itu diperlukan pula percepatan penanganan pandemik covid -



3. Ketenagakerjaan

Sumatera Utara mengalami peningkatan jumlah penduduk usia kerja, sebesar 171 ribu orang dari 10,53 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 10,70 juta orang pada Agustus 2020 dan terdapat sekitar 1,23 juta orang penduduk usia kerja di Sumatera Utara yang terdampak Covid-19 atau sebesar 11,51 persen dari total penduduk usia kerja di Sumut. Semakin terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya kualitas tenaga kerja di Sumatera Utara tentunya memerlukan penanganan yang lebih serius. Untuk itu, Pengelolaan Balai Latihan Kerja, Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja melalui Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industry, Penumbuhan sektor UMKM dan IKM baru serta pemasaran hasil produksi melalui model e-commerce serta pembangunan aplikasi bursa lowongan kerja online yang merupakan langkah strategis dalam upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan

4. Agraris

Terbatasnya Sarana dan Prasarana usaha pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan/peternakan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan peningkatan populasi ternak sapi, pencapaian swasembada komoditas pangan dan peningkatan produksi perikanan tangkap sebagai upaya peningkatan daya saing sektor agraris

5. Pariwisata

Pandemi Covid-19 tentunya menjadi tantangan yang luar biasa dalam upaya peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata. Untuk itu perlu dilakukan penerapan prinsip CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Enviromental Sustainability) atau 4 K (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Keberlanjutan Lingkungan di destinasi Wisata. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata melalui pembangunan desa – desa wisata merupakan langkah strategis untuk menyiasati upaya pencapaian kontribusi PDRB pada sektor pariwisata pada masa pandemi dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat.

6. Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga

Dalam upaya membangun pergaulan masyarakat yang kondusif ditengah maraknya penyakit masyarakat yaitu judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, perlu dilakukan penanganan lebih serius untuk membangun peningkatan kualitas



sosial kemasyarakatan dalam upaya menciptakan ketertiban, ketentraman, keamanan serta kondisi kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berkeyakinan

7. Reformasi Birokrasi

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi diwujudkan melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik melalui prioritas – prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), mempertahankan Nilai laporan kinerja keuangan daerah serta peningkatan pelayanan publik dan penataan kelembagaan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

8. Infrastruktur

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penanganan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara sepanjang ± 3.000 km tentunya memerlukan penentuan prioritas penanganan ruas jalan yang menjadi jalan strategis Provinsi yang mendukung Fungsi Daya Dukung Lingkungan, Susur Pantai Timur, Kawasan Strategis Prioritas Nasional Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Nasional Mebidangro, Kawasan Daerah Tertinggal dengan tentunya tetap memperhatikan peningkatan kemantapan jalan secara keseluruhan. Selanjutnya kebutuhan pembangunan TPA Regional dan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Pengurangan Luas Kawasan Kumuh menjadi sesuatu yang urgensi dalam upaya pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan

Pembangunan yang dilaksanakan juga harus berwawasan lingkungan, antara lain melalui:

a. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon (PRK) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Konsep PRK menekankan pada trade-off kebijakan lintas sektor yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya penurunan emisi, serta mendorong tumbuhnya green investment untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Penerapan pembangunan rendah karbon (PRK) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multi-pihak, baik dari dalam dan luar negeri. Pelibatan aktor non-pemerintah perlu ditingkatkan guna mendukung



keberhasilan pencapaian target pembangunan. Pada lingkup nasional, dukungan terhadap Pembangunan Rendah Karbon terus bergulir, akan tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara belum optimal kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat terhadap penerapan pembangunan rendah karbon di daerah. Informasi mengenai berbagai dampak dan manfaat dari pembangunan rendah karbon yang belum tersampaikan secara merata kepada berbagai pihak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dukungan dari sektor swasta belum optimal. Komunikasi dan penjangkauan terhadap aktor non-pemerintah untuk peningkatan kesadaran (awareness) perlu semakin digencarkan, sehingga diharapkan keterlibatan aktor non-pemerintah terhadap agenda pembangunan rendah karbon dapat semakin ditingkatkan.

Inovasi usaha yang berprinsip ramah lingkungan juga perlu terus dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran sekaligus meningkatkan kompetisi usaha ramah lingkungan. Di samping itu, potensi dukungan dunia usaha melalui program CSR pada bidang-bidang pembangunan rendah karbon perlu lebih dioptimalkan.

b. Rencana Pertumbuhan Hijau

Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam RJMD 2019 -2023 perlu diperkuat khususnya terkait dengan misi kelima yaitu “Mewujudkan Sumatra Utara yang bermartabat dalam lingkungan” dengan menekankan prinsip pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Visi dan misi yang menjadi komitmen terhadap rencana dan arah pembangunan harus menjamin terwujudnya keseimbangan pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dan keberlanjutan daya dukung ekosistem.

c. Indikator Pertumbuhan Hijau

Laju pertumbuhan ekonomi yang positif tidak dipungkiri sebagai salah satu indikator kemajuan suatu daerah beserta indikator makro lainnya seperti ketimpangan wilayah, kemiskinan, ketimpangan pendapatan (koefisien gini) dan indeks pembangunan manusia. Namun demikian capaian pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan ekstraksi dan investasi yang merusak akan menimbulkan “biaya sosial” dan “lingkungan” sebagai akibat dari ekstraksi sumber daya alam dan eskalasi konsumsi pada barang dan jasa. Capaian pertumbuhan ekonomi melalui perhitungan PDB dengan mengabaikan biaya sosial dan lingkungan tersebut sering disebut sebagai “PDB coklat”. Sebagaimana disampaikan oleh David Piling dalam “Growth Illusion”, negara atau daerah yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata berada dalam ilusi pertumbuhan karena menafikan terjadinya deplesi dan degradasi



pada sumber daya alam dan lingkungan. Deplesi dan degradasi ini pada akhirnya akan menimbulkan biaya cukup mahal yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah. Kerusakan lingkungan dari pembangunan yang mengandalkan ekstraktif semata akan berkontribusi terhadap bencana lingkungan yang selama 10 tahun terakhir telah mengakibatkan kerugian hampir Rp 30 triliun rupiah. Biaya ini merupakan biaya korbanan yang sejatinya bisa alokasikan untuk pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan, fisik dan lingkungan. Untuk menghindari proses perencanaan pembangunan yang Business As Usual, Revisi dan telaah atas RPJMD 2019-2023 Provinsi Sumatra Utara perlu memasukkan Nilai PDB Hijau. Nilai PDB Hijau didapat setelah nilai PDB dikurangi deplesi dan degradasi lingkungan (biaya eksternalitas). Kebutuhan untuk menampilkan Nilai PDB Hijau ini merupakan bagian dari proses konsultasi parapihak dalam penyusunan Green Growth Plan Sumatra Utara, sekaligus berkaitan melakukan perbaikan pada perencanaan pembangunan lebih baik, agar hasil-hasil capaian pembangunan dapat dimonitor kinerja pertumbuhan ekonomi dan kesehatan ekologi dan daya dukung sumberdaya alam agar tetap menjadi modal dasar pembangunan dan pertumbuhan hijau di Sumatra Utara.

Menyadari pentingnya mempertimbangkan biaya eksternalitas dari pembangunan yang bersifat ekstraktif tersebut, kini di berbagai belahan dunia dan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah diarusutamakan pembangunan yang berkelanjutan dengan basis perencanaan pertumbuhan hijau. Pertumbuhan hijau sendiri akan menjadi pendekatan pembangunan inklusif, dimana konsultasi multipihak dimasa depan akan merekognisi tentang pentingnya Nilai PDB Hijau ini sebagai acuan penilaian keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

d. Pengarusutamaan Rencana Pertumbuhan Hijau

Pengarus utamaan perencanaan pertumbuhan hijau dalam perencanaan pembangunan ini akan lebih berdampak jika kemudian dimasukan dalam dokumen RPJMD sehingga akan mengikat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karenanya indikator-indikator pembangunan yang menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan hijau perlu menjadi pertimbangan yang serius dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan pertumbuhan hijau, maka disarankan pada proses telaah (review) dan penyusunan dokumen perencanaan RPJMD 2019-2023 dimasukan beberapa indikator pembangunan yang mendukung tercapainya pertumbuhan hijau. Salah satu



yang perlu dikembangkan di daerah adalah Indeks Komposit Pembangunan Hijau Daerah (IPHD). Indeks komposit ini menggambarkan sejauh mana arah capaian pembangunan daerah menuju pembangunan berkelanjutan. IPHD dari skala 0-100 menggambarkan skala indeks capaian pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi berbagai indikator seperti:

- 1) Laju pertumbuhan ekonomi (PDB coklat);
- 2) Laju deplesi dan degradasi sumber daya alam dan lingkungan yang dapat diukur melalui IKLH (indeks kualitas lingkungan hidup);
- 3) Indeks pembangunan manusia (IPM);
- 4) Indikator-indikator yang berkaitan dengan kerentanan sosial dan lingkungan seperti kepadatan penduduk, keragaman mata pencaharian (livelihood); dan
- 5) Indeks kerentanan ekonomi dan lingkungan atau indeks resiliensi ekonomi dan lingkungan.

Beberapa indikator tersebut di atas mungkin sebagian belum tersedia dalam dokumen perencanaan pembangunan oleh karenanya perlu dibangun sebagai indeks yang baru yang akan mengukur seberapa kuat atau seberapa rapuh capaian pembangunan yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun mendatang.

4.2.4. Isu strategis RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah, maka secara geografis Kota Pematang Siantar dikelilingi wilayah Kabupaten Simalungun, maka isu strategis RPJMD Kabupaten Simalungun relevan untuk di sandingkan dengan isu strategis RPJMD Kota Pematang Siantar. Isu strategi pembangunan Kabupaten Simalungun lima tahun ke depan sebagai berikut:

a. Pemulihan ekonomi dan penanganan Pandemi COVID-19

Beberapa penyakit berpotensi wabah/pandemi wajib menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalamantisipasi penularannya. Wabah sendiri mengindikasikan peningkatan jumlah kasus penyakit yang jelas terlihat, meski kecil, jika dibandingkan dengan jumlah “normal” yang diantisipasi. Sedangkan pandemi adalah wabah yang menyebar di area geografis yang lebih luas hingga antar Negara dan menjadi kasus internasional.

Seperti yang sedang terjadi saat ini dimana dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit



COVID-19 (*Corona Virus Disease* – 2019) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Simalungun juga memiliki kasus positif COVID-19 dengan beberapa wilayah masuk ke dalam zona merah meskipun tingkat kesembuhan pasien positif masih cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan COVID-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya COVID-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

b. Penetapan Kaldera Toba sebagai Unesco Global Geopark (UGG)

Setelah ditetapkan sebagai Unesco Global Geopark (UGG), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menyiapkan rencana induk pengembangan Geopark Kaldera Toba sehingga perencanaan pengembangan di kawasan Geopark Kaldera Toba bisa terintegrasi satu sama lain, tak terkecuali dalam pembangunan Kabupaten Simalungun. Ke depan akan dilakukan pengembangan keragaman geologi hayati dan budaya sebagai daya tarik wisata, pembangunan aksesibilitas fasilitas pariwisata dan prasarana umum pendukung geopark, termasuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha masyarakat. Bersama dengan enam kabupaten lain yang berada di sekitar kawasan Danau Toba, Kabupaten Simalungun akan mengupayakan berbagai program dan kegiatan pendukung pengembangannya. Dari sisi UNESCO sendiri telah memberikan enam rekomendasi untuk pengembangan Kaldera Toba sebagai Global Geopark antara lain:

- i. mengembangkan hubungan antara warisan geologis dan warisan teritorial lainnya seperti biotik alami, budaya, tidak berwujud melalui interpretasi, pendidikan dan wisata;
- ii. mengembangkan strategi kemitraan yang mencakup metodologi dan kriteria yang jelas untuk menjadi mitra;
- iii. memperkuat keterlibatan dalam aktivitas Global Geoparks Network dan Asia Pasifik Jaringan Geoparks untuk mempromosikan nilai internasional wilayah melalui kemitraan dengan Global Geoparks di bawah payung UGG;
- iv. mengembangkan strategi pendidikan dengan bekerja dalam kemitraan dengan UGG lainnya;



- v. meningkatkan strategi dan kegiatan pendidikan untuk memfasilitasi mitigasi bahaya alam dan perubahan iklim di sekolah-sekolah untuk populasi lokal; dan
- vi. memperkuat keterlibatan UGG dalam studi penelitian, konservasi dan promosi penduduk asli setempat dan budaya serta bahasa mereka.

c. Percepatan pengentasan kemiskinan daerah

Sebagai daerah yang masih memiliki cukup tinggi angka kemiskinan, Kabupaten Simalungun harus memiliki upaya taktis dalam pengentasan kemiskinan khususnya di daerah-daerah yang jauh dari sarana dan prasarana pembangunan layak. Perlu adanya percepatan dalam pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan rakyat Simalungun yang sejahtera.

Sebagai permasalahan yang multidimensi, kemiskinan tidak bisa dilihat dari sudut pandang satu arah, namun beberapa fokus mampu menjadikan satu benang merah dalam mengurangi angka kemiskinan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan namun memiliki bobot tinggi dalam pengentasan kemiskinan adalah pendidikan anggota rumah tangga, culture mindset, dan paling penting adalah kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Fokus tersebut akan mampu memutus rantai kemiskinan dengan memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan, terutama pada masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang.

d. Pemantapan pengembangan perekonomian berkelanjutan

Upaya pengembangan perekonomian suatu wilayah akan memberikan dampak signifikan bagi perwujudan pembangunan. Hal ini dikarenakan perekonomian daerah sebagai “bahan bakar” pembangunan yang menentukan bagaimana anggaran keuangan daerah, pengelolaan lapangan kerja masyarakat hingga kesejahteraan masyarakat. Namun adanya aktivitas perekonomian daerah seringkali menimbulkan dampak ikutan yang negatif, dimana salah satunya adalah degradasi kualitas lingkungan hidup. Sebagai daerah yang didominasi oleh sektor pertanian, masih terlihat kualitas lingkungan hidup yang baik. Namun semakin menurunnya kontribusi terhadap struktur ekonomi menjadikan kekhawatiran tersendiri terkait alih lahan pertanian menjadi non pertanian yang dapat merusak ekosistem alam.

Hal ini sejalan dengan konsep SDG's dimana isu lingkungan global lebih ditekankan dan diprioritaskan untuk pembangunan lebih baik. Adapun 3 (tiga) pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (Human Development), diantaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana



lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, tetapi ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan, di antaranya segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada negara berkembang atau negara maju.

e. Optimalisasi kualitas SDM dalam persaingan pasar kerja

Permasalahan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Simalungun terlihat dari jenjang pendidikan masyarakat yang bekerja dimana sebanyak 26,04 persen tenaga kerja memiliki pendidikan sebatas lulusan SD sederajat ke bawah dan sebanyak 23,66 persen dari total tenaga kerja hanya memiliki pendidikan SMP sederajat. Hal ini tentu saja menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya perangkat daerah terkait untuk lebih memfokuskan berbagai kebijakan pembangunannya dalam kerangka meningkatkan kualitas tenaga kerja baik dari segi keterampilan teknis maupun non teknis. Karena selain dikarenakan pendidikan formal yang diduduki, kualitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh pelatihan yang pernah diikuti serta pengalaman kerja yang dimiliki.

Imbas dari rendahnya kualitas tenaga kerja tentu saja adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dikarenakan minimnya pendapatan yang masuk ke dalam rumah tangga tersebut. Terlebih dengan rendahnya Upah Minimum Regional, maka pendapatan layak masyarakat Simalungun masih perlu upaya lebih untuk mewujudkannya.

Secara umum, rendahnya kualitas tenaga kerja akan berbanding lurus dengan penghasilan yang diterima sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga terbatas pada penghasilan yang telah didapatkan. Selain itu, lapangan usaha untuk tenaga kerja yang minim keterampilan rata-rata tidak memiliki potensi untuk mengembangkan tenaga kerjanya seperti pertanian maupun buruh/karyawan level menengah ke bawah. Oleh karena itu, diharapkan dengan peningkatan keterampilan dan kemandirian tenaga kerja, akan memberikan andil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh.

f. Peningkatan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur



dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Diharapkan dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Simalungun merujuk pada penyediaan layanan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, kelistrikan, air bersih, perumahan layak huni, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Peningkatan berbagai infrastruktur pembangunan daerah diharapkan akan berdampak langsung pada perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga hal tersebut akan menjadikan kemandirian wilayah akan terwujud.

g. Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi

Prioritas utama Kabupaten Simalungun dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Simalungun adalah melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan memegang komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi di setiap jenjang dan struktur organisasi pemerintah daerah, serta pengelolaan keuangan daerah melalui perbaikan postur APBD.

Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun salah satunya melalui peningkatan pelayanan publik dengan penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu yang memungkinkan penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Selain itu, pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perbaikan manajemen (struktur) pemerintah daerah secara efektif dan efisien menjadi dukungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada prinsipnya, pembangunan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian daerah disini tidak hanya berlaku pada pelaksana pembangunan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, akan tetapi kemandirian juga diharapkan terealisasi dalam keuangan daerah baik dari segi pengelolaan dan penyediaan anggaran.

Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan,



partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tak terkecuali Kabupaten Simalungun dimana saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 8,15 persen dari total pendapatan daerah pada tahun 2019. Minimnya kontribusi PAD ini harus menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah yang saat ini masih jauh dari harapan.

h. Penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

Dari sisi pelayanan publik, saat ini teknologi informasi sudah sangat memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dirinya. Hal tersebut juga seharusnya mampu ditangkap oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai pelayanan masyarakat maupun dalam menjalankan kinerja masing-masing bidang urusan pembangunan, khususnya pelayanan publik. Peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan yang maksimal. Namun perlu juga dilakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga tidak terkesan memperumit jalur pelayanan publik.

Beberapa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadikan kemudahan dalam pelaksanaan koordinasi bagi perangkat daerah; pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah di daerah yang sulit dijangkau atau membutuhkan biaya besar; meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; mempermudah berbagai pelayanan masyarakat seperti kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, penanaman modal, dan sebagainya.

Diharapkan berbagai inovasi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara berkualitas dan merata akan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan dan optimalisasi capaian pembangunan di Simalungun.

4.2.5. Isu strategis Dalam Dokumen Perencanaan Sektoral

4.2.5.1. Isu strategis RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032

Saat ini dokumen Revisi RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032 sedang dalam proses persetujuan di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR/BPN). Dalam penyusunan dokumen Rancangan RPJMD ini tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032 dengan isu strategis sebagai berikut;



1. Sebagai Kota Pusat Kegiatan Wilayah dan Kota Sekunder di Provinsi Sumatera Utara, menjadi penyeimbang pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki hinterland wilayah dataran tinggi Danau Toba;
2. Memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang dataran tinggi bukit barisan dalam wujud kesamaan iklim, kondisi alam, kegiatan produktif, dan sosial budayanya yang berarti
3. Berbagai potensi kegiatan ekonomi, social, budaya dan keagamaan serta dan pemerintahan dengan pelayanan skala wilayah dan nasional sudah berlangsung sejak dahulu, yaitu :
 - a. kegiatan perdagangan dan jasa (komersial) perbankan, supermarket, telekomunikasi, dan pelayanan imigrasi yang memiliki jangkauan pelayanan regional
 - b. ketersediaan kegiatan pendidikan menengah dan tinggi dan dukungan fasilitas kesehatan yang berskala regional yang menciptakan kualitas SDM yang dapat bersaing secara nasional dan internasional
 - c. kantor pusat 4 (empat) gereja berskala nasional dan internasional memiliki sejarah yang panjang di kota ini
 - d. bangunan bersejarah budaya adat Simalungun
 - e. kegiatan industri pengolahan beberapa produk pertanian/perkebunan yang sudah memiliki brand dan skala pemasaran nasional dan ekspor
 - f. fasilitas dan kegiatan pertahanan dan keamanan Kawasan Rindam yang sekaligus pusat pelatihan militer
4. Disamping sudah terbangun infrastruktur nasional dan wilayah, seperti : jalur Kereta Api dan jalan nasional, sudah ada rencana pengembangan infrastruktur baru lainnya, yaitu : rencana pembangunan jalur KA baru rute Merek – Pematang Siantar, pembangunan pembangunan jalan bebas hambatan Medan - Tebingtinggi – Parapat yang menambah fungsi distribusi dan koleksi bagi Kota terhadap wilayah hinterland berupa angkutan barang produk-produk pertanian dari Daerah Tinggi Bukit Barisan dan transportasi transit menuju daerah tujuan wisata Danau Toba dan sekitarnya
5. Pengembangan Kawasan Ekonomi Nasional Industri Hilir Produk Sawit berskala internasional di Kawasan Sei Mangkei Kecamatan Perdagangan Kabupaten yang berjarak hanya sekitar 40 Km dari Kota Pematang Siantar diharapkan mendorong perkembangan perekonomian kota melalui kegiatan jasa pendidikan, jasa konsumtif konsumsi, jasa otomotif/ transportasi dan industri turunannya, dan kegiatan lainnya.
6. Rencana pembangunan jalan lingkaran luar kota sebelah timur dan barat, yang dapat dikaitkan sebagai pendorong pengembangan wilayah pinggiran kota



7. Terdapat lahan ex HGU di tepi kota (Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba) menambah kawasan potensi lahan pengembangan
8. Didominasi oleh lahan pertanian (perkebunan, lading dan sawah) yang sebagian besar diantaranya dialiri oleh jaringan prasarana irigasi teknis.
9. Tantangan pengembangan Kota Pematang Siantar dalam waktu mendatang adalah mengendalikan dan mengarahkan pertumbuhan fisik kota sehingga berlangsung pada lokasi yang direncanakan dengan intensitas yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Arah pengembangan fisik wilayah kota yang mempertimbangkan :
 - a. perkembangan fisik di kawasan pusat kota berlangsung secara intensif dengan orientasi pada sektor perdagangan dan jasa. Dengan demikian dituntut kebijakan yang dapat mengakomodasi perkembangan tersebut sekaligus merevitalisasi kawasan pusat kota.
 - b. perkembangan fisik di pinggiran berlangsung secara ekstensif dan sporadis. Dengan demikian dituntut kebijakan yang dapat mengarahkan perkembangan fisik secara optimal sekaligus mempertahankan lahan terbuka hijau secara terpadu.

4.2.5.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Isu-isu strategis yang dirumuskan merupakan pokok permasalahan yang menjadi kendala dan tantangan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pematang Siantar. Isu-isu strategis prioritas atau pokok permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Penataan ruang

Penataan ruang merupakan salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan KLHS RPJMD Kota Pematang Siantar. Pada saat ini Perda No. 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar 2012-2032 sedang dilakukan revisi RTRW, dan yang menjadi salah satu menjadi isu utama kebutuhan revisi tersebut adalah dinamika dan rencana perkembangan kota yang mengadopsi program strategis nasional yaitu : rencana pembangunan jaringan infrastruktur nasional, berupa rencana jalan bebas hambatan Tebing Tinggi-Parapat, dan jaringan jalur Kereta Api ruas Sei Mangke-Pematang Siantar-Raya-Merek; implikasi rencana infrastruktur nasional ini terhadap perubahan sistem pusat pelayanan dan pergeseran pola ruang terbuka hijau yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Status penyelesaian Revisi RTRW



Kota Pematang Siantar dalam finalisasi proses persetujuan substansi yang segera dilanjutkan dalam proses legalisasi.

Hal yang menjadi permasalahan adalah pada tahap pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan budidaya dan pola ruang terbuka hijau. Dengan kondisi topografi yang bergelombang sebaran tutupan hijau vegetasi yang perlu dipertahankan agar tidak terfragmentasi, pemanfaatan ruang kawasan budidaya harus dikendalikan dengan cara optimal dan efisien dalam memanfaatkan ruang melalui densifikasi, intensifikasi, multifungsi dan tidak menyebar acak (sprawl). Di sisi lain, kondisi tutupan lahan vegetasi yang semakin berkurang dan terfragmentasi menurunkan kondisi kinerja ekosistem alami sebagai penyedia, pengatur, budaya dan pendukung bagi manusia dan lingkungan.

Lahan sawah semakin berkurang karena beralih fungsi menjadi lahan perumahan yang dijual pemilik tanah atau yang mendirikan bangunan pada lahan. Hilangnya sawah umumnya dapat mengubah atau mengganggu aliran irigasi sehingga mengurangi ketersediaan air bagi petak lahan sawah lainnya. Pengendalian pemanfaatan ruang dititik beratkan pada penyediaan ruang terbuka hijau, khususnya RTH publik, yang diantaranya dapat berasal dari komitmen kontribusi pengembang dalam bentuk fasilitas publik berupa ruang terbuka hijau. Jika tidak direalisasikan komitmen akan mengancam pencapaian kewajiban RTH seluas 30 % dari seluruh wilayah kota. Begitu alih fungsi lahan pertanian pangan basah dapat terancam jika tidak dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang maka ancaman peran pemasok ketahanan pangan akan menurun yang selanjutnya berdampak pada masalah lingkungan lainnya seperti hilangnya daya dukung pengendalian banjir yang ada pada persawahan, muka air tanah menurun, meningkatnya erosi (kondisi tanah erosi tinggi), kerusakan tanah meluas, pelepasan karbon meningkat dan kenaikan suhu kota.

2. Penurunan kualitas lingkungan hidup

Penurunan kualitas hidup yang menjadi perhatian Kota Pematang Siantar, adalah pencemaran badan air permukaan dan air tanah, peningkatan suhu udara. Permasalahan kerusakan dan pencemaran sumber air dan badan air, selain permasalahan perubahan tutupan lahan tersebut, juga pengelolaan pengambilan air tanah yang tidak terkendali, pembuangan air limbah dan sampah (domestik, peternakan, pabrik, transportasi dan lainnya) yang belum dilaksanakan secara optimal sehingga menimbulkan pencemaran pada kualitas air sungai dan air tanah sehingga menurunkan tingkat produktifitas tanah serta mengancam keanekaragaman hayati yang akhirnya menurunkan



daya dukung penyediaan air bersih (air baku dari sungai dan sumur pompa dan mata air). dan daya tampung sungai untuk memulihkan pencemaran.

Pengelolaan penyediaan air bersih yang bersumber dari sistem air permukaan dan air tanah bagi dari pengelolaan sumber daya air berbasis daerah aliran sungai yang memerlukan koordinasi dan kerjasama lintas daerah dan mengancam kualitas layanan penyediaan air bersih dan sanitasi di tingkat rumah tangga.

Menghilangnya lahan bervegetasi dengan cara yang boros dan tidak terkendali, terutama tumbuhan pepohonan, akan menyebabkan pelepasan karbon (emisi karbon) dan meningkatkan suhu lokal, berkontribusi terhadap perubahan iklim. Kenaikan suhu lokal yang terus berlangsung mengurangi kenyamanan berkehidupan.

3. Pengelolaan Keluarga Sehat

Pada aspek pengelolaan keluarga sehat di Kota Pematang Siantar memiliki permasalahan di bidang kesehatan ibu hamil dan persalinannya kurang memperhatikan pola asuh ibu terhadap kesehatan dirinya sendiri, maupun bagi bayi dan anak balitanya, berupa pemberian pangan/makanan berkualitas. Begitu juga, ibu-ibu hamil masih banyak melakukan persalinan bukan pada fasilitas kesehatan.

Permasalahan keluarga sehat lain adalah kondisi layanan air minum dan sanitasi terutama bagi rumah tangga orang miskin yang belum mendapatkan layanan air bersih menyebabkan beberapa persoalan terkait kebersihan dan kesehatan hunian.

4. Pengelolaan Pelayanan Masyarakat

Permasalahan layanan pendidikan terdapat pada kualitas sekolah, guru serta angka partisipasi (APK dan APM). Masih terdapat sekolah setingkat SD dan SMP yang belum mencapai akreditasi minimal B, terutama untuk sekolah setingkat SD. Ketidakmerataan kualitas layanan pendidikan kemungkinan terjadi beberapa sekolah negeri atau swasta. Disamping itu, jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik masih belum terpenuhi ikut mempengaruhi kualitas layanan.

Begitu juga angka partisipasi kasar murid setingkat SD belum tercapai pencapaian dapat disebabkan kualitas layanan sekolah tersebut dari pada ketidaksanggupan atau ketidakmauan orang tua menyekolahkan anaknya. Pengendalian tingkat fertilitas belum diperhatikan para suami/istri. Pelayanan kota yang masih belum terselesaikan adalah masih ada rumah tangga yang belum terlayani oleh sumber air minum. Rumah tangga yang belum terlayani ini dapat berupa penduduk yang di bawah garis kemiskinan



dan wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa air minum oleh PDAM Tirtauli. Begitu juga layanan jaringan utilitas kota lainnya, yaitu penerangan belum menjangkau sebagian rumah tangga merupakan penduduk di bawah garis kemiskinan. Layanan transportasi angkutan umum semakin berkurang sejalan dengan penambahan kendaraan mobil yang dipergunakan masyarakat. Termasuk pengaruh masyarakat lebih memanfaatkan angkutan pribadi sewa berbagai (online) untuk melakukan perjalanan. Dari sisi suplai, angkutan umum yang semakin dimanfaatkan masyarakat dapat disebabkan jangkauan dan kualitas layanan angkutan umum tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Permasalahan layanan persampahan terutama terkait volume sampah yang terkelola tidak berkurang oleh kegiatan daur ulang sampah. Pengurangan sampah sejak dari produsen dan pemanfaatan daur ulang sampah, jika tidak didukung sistem pengelolaan persampahan yang memadai menyebabkan beban penanganan persampahan kota tetap meningkat.

5. Pertumbuhan ekonomi kota

Perekonomian Kota Pematang Siantar dimotori oleh tiga sektor utama, yaitu: sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; dan sektor konstruksi dan transportasi dan pergudangan. Diluar, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan pengguna lahan terbesar, yaitu sekitar 60 % lahan wilayah kota, hanya berkontribusi pada 1,5 % dari PDRB kota.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar mengalami peningkatan hampir di semua sektor, hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonominya baik. Akan tetapi, jika dilihat nilai PDRB per kapita walaupun masih menunjukkan laju pertumbuhan yang menaik, terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB per kapita menunjukkan penurunan (kategori SB). Hal ini sejalan dengan tingkat pengangguran yang menaik, baik tingkat pengangguran terbuka maupun tingkat setengah pengangguran. Begitu juga pekerja formal dan pekerja informal mengalami penurunan. Kegiatan industri manufaktur menunjukkan laju pertumbuhan menurun. Sektor pariwisata bisa menjadi berpotensi menjadi motor perekonomian Kota Pematang Siantar. Walaupun kontribusi pariwisata terhadap PDRB belum memenuhi target nasional (8 %), akan tetapi telah mengalami pertumbuhan hingga pada tahun 2019 mencapai 5,8 %. Hal ini dapat digambarkan dengan penambahan jumlah wisatawan nusantara bertambah 200 % selama lima tahun, begitu juga jumlah wisatawan mancanegara bertambah hampir 300 % selama lima tahun juga. Potensi pariwisata dan dapat dikaitkan ketertarikan lembaga keuangan memberikan pinjaman/kredit UMKM yang semakin meningkat.



Pihak lembaga keuangan mungkin melihat peran UMKM dalam peningkatan kegiatan potensi pariwisata di Kota Pematang Siantar. Laju penurunan kegiatan industri manufaktur dapat terjadi pada perusahaan industri lama yang semakin sulit mendapatkan lahan pengembangan atau relokasi ke luar wilayah Kota Pematang Siantar.

Dengan ditetapkan RTRW Kota Pematang Siantar yang mengarahkan lokasi kegiatan/kawasan industri ke lahan yang luas di wilayah Kecamatan Siantar Martoba dan pembangunan jalan arteri primer jalan lingkar luar barat kota, rencana jalur kereta api rute Raya-Saribudolok, dan rencana jalan tol Tebing Tinggi-Parapat-Sibolga diharapkan akan meningkatkan kembali pertumbuhan kegiatan industri baru. Dengan demikian, permasalahan yang terkait dengan isu pertumbuhan ekonomi di Kota Pematang Siantar, adalah selain peran sektor perdagangan dan jasa dominan, pengembangan sektor-sektor perekonomian yang perlu dipertahankan, seperti industri manufaktur yang lagi menurun agar perlu dikembalikan dengan imlementasi rencana pengembangan kegiatan/kawasan industri baru, potensi pertumbuhan kegiatan pariwisata yang dapat terus ditingkatkannya dan peran pelaku usaha UMKM yang semakin didorong sejalan dengan kepercayaan pihak lembaga keuangan memberikan pinjaman. Dengan demikian, kesempatan kerja pada lapangan kerja formal dan informal semakin dipulihkan dari peningkatan jumlah pengangguran selama ini.

6. Kesiapsiagaan penanganan bencana alam

Indeks risiko bencana alam di Kota Pematang Siantar masuk dalam kategori sedang. Jenis bencana alam yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, seperti banjir dan longsor di daerah bantaran sungai pada level rendah di beberapa kecamatan-kecamatan di pusat dan selatan kota. Walaupun indeks risiko bencana alam semakin menurun, tetapi penurunan risiko masih dibawah yang diharapkan (target nasional menurun 30 % dari data 2016). Artinya masih perlu penanganan pada pengurangan faktor probabilitas ancaman, faktor kerentanan dan faktor kapasitas). Begitu juga, telah memiliki sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan dan dokmmen strategis pengurangan risio bencana alam, tetap perlu memastikan kesiapsiagaan dalam hal kota tangguh yang terbentuk atau pengurangan lokasi risiko bencana, terutama kecepatan respon bagi penduduk di bawah garis kemiskinan atau rentan terhadap bencana.

7. Pemantapan tata kelola pemerintahan

Permasalahan tata kelola pemerintah terutam mencakup perlunya menyempurnakan terus menerus kualitas tata kelola pemerintahan, misalnya



dapat dilihat dalam hal status kinerja peningkatan SAKIP saat ini C dapat ditingkatkan dan status penilaian (opini) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pematang Siantar.

4.2.6. Isu Strategis Nasional dan Global

4.2.6.1. Adaptasi Era Normal Baru Pasca Pandemi Covid-19

Terjadinya pandemi Covid-19 telah berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan dunia. Pandemi Covid-19 membawah tantangan dan perubahan yang tidak pernah terprediksi sebelumnya. Covid-19 merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sejak penemuan pertama kasus positif Covid-19 di Wuhan, Cina. Covid-19 menyebar sangat cepat dan meluas ke hampir seluruh negara di dunia, hingga World Health Organization (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada 9 Maret 2020. Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi di wilayah yang luas dan pada waktu yang bersamaan. Artinya, pandemi Covid-19 merupakan wabah penyakit yang diakibatkan oleh virus SARS-CoV-2 dan terjadi hampir di seluruh wilayah dunia pada waktu yang bersamaan. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) hingga 27 Agustus 2021, total infeksi virus SARS-CoV-2 mencapai 215 juta kasus dengan 4,48 juta kasus meninggal dunia. Pandemi Covid-19 berdampak luas pada aspek kesehatan dunia, dimana masyarakat dunia diharuskan beradaptasi dengan pola kehidupan baru seperti harus sering mencuci tangan, menggunakan handsanitizer, dan menggunakan masker. Selain menyebabkan krisis kesehatan dunia. Pandemi Covid-19 juga berdampak besar terhadap perekonomian dunia. Kinerja perekonomian global mengalami kontraksi yang cukup dalam, sehingga mengakibatkan perekonomian sebagian besar negara-negara di dunia mengalami pertumbuhan negatif bahkan resesi. Berdasarkan data dari Bank Dunia, Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 sebesar -4,3% yoy. Penurunan kinerja perekonomian dunia ini diakibatkan oleh penurunan pertumbuhan ekonomi hampir seluruh negara di dunia. Amerika Serikat mengalami kontraksi ekonomi yang cukup dalam pada triwulan II tahun 2020 yaitu sebesar -9,9%; Kawasan ekonomi Eropa mengalami kontraksi yang lebih dalam lagi pada triwulan II tahun 2020 yaitu sebesar -14,7%. Kebijakan pembatasan kegiatan penduduk secara langsung berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi, karena terbatasnya mobilitas barang dan jasa. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja di beberapa negara. Berdasarkan data Internasional Labour Organization (ILO) pada tahun 2020 akibat terjadinya pandemi Covid-19 sebanyak 195 juta jiwa mengalami pemutusan hubungan kerja. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan krisis multi dimensi di dunia. Dari aspek kesehatan, ekonomi,



tenaga kerja, pendidikan, teknologi, hingga psikologis. Pada tahun 2021, Berdasarkan data Bank Dunia, kinerja perekonomian global telah mengindikasikan adanya peningkatan secara gradual akibat pelonggaran pembatasan mobilisasi masyarakat serta percepatan vaksinasi di beberapa negara di dunia. Namun, Internasional Monetary Fund (IMF) mengestimasi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 sebesar -3,5%.

Pandemi Covid-19 selain memberikan dampak yang negatif, juga memberikan dampak yang positif. Salah satu aspek yang terus menguat saat pandemi adalah penggunaan teknologi informasi. Hal tersebut secara tidak langsung mengharuskan penduduk di seluruh dunia untuk mengupgrade kecakapan digitalnya. Merebaknya wabah Covid-19 beserta penanganannya menimbulkan protokol kesehatan baru yang perlu dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat serta menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sering disebut dengan normal baru. Era dimana kebiasaan-kebiasaan baru tersebut menjadi normal disebut dengan era normal baru. Pada era tersebut, kebiasaan baru tidak hanya timbul pada aktivitas masyarakat sehari-hari termasuk dalam sektor bisnis dan pemerintahan. Normal baru akan mendorong berubahnya cara berkomunikasi, interaksi, dan menjalankan bisnis bagi sebagian besar masyarakat. Perlu adaptasi pada era normal baru ini supaya dapat tetap bersaing terutama dalam berinteraksi dengan pihak luar baik di Indonesia maupun negara lain. Pemerintah Kota Pematang Siantar pada awal tahun 2021 telah melakukan vaksinasi secara bertahap kepada pelayan publik dan masyarakat secara bertahap. Harapannya, masyarakat mulai beraktivitas kembali dengan menerapkan protokol kesehatan dan memandang pandemi Covid-19 sebagai titik tolak dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kota Pematang Siantar yang lebih baik melalui pendekatan Build Back Better dengan berorientasi pada peningkatan ketahanan (resilience) untuk seluruh sektor pembangunan, dan perlahan mulai meninggalkan pendekatan Business as Usual yang tidak responsif dalam menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan saat ini. Kebijakan pembangunan jangka menengah harus benar-benar di desain untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, menjamin kesehatan dalam jangka panjang, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik, dengan demikian Kota Pematang Siantar dapat berkontribusi secara optimal bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

4.2.6.2. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar atau sebagai tempat memproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif



dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen, sebab disisi lain Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau AEC (ASEAN Economic Community) merupakan kesepakatan ekonomi bersama yang dibuat atas integrasi Perbara (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dalam menghadapi perdagangan bebas. Perjanjian ini pertama kali ditetapkan pada Desember 2015 oleh 10 negara Perbara, yaitu Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Laos, Vietnam, dan Singapura. MEA menjadi langkah konkrit negara-negara Asia Tenggara untuk menghadapi persaingan pasar dunia dengan memperkuat hubungan ekonomi antar anggotanya. Tujuan utama dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah peningkatan kesejahteraan dan pemerataan kondisi perekonomian di negara-negara Asia Tenggara.

Selain itu, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga memiliki tujuan tercapainya wilayah Asia Tenggara yang aman, peningkatan pembangunan yang terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Selain tujuan utama tersebut, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga memiliki 4 tujuan secara spesifik berdasarkan cetak birunya:

1. Membantu menciptakan lingkungan kedaerahan yang mendukung inovasi dan ramah bisnis. Tujuan ini dapat tercapai dengan mengadopsi standar, kerangka kerja umum, dan kerja sama mutualisme antarwilayah, seperti dalam kebijakan persaingan, dalam jasa keuangan dan agrikultur, proteksi konsumen, serta hak cipta kekayaan intelektual.
2. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi melalui arus bebas dari investasi, produk, jasa, dan pekerja ahli. Secara kumulatif, pilar ini menargetkan pasar yang lebih liberalis dengan penawaran menjanjikan untuk berdagang dan berbisnis antarwilayah.
3. Membangun integrasi menuju ekonomi global. Pilar ini didorong melalui pendekatan koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal. Misalnya, wilayah pasar bebas dan persetujuan kerja sama ekonomi yang komprehensif. MEA juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam jaringan pasokan internasional.
4. Meraih pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang seimbang sekaligus berkelanjutan. Pilar ini dicapai dengan inisiasi kreatif yang mendorong UKM (Usaha Kecil dan Menengah) untuk berpartisipasi dalam rantai perdagangan antardaerah maupun antarnegeri. MEA fokus pada usaha membangun



kapasitas negara-negara anggota ASEAN yang lebih muda untuk memastikan mereka memiliki integrasi yang efektif dalam komunitas ekonomi. Selanjutnya, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memiliki empat karakteristik utama. Pertama, pasar tunggal dan basis produksi. Kedua, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Ketiga, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Keempat, kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Indonesia sebagai salah satu anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) harus memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan berbagai manfaat dari penetapan MEA, antara lain: (1) Bertambahnya laba negara; (2) Kelancaran kegiatan ekspor; (3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat; (4) Peningkatan investasi dari luar negeri.

4.2.6.3. Revolusi 4.0

Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan cara hidup dan proses kerja manusia secara fundamental, karena kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan antara dunia kehidupan dan digital serta memberikan dampak bagi seluruh disiplin ilmu. Perkembangan teknologi informasi yang berkembang secara pesat menghasilkan berbagai terobosan baru antara lain di bidang artificial intelligent, dimana teknologi komputer dapat mengadopsi keahlian seseorang kedalam suatu aplikasi yang berbasis teknologi dan mengendalikan proses produksinya secara otomatis. Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Pada masa ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik.

Revolusi industri 4.0 menghasilkan berbagai produk dan cara kerja manusia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pada bidang transportasi, revolusi industri 4.0 telah melahirkan berbagai bisnis transportasi online seperti Grab dan Gojek. Sebelumnya tidak ada bayangan akan adanya moda transportasi secara online yang terintegrasi dengan smartphone. Selain di bidang transportasi, perkembangan teknologi dan jaringan juga memunculkan aplikasi-aplikasi belanja online. Hal ini menandakan terjadinya transformasi pasar ke dalam dunia digital. Revolusi industri 4.0 ini telah memberikan optimisme bagi upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang semakin baik ke depan. Namun, dibalik optimisme tersebut terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama, masalah keamanan teknologi informasi. Kedua, keandalan stabilitas mesin produksi. Ketiga, kurangnya keterampilan yang memadai. Keempat, ketidakmampuan untuk berubah oleh pemangku kepentingan. Kelima, hilangnya



banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Pemerintah Nasional telah berusaha melakukan percepatan implementasi revolusi Industri 4.0 di Indonesia melalui inisiasi program “Making Indonesia 4.0”.

Program ini diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian, dimana memiliki sasaran utama menjadikan Indonesia sebagai 10 negara ekonomi terbesar dunia di tahun 2030 dengan tiga aspirasi utama. Pertama, 10 persen kontribusi ekspor netto terhadap PDB. Kedua, dua kali peningkatan produktivitas terhadap biaya. Ketiga, 2% pengeluaran penelitian dan pengembangan (R&D) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Lima sektor industri yang akan menjadi prioritas awal iniasi program “Making Indonesia 4.0” adalah (i) makanan dan minuman, (ii) tekstil dan pakaian, (iii) otomotif, (iv) kimia, dan (v) elektronik. Sektor-sektor tersebut menjadi prioritas karena setelah melalui evaluasi dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran PDB, perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar. Indonesia akan mengevaluasi strategi dari setiap fokus sektor setiap tiga sampai empat tahun untuk meninjau kemajuannya dan mengatasi tantangan pelaksanaannya. Selain menetapkan sektor industri yang akan menjadi prioritas implementasi “Making Indonesia 4.0”. Pemerintah Indonesia juga akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif “Making Indonesia 4.0”, Sepuluh prioritas tersebut ditetapkan berdasarkan evaluasi bahwa hampir seluruh sektor manufaktur Indonesia menghadapi tantangan yang serupa, mulai dari ketersediaan bahan baku domestik hingga kebijakan industri. Beberapa faktor yang menghambat industri Indonesia seringkali bersifat lintas sektoral.

Oleh karenanya, Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif nasional yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia. Sepuluh prioritas tersebut antara lain: (1) Perbaikan alur aliran barang dan material; (2) Desain ulang zona industri; (3) Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability); (4) Memberdayakan UMKM; (5) Membangun infrastruktur digital nasional; (6) Menarik minat investasi asing; (7) Peningkatan kualitas SDM; (8) Pembangunan ekosistem inovasi; (9) Insentif untuk investasi teknologi; (10) Harmonisasi aturan dan kebijakan. Namun, revolusi industri 4.0 ini juga memberikan tantangan dan dampak negatif, antara lain: (1) Peningkatan pengangguran akibat otomatisasi; (2) Kerusakan alam akibat eksploitasi industri; (3) Kemunculan berita bohong akibat kemudahan penyebaran informasi.

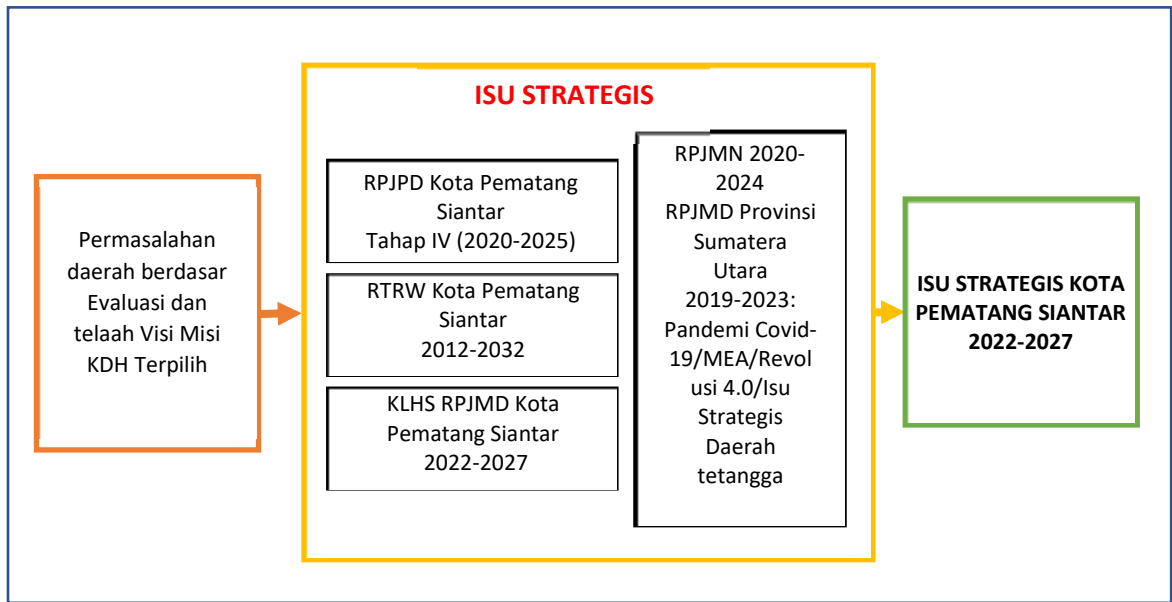
Hal ini perlu mendapat perhatian, sehingga upaya penciptaan transformasi digital yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Untuk menyikapi hal itu, Pemerintah Nasional dan Pemerintah Daerah perlu untuk menyiapkan sumber



daya manusia yang memiliki kemampuan digital yang mumpuni selain itu untuk dapat bersaing di tingkat global, Pemerintah baik di tingkat Nasional maupun Daerah juga harus menyiapkan infrastruktur digital yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.

4.3. Isu Strategis RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Untuk merumuskan isu strategis Kota Pematang Siantar dalam RPJMD Tahun 2022-2027 digunakan komponen sebagai berikut.



Sumber : Analisi Tim Penyusun

Gambar 4.2

Komponen untuk Merumuskan Isu Srategis Kota Pematang Siantar

Berdasarkan gambaran komponen diatas maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mampu menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan juga pendapatan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat (long and healthy life) yang diukur dari angka harapan hidup; pengetahuan (knowledge) yang diukur dari angka melek huruf dan angka harapan lama sekolah; serta standar hidup yang layak (decent standard of living) yang diukur dari kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran pendapatan per kapita. Pada tahun 2016 hingga 2021, IPM Kota Pematang Siantar menunjukkan trend peningkatan dengan capaian sebesar 79,17 pada



tahun 2020. Nilai IPM Kota Pematang Siantar ini berada di atas capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 72 dan IPM Nasional sebesar 72.29. Capaian ini perlu untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan mengingat sumber daya manusia merupakan sumber daya utama yang diperlukan dalam mencapai hasil pembangunan yang baik. Pengembangan sumber daya manusia yang unggul dapat dilakukan dari beberapa faktor secara menyeluruh dan berkelanjutan, baik dari sisi pemenuhan pendidikan, pemenuhan kesehatan, maupun pemenuhan pendapatan. Dilihat dari dimensi pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kota Pematang Siantar berada pada urutan ke 2 setelah Kota Medan sebesar 11,16 Tahun, sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) berada pada urutan ke 3 setelah Kota Medan dan Kota Padangsidempuan. Kedepan, Kota Pematang Siantar dihadapkan pada tantangan pemenuhan mutu yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Sistem pendidikan yang berkualitas harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk usia sekolah termasuk di dalamnya penduduk miskin dan yang berkebutuhan khusus, mulai dari pendidikan jenjang dasar, jenjang menengah, dan jenjang tinggi. Di samping itu, peningkatan budaya literasi dan memperkuat pendidikan budaya dan pendidikan karakter juga menjadi tantangan dalam mengatasi isu kualitas sumber daya manusia. Pada dimensi kesehatan, isu utama yang berkembang sekarang ini adalah ancaman Pandemi Covid-19 yang belum kunjung selesai hingga akhir tahun 2021. Adanya pandemi ini tentunya mengubah tatanan kehidupan normal karena harus beradaptasi dengan protokol kesehatan yang baru guna menekan penyebaran virus ini sehingga usia harapan hidup masyarakat secara keseluruhan dapat diperpanjang karena merupakan salah satu indikator dalam penghitungan indeks pembangunan manusia. Melihat hal tersebut, penanganan kesehatan yang selama ini bergerak secara kuratif diprediksi akan bergeser menjadi tindakan preventif dan promotif. Disamping itu berdasarkan data tahun 2021 meskipun usia harapan hidup Kota Pematangsiantar berada pada urutan ke 1 se Sumatera Utara sebesar 73,77 tahun, namun capaian rumah tangga yang berperilaku hidup sehat dan bersih masih mencapai 41,95%, angka kematian bayi masih ditemukan yang mencapai 0.93/1000 kelahiran hidup, angka kematian ibu mencapai 0.18/100.000 kelahiran hidup dan kematian balita 2,17/1000, sedangkan ibu dan balita merupakan hulu dari pembangunan kualitas sumber daya manusia yang baik ditambah lagi, persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular masih 71,72%, dan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan masih 85.92% belum sepenuhnya mencapai *Universal Health Coverage*.



Dengan demikian, upaya penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi tantangan di bidang kesehatan yang dihadapi Pemerintah Kota Pematang Siantar terkait dengan isu kualitas sumber daya manusia. Penduduk yang sehat tentunya harus didukung dengan kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan nya sehari-hari agar memenuhi standar hidup yang layak. Tahun 2021 pengeluaran perkapita Kota Pematang Siantar yang disesuaikan sebesar 12,436,000 juta berada pada urutan ke 3 setelah Kota Tebing Tinggi dan Kota Medan. Korelasi dari pengeluaran perkapita yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (2020) 12.372.000 juta menunjukkan pengaruh terhadap kemiskinan. Angka kemiskinan di Kota Pematang Siantar tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,52% atau 21,060 ribu penduduk dengan tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimumnya mencapai 583.588 ribu perkapita perbulan, dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 4 jiwa. Sedangkan untuk angka pengangguran menurun 0,5% dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah 14.984 orang. Diasumsikan bantuan dari pemerintah pada masa pandemi mempengaruhi kemampuan memnuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan begitu juga sebaliknya. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin perlu menjadi perhatian untuk bagi Kota Pematang Siantar untuk dapat menjamin harga yang stabil, ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang memenuhi angka kecukupan gizi dan kecukupan energi.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Produk domestik bruto (PDRB) digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Tahun 2021 PDRB Kota Pematang Siantar mengalami peningkatan dari -1,89%. Di tahun 2020 naik menjadi 1,25%. Pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung dan telah sampai pada tahun kedua telah membawa perubahan yang signifikan terutama dalam bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di dunia yang sebelumnya masih positif secara tiba-tiba berubah dan mengalami kontraksi yang mengakibatkan pertumbuhan negatif. Kondisi ini menjadikan pemulihan ekonomi sebagai agenda yang makin penting untuk dilakukan. Termasuk bagi



Kota Pematang Siantar yang pada masa pandemi ini ikut mengalami kontraksi ekonomi. Dampak dari pandemi Covid-19 mengakibatkan angka pengangguran terbuka meningkat. Di tahun 2019 persentase pengangguran sebesar 11,12% di tahun 2020 naik sebesar 11.50%. Khusus di lapangan kerja milik swasta banyak terjadi pengurangan jam kerja, pengurangan tenaga kerja bahkan pemberhentian seluruh pekerja dikarenakan operasional berhenti akibat permintaan yang terus menurun. Data PDRB tahun 2021 dari BPS menunjukkan pertumbuhan Struktur perekonomian Pematang Siantar pada tahun 2021 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 25,67%; Industri Pengolahan sebesar 20,93%; serta Konstruksi sebesar 10,31% persen. Peranan ke tiga lapangan usaha tersebut mencapai 56,91% terhadap total PDRB Pematang Siantar. Persoalan lainnya adalah belum tumbuhnya kolaborasi antar pelaku usaha ditunjukkan dengan capaian usaha mikro kecil menengah sebesar 26,869 unit tapi belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Oleh karena itu tantangan penguatan daya saing UMKM menjadi perhatian yang perlu didukung oleh peningkatan akses fasilitasi pembiayaan dari Koperasi sehingga produktivitas dan daya saing UMKM meningkat. Penguatan UMKM secara inklusif adalah upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat dan akan mengurangi kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan akan semakin berkurang. Pertumbuhan Industri kecil dan menengah juga menunjukkan angka pertumbuhan yang belum optimal seiring dengan realisasi nilai investasi. Faktor penghambat seperti Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematang Siantar yang belum selesai dan pembebasan lahan 573 Ha Tanjung Pinggir Ex-PTPN IV yang dapat untuk dikembangkan sebagai kawasan industri dan perkantoran belum juga selesai.

Kota Pematang Siantar memiliki luas lahan produksi pangan sebesar 1622,31 Ha. Hal ini merupakan peluang selain hasil produksi pertanian mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri tapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang kondisi Tahun 2021 Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Pematang Siantar adalah 97,56% masih di bawah <100, sehingga daerah tidak hanya mengandalkan sektor perdagangan dan jasa. Selain hal tersebut diatas berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Pematang Siantar adalah adanya bonus demografi dimana keberadaan penduduk usia produktif lebih besar dibanding penduduk usia non produktif, hal ini ditunjukkan dengan



rasio ketergantungan mencapai nilai tahun 2020 sebesar 47,16%. Adanya bonus demografi ini menjadi tantangan ke depan karena harus dapat dimanfaatkan guna mendorong percepatan pembangunan daerah dengan memaksimalkan penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja penggerak roda pembangunan dengan tetap mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ditambah lagi dengan lapangan kerja yang tersedia hanya mampu untuk menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terbesar adalah lulusan setingkat SMA/SMK mencapai 30,59% sedangkan lulusan setingkat Universitas hanya 16,90 % dari jumlah penduduk yang bekerja ditahun 2021 sebesar 121.228 orang. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan daya saing angkatan kerja sehingga mampu bersaing memperebutkan kesempatan kerja tidak hanya di Kota Pematang Siantar, namun juga di luar wilayah Kota Pematang Siantar khususnya kesempatan yang ada dengan saat ini dengan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Kawasan Indusri Strategis Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara dan Pembangunan Super Prioritas Nasional Pariwisata Danau Toba dan upaya ini pastinya akan menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan sehingga tujuan akhir untuk masyarakat Kota Pematang Siantar yang sejahtera dapat dicapai.

3. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi Birokrasi terhadap 8 area perubahan bertujuan untuk terjadi perubahan yang sistematis dan konsisten agar pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja menjadi lebih baik. Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik. Peta jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk periode 2020-2024 adalah menekankan pada *Dynamic Governance*, dimana visi yang diusung adalah “Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia”. Pada tahun 2024 pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan semakin baik yang ditandai dengan:



1. Tidak ada korupsi;
2. Tidak ada pelanggaran;
3. APBD baik;
4. Semua program selesai dengan baik;
5. Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. Komunikasi dengan publik baik;
7. Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. Penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan;
9. Hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan).

Untuk mencapai kondisi di atas setidaknya perlu ditempuh dengan strategi sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan diperlukan dalam menguatkan *leadership* dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama sehingga terwujud rasa memiliki (*ownership*) dalam organisasi;
2. Implementasi reformasi birokrasi sampai unit kerja, diperlukan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja individu dalam organisasi;
3. Pemilihan program dan kegiatan yang tepat untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi bermakna perlu adanya ketelitian dalam menentukan program dan kegiatan yang bersifat *solving problem*, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan, mewujudkan organisasi yang kredibel, dan
4. Meningkatkan pelayanan prima bukan hanya di level atas, juga sampai di unit kerja terkecil;
5. Peningkatkan kualitas manajemen reformasi birokrasi (*plan, do, check, action*)
6. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta tindak lanjut secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang sedang dijalankan tetap dijalurnya dan memiliki umpan balik perbaikan secara kolaboratif.

Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Pematang Siantar ditunjukkan dengan capaian nilai Indeks Reformasi dan SAKIP yang masih dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan masih perlunya penguatan kompetensi, membangun budaya kerja yang profesional dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah. Lebih lanjut diperlukan upaya penyesuaian struktur organisasi, tugas dan fungsi dan jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih optimal dalam peningkatan



kualitas dan akselerasi pelayanan publik. Aspek penting lainnya adalah peningkatan kapasitas fiskal dan manajemen keuangan daerah sebagai input dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan perlunya pelayanan yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa indikator yang mendukung implementasi Reformasi Birokrasi;

1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Survei Kepuasan masyarakat melalui perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik secara teratur
3. Akuntabilitas perencanaan dan penganggaran melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas APIP
5. Merit sistem dan Indeks Profesionalitas ASN.

4. Infrastruktur Kota dan Lingkungan

Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas bagi pemerintah pusat dengan agenda memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Jalan merupakan salah satu infrastruktur penting dalam mendukung kegiatan perekonomian. Dari total panjang jalan di Kota Pematang Siantar adalah 395,187 Km, terdiri dari 17,491 adalah jalan Nasional, 12,320 jalan Provinsi dan 364,376 kewenangan Kota. Tahun 2021 capaian rasio jalan dalam kondisi baik sebesar 81,12%. Disamping itu, kondisi penggunaan air bersih oleh rumah tangga masih mencapai 97,56%, belum sepenuhnya mencapai target nasional (100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi). Permasalahan infrastruktur publik lainnya adalah proyek jalan lingkar luar (outer ringroad) yang sampai pada saat belum selesai, dan masih ada beberapa ruas jalan yang mengalami genangan air ketika hujan turun yang cukup mengganggu pengendara yang diakibatkan sistem drainase yang tidak baik. Perkembangan di tingkat global saat ini semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dengan menelaah kondisi lingkungan hidup saat ini dari data yang ada terkait kualitas lingkungan hidup menunjukkan bahwa Kota Pematang Siantar masih memiliki persoalan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator kinerja yang mencerminkan tingkat pencemaran lingkungan. Indeks ini dihitung berdasarkan tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan (ITH). Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar, pada Tahun 2020 Nilai IKLH mengalami penurunan



dari 59,95 di tahun 2019 menurun menjadi 58,68, angka ini termasuk pada kategori “kurang baik” namun meningkat di Tahun 2021 menjadi 62,17. Apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat bukan tidak mungkin dapat menimbulkan ancaman, seperti krisis air bersih dan pangan. Disamping itu dalam pengelolaan persampahan, jumlah sampah yang terangkut berdasarkan pencatatan di TPA Tanjung Pinggir TPA adalah sebesar 72,4% dari timbunan sampah harian sebanyak 179,87 ton/hari atau 514 m³/hari, hanya 17,6% yang terkelola melalui kegiatan pengomposan, pemulung/lapak barang bekas, kerajinan 3R dan sebagainya, sisanya $\pm 10\%$ tidak terkelola karena tidak terjangkau layanan pengangkutan sampah. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya kasus pencemaran lingkungan baik sebagai akibat kian padatnya penduduk, maupun masih rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup sehat dan bersih. Pemerintah Kota Pematang Siantar dalam perlu melakukan penanganan secara berkelanjutan guna memastikan keberlanjutan dari kualitas lingkungan hidup yang tetap baik. Keterkaitan antar-isu merupakan bagian yang penting untuk dipahami, perlu adanya analisis keterkaitan antar isu strategis, sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terealisasi. Berdasarkan pembahasan sebelumnya berikut disajikan keterkaitan antara isu strategis yang tersaji pada tabel berikut.



Tabel 4.3
Sandingan Isu-Isu Strategis

No	Bidang	Isu Strategis RPJPD Kota Pematang Siantar 2015-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027	Isu Strategis RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023	Isu Strategis RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Simalungun 2021-2026
1	Sosial Budaya	1. Kesehatan 6. Sosial, Budaya dan Politik;	1. Pengelolaan Keluarga Sehat	1. Pendidikan 2. Kesehatan 6. Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	1. Pemenuhan layanan dasar 2. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, 3. Perlindungan sosial 4. Pengentasan kemiskinan, dan produktivitas dan daya saing 5. Pengendalian penduduk 6. Pemajuan budaya belum optimal, 7. Pendidikan karakter dan budi pekerti, nilai budaya dan agama melemah 8. Toleransi dan kerukunan serta peningkatan peran keluarga.	1. Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Pemulihan ekonomi dan penanganan Pandemi COVID-19
2	Ekonomi	2. Pariwisata 4. Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Investasi;	5. Pertumbuhan ekonomi Kota	3. Ketenagakerjaan 4. Agraris 5. Pariwisata	1. Efektifitas tata kelola sumberdaya ekonomi, 2. Transformasi struktural ekonomi berjalan lambat, 3. Revolusi 4.0 dan ekonomi digital 4. Ketimpangan wilayah	2. Pertumbuhan Ekonomi	9. Peningkatan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar 2. Penetapan Kaldera Toba sebagai Unesco Global Geopark (UGG) 3. Percepatan pengentasan kemiskinan daerah 4. Pemantapan pengembangan perekonomian berkelanjutan 5. Optimalisasi kualitas SDM dalam persaingan pasar kerja
3	Tata Kelola Pemerintahan	7. Pemerintahan Kota (Kelembagaan)	4. Pengelolaan Pelayanan Masyarakat 7. Pemantapan tata kelola	7. Reformasi Birokrasi	1. Demokrasi 2. Penegakan hukum	3. Tata Kelola Pemerintahan	7. Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi



No	Bidang	Isu Strategis RPJPD Kota Pematang Siantar 2015-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027	Isu Strategis RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023	Isu Strategis RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Simalungun 2021-2026
			Pemerintahan		3. Reformasi birokrasi dan tata kelola 4. Menurunkan tindakan kriminal dan radikalisme.		8. Penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
4	Infrastruktur dan Lingkungan	3. Sarana dan Prasarana Kota (Perhubungan, Drainase, Pengairan, Komunikasi, Listrik, Air bersih dan Penataan Ruang) 5. Geomorfologi Dan Lingkungan Hidup;	1. Penataan ruang 2. Penurunan kualitas lingkungan hidup 6. Kesiapsiagaan penanganan bencana alam	8. Infrastruktur	1. Infrastruktur pelayanan dasar(Jalan, air minum dan sanitasi layak dan aman, keselamatan dan keamanan transportasi, komunikasi, perumahan dan permukiman layak) 2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan rendah karbon	4. Infrastruktur dan Lingkungan	6.Peningkatan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar

Sumber : Analisis Tim Penyusun



BAB V

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi merupakan kaidah umum yang berkaitan dengan keadaan yang ingin dicapai pada periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat dimaknai sebagai pandangan atau wawasan ke depan. Visi Kota Pematang Siantar periode 2022-2027 dirumuskan dengan mempertimbangkan capaian-capaian yang telah berhasil dilaksanakan pada pemerintahan periode sebelumnya. Selain mempertimbangkan capaian yang telah berhasil tersebut, visi memuat permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah yang direncanakan di masa mendatang. Penetapan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 tidak dapat dipisahkan dari visi pembangunan jangka panjang yang telah tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Pematang Siantar tahun 2005-2025. Dengan pertimbangan-pertimbangan arah pembangunan, kondisi, masalah, tantangan, dan isu-isu strategis, maka Visi Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 adalah;

Terwujudnya Kota Pematang Siantar
Sehat, Sejahtera dan Berkualitas

Dalam visi tersebut memuat pokok visi yang akan dicapai dalam waktu 5 tahun kedepan. Penjabaran pokok-pokok visi sebagai berikut:

Tabel 5.1
Penjelasan Visi RPJMD

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas	Sehat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau paska Pandemic Covid-19.
	Sejahtera	Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan



Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
		ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemi Covid-19.
	Berkualitas	Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

5.2. Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 harus mendukung tercapainya visi “Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera Dan Berkualitas” Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Pematang Siantar yang telah ditetapkan, maka misi pembangunan Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 sebagai berikut.

Tabel 5.2
Penjelasan Misi RPJMD

Misi	Penjelasan Misi
1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas	Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar
2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19	Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif,	Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan



Misi	Penjelasan Misi
efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>corporate governance</i> .	penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang profesional
4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.	Bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota Pematang Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah
5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.	Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan

Gambaran atas uraian visi dan misi selanjutnya dapat dilihat dalam ilustrasi struktur berikut.



Analisis Tim Penyusun

Gambar 5.1
Struktur Visi dan Misi



Dalam rangka mendapatkan kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan diperlukan keselarasan dan konsistensi. Keselarasan hubungan antara Visi dan Misi ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.3
Keselarasan RPJPD dan RPJMD Kota Pematang Siantar

RPJPD KOTA PEMATANG SIANTAR 2005-2025		RPJMD KOTA PEMATANG SIANTAR 2022-2027	
VISI			
Mewujudkan Kota Pematang Siantar sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, yang Mantap, Maju dan Jaya, dengan dukungan sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pariwisata		Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas	
MISI			
Misi 1	Mengembangkan Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Misi 4	Meningkatkan tata kelola pemerintaban yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan coorporate governance.
Misi 2	Mendorong Terwujudnya Masyarakat Madani (Civil Society) dengan Budaya Politik dan Hukum yang Beradab dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional dan Budaya Multikultural.	Misi 4	Meningkatkan tata kelola pemerintaban yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan coorporate governance.
Misi 3	Mendorong Pembangunan Masyarakat yang Berkualitas dan Mampu Menguasai serta Menerapkan Sains dan Teknologi Tanpa Mengabaikan Nilai-Nilai Budaya Lokal	Misi 1	Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas
Misi 4	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Disertai dengan Upaya Perbaikan Pendapatan Masyarakat	Misi 2	Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pascapandemi covid-19
		Misi 3	Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.
Misi 5	Mengembangkan Pembangunan Ruang dan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Misi 5	Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.



Tabel 5.4
Keselarasan PRPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kota Pematang Siantar

PERUBAHAN RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA 2019-2023		RPJMD KOTA PEMATANG SIANTAR 2022-2027	
VISI			
Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat		Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas	
MISI			
Misi 1	Bermartabat dalam kehidupan : Mewujudkan masyarakat sumatera utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup,rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan serta harga-harga yang terjangkau.	Misi 1	Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas
		Misi 2	Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pascapandemi covid-19
		Misi 3	Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.
Misi 2	Bermartabat dalam politik: Mewujudkan sumatera utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika,masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.	Misi 4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan coorporate governance.
Misi 3	Bermartabat dalam pendidikan: mewujudkan sumatera utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	Misi 1	Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas
Misi 4	Bermartabat dalam pergaulan: Mewujudkan sumatera utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.	Misi 4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan coorporate governance.
Misi 5	Bermartabat dalam lingkungan: Mewujudkan sumatera utara yang bermartabat dalam	Misi 5	Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur,



PERUBAHAN RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA 2019-2023		RPJMD KOTA PEMATANG SIANTAR 2022-2027	
	lingkungan karena ekologi yang terjaga,alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya,berprikemanusiaan dan beradab.		keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Tabel 5.5
Keselarasan RPJMN dan RPJMD Kota Pematang Siantar

RPJMN 2020-2024		RPJMD KOTA PEMATANG SIANTAR 2022-2027	
VISI			
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas	
MISI			
Misi 1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;	Misi 1	Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas
Misi 2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;	Misi 2	Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pascapandemi covid-19
Misi 3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;	Misi 3	Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.
Misi 4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi 5	Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.
Misi 5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;	Misi 1	Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas
Misi 6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Misi 4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan coorporate governance.
Misi 7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;	Misi 1	Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas



RPJMN 2020-2024		RPJMD KOTA PEMATANG SIANTAR 2022-2027	
Misi 8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;	Misi 4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.
Misi 9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Tujuan dan sasaran RPJMD menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra seluruh Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dalam RPJMD merupakan suatu kondisi yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun, yang dirumuskan secara teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, melalui penelaahan arah kebijakan dan sesuai dengan RPJPD Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025, RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada Bab IV sebelumnya.

Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kota Pematang Siantar sampai dengan Tahun 2027. Sementara itu, Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Dalam upaya mewujudkan satu misi yang telah ditetapkan tersebut, dapat memuat satu atau lebih tujuan maupun sasaran. Berikut ini perumusan tujuan pembangunan untuk masing-masing misi sesuai dengan visi misi Kepala Daerah terpilih sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum yang ditunjukkan dalam tabel 5.6 dan seterusnya dilakukan turunan dari tujuan (*cascading*) sehingga diperoleh sasaran yang ditunjukkan dalam tabel 5.7 dibawah ini.



Tabel 5.6
Perumusan Tujuan Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

VISI MISI STRATEGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG DISAMPAIKAN KE KPU					HASIL PERUMUSAN TUJUAN
VISI	MISI		STRATEGI		
Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas	1	Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas	1	Meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata, terjangkau dan tersampaikan serta berkelanjutan, khususnya pandemi Covid-19	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
			2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehat rohani dan jasmani serta pemberdayaan masyarakat.	
			3	Meningkatkan dan memfasilitasi tatanan kehidupan budaya lokal dan ragam budaya, suku, dan agama yang toleran.	
			4	Meningkatkan pelestarian dan kreasi budaya lokal dan prestasi olahraga yang berdaya saing.	
	2	Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19	1	Mewujudkan Regulasi Sosialisasi Protokol Kesehatan Yang Ketat tersampaikan ke masyarakat dan pelaku UMKM	2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3. Merwujudkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata (Misi 2 dan 4 digabung karena memiliki dampak outcome yang sama di bidang ekonomi)
			2	Membangun Sistem Informasi Ekonomi dan Potensi Kawasan	
			3	Memfasilitasi Penguatan Pertumbuhan Usaha Kecil dan pasar-pasar tradisional	
			4	Meningkatkan daya saing Pelaku Ekonomi Kota	
			5	Membangun Sentra Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Stimulus Permodalan UMKM	
			6	Meningkatkan Akses Kerjasama dengan Investasi Lokal dan Luar dalam meningkatkan Badan Usaha maupun kemitraan bisnis swasta.	
	4	Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai	1	Meningkatkan inovasi, kreavitas dan produktivitas kegiatan usaha non formal, UMKM, industri, perdagangan dan jasa	



VISI MISI STRATEGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG DISAMPAIKAN KE KPU					HASIL PERUMUSAN TUJUAN
VISI	MISI		STRATEGI		
		subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.	2	Menyusun program-program kegiatan yang tersistem (sistemik)	
			3	Mewujudkan kota satelit sebagai pusat pertumbuhan baru di kecamatan	
			4	Meningkatkan daya tarik dan sentralitas Kota sebagai Pusat perdagangan dan Jasa	
			5	Mengembangkan sektor unggulan dan komoditas unggulan/andalan di tiap wilayah kecamatan.	
			6	Mengembangkan dan revitalisasi infrastruktur perdagangan, pergudangan, pendidikan, industri rumah tangga, usaha informal, UMKM dan Koperasi.	
	3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.	1	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan	4. Merwujudkan reformasi tata kelola pemerintahan
			2	Melakukan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi	
			3	Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dan aparatur terhadap penegakan hukum dan HAM.	
			4	Menerapkan dan menyempurnakan sistem <i>reward dan punishment</i> dalam peningkatan kinerja	
			5	Mewujudkan birokrasi yang ramah, gesit, terampil dan responsif.	
			6	Membangun kemitraan dengan lembaga atau badan pendidikan untuk penguatan tata kelola pemerintahan	
5	Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan	1	Mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	5. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan	



VISI MISI STRATEGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG DISAMPAIKAN KE KPU				HASIL PERUMUSAN TUJUAN
VISI	MISI		STRATEGI	
		infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.	<div>2</div> <div>Meningkatkan infrastruktur, pemukiman dan sanitasi serta drainase perkotaan yang nyaman, merata dengan konsep maju, hijau dan humanis.</div> <div>3</div> <div>Meningkatkan sistem transportasi yang nyaman, aman, efisien, memadai handal dan ramah lingkungan</div> <div>4</div> <div>Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal.</div> <div>5</div> <div>Mengoptimalkan penggunaan lahan sesuai fungsinya.</div>	

Sumber: Analisis Tim Penyusun



Tabel 5.7
Penjenjangan Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

NO	MISI		TUJUAN		SASARAN	
1	MISI 1	Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas	Tujuan 1.1	Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas	Sasaran 1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
					Sasaran 1.1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
					Sasaran 1.1.3	Meningkatnya kehidupan harmonis masyarakat
2	MISI 2	Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19	Tujuan 2.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 2.1.1:	Menurunnya angka kemiskinan
	MISI 4	Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.	Tujuan 2.2	Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas dan merata	Sasaran 2.1.2:	Menurunnya angka pengangguran
					Sasaran 2.2.1:	Meningkatnya kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah
					Sasaran 2.2.2:	Meningkatnya investasi daerah
3	MISI 3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance	Tujuan 3.1	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan	Sasaran 3.1.1:	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
					Sasaran 3.1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja
					Sasaran 3.1.3	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah
4	MISI 5	Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.	Tujuan 4.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan	Sasaran 4.1.1	Meningkatnya infrastruktur kota sesuai dengan peruntukannya
					Sasaran 4.1.2	Meningkatnya keseimbangan lingkungan hidup

Sumber: Analisis Tim Penyusun



Lebih lanjut dijabarkan tujuan dan sasaran beserta indikatornya sesuai dengan desain penjenjangan pencapaian setiap dari misi dibawah ini.

5.3.1. Tujuan dan Sasaran Misi 1

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 1 yakni “Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas” dan pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 1 RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 diuraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran agar dapat dengan mudah dipahami melalui desain penjenjangan yang disajikan sebagai dalam gambar berikut.

Misi 1	Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas		
Tujuan	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas		
Indikator	Indeks Pembangunan Manusia		
Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya kehidupan harmonis masyarakat
Indikator	1. Usia Harapan Hidup 2. Prevelensi Stunting	1. Rata-Rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah	% Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Urusan	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Pendidikan	Trantibum

Gambar 5.2
Penjenjangan Misi 1

5.3.2. Tujuan dan Sasaran Misi 2 dan 4

Misi kedua adalah “Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19” dan sedangkan Misi keempat adalah “Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara”. Hasil analisis tim penyusun RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 bahwa Misi kedua dan Misi keempat memiliki dampak yang sama di bidang ekonomi, agar lebih selaras maka 2 misi tersebut di gabung dengan 2 indikator tujuan. Berikut desain penjenjangan Misi ke 2 dan 4 disajikan.



Misi 2	2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19			
Misi 4	4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara			
Tujuan	1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata			
Indikator	1.1. Persentase Angka Kemiskinan 1.2. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka 2.1. Laju Pertumbuhan ekonomi 2.2. Indeks Gini			
Sasaran	Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya angka pengangguran	Meningkatnya kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Meningkatnya investasi daerah
Indikator	Persentase penurunan PPKS	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	1. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha 2. Persentase sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persentase Peningkatan investasi
Urusan	Sosial	Tenaga Kerja	Koperasi, Perdagangan	Penanaman Modal

Gambar 5.3
Penjenjangan Misi 2 dan 4

5.3.3. Tujuan dan Sasaran Misi 3

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 3 yakni “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance” berikut desain penjenjangannya.

Misi	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance		
Tujuan	Mewujudkan reformasi Tata Kelola Pemerintahan		
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi		
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah
Indikator	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Publik (SAKIP) 2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Derajat desentralisasi fiskal
Urusan	Unsur Pendukung Pemerintahan, Kewilayahan, Kominfo	Perencanaan, Pengawasan, Unsur Pendukung Pemerintahan, Keuangan	Keuangan

Gambar 5.4
Penjenjangan Misi 3



- 5.3.4. Tujuan dan Sasaran Misi 5
- Sebagai upaya untuk mencapai Misi 5 yakni “Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.” berikut penjenjangan nya.

Misi 5	Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.	
Tujuan	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan	
Indikator	Indeks Infratsruktur	
Sasaran	Meningkatnya infrastruktur kota sesuai dengan peruntukannya	Meningkatnya keseimbangan lingkungan hidup
Indikator	Persentase kesesuaian tata ruang	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Persentase sampah perkotaan yang tertangani
Urusan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lingkungan Hidup

Gambar 5.5
Penjenjangan Misi 5

Dalam tabel 5.8 dibawah ini dilakukan turunan dari visi misi tujuan sasaran dan indikator beserta targetnya secara lengkap dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2027.



Tabel 5.8
Rumusan Misi Tujuan Sasaran dan Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022-2027

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Formula	Sumber	Satuan	Kondisi Awal			Target (Proyeksi)					Kondisi Akhir 2027	Urusan	
						Realisasi 2020	Realisasi 2021	Proyeksi 2022	2023	2024	2025	2026	2027			
VISI : Mewujudkan Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas"																
1	MISI 1 :	Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas														
	Tujuan 1.1 :	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = 1/3 [X_{01} + X_{02} + X_{03}]$	PMDN 86 Tahun 2017	Indeks	78,75	79,17	(79,17-79,65)	(79,65-80,13)	(80,13-80,61)	(80,61-81,10)	(81,10-81,59)	(81,59-82,09)	82,09	IKU Kota
	Sasaran 1.1.1 :	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	$UHH = \frac{AHH - AHH_{2017}}{AHH_{2020} - AHH_{2017}}$	PMDN 86 Tahun 2017	Tahun	73,55	73,77	73,88	73,91	74,13	74,53	74,82	75,06	75,06	Kesehatan
			Prevelensi Stunting	Jumlah Balita Stunting tahun n / Jumlah antropometri tahun n x100%	Permenkes 20 Tahun 2020	%	1,1	1,3	13,17	11,08	8,96	7	6	5	5	Kesehatan
	Sasaran 1.1.2 :	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	PMDN 86 Tahun 2017	Tahun	11,16	11,29	11,38	11,48	11,58	11,67	11,77	11,87	11,87	Pendidikan
			Harapan Lama Sekolah	$HLS = \sum_{i=1}^n \frac{E_i}{P_i}$	PMDN 86 Tahun 2017	Tahun	14,45	14,57	14,67	14,77	14,87	14,97	15,07	15,17	14,67	Pendidikan
	Sasaran 1.1.3 :	Meningkatnya kehidupan harmonis masyarakat	% Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani/ Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%	PMDN 18 Tahun 2020	%	84,8	90	90	90	90	90	90	90	90	Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator	Formula	Sumber	Satuan	Kondisi Awal			Target (Proyeksi)					Kondisi Akhir 2027	Urusan
							Realisasi 2020	Realisasi 2021	Proyeksi 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
2	MISI 2 :	Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19														
	MISI 4 :	Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.														
	Tujuan 2.1 :	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	% Tingkat Kemiskinan	$P_k = \frac{J_k}{J} \times 100\%$	PMDN 86 Tahun 2017	%	8,27	8,52	(8,52-8,46)	(8,46-8,07)	(8,07-7,69)	(7,69-7,30)	(7,30-6,92)	(6,92-6,53)	6,53	IKU Kota
			% Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{P_p}{P_k} \times 100\%$	PMDN 86 Tahun 2017	%	11,50	11,00	(11-10,40)	(10,40-9,74)	(9,74-8,57)	(8,57-7,46)	(7,46-6,41)	(6,41-5,28)	5,28	IKU Kota
	Sasaran 2.1.1 :	Menurunnya angka kemiskinan	% Penurunan PPKS/PMKS	(Jumlah PPKS tahun n - jumlah PMKS tahun n-1) /Jumlah PMKS tahun n-1	Mandiri	%	0,81	0,18	0,08	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,09	Sosial
	Sasaran 2.1.1 :	Menurunnya angka pengangguran	% Tenaga Kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan/ Jumlah pencaker yang terdaftar x 100%	PMDN 18 Tahun 2020	%	44,39	61,81	64,28	66,67	68,75	70,58	72,00	73,69	73,69	Tenaga Kerja
	Tujuan 2.2 :	Mewujudkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	PDRB tahun n- PDRB tahun n-1/PDRB tahun n-1 x 100%	PMDN 86 Tahun 2017	%	-1,89	1,25	(1-25-2,21)	(2,21-3,38)	(3,38-4,54)	(4,54-5,72)	(5,72-6,89)	(6,89-7,08)	7,08	IKU Kota
			Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(Q_i + Q_{i-1})$	PMDN 86 Tahun 2017	Indeks	0,336	0,307	0,307-0,305	0,305-0,300	0,300-0,295	0,295-0,290	0,290-0,285	0,285-0,280	0,280	IKU Kota



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator	Formula	Sumber	Satuan	Kondisi Awal			Target (Proyeksi)					Kondisi Akhir 2027	Urusan
							Realisasi 2020	Realisasi 2021	Proyeksi 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	Sasaran 2.2.1 :	Meningkatnya kontribusi UMKM dan Sektor unggulan daerah	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha/ Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	PMDN 18 Tahun 2020	%	2,87	2,94	3,01	3,08	3,15	3,22	3,29	3,36	3,36	Koperasi dan UMKM
			% Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap/dibagi Jumlah PDRB x100%	PMDN 86 Tahun 2017	%	25,28	25,67	25,92	26,19	26,45	26,72	26,98	27,24	27,24	Perdagangan
	Sasaran 2.2.2 :	Meningkatnya investasi daerah	% peningkatan investasi	Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1/ Jumlah investasi tahun n-1 x 100%	PMDN 18 Tahun 2020	%	20	48	50	52	54	56	58	60	60	Penanaman Modal
3	MISI 3 :	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance														
	Tujuan 3.1 :	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian Kemenpan RB	Permenpan RB 26 Tahun 2020	Indeks	C (40,47)	C (42,39)	C (42,39-45)	C (45-50)	B (50-61)	B (61-65)	B (65-67)	B (67-70)	B (70)	IKU Kota Unsur Pendukung



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator	Formula	Sumber	Satuan	Kondisi Awal			Target (Proyeksi)					Kondisi Akhir 2027	Urusan
							Realisasi 2020	Realisasi 2021	Proyeksi 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
																Urusan Pemerintahan Setdako
	Sasaran 3.1.1 :	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Survei Mandiri	Permenpan RB 14 Tahun 2017	Indeks	C (70)	C (73,36)	C (73,36-76,)	B (76-78)	B (78-80)	B (80-82)	B (82-84)	B (84-86)	B (84-86)	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Setdako
			Indeks SPBE	Penilaian Kemenpan RB	Permenpan RB 59 Tahun 2020	Indeks	NA	Kurang (1,53)	Baik (2,604)	Baik (2,854)	Baik (2,994)	Baik (3,187)	Sangat Baik (3,409)	Sangat Baik (3,563)	Sangat Baik (3,563)	Kominfo
	Sasaran 3.1.2 :	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Penilaian Kemenpan RB	Permenpan RB 12 Tahun 2015	Nilai	C (40,14)	C (40,57)	C (40,57-50)	CC (50-55)	B (55-61)	B (61-65)	BB (65-71)	BB (71-75)	BB (71-75)	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Setdako Perencanaan, Pengawasan
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	$IPKD = (A \times 15) + (B \times 20) + (C \times 15) + (D \times 20) + (E \times 15) + (F \times 15)$ A = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran B = Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	PMDN 19 Tahun 2020	Skor	(32,54)	(32,54-40)	(40-43)	(43-47)	(47-52)	(52-57)	(57-60)	(60-63)	63	Perencanaan, Keuangan Kominfo



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator	Formula	Sumber	Satuan	Kondisi Awal			Target (Proyeksi)					Kondisi Akhir 2027	Urusan
							Realisasi 2020	Realisasi 2021	Proyeksi 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				C = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah D = Penyerapan anggaran E = Kondisi keuangan daerah F = Opini BPK atas LKPD Penilaian Kemendagri												
	Sasaran 3.1.3 :	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	$ddf = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	Mandiri	%	12.88	18,71	14.54	14.88	15.53	16.09	16.68	17.28	17.28	Keuangan
4	MISI 5 :	Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.														
	Tujuan 5.1 :	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan	Indeks infrastruktur	Perhitungan data kualitas infrastruktur, yaitu kondisi Jalan, Irigasi, akses Air minum, Persampahan, Limbah, dan rumah layak huni	Mandiri	Indeks	NA	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.92	IKU Kota Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator	Formula	Sumber	Satuan	Kondisi Awal			Target (Proyeksi)					Kondisi Akhir 2027	Urusan
							Realisasi 2020	Realisasi 2021	Proyeksi 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	Sasaran 5.1.1 :	Meningkatnya infrastruktur kota sesuai dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian tata ruang (Ketaatan terhadap RTRW)	$\text{Realisasi RTRW/ Rencana Peruntukan} \times 100\%$	PMDN 86 Tahun 2017	%	62,00	62,00	63,00	64,80	66,05	68,05	70,05	72,05	72,05	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
	Sasaran 5.1.2 :	Meningkatnya keseimbangan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$PI_L = \sqrt{\frac{(C_i/I_{ij})^2 + (C_j/I_{ij})^2}{2}}$	PMDN 18 Tahun 2020	Indeks /skor	58,77	59,29	59,94	60,35	60,76	61,17	61,58	61,99	61,99	Lingkungan Hidup
			Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Total volume sampah yang dapat ditangani/ Total vol timbunan sampah kota x 100%	PMDN 18 Tahun 2020	%	93,81	93,81	100	100	100	100	100	100	100	Lingkungan Hidup

Sumber: Analisis Tim Penyusun



Visi, misi, tujuan dan sasaran diharapkan dapat memberikan jawaban atas berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Pematang Siantar. Pada Bab II dan IV sebelumnya telah dijelaskan mengenai permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kota Pematang Siantar disertai dengan isu-isu strategis untuk diselesaikan. Beberapa isu-isu strategis lain seperti isu strategis nasional dan global yang secara langsung maupun secara tidak langsung akan berpotensi mempengaruhi capaian pembangunan Kota Pematang Siantar hingga tahun 2027. Berikut ditunjukkan sandingan antara isu strategis yang diharapkan dapat diatasi dengan dengan misi, tujuan, dan sasaran beserta indikatornya dan sandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Pematang Siantar yang ditunjukkan dalam Tabel 5.9, Tabel 5.10 dibawah ini.



Tabel 5.9
Sandingan Isu Strategis dengan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator

No	Isu Strategis RPJPD Kota Pematang Siantar 2015-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027	Isu Strategis RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023	Isu Strategis RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027	Misi RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	1. Kesehatan 6. Sosial, Budaya Dan Politik;	3. Pengelolaan Keluarga Sehat	1. Pendidikan 2. Kesehatan 6. Sosial kemasyarakatan dan olahraga	1. Pemenuhan layanan dasar 2. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, 3. Perlindungan sosial 4. Pengentasan kemiskinan, dan produktivitas dan daya saing 5. Pengendalian penduduk 6. Pemajuan budaya belum optimal 7. Pendidikan karakter dan budi pekerti, nilai budaya dan agama melemah 8. Toleransi dan kerukunan serta peningkatan peran keluarga.	Kualitas Sumber Daya Manusia	Misi 1 : Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	IPM	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup 2. Prevelensi Stunting
									Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah
									Meningkatnya kehidupan harmonis masyarakat	% Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan



No	Isu Strategis RPJPD Kota Pematang Siantar 2015-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027	Isu Strategis RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023	Isu Strategis RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027	Misi RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
2	2. Pariwisata 4. Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Investasi	5. Pertumbuhan ekonomi kota	3. Ketenaga kerjaan 4. Agraris 5. Pariwisata	1. Efektifitas tata kelola sumberdaya ekonomi 2. transformasi struktural ekonomi berjalan lambat, 3. revolusi 4.0 dan ekonomi digital 4. Ketimpangan wilayah	Pertumbuhan Ekonomi	Misi 2 : Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19 Misi 4 : Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. % Penduduk Miskin 2. % Tingkat Pengangguran Terbuka	Menurunnya angka kemiskinan	% Penurunan PPKS/ PMKS
									Menurunnya angka pengangguran	% Tenaga Kerja yang ditempatkan
							Meningkatkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Indeks Gini	Meningkatnya kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	1. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha 2. % sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB



No	Isu Strategis RPJPD Kota Pematang Siantar 2015-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027	Isu Strategis RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023	Isu Strategis RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027	Misi RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
									Meningkatnya investasi daerah	% Peningkatan investasi
3	7. Pemerintahan Kota (Kelembagaan)	4. Pengelolaan Pelayanan Masyarakat 7. Pemantapan tata kelola pemerintahan	7. Reformasi Birokrasi	Demokrasi, penegakan hukum dan reformasi birokrasi dan tata kelola serta menurunkan tindakan kriminal dan radikalisme.	Tata Kelola Pemerintahan	Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance	Mewujudkan reformasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Nilai IKM 2. Indeks SPBE
									Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Nilai SAKIP 2. IPKD
									Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Derajat desentralisasi fiskal (DDF)
4	3. Sarana dan Prasarana Kota (Perhubungan, Drainase, Pengairan, Komunikasi, Listrik, Air bersih dan Penataan Ruang) 5. Geomorfologi Dan Lingkungan Hidup;	1. Penataan ruang 2. Penurunan kualitas lingkungan hidup 6. Kesiapsiagaan penanganan bencana alam	8. Infrastruktur	1. Infrastruktur pelayanan dasar(Jalan, air minum dan sanitasi layak dan aman, keselamatan dan keamanan transportasi, komunikasi, perumahan dan permukiman layak)	Infrastruktur dan Lingkungan	Misi 5 : Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan	Indeks infrastuktur	Meningkatnya infrastruktur kota sesuai dengan peruntukannya	% kesesuaian tata ruang



No	Isu Strategis RPJPD Kota Pematang Siantar 2015-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027	Isu Strategis RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023	Isu Strategis RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027	Misi RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan rendah karbon						
									Meningkatnya keseimbangan lingkungan hidup	1. IKLH 2. % Sampah tertangani

Sumber: Analisis Tim Penyusun



Tabel 5.10

Sandingan Prioritas Nasional (PN) - Prioritas Pembangunan (PP) Provinsi Sumatera Utara – Prioritas Pembangunan Kota Pematang Siantar

Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN)		Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara		Prioritas Pembangunan Kota Pematang Siantar	
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;	PP2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
		PP8	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;	PP5	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP8	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;	PP5	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP1	Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses Pendidikan	PP1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
		PP2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;	PP1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
		PP3	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;	PP2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP6	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi	PP4	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan
		PP7	Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olah raga	PP1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP4	Peningkatan daya saing melalui sektor agraris;	PP3	Meningkatkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata
		PP5	Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata	PP3	Meningkatkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata
		PP8	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	PP5	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PP8	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;	PP5	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP6	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi	PP4	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan

Sumber: Analisis Tim Penyusun



Tabel 5.11
Penyelarasan Target Ekonomi Makro Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Pematang Siantar

No	RPJMN Tahun 2020-2024						RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023						RPJMD Kota Pematnagsiantar Tahun 2022-2027					
	Indikator Pembangunan	Realisasi		Target			Indikator Pembangunan	Realisasi		Target			Indikator Pembangunan	Realisasi		Target		
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60	3,69	5,90	6,10	6,20	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,07	2,61	4-5	5-6	5-6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,89	1,25	(1-25-2,21)	(2,21-3,38)	(3,38-4,54)
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,81	10,14	9,00	8,55	8,15	Tingkat Kemiskinan (%)	8,75	9,01	8.90-7.90	8.80 - 7.80	8.80 - 7.80	Tingkat Kemiskinan (%)	9,06	8,52	(8,52-8,46)	(8,46-8,07)	(8,07-7,69)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,20	6,49	3,80	3,40	3,10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,91	6,33	6.40 - 5.40	6.30 - 5.30	6.30 - 5.30	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	11,50	11,00	(11-10,40)	(10,40-9,74)	(9,74-8,57)
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*	71,94	72,29			74,60-84,23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,77	72,00	72,00-72,50	72,25-72,75	72,25-72,75	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,75	79,17	(79,17-79,65)	(79,65-80,13)	(80,13-80,61)
5	Rasio Gini *	0,385	0,381			0,360-0,474	Indeks Gini	0,316	0,315	0,311	0,309	0,309	Indeks Gini	0,336	0,307*	0,336-0,330	0,330-0,320	0,320-0,310
							Inflasi	1,96	0,46	2,25	2	2	Inflasi	2,78	2,12	2+1	2+1	2+1
6	Penurunan Emisi GRK (%)					27,3	Penurunan Emisi GRK (%)	22,07	26,56	31,06	35,55	35,55	IKLH	58,77	59,29	59,94	60,35	60,76

Sumber: Analisis Tim Penyusun



BAB VI

STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN

6.1. Strategi

Strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan, Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa strategi merupakan “ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan”. Untuk dapat diimplementasikan dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan, strategi pembangunan akan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah.

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD. Langkah pertama yang dilakukan adalah menelaah strategi dan arah kebijakan nasional agar Kota Pematang Siantar berkontribusi pada pencapaian pembangunan nasional. Berikut disajikan 5 arahan Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN 2020–2024 sebagai panduan strategi dan arah kebijakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 6.1
Strategi Pembangunan RPJMN 2020–2024

No	Arahan Presiden	Strategi	Sub Strategi
1	Pembangunan SDM	Layanan Dasar & Perlindungan Sosial	1. Tata Kelola Kependudukan; 2. Perlindungan Sosial; 3. Kesehatan; 4. Pendidikan; 5. Pengentasan Kemiskinan; 6. Kualitas Anak, Perempuan, Pemuda
		Produktivitas	1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; 2. Pendidikan Tinggi; 3. Iptek dan Inovasi; 4. Prestasi Olahraga
		Pembangunan karakter	1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila; 2. Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan; 3. Moderasi Beragama; 4. Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas



No	Arahan Presiden	Strategi	Sub Strategi
2	Pembangunan Infrastruktur	Infrastruktur pelayanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau; 2. Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan; 3. Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; 4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi; 5. Ketahanan Kebencanaan; 6. Infrastruktur Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi
		Infrastruktur ekonomi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Darat; Jalan Tol, Jalan Baru, Jalan Trans Pulau 3T, dan pelabuhan penyeberangan baru; 2. Kereta Api: KA kecepatan tinggi dan KA angkutan barang; 3. Laut: Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; 4. Udara: Bandara Baru; 5. Industri Pengolahan; 6. Jasa dan Pariwisata; 7. Pertanian Perkebunan Kawasan /Klaster Kelautan-Perikanan
		Infrastruktur perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transportasi Perkotaan 2. Energi Berkelanjutan Perkotaan 3. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan 4. Akses Air Minum Perpipaan dan Sanitasi Perkotaan yang Layak dan Aman 5. Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan
		Energi dan ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberlanjutan Penyediaan; 2. Akses dan Keterjangkauan; 3. Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan
		Teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi Digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penuntasan & pemanfaatan Infrastruktur TIK; 2. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital
3	Penyederhanaan Regulasi	Pendekatan <i>omnibus law</i>	Penerapan pendekatan <i>Omnibus Law</i>
		Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Dampak Regulasi (<i>Regulatory Impact Analysis/RIA</i>); 2. Analisis Biaya dan Manfaat (<i>Cost and Benefit Analysis/CBA</i>)
4	Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Prosedur	4 hari waktu memulai usaha (EoDB)
		Penyelenggaraan <i>e-Government</i>	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): $\geq 2,6$ (baik)
		Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik	2,9-3,2 hari waktu rata-rata pengeluaran barang (<i>dwelling time</i>)
5	Transformasi ekonomi	Industrialisasi	Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global



No	Arahan Presiden	Strategi	Sub Strategi
		Pengembangan destinasi unggulan	Pengembangan Destinasi Unggulan, melalui: perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di Destinasi Pariwisata Prioritas
		Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi Digital	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, pada sektor: kuliner, <i>fashion</i> , kriya, aplikasi dan konten digital, <i>games</i> , film, dan musik.

Sumber: RPJMN 2020-2024

Keselarsan strategi merujuk pada arahan Presiden tersebut antara lain :

1. Pembangunan SDM: dengan strategi layanan Dasar dan perlindungan Sosial
2. Pembangunan Infrastruktur: dengan strategi Infrastruktur layanan dasar
3. Penyederhanaan Birokrasi: Penyelenggaraan e-Government dan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik
4. Transformasi ekonomi : Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi Digital

Berangkat dari komitmen untuk mencapai visi “Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”, melalui 5 misi pembangunan Berikut strategi dalam mencapai sasaran daerah pada masing-masing tujuan di uraikan sebagai berikut.

1. **Misi 1; Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas** dengan sasaran ;
 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; Indikator kinerja sasaran adalah Usia Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting
Strategi: Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan;
 2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat; Indikator kinerja sasaran Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Strategi: Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan
 3. Meningkatnya kehidupan harmonis masyarakat; Indikator kinerja sasaran Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Strategi: Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. **Misi 2; Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19**
- Misi 4; Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara**



dengan sasaran;

1. Menurunnya angka kemiskinan; Indikator kinerja sasaran adalah Persentase penurunan PMKS.

Strategi: Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin

2. Menurunnya angka pengangguran; Indikator kinerja sasaran adalah Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan

Strategi: Meningkatkan Kesempatan Kerja

3. Meningkatnya kontribusi UMKM dan Sektor unggulan daerah; dengan indikator kinerja sasaran Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha dan Persentase Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB

Strategi: Untuk kedua sasaran tersebut strategi yang digunakan adalah Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM dan Peningkatan volume perdagangan barang dan jasa dan Peningkatan iklim usaha yang kondusif.

4. Meningkatnya investasi daerah; dengan indikator kinerja sasaran Persentase peningkatan investasi

Strategi: Peningkatan iklim usaha yang kondusif.

5. Misi 3; Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance

dengan sasaran;

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; Indikator kinerja sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks SPBE

Strategi: Peningkatan pelayanan prima dalam pelayanan publik

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja; Indikator kinerja sasaran adalah Nilai SAKIP dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Strategi; Peningkatan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien transparan dan akuntabel.

3. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah; Indikator kinerja sasaran Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Strategi: Mengoptimalkan pendapatan asli daerah

4. Misi 5; Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan

dengan sasaran;

1. Meningkatnya infrastruktur wilayah kota; Indikator sasaran Persentase kesesuaian tata ruang,



Strategi: Peningkatan infrastruktur daerah

2. Meningkatnya keseimbangan lingkungan hidup; Indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Strategi: Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kota Pematang Siantar ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 6.2
Keterkaitan Misi Tujuan Sasaran dan Strategi Pembangunan

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi		Urusan
VISI : Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas					
1	MISI 1 :	Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas			
	Tujuan 1.1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas			
		Indeks Pembangunan Manusia			
	Sasaran 1.1.1 :	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.Usia Harapan Hidup 2.Prevelensi Stunting	Strategi 1.1.1 :	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan Kesehatan
	Sasaran 1.1.2 :	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1.Rata-Rata Lama Sekolah 2.Harapan Lama Sekolah	Strategi 1.1.2 :	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan Pendidikan
	Sasaran 1.1.3 :	Meningkanya kehidupan harmonis masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Strategi 1.1.3 :	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Ketentraman dan ketertiban umum
2	MISI 2 :	Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19			
	MISI 4 :	Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara			
	Tujuan 2.1	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat			
		1. Persentase Penduduk miskin 2. Persentase TPT			
	Sasaran 2.1.1 :	Menurunnya angka kemiskinan	% Penurunan PPKS/PMKS	Strategi 2.1.1 :	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin Sosial
	Sasaran 2.1.2 :	Menurunnya angka pengangguran	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Strategi 2.1.2 :	Meningkatkan kesempatan kerja Tenaga Kerja
	Tujuan 2.2	Mewujudkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata			



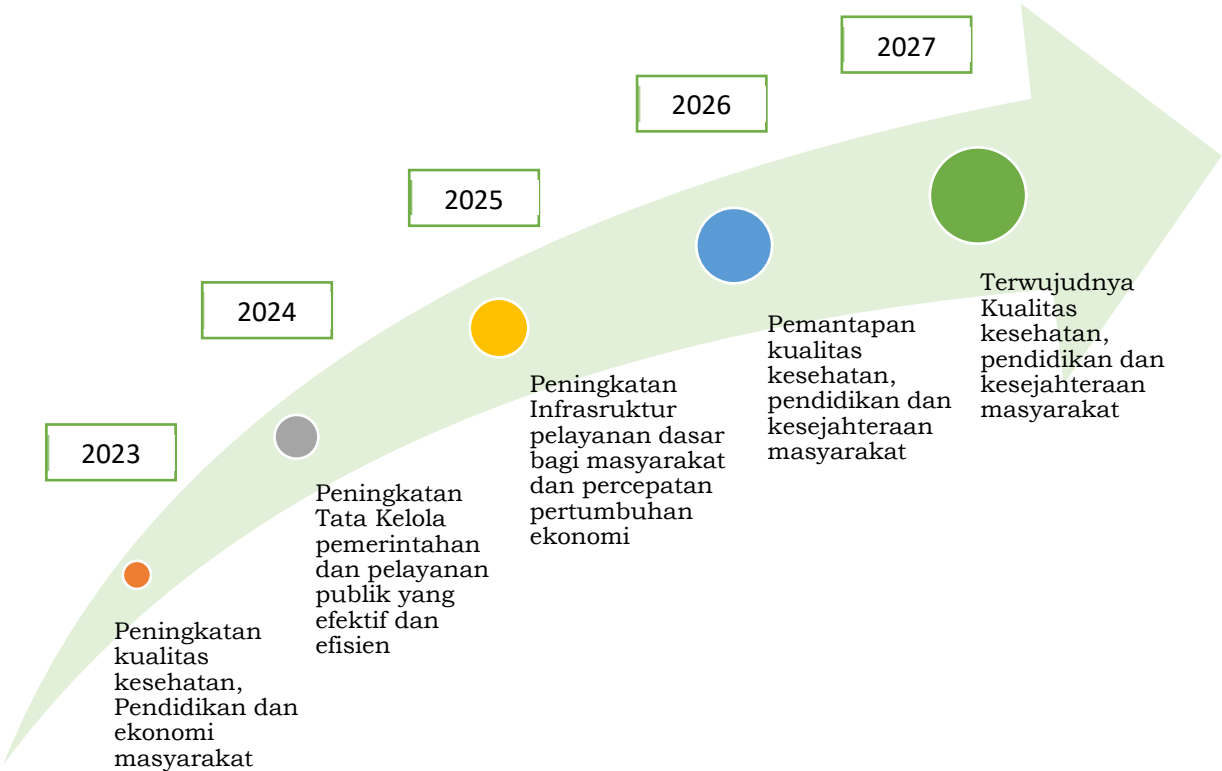
No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi		Urusan
	Sasaran 2.2.1 :	Meningkatnya kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Strategi 2.2.1 :	Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM	Koperasi dan UMKM
			% Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Strategi 2.2.2 :	Peningkatan volume perdagangan barang dan jasa	Perdagangan
	Sasaran 2.2.2 :	Meningkatnya investasi daerah	% peningkatan investasi	Strategi 2.2.3 :	Peningkatan iklim usaha yang kondusif	Penanaman Modal
3	MISI 3:	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance				
	Tujuan 3.1	Mewujudkan reformasi Tata Kelola Pemerintahan				
			Indeks Reformasi Birokrasi			
	Sasaran 3.1.1 :	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Indeks SPBE	Strategi 3.1.1 :	Peningkatan pelayanan prima dalam pelayanan publik	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Setdako , Kominfo
	Sasaran 3.1.2 :	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Nilai SAKIP 2. Indeks IPKD	Strategi 3.1.2 :	Peningkatan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien transparan dan akuntabel	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Setdako , Perencanaan, Keuangan
	Sasaran 3.1.3 :	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	Strategi 3.1.3 :	Mengoptimalkan pendapatan asli daerah	Keuangan
4	MISI 5 :	Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.				
	Tujuan 5.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan				
			Indeks infratsruktur			
	Sasaran 5.1.1 :	Meningkatnya infrastruktur wilayah kota sesuai dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian tata ruang	Strategi 5.1.1 :	Peningkatan infrastruktur daerah	PUPR
	Sasaran 5.1.2 :	Meningkatnya keseimbangan lingkungan hidup	1. IKLH 2. Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Strategi 5.1.2 :	Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup	Lingkungan Hidup

Sumber: Analisis Tim Penyusun



6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit yang menjadi arahan dan panduan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun kedepan. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan untuk setiap tahunnya. Tema arah kebijakan pembangunan Kota Pematang Siantar sebagai berikut.



Sumber: Analisis Tim Penyusun

Gambar 6.1
Tema Arah Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan perumusan tema diatas dan mempertimbangkan batas waktu pemerintahan sampai dengan tahun 2024, maka arah kebijakan daerah sebagai berikut;



Tabel 6.3
Keterkaitan Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	Urusan
VISI : Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas							
1	MISI 1 :	Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas					
	Tujuan 1.1 :	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas					
			Indeks Pembangunan Manusia				
	Sasaran 1.1.1 :	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup Prevelensi Stunting	Strategi 1.1.1 :	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan	1. Pemenuhan SPM bidang kesehatan 2. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan 4. Peningkatan cakupan pelayanan Kesehatan dan KB 5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan olahraga 6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan 7. Percepatan penanganan Covid-19 dan vaksinasi	Kesehatan, PP dan KB, Kepemudaan dan Olahraga
	Sasaran 1.1.2 :	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	Strategi 1.1.2 :	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan	1. Pemenuhan capaian SPM bidang pendidikan; 2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan; 3. Pemerataan tenaga pendidik 4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan



No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	Urusan
						5. Peningkatan minat baca masyarakat 6. Pelestarian kebudayaan daerah	
	Sasaran 1.1.3 :	Meningkatnya kehidupan harmonis masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Strategi 1.1.3 :	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1. Pemenuhan capaian SPM bidang Ketertiban umum 2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 3. Penguatan idiologi Pancasila	Ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintahan Umum
2	MISI 2 :	Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19					
	MISI 4 :	Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara					
	Tujuan 2.1 :	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat					
			1. Persentase penduduk miskin 2. Persentase TPT				
	Sasaran 2.1.1 :	Menurunnya angka kemiskinan	1. Persentase penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Strategi 2.1.1 :	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin	1. Pemenuhan capaian SPM bidang Sosial 2. Peningkatan pelayanan bantuan sosial yang tepat sasaran sesuai data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sosial
	Sasaran 2.1.2 :	Menurunnya angka pengangguran	2. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Strategi 2.1.2 :	Meningkatkan Kesempatan Kerja	1. Perluasan lapangan kerja berbasis potensi daerah 2. Peningkatan kompetensi dan Ketampilan tenaga kerja/calon tenaga kerja 3. Kerjasama dengan pihak swasta (link and match)	Tenaga Kerja
	Tujuan 2.2 :	Mewujudkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata					



No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	Urusan
			Laju Pertumbuhan ekonomi Indeks Gini				
	Sasaran 2.2.1 :	Meningkatnya kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	1. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Strategi 2.1.1 :	Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM	1. Peningkatan manajemen pengelolaan Koperasi dan UMKM, 2. Fasilitasi modal usaha, penguasaan teknologi, standarisasi produk dan pemasarannya	Koperasi dan UKM,
			2. Persentase sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Strategi 2.1.2 :	Peningkatan voleme perdagangan barang dan jasa	1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung sektor unggulan 2. Peningkatan fasilitasi BUMD dan BLUD milik daerah 3. Peningkatan sektor potensial lainnya	Perdagangan, Pariwisata, Pertanian, Perindustrian,
	Sasaran 2.2.2 :	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	Strategi 2.1.2 :	Peningkatan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi daerah	1. Meningkatkan pelayanan pengurusan izin berusaha yang mudah, cepat dan profesional 2. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah yang clean dan clear 3. Penyediaan lahan untuk pengembangan ekonomi daerah	Penanaman Modal dan Keuangan
3	MISI 3:	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan coorporate governance					
	Tujuan 3.1 :	Mewujudkan reformasi Tata Kelola Pemerintahan					
			Indeks Reformasi Birokrasi				



No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	Urusan
	Sasaran 3.1.1 :	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Indeks SPBE	Strategi 3.1.1 :	Peningkatan pelayanan prima dalam pelayanan publik	1. Meningkatkan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah 2. Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang responsif, inovatif, akses yang cepat dan berbasis teknologi informasi	Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Komunikasi dan Informatika, Kewilayahan, Unsur Pemerintahan, Adm Kependudukan,
	Sasaran 3.1.2 :	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Nilai SAKIP 2. Indeks IPKD	Strategi 3.1.2 :	Peningkatan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan inovasi daerah 2. Peningkatan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Perencanaan, Pengawasan, Arsip, Keuangan
	Sasaran 3.1.3 :	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	Strategi 3.1.3 :	Mengoptimalkan pendapatan asli daerah	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah 2. Peningkatan kinerja badan usaha milik daerah 3. Meningkatkan kualitas belanja daerah 4. Peningkatan pengelolaan aset daerah	Keuangan
4	MISI 5 :	Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.					
	Tujuan 5.1 :	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan					
			Indeks infratsruktur				



No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	Urusan
	Sasaran 5.1.1 :	Meningkatnya infrastruktur wilayah kota sesuai dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian tata ruang	Strategi 5.1.1 :	Peningkatan infrastruktur daerah	1. Pemenuhan capaian SPM bidang PUPR 2. Pemenuhan capaian SPM bidang PRKP 3. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur kota : jalan, drainase, sanitasi, air bersih, kawasan kumuh 4. Pembangunan dan pengendalian tata ruang sesuai sesuai RTRW	PUPR, PRKP, Perhubungan
	Sasaran 5.1.2 :	Meningkatnya keseimbangan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Strategi 5.1.2 :	Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup	1. Pencegahan, penanggulangan pengendalian dampak, dan pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup 2. Peningkatan pengelolaan sampah (pengurangan sampah dan penanganan sampah).	Lingkungan Hidup dan Keamanan dan Ketertiban Umum

Sumber: Analisis Tim Penyusun



Tabel 6.4
Implementasi Strategi dan Arah Kebijakan Melalui Program Pembangunan Daerah

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Stategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	PD Penanggung Jawab	
VISI : Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas							
1	M 1	Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas					
	T 1.1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas					
		Indeks Pembangunan Manusia					
	SS 1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup 2. Prevelensi Stunting	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan	1. Pemenuhan SPM bidang kesehatan 2. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan 4. Peningkatan cakupan pelayanan Kesehatan dan KB 5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan olahraga 6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan 7. Percepatan penanganan Covid-19 dan vaksinasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman						Dinas Kesehatan	
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (khusus rsud)	RSUD dr. Djasamen Saragih					



No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	PD Penanggung Jawab
						Program Pengendalian Penduduk	DPP & KB
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing keolahragaan	Dinas Pariwisata
	SS 1.1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan	1. Pemenuhan capaian SPM bidang pendidikan; 2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan; 3. Pemerataan tenaga pendidik 4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 5. Peningkatan minat baca masyarakat 6. Pelestarian kebudayaan daerah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
						Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan
						Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan
	SS 1.1.3	Meningkatnya kehidupan harmonis masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1. Pemenuhan capaian SPM bidang Ketertiban umum 2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 3. Penguatan idiologi Pancasila	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
						Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	KesbangPol



No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	PD Penanggung Jawab
2	M 2	Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19					
	M 4	Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara					
	T 2.1	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat					
			1. Persentase penduduk miskin				
			2. Persentase TPT				
	SS 2.1.1	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin	1. Pemenuhan capaian SPM bidang Sosial 2. Peningkatan pelayanan bantuan sosial yang tepat sasaran sesuai data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos PP & PA
						Program Perlindungan dan Perlindungan Jaminan Sosial	Dinsos PP & PA
	SS 2.1.2	Menurunnya angka pengangguran	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Meningkatkan Kesempatan Kerja	1. Perluasan lapangan kerja berbasis potensi daerah 2. Peningkatan kompetensi dan Ketampilan tenaga kerja/calon tenaga kerja 3. Kerjasama dengan pihak swasta (link and match)	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker
	T 2.2 1	Merwujudkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata					
			1. Laju Pertumbuhan ekonomi				
			2. Indeks Gini				



No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	PD Penanggung Jawab
	SS 2.2.1	Meningkatnya kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	1. Meningkatkan usaha mikro yang menjadi wirausaha daerah	Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM	1. Peningkatan manajemen pengelolaan Koperasi dan UMKM, 2. Fasilitasi modal usaha, penguasaan teknologi, standarisasi produk dan pemasarannya	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinkop UKM dan Perdagangan
						Program Pengembangan UMKM	Dinkop UKM dan Perdagangan
						Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinkop UKM dan Perdagangan
			2. Persentase sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Peningkatan volume perdagangan barang dan jasa	1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung sektor unggulan 2. Peningkatan fasilitasi BUMD dan BLUD milik daerah 3. Peningkatan sektor potensial lainnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkop UKM dan Perdagangan
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	SS 2.2.2	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	Peningkatan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi daerah	1. Meningkatkan pelayanan pengurusan izin berusaha yang mudah, cepat dan profesional 2. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah yang clean dan clear 3. Penyediaan lahan untuk pengembangan ekonomi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPM PTSP
						Program Promosi Penanaman Modal	DPM PTSP
						Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	BPKD



No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Stategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	PD Penanggungjawab
3	M 3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan coorporate governance					
	T 3.1	Mewujudkan reformasi Tata Kelola Pemerintahan					
			Indeks Reformasi Birokrasi				
	SS 3.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Indeks SPBE	Peningkatan pelayanan prima dalam pelayanan publik	1. Meningkatkan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah 2. Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang responsif, inovatif, akses yang cepat dan berbasis teknologi informasi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKD
						Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Semua Kecamatan
						Program Administrasi umum Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
						Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
						Program Pendaftaran Penduduk	DisdukCapil
	SS 3.1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Nilai SAKIP 2. Indeks IPKD	Peningkatan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan inovasi daerah 2. Peningkatan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
						Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
						Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bappeda



No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Stategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	PD Penanggungj Jawab
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
						Program Pengelolaan Arsip	Dinas Kearsian dan Perpustakaan
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Semua Perangkat Daerah
	SS 3.1.3	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	Mengoptimalisasi pendapatan asli daerah	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan redistribusi daerah 2. Peningkatan kinerja badan usaha milik daerah 3. Meningkatkan kualitas belanja daerah 4. Peningkatan pengelolaan aset daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKD
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD
4	M 5	Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.					
	T 5.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan					
			Indeks infratsruktur				
	SS 5.1.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah kota sesuai dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian tata ruang	Peningkatan infrastruktur daerah	1. Pemenuhan capaian SPM bidang PUPR 2. Pemenuhan capaian SPM bidang PRKP 3. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur kota	Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas PUTR
Program Penataan Bangunan Gedung						Dinas PUTR	
Program Penyelenggaraan Jalan						Dinas PUTR	



No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	PD Penanggung Jawab
					: jalan, drainase, sanitasi, air bersih, kawasan kumuh 4. Pembangunan dan pengendalian tata ruang sesuai sesuai RTRW	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUTR
						Program Kawasan Permukiman	Dinas PKP
						Program Pengembangan Perumahan	Dinas PKP
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
	SS 5.1.2	Meningkatnya keseimbangan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup	1. Pencegahan, penanggulangan pengendalian dampak, dan pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup 2. Peningkatan pengelolaan sampah (pengurangan sampah dan penanganan sampah).	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
						Program penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: Analisis Tim Penyusun



Tabel 6.5
Arah Kebijakan Pembangunan

Sasaran	Arah Kebijakan	Tahun				
		2023	2024	2025	2026	2027
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Pemenuhan SPM bidang kesehatan	√	√	√	√	√
	2. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan	√	√	√	√	√
	3 Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan	√	√			
	4. Peningkatan cakupan pelayanan Kesehatan dan KB	√	√	√	√	√
	5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan olahraga	√	√	√	√	√
	6 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	√	√			
	7. Percepatan penanganan Covid-19 dan vaksinasi	√				
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Pemenuhan capaian SPM bidang pendidikan;	√	√	√	√	√
	2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;	√	√	√	√	√
	3. Pemerataan tenaga pendidik	√	√	√		
	4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	√				
	5. Peningkatan minat baca masyarakat	√	√	√	√	√
	6. Pelestarian kebudayaan daerah	√	√	√	√	√
Meningkatnya kehidupan harmonis masyarakat	1. Pemenuhan capaian SPM bidang Ketertiban umum	√	√	√	√	√
	2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	√	√	√	√	√
	3. Penguatan idiologi Pancasila	√	√	√	√	√
Menurunnya angka kemiskinan	1. Pemenuhan capaian SPM bidang Sosial	√	√	√	√	√
	2. Peningkatan pelayanan bantuan sosial yang tepat sasaran sesuai data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	√	√	√	√	√
Menurunnya angka pengangguran	1. Perluasan lapangan kerja berbasis potensi daerah	√	√	√	√	√
	2. Peningkatan kompetensi dan Ketampilan tenaga kerja/calon tenaga kerja	√	√	√	√	√
	3. Kerjasama dengan pihak swasta (link and match)	√	√	√		
Meningkatnya kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	1. Peningkatan manajemen pengelolaan Koperasi dan UMKM	√	√			
	2. Fasilitasi modal usaha, penguasaan teknologi standarisasi produk dan pemasarannya	√	√	√	√	√
	3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung sektor unggulan	√	√			
	4. Peningkatan fasilitasi BUMD dan BLUD milik daerah	√				



Sasaran	Arah Kebijakan	Tahun				
		2023	2024	2025	2026	2027
	5. Peningkatan sektor potensial lainnya	√	√	√	√	√
Meningkatnya investasi daerah	1. Meningkatkan pelayanan pengurusan izin berusaha yang mudah, cepat dan profesional	√	√	√	√	√
	2. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah yang clean dan clear	√		√		√
	3. Penyediaan lahan untuk pengembangan ekonomi daerah	√	√	√	√	√
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah	√	√	√	√	√
	2. Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang responsif, inovatif, akses yang cepat dan berbasis teknologi informasi	√	√	√	√	√
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan inovasi daerah	√	√	√	√	√
	2. Peningkatan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan	√	√	√	√	√
Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan restribusi daerah	√	√	√	√	√
	2. Peningkatan kinerja badan usaha milik daerah	√	√	√	√	√
	3. Meningkatkan kualitas belanja daerah	√	√	√	√	√
	4. Peningkatan pengelolaan aset daerah	√	√			
Meningkatnya infrastruktur kota sesuai dengan peruntukannya	1. Pemenuhan capaian SPM bidang PUPR	√	√	√	√	√
	2. Pemenuhan capaian SPM bidang PRKP	√	√	√	√	√
	3. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur kota : jalan, drainase, sanitasi, air bersih, kawasan kumuh	√	√	√	√	√
	4. Pembangunan dan pengendalian tata ruang sesuai sesuai RTRW	√	√	√	√	√
Meningkatnya keseimbangan lingkungan hidup	1. Pencegahan, penanggulangan pengendalian dampak, dan pemulihan pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup	√	√	√	√	√
	2. Peningkatan pengelolaan sampah (pengurangan sampah dan penanganan sampah).	√	√	√	√	√

Sumber: Analisis Tim Penyusun



6.2.1. Arah Kebijakan Kewilayahan

Pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kota Pematang Siantar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032, memiliki rencana pengembangan sebagai berikut:

1. Rencana sistem pusat pelayanan kota;

Sistem pusat pelayanan kota meliputi: Kelurahan Melayu, Kelurahan Dwikora, Kelurahan Proklamasi, Kelurahan Simalungun, Kelurahan Baru, Kelurahan Sukadame, Kelurahan Banjar, Kelurahan Timbanggalung, Kelurahan Teladan, Kelurahan Karo, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Pardomuan, Kelurahan Martoba, memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perdagangan dan jasa skala regional;
2. Pelayanan kesehatan skala regional;
3. Simpul transportasi regional;
4. Perkantoran; dan
5. Perumahan kepadatan tinggi.

Sub sistem pusat pelayanan kota, meliputi;

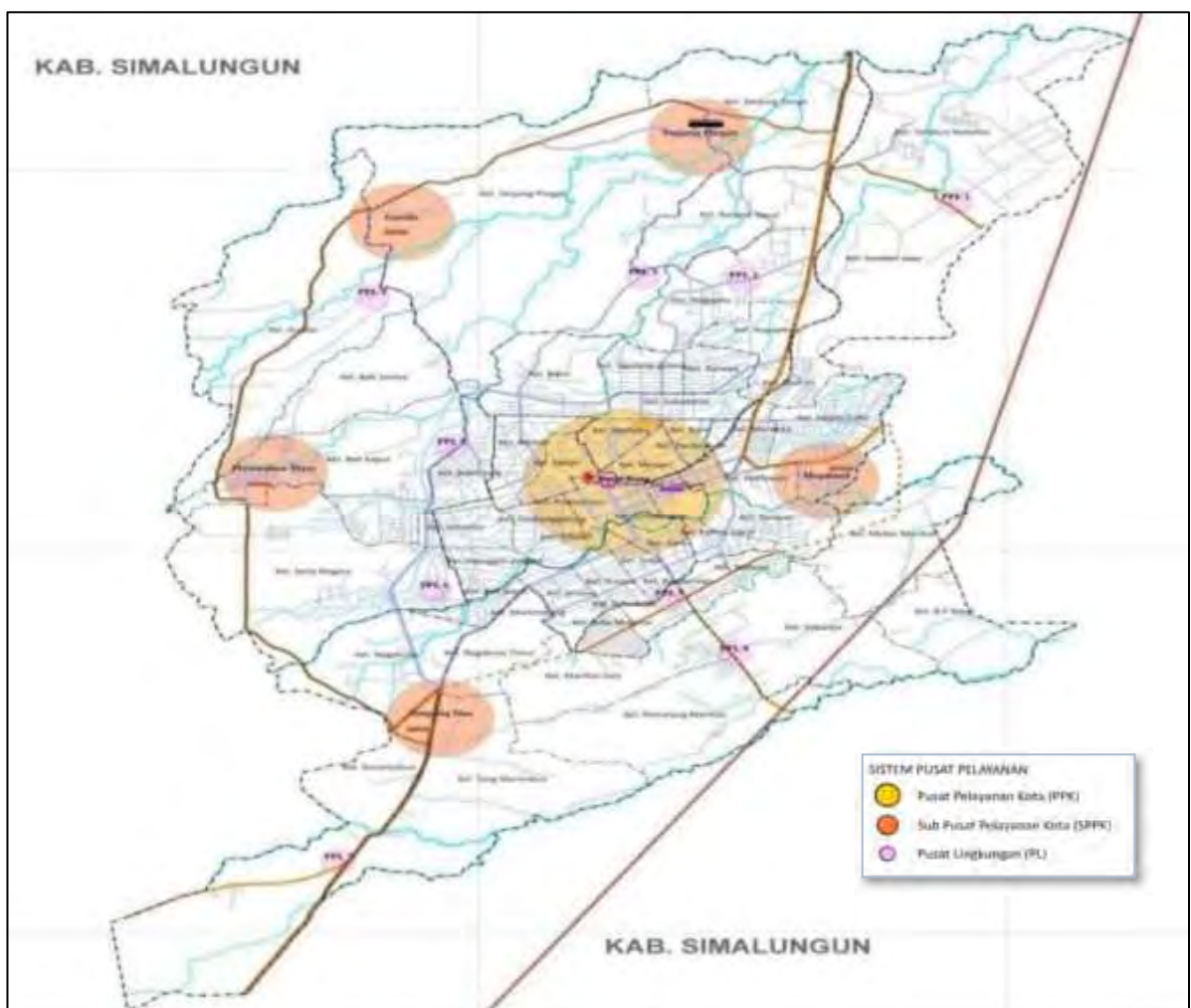
- a) Sub pusat pelayanan kota Tanjung Pinggir, terdapat di sebagian Kelurahan Tanjung Pinggir dan sebagian Kelurahan Tanjung Tonga, Kecamatan Siantar Martoba, memiliki fungsi sebagai berikut: 1. pusat perdagangan skala kota; 2. simpul transportasi regional; 3. pendidikan menengah; 4. pelayanan kesehatan; dan 5. perumahan kepadatan rendah – sedang.
- b) Sub pusat pelayanan kota Gurilla, terdapat di sebagian Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari dan sebagian Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, memiliki fungsi sebagai berikut: 1. perkantoran; 2. budaya dan olah raga; 3. pendidikan menengah dan tinggi; 4. pelayanan kesehatan; 5. perumahan kepadatan rendah – sedang.
- c) Sub pusat pelayanan kota perumahan Tojai, terdapat di sebagian Kelurahan Gurilla, sebagian Kelurahan Bah Sorma dan sebagian Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, memiliki fungsi sebagai berikut: 1. perdagangan dan jasa; 2. pendidikan menengah dan tinggi; 3. pelayanan kesehatan; 4. perumahan kepadatan rendah – sedang; dan 5. perkantoran.
- d) Sub pusat pelayanan kota Simpang Dua, terdapat di sebagian Kelurahan Nagahuta, sebagian Kelurahan Nagahuta Timur, sebagian Kelurahan Tong Marimbun dan Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun,



memiliki fungsi sebagai berikut : 1. perdagangan dan jasa; 2. pendidikan menengah dan tinggi; 3. pelayanan kesehatan; dan 4. perumahan kepadatan rendah-sedang.

- e) Sub pusat pelayanan kota Megaland, terdapat di Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, memiliki fungsi sebagai berikut 1. perdagangan dan jasa; perkantoran; 2. pendidikan menengah dan tinggi; 3. pelayanan kesehatan; 4. perumahan kepadatan sedang-tinggi.

Pusat lingkungan tersebar di seluruh wilayah kota dengan fungsi sebagai berikut: 1. Pendidikan dasar, 2. perdagangan skala kelurahan, 3. pelayanan kesehatan; 4. perumahan kepadatan rendah sedang dan tinggi



Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012–2032

Gambar 6.2
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Pematang Siantar

2. Rencana sistem jaringan transportasi, meliputi :

- a. Sistem jaringan jalan;
- a) sistem jaringan jalan primer, yang terdiri atas :
1. Jaringan jalan arteri primer;



- a. ruas Jalan Medan – batas Kabupaten Simalungun; dan
 - b. ruas Jalan Parapat Simpang Dua – batas Kabupaten Simalungun.
 2. jaringan jalan kolektor primer.
 - a. ruas Jalan Sangnauuluh - batas Kabupaten Simalungun sebagai Kolektor Primer 1;
 - b. ruas Jalan Saribudolok Simpang Dua - batas Kabupaten Simalungun sebagai Kolektor Primer 2;
 - c. ruas Jalan Melanton Siregar – batas Kabupaten Simalungun sebagai Kolektor Primer 2; dan
 - d. ruas Jalan Sidamanik – batas Kabupaten Simalungun sebagai Kolektor Primer 3.
 - b) Sistem jaringan jalan sekunder, yang terdiri atas :
 1. jaringan jalan arteri sekunder; a. ruas jalan Sisingamangaraja; b. ruas jalan Merdeka; c. ruas jalan Sutomo; d. ruas jalan Sudirman; e. ruas jalan Gereja; dan f. ruas jalan DI Panjaitan.
 2. jaringan jalan kolektor sekunder; a. ruas jalan Seram; b. ruas jalan Rajamin Purba; c. ruas jalan Dahlia; d. ruas jalan Kartini; e. ruas jalan Sudirman; f. ruas jalan Merdeka Lapangan Merdeka; g. ruas jalan DR. Sutomo Lapangan Merdeka; h. ruas jalan Ade Irma Suryani; i. ruas jalan Pendidikan; j. ruas jalan Patuan Anggi; k. ruas jalan Setia Negara; l. ruas jalan HOS Cokroaminoto; m. ruas jalan Pendeta J Sihombing; n. ruas jalan Rakuta Sembiring; o. ruas jalan ABRI Masuk Desa 1981; p. ruas jalan Pdt. J. Wismar Saragih.
 3. jaringan jalan lokal sekunder.
- Rencana pengembangan jaringan jalan, meliputi :
- a. Peningkatan ruas jalan, meliputi :
 1. ruas Jalan DI Panjaitan – Simpang Dua;
 2. ruas Jalan Gereja;
 3. ruas Jalan Sisingamangaraja;
 4. ruas Jalan Sudirman;
 5. ruas Jalan Merdeka;
 6. ruas Jalan Sutomo;
 7. ruas ujung Jalan Sutomo – Jalan A.Yani, simpang Jalan Sisingamangaraja;
 8. ruas Jalan Medan simpang Sisingamangaraja – simpang Jalan Bombongan;



9. ruas Jalan Sangnauualuh;
10. ruas Jalan S. Parman.
- b. pengembangan jalan bebas hambatan ruas Kota Tebing Tinggi-Kota Pematang Siantar – Parapat – Sibolga;
- c. pengembangan jalan lingkaran luar barat yang menghubungkan Jalan Parapat menuju Jalan Medan menjadi jalan arteri primer;
- d. pengembangan jalan lingkaran luar timur dari Simpang Dua Jalan Parapat menuju Jalan Sangnauualuh menjadi jalan Kolektor Primer 2;
- e. peningkatan ruas jalan arteri sekunder dan kolektor penghubung PPK serta keseluruhan SPPK meliputi : ruas Jalan Sibolga, ruas Jalan Melanton Siregar, ruas Jalan Ade Irma Suryani, ruas Jalan Patuan Anggi, ruas Jalan Patuan Nagari, ruas Jalan Rakuta Sembiring, ruas Jalan Pdt. J. Wismar Saragih, ruas Jalan ABRI Masuk Desa, ruas Jalan Pdt. Justin Sihombing, ruas Jalan Handayani, ruas Jalan Seram, ruas Jalan Kartini, ruas Jalan Rajamin Purba, ruas Jalan Sibatu-batu, ruas Jalan Setia Negara;
- f. pengembangan ruas jalan yang menghubungkan Jalan Rakuta Sembiring menuju Jalan Pdt. J. Wismar Saragih di Kelurahan Nagapita, dan jalan tembus ruas Jalan Handayani menuju ruas Jalan Rajamin Purba di Kelurahan Simarito; dan
- g. peningkatan ruas Jalan Suka Samosir Kelurahan Sukaraja menuju ke Jalan Lingkaran Luar Timur Kelurahan Tomuan.
- b. Sistem jaringan jalur kereta api;
Sistem jaringan jalur kereta api di Kota Pematang Siantar saat ini adalah jaringan jalur kereta api Kota Pematang Siantar - Kota Tebing Tinggi - Kota Medan; yang berada di Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat. Rencana pengembangan sistem jaringan kereta api, meliputi :
 - a) peningkatan kualitas pelayanan Stasiun Kereta Api Kota;
 - b) pengembangan sistem jaringan kereta api yang terkoneksi dengan sistem angkutan umum penumpang dan barang;
 - c) pengembangan jaringan kereta api ruas kota Pematang Siantar – Perlanaan – Sei Mangke;
 - d) pengembangan jaringan kereta api ruas Kota Merek, Kabupaten Karo – Kota Pematang Siantar – Kota Tebing Tinggi;
 - e) pengembangan stasiun kereta api khusus barang regional di Kecamatan Siantar Martoba.

Rencana sistem jaringan angkutan penumpang dan barang meliputi :

- a. Terminal penumpang;

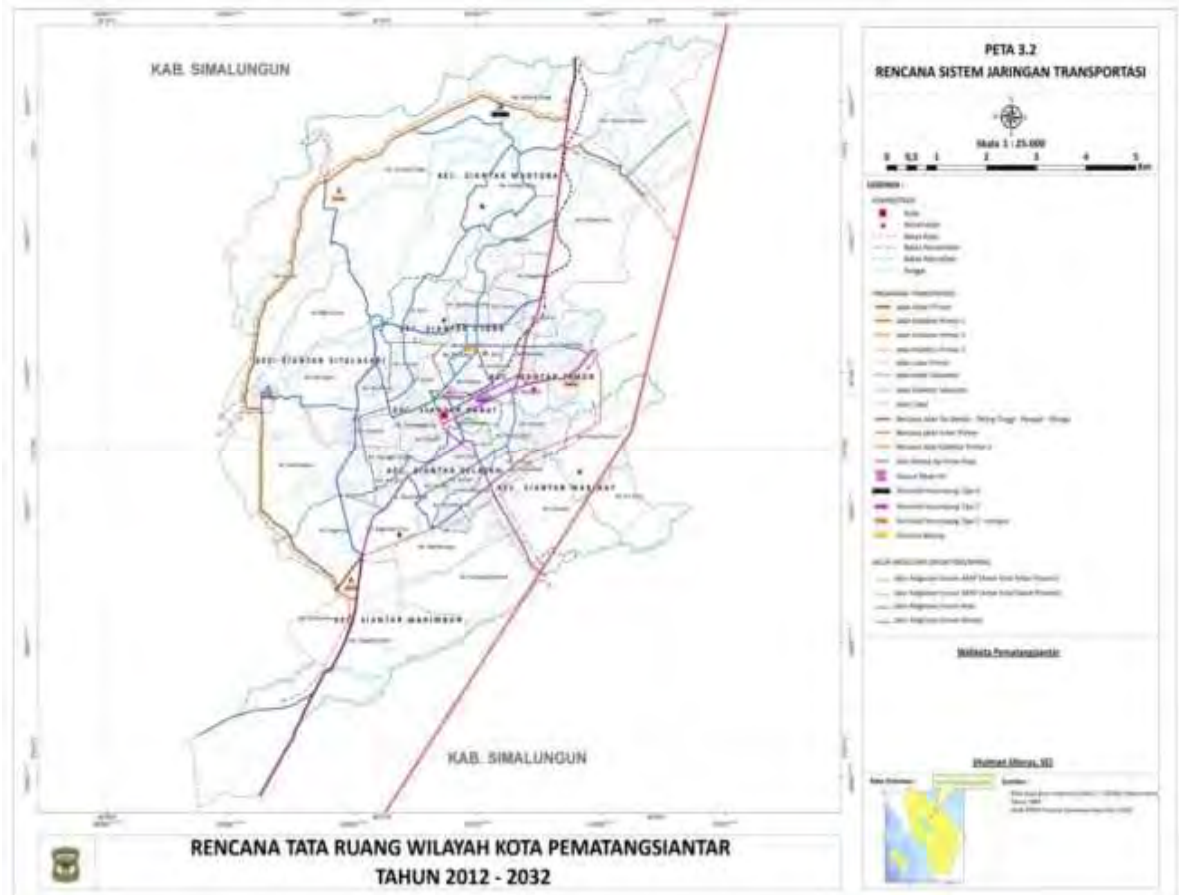


- a) terminal penumpang tipe A Sarantama di Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba;
 - b) terminal penumpang tipe C di Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat;
 - c) terminal penumpang tipe C di Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari;
 - d) terminal penumpang tipe C di Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur;
 - e) terminal penumpang tipe C di Tojay Kecamatan Siantar Sitalasari;
 - f) terminal penumpang tipe C di Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun.
- b. Terminal barang meliputi;
- Terminal Regional Agribisnis di Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara.
- c. Sistem jaringan angkutan penumpang dan barang.meliputi;
- a) rute angkutan umum penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) melalui ruas Jalan Parapat - Jalan Lingkar Barat-Jalan ABRI Manunggal Desa-Jalan Medan;
 - b) rute angkutan umum penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) melalui ruas jalan Jalan Parapat - Jalan Lingkar Barat – Jalan AMD – Jalan Medan, Jalan Sangnauuluh, Jalan Bongbongan;
 - c) rute angkutan barang regional diarahkan untuk melayani pusat pergudangan di Kawasan Megaland Kecamatan Siantar Timur, Kawasan Terminal Agrobisnis (Sukadame) dan Kawasan Stasiun KA melalui jalan Parapat - Jalan Lingkar Luar Barat - Jalan AMD - Jalan Medan - Jalan Lingkar Luar Timur - Jalan Sisingamangaraja - Jalan Ade Irma Suryani;
 - d) rute angkutan umum ukuran kecil, meliputi :
 - 1. terminal Sarantama–Jalan AMD–Jalan Rakutta Sembiring– Jalan Patuan Nagari–Jalan Mojopahit–Jalan Sutomo–Terminal C Dwikora–Jalan Merdeka -Jalan Diponegoro–Jalan Gereja– Jalan DI Panjaitan–Terminal C Simpang Dua;
 - 2. terminal C Siopat Suhu – Jalan Sutomo – Terminal C Dwikora – Jalan Ade Irma Suryani – Jalan Patuan Nagari - Jalan Sisingamangaraja–Jalan Seram–Jalan Rajamin Purba–Jalan Batu-batu–Terminal C Gurila–jalan Lingkar Luar Barat–Terminal Sarantama;
 - 3. terminal C tojai–Jalan Handayani–Jalan Sisingamangaraja–terminal C Simpang Dua–Jalan Sisingamangaraja–Jalan Rajamin Purba–Jalan Kartini–Jalan Ade Irma Suryani–Jalan Patuan Nagari–JalanMojopahit–



Jalan Sutomo–Terminal C Dwikora –Jalan Sudirman–kembali melalui Jalan Kartini.

- e) rute angkutan umum massal bus melalui–Jalan Parapat (Kelurahan Simarimbun)–Terminal C Simpang Dua–jalan DI Panjaitan–jalan Gereja–Jalan Diponegoro–Jalan Merdeka–jalan Sutomo;
- f) rute angkutan umum massal bus Terminal C Siopat Suhu–jalan Sutomo–Terminal C Dwikora–jalan Sangnualuh–jalan Medan–Jalan AMD–Terminal Sarantama.



Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012–2032

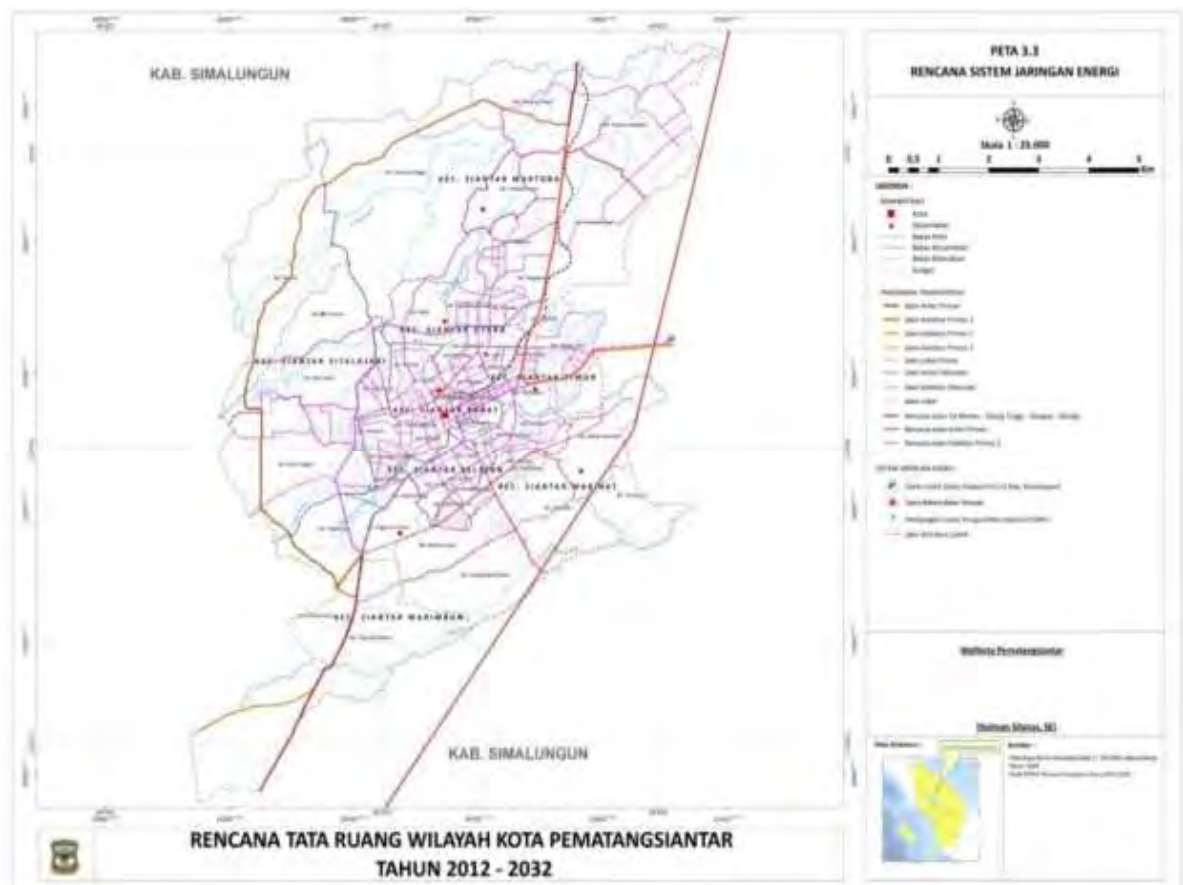
Gambar 6.3
Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi

- 2 Rencana sistem jaringan energi, meliputi :
 1. Pembangkit listrik;untuk melayani rencana kebutuhan listrik Kota sebesar lebih kurang 65,92 (enam puluh lima koma sembilan dua) Megawatt berasal dari PLTU Sicanang Belawan.
 2. Gardu listrik;untuk melayani kota adalah Gardu Induk yang berada di Kabupaten Simalungun.
 3. Jaringan distribusi listrik;meliputi jaringan listrik dari Gardu Induk melalui jaringan jalan arteri dan kolektor yang melalui kelurahan Siopat Suhu, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Dwikora, Kelurahan Proklamasi,



Kelurahan Merdeka, Kelurahan Asuhan, Kelurahan Nagapitu, Kelurahan Sumber Jaya dan Kelurahan Tambun Nabolon.

4. Depo bahan bakar minyak.meliputi Depo Bahan Bakar Minyak di Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat.



Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032

Gambar 6.4

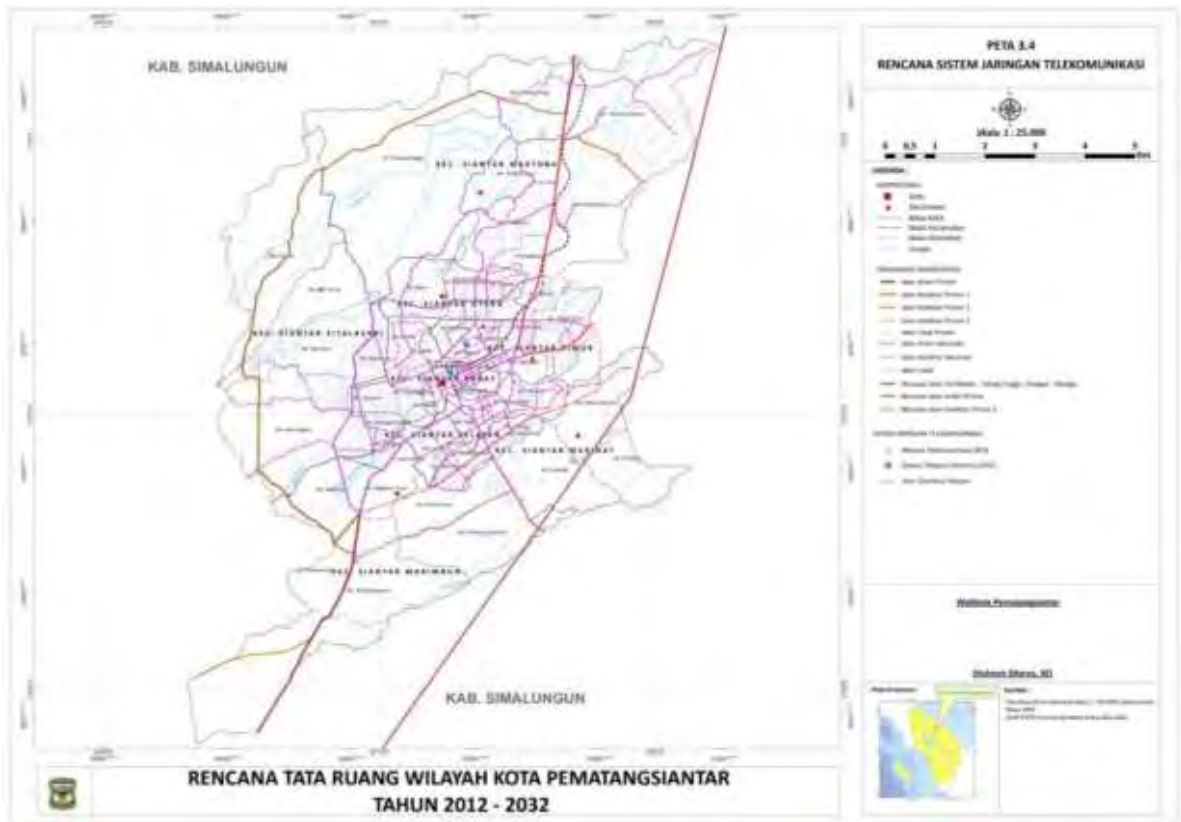
Peta Rencana Sistem Jaringan Energi

Rencana pengembangan jaringan energi meliputi :

1. Penambahan kapasitas daya listrik sebesar 5.866,27 KVA;
 2. Pengembangan jaringan distribusi listrik pada Jalan Lingkar Luar Barat dan Jalan Lingkar Luar Timur dan kawasan perumahan baru;
 3. Pengembangan sistem prasarana energi lainnya, meliputi: pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro pada Sungai Bah Bolon, pembangkit listrik tenaga surya pada lahan pertanian, dan bioenergi dengan memanfaatkan sampah pertanian pada lokasi kegiatan agro industry; dan Pengembangan rencana jaringan SUTET, SUTUT, SUTT meliputi diwilayah SPPK.
- 3 Rencana sistem jaringan telekomunikasi; meliputi :
1. Jaringan kabel;pengembangan jaringan telekomunikasi kabel secara merata di seluruh Kecamatan; dan stasiun telepon otomatis meliputi stasiun telepon otomatis di kelurahan Proklamasi;



2. Jaringan nirkabel;penyediaan dan pemanfaatan *Base Transceiver Station* berlokasi di seluruh kecamatan yang di gunakan Bersama menjangkau seluruh wilayah kota dan Penyebaran jaringan internet hotspot pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis.
3. Jaringan telekomunikasi satelit.



Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032

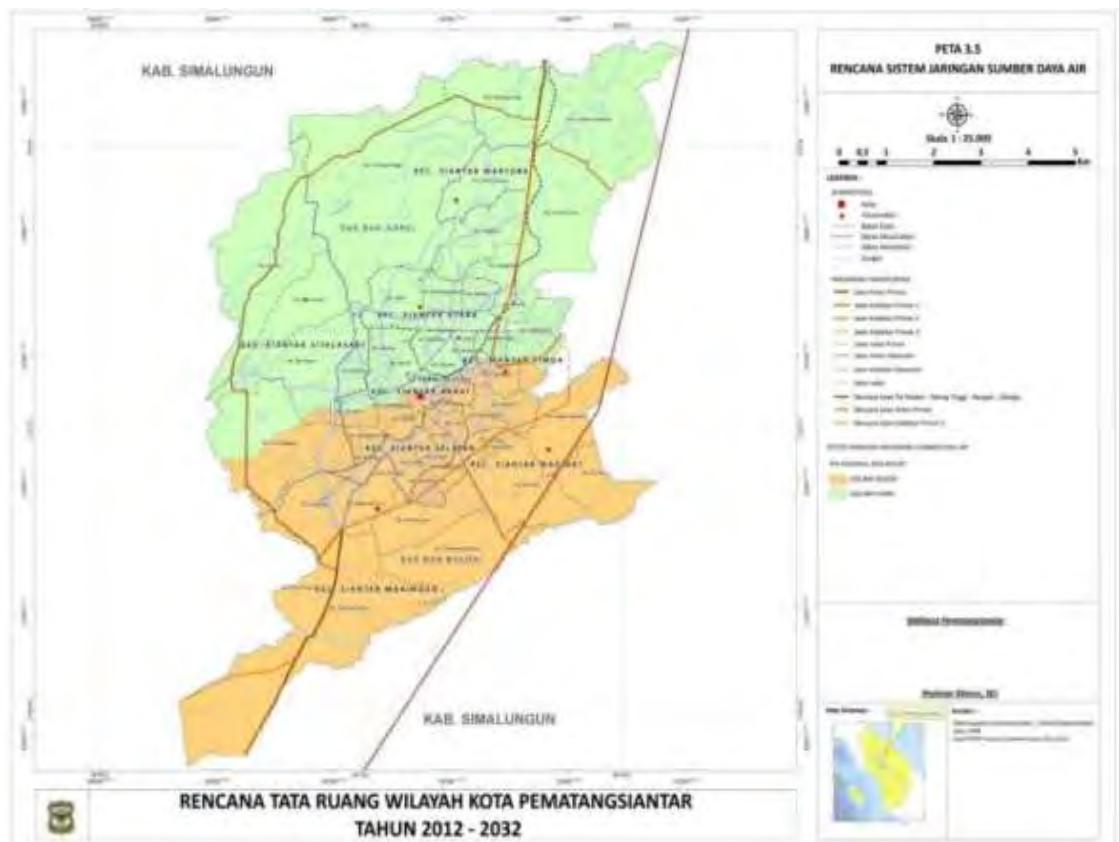
Gambar 6.5

Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

- 4 Rencana sistem jaringan sumber daya air,meliputi :
 1. Wilayah sungai;meliputi wilayah sungai Bah Bolon dan sebagai wilayah sungai air tanah yang bersumber pada Cekungan Air Tanah Medan;
 - a. daerah aliran sungai Bah Bolon Lintas Kabupaten, meliputi : Sungai Bah Bolon, Sungai Bah Biak dan Sungai Bah Sibarambang;
 - b. daerah aliran sungai Bah Hapal Lintas Kabupaten, meliputi : Sungai Bah Kapul dan Sigulang-gulang
 2. Jaringan prasarana air baku untuk air bersih, terdiri dari;
 - a. jaringan perpipaan Mual Goit melalui Jalan Sidamanik -Jalan Parapat - Jalan DI Panjaitan, Jalan Farel Pasaribu -Jalan Kolonel Simanjuntak - Jalan Gereja - Jalan Kapten Sitorus - Jalan Merdeka - Jalan Sutomo - Jalan Diponegoro- Jalan Kartini - Jalan Ade Irma Suryani - Jalan Brawijaya-Jalan Patuan Anggi - Jalan Tuan Nagari - Jalan



- Sisingamangaraja - Jalan Sangnauuluh - dan rencana pembangunan pada Jalan Lingkar Luar Kota Timur;
- b. jaringan perpipaan Habonaran melalui Jalan Saribudolok, Sisingamangaraja - Jalan Rambung Merah - Jalan Dahlia -Jalan Jawa - Jalan Seram - dan Jalan Singosari - Jalan Pdt Wismar Saragih - Jalan Tuan Nagari - Jalan Rakuta Sembiring - Jalan Sisingamangaraja - Jalan Bombongan -Jalan Tambun Barat - dan Jalan Tambun Timur
 - c. jaringan perpipaan Naga Huta melalui Perumahan Tojai -Jalan Handayani - Jalan Gurila, Jalan Sibatu-batu - Jalan Tengkoh - Jalan Gurila.
3. Jaringan irigasi;
 - a. jaringan prasarana irigasi primer meliputi Kelurahan Simarimbun, Tong Marimbun, Nagahuta, Kelurahan Nagahuta Timur, Kelurahan Marihat Jaya, Kelurahan Pematang Marihat;
 - b. jaringan prasarana irigasi sekunder meliputi Kelurahan Marihat, Kelurahan Suka Maju, Kelurahan Sukaraja, Kelurahan Tomuan, Kelurahan Mekar Nauli, Kelurahan Bah Sorma, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kelurahan Pondok Sayur.
 4. Jaringan pengendalian banjir.
- Sistem jaringan pengendalian banjir meliputi:



Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012–2032

Gambar 6.6
Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air



Pengembangan tanggul pada Sungai Bah Bolon di Kelurahan Simalungun, Kelurahan Banjar, Kelurahan Bantan dan Kelurahan Teladan, dan Sungai Sigulang-gulang di Kelurahan Martoba, Kelurahan Sigulang-gulang, Kelurahan Proklamasi dan Kelurahan Tomuan.

- 5 Rencana sistem infrastruktur perkotaan.meliputi;
 1. Sistem penyediaan air minum;berupa sistem jaringan perpipaan dan non perpipaan, meliputi:
 - a. Penyediaan air minum, terdiri dari;
 - a) Mata air, meliputi:
 1. Mata air Mual Goit di Kelurahan Simarimbun;
 2. Mata air Sibulak-bulak di Kelurahan Simarimbun;
 3. Mata air Pancur Lima di Kelurahan Setia Negara;
 4. Mata air Silumangi di Jalan Marihat Kelurahan Mekar Nauli;
 5. Rencana produksi mata air Bah Sikam di Jalan Bah Kora Kelurahan Pematang Marihat; dan
 6. Rencana produksi mata air Aek Nauli.
 - b) Sumur pompa air tanah dalam, meliputi :
 1. mata Air Simarito Kelurahan Martimbang;
 2. jalan Sabang Merauke Kelurahan Simalungun;
 3. jalan Patuan Anggi Kelurahan Nagapitu;
 4. jalan Raya dengan Kelurahan Simarito;
 5. jalan Kertas Kelurahan Siopat Suhu;
 6. simarimbun Dolok Kelurahan Simarimbun;
 7. nommensen Kelurahan Siopat Suhu;
 8. timbang Galung Kelurahan Simarito;
 9. jalan Jambu Kelurahan Sukamaju;
 10. jalan Bakung Kelurahan Simarito;
 11. batu III Kelurahan Setia Negara;
 12. kompleks SMP Negeri I Kelurahan Pahlawan;
 - c) Pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sungai Bah Bolon di Kelurahan Nagahuta yang menggunakan air sungai Bah Bolon dengan kapasitas produksi sebesar 100 (seratus) liter per detik;
 - d) Instalasi penyedia air minum terdapat di Kelurahan Teladan dengan kapasitas sebesar 762,87 (tujuh ratus enam puluh dua koma delapan tujuh) liter per detik.
 - b. Reservoir; Dengan kapasitas tampung sebesar lebih kurang 10.500 meter kubik, meliputi :



1. Reservoir di Kelurahan Simarimbun dengan kapasitas tampung 1.500meter kubik;
2. Pembangunan reservoir Kelurahan Bukit Sofa;
3. Pembangunan reservoir Kelurahan Pondok Sayur;
4. pembangunan reservoir Kelurahan Tanjung Tengah;
5. Pembangunan reservoir Kelurahan Naga Huta; dan
6. Pembangunan reservoir Kelurahan Merdeka.

Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum, meliputi :

- a) kerjasama perlindungan dan pemeliharaan sumber mata air dengan Kabupaten Simalungun yang meliputi :
 - a. kawasan sekitar mata air Naga Huta di Kota, mata air Naga Huta I – II, Mata air Naga Huta III - IV, dan mata air Habonaran di Kabupaten Simalungun;
 - b. kawasan bangunan reservoir Simpang Pane di Kabupaten Simalungun dengan kapasitas tampung sebesar lebih kurang 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) meter kubik.
- b) Rehabilitasi prasarana-sarana pengaliran untuk mengurangi tingkat kehilangan air hingga 20 % meliputi : jaringan pipa transmisi dan distribusi di Kelurahan Martoba, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Tomuan, Kelurahan Merdeka, Kelurahan Setia Negara;
- c) Penambahan sumber air baku meliputi mata air dan air tanah dalam di luar kawasan permukiman di Kelurahan Simarimbun, Kelurahan Tong Simarimbun, Kelurahan Mekar Nauli, Kelurahan BP Nauli, Kelurahan Sukaraja, Kelurahan Gurila, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kelurahan Tambun Nabolon, Kelurahan Siopat Suhu;
- d) Pembatasan dan pengawasan pengambilan air tanah dalam oleh masyarakat di kawasan pusat kota di Kecamatan Siantar Utara, Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Selatan dan Kecamatan Siantar Timur.

Jaringan pipa distribusi air minum, meliputi :

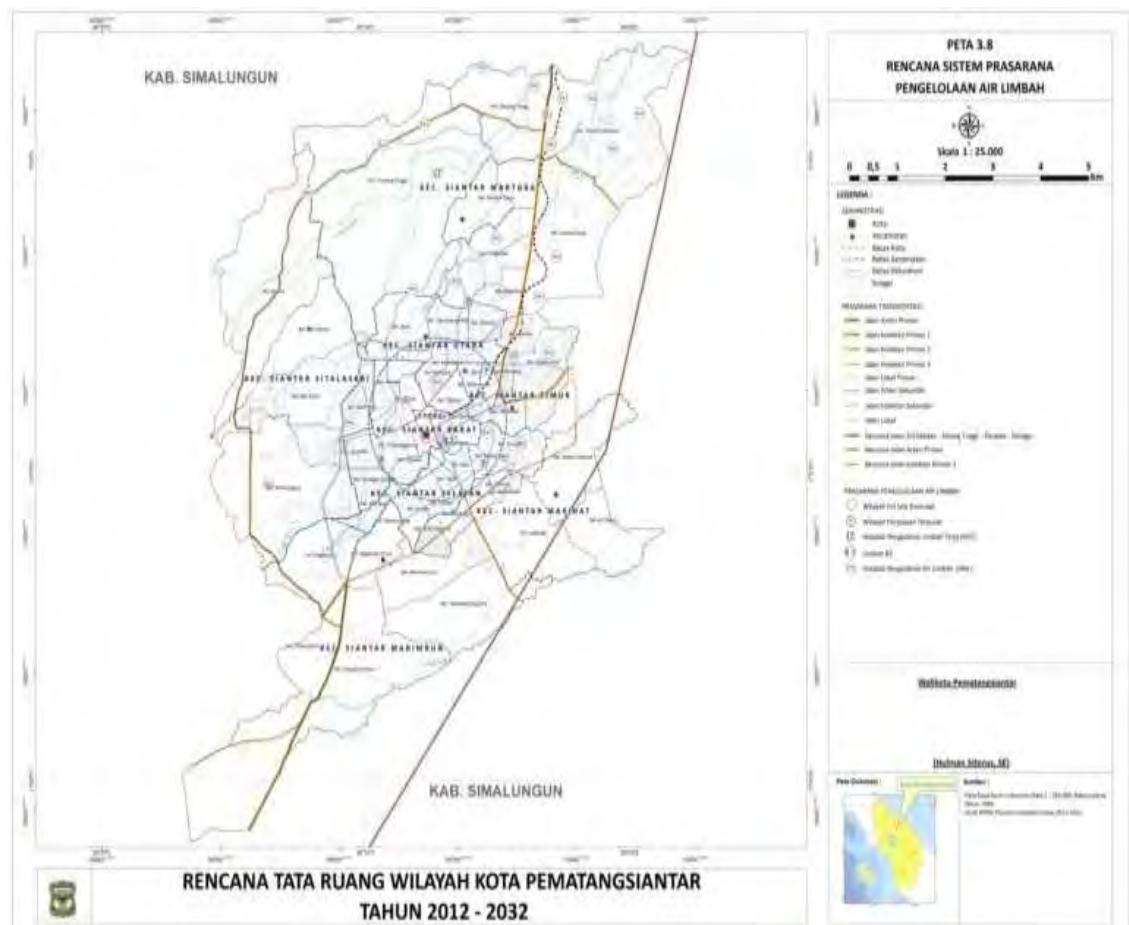
- a. jaringan perpipaan Mual Goit melalui Jalan Sidamanik, Jalan Parapat, Jalan DI Panjaitan, Jalan Farel Pasaribu, Jalan Kolonel Simanjuntak, Jalan Gereja, Jalan Kapten Sitorus, Jalan Merdeka, Jalan Sutomo, Jalan Diponegoro, Jalan Kartini, Jalan Ade Irma Suryani, Jalan Brawijaya, Jalan Patuan Anggi, Jalan Tuan Nagari, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Sangnauuluh, dan rencana pembangunan pada jalan Lingkar Luar Kota Timur,
- b. Jaringan perpipaan Habonaran melalui Jalan Saribudolok,



Sisingamangaraja, Jalan Rambung Merah, Jalan Dahlia, Jalan Jawa, Jalan Seram, dan jalan Singosari, Jalan Pdt Wismark Saragih, Jalan-Tuan Nagari-jalan Rangkuta Sembiring-jalan Sisingamangaraja, Jalan Bombongan, Jalan Tambun Barat, dan Jalan Tambun Timur,

c. jaringan perpipaan Naga Huta melalui Perumahan Tojai, Jalan Handayani, Jalan Gurila, Jalan Sibatu-batu, Jl. Tengkoh, Jalan Gurila.

2. Sistem pengelolaan air limbah; meliputi :
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik;
 - a) sistem setempat komunal di perumahan kepadatan tinggi;
 - b) sistem perpipaan terpusat di kawasan pusat kota dimana pembuangan air limbahnya dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat;
 - c) sistem setempat individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat dan dikembangkan pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat;
 - d) pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja di Kecamatan Siantar Martoba.



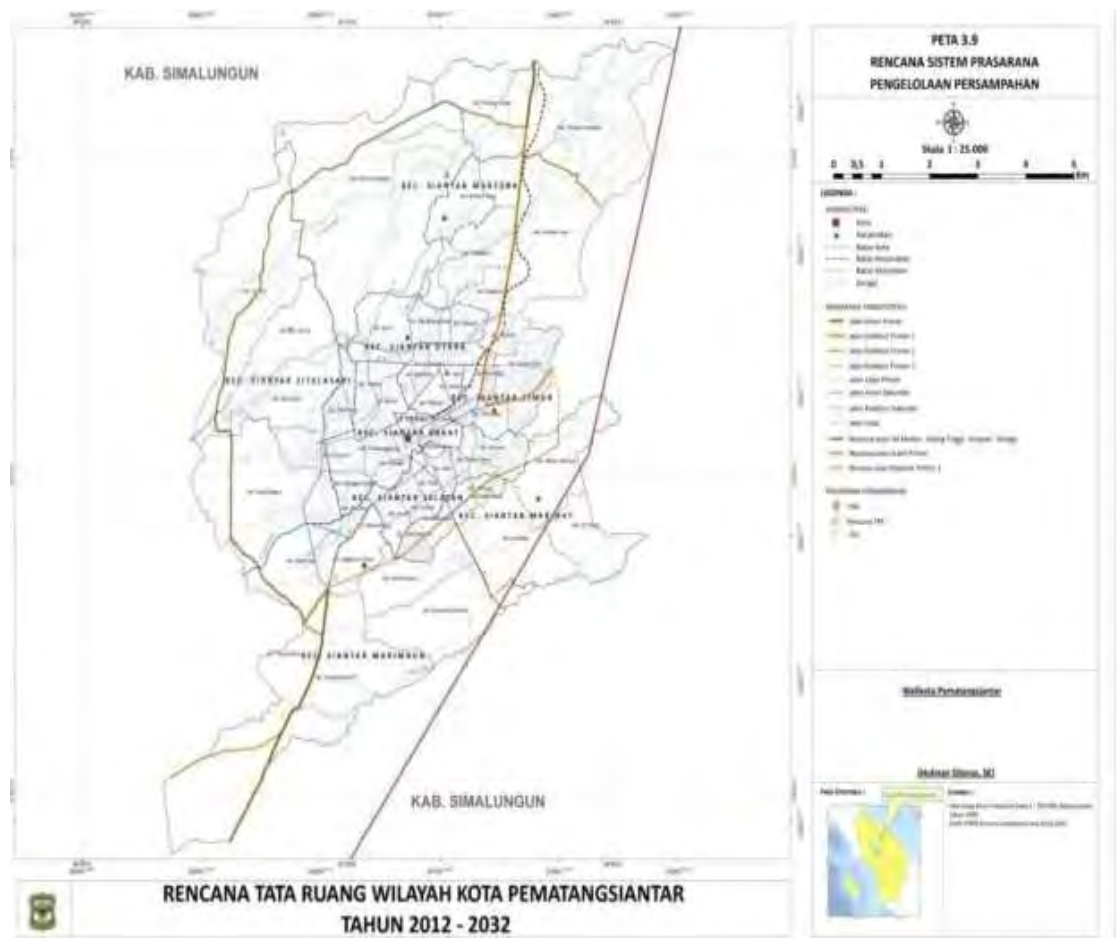
Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012–2032

Gambar 6.7

Peta Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Air Limbah



- b. sistem pengelolaan air limbah industri,; meliputi pengembangan instalasi pengolahan air limbah di kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan industri RT
 - c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dikembangkan di Kecamatan Siantar Selatan.
7. Sistem pengolahan persampahan; meliputi :
- a. TPS; TPS ditetapkan pada setiap unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat kegiatan yang tersebar di seluruh kelurahan.
 - b. TPST; meliputi stasiun peralihan antara (SPA) di Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara.
 - c. TPA : meliputi:
 - 1. TPA di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba seluas lebih kurang 5 hektar;
 - 2. pengembangan TPA di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba seluas lebih kurang 7 hektar di lahan eks PTPN III;
 - 3. kerjasama pengelolaan TPA Regional bersama Kabupaten Simalungun yang berada di Kabupaten Simalungun seluas lebih kurang 30 hektar.



Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032

Gambar 6.8

Peta Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Persampahan

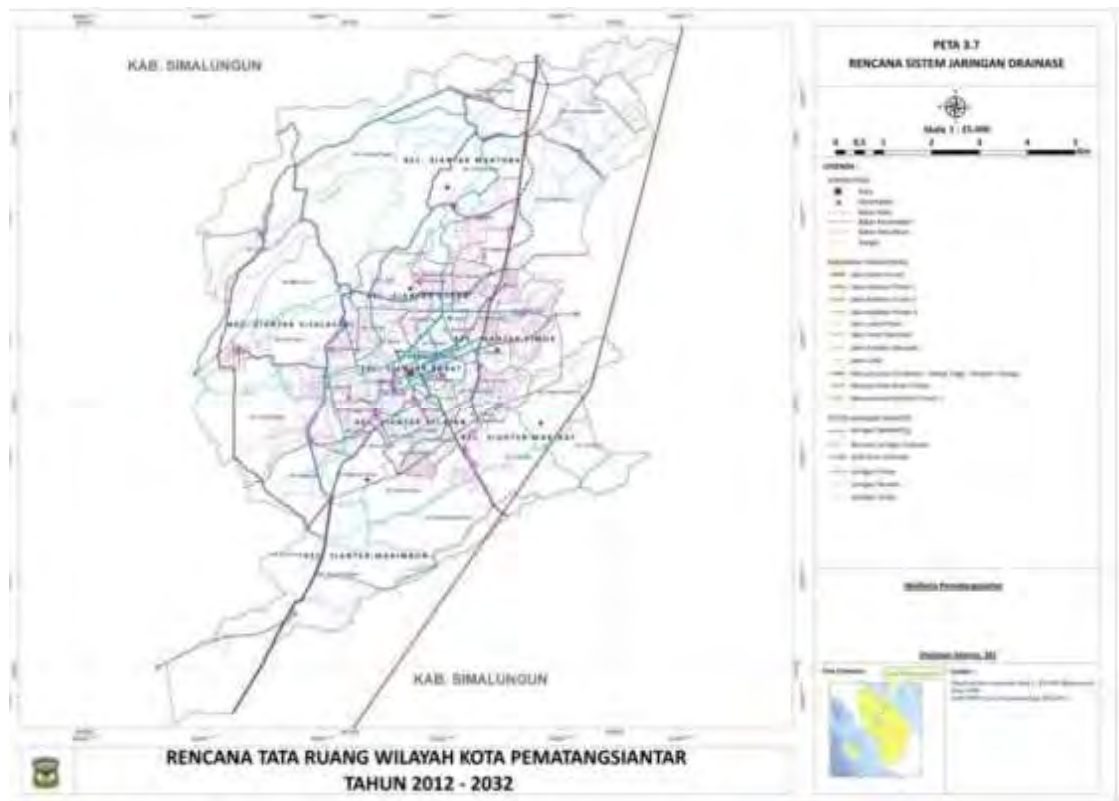


Rencana pengelolaan persampahan, meliputi :

- a. pengelolaan sampah kota dengan pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle);
- b. pengelolaan seluruh TPA menggunakan metode sanitary landfill; dan
- c. pemanfaatan zona penyangga TPA sebagai RTH.

8. Sistem jaringan drainase kota; meliputi :

- a. jaringan drainase primer; Jaringan drainase primer ditetapkan pada sungai-sungai yang meliputi :
 - a) sungai Bah Bolon;
 - b) sungai Bah Kapul;
 - c) sungai Bah Sigulang-gulang;
 - d) sungai Bah Biak;
 - e) sungai Bah Sibarambang.
- b. jaringan drainase sekunder; Jaringan drainase sekunder ditetapkan pada saluran-saluran yang bermuara ke saluran primer, meliputi :
 - a) jaringan drainase jalan-jalan utama yang terdapat pada Jalan Medan, Jalan Sutomo, Jalan Gereja, Jalan DI. Panjaitan-Jalan Parapat, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Sangnauuluh, Jalan Merdeka, Jalan Kartini, Jalan Farel Pasaribu, Jalan Melanton Siregar, Jalan Narumonda, Jalan Ade Irma Suryani;
 - b) jaringan drainase spoeleiding, meliputi:
 - 1. saluran dari jalan Padangsidimpuan, Jalan Menambin, Jalan Suprpto, Jalan Sakti Lubis, Jalan Kartini, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Adam Malik, Jalan Bambu Runcing, Jalan WR Supratman, Jalan Sutomo, Jalan Merdeka, Jalan Wahidin menuju Sungai Bah Bolon;
 - 2. saluran dari Jalan WR Supratman, Jalan Lokomotif menuju anak Sungai Bah Sigulang-gulang;
 - 3. saluran dari Jalan Ade Irma Suryani, Jalan Mataram, Jalan Wahidin, Jalan Patuan Nagari, Jalan Sisingamangaraja menuju Sungai Bah Sigulang-gulang;
 - 4. saluran dari Jalan Ade Irma Suryani, Jalan Patuan Anggi, Jalan Gotong Royong, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Kabu-Kabu menuju anak Sungai Bah Sigulang-gulang.
- c. jaringan drainase tersier; Jaringan drainase tersier ditetapkan di saluran-saluran berskala pelayanan lokal yang menyebar di seluruh wilayah kota.



Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012–2032

Gambar 6.9

Peta Rencana Sistem Jaringan Drainase

Rencana pengembangan sistem jaringan drainase kota sebagaimana dimaksud, meliputi:

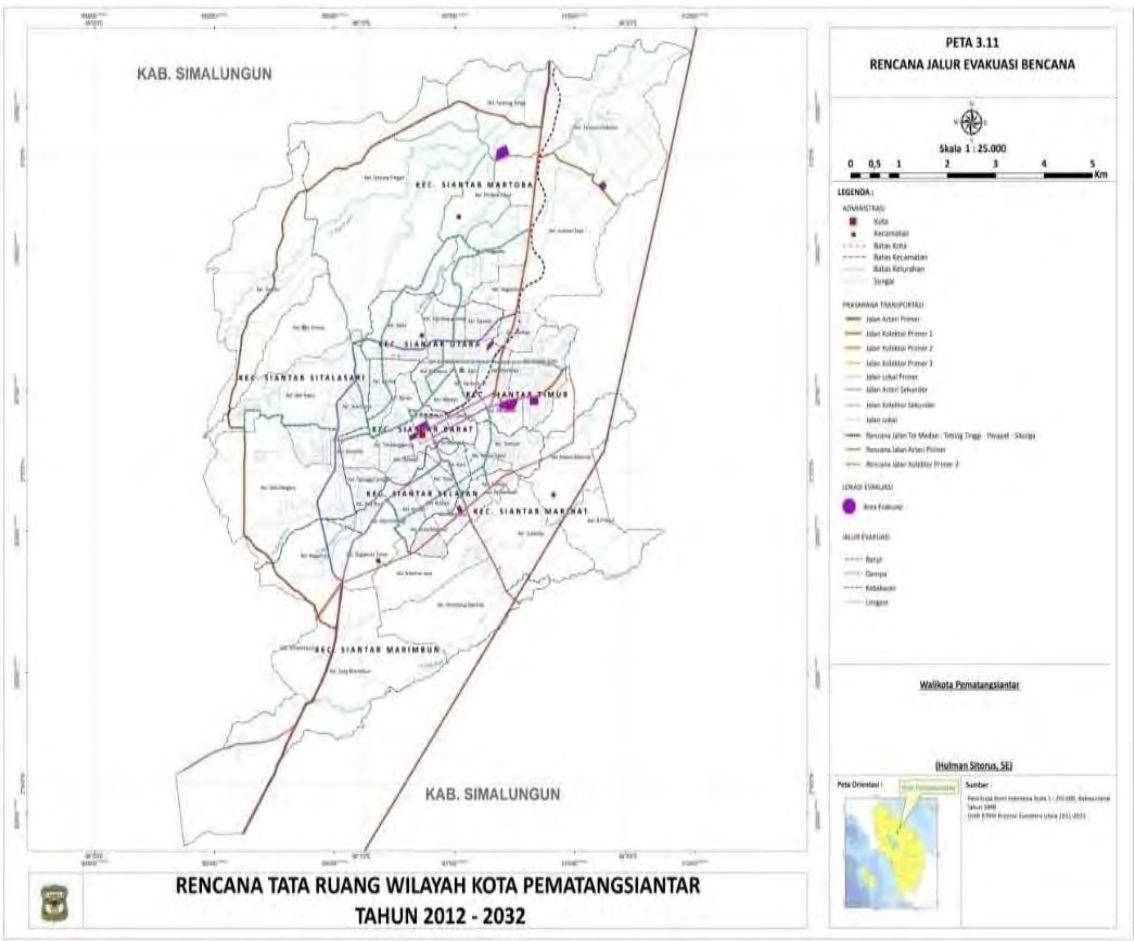
- a. peningkatan dimensi dan rehabilitasi saluran drainase sekunder;
 - b. pemeliharaan saluran drainase tertutup di Kelurahan Teladan, Kelurahan Proklamasi, Kelurahan Dwikora, Kelurahan Melayu, Kelurahan Baru, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Siopat Suhu, Kelurahan Pardomuan;
 - c. pemeliharaan saluran dari sedimentasi dan tertutup bangunan, termasuk perawatan saluran drainase spoeleiding;
 - d. melakukan perawatan saluran secara berkala terutama pada daerah-daerah rawan genangan;
9. Sistem jaringan jalur pejalan kaki; meliputi :
- a. pemeliharaan jaringan pedestrian meliputi Jalan Sutomo, Jalan Merdeka, Jalan Diponegoro, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Asahan, Jalan Medan, Jalan Gereja, Jalan Sudirman, Jalan Ade Irma Suryani, sebagian Jalan Melanton Siregar;
 - b. pengembangan jaringan jalur pejalan kaki meliputi :
 1. kawasan terminal penumpang di Tanjung Pinggir dan terminal regional agrobisnis perluasan;
 2. kawasan SPPK dan jalan penghubung dengan Terminal Tipe C;

-

Peta Rencana Jaringan Pejalan Kaki



10. Sistem jalur evakuasi bencana. meliputi :
- a. Jalur evakuasi bencana longsor;Jalan Pematang, Jalan Diponegoro, Jalan Seram, Jalan Jawa, Jalan Ade Irma Suryani, Jalan Kapten MH Sitorus, Jalan Sudirman, Jalan Gereja, Jalan Nagur, Jalan Singosari, Jalan Patuan Nagari, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Medan.
 - b. Jalur evakuasi bencana banjir;Jalan Sutomo, Jalan Merdeka, Jalan Wahidin, Jalan HOS.Cokroaminoto, Jalan Tanah Jawa, Jalan Ade Irma Suryani, Jalan Sangnualuh, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Medan.
 - c. Jalur evakuasi bencana gempa;Jalan DI Panjaitan, Jalan Gereja,Jalan Parapat, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Medan, Jalan Sutomo, Jalan Merdeka, Jalan Sudirman, Jalan Ade Irma Suryani, Jalan Medan, Jalan Sangnualuh, Jalan Ahmad Yani, Jalan Melanthon Siregar.
 - d. Jalur evakuasi bencana kebakaran.Jalan Sutomo, Jalan Merdeka, Jalan Surabaya dan Jalan Cipto.



Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012–2032

Gambar 6.11
Rencana Jalur Evakuasi Bencana



6.2.1.1. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kota Pematang Siantar, meliputi :

- A. Kawasan lindung seluas kurang lebih 1.525,04 hektar atau 19,07% terdiri dari;
 1. Kawasan perlindungan setempat; meliputi;
 - a. Kawasan sempadan sungai
 - a) sempadan Sungai Bah Bolon;
 - b) sempadan Sungai Sigulang-gulang dan Bah Kapul;
 - c) sempadan Sungai Bah Biak; dan
 - d) sempadan sungai-sungai kecil lainnya
 - b. Kawasan sekitar mata air
 - a) mata air Sibulak-Bulak;
 - b) mata air Simarito;
 - c) mata air Pancur Lima;
 - d) mata air Silumangi;
 - e) mata air Bah Sikam;
 - f) mata air Aek Nauli; dan
 - g) mata air mual goit.
 2. Kawasan ruang terbuka hijau; Kawasan RTH kota ditetapkan seluas 2.621,93 hektar atau 32,78 % dari luas wilayah kota.
 - a. kawasan RTH Publik seluas lebih kurang 1.642,7 hektar atau sebesar lebih kurang 20,54 % dari luas wilayah kota; dan
 - b. kawasan RTH Privat seluas lebih kurang 979,23 atau sebesar lebih kurang 12,25 % dari luas wilayah kota.
 3. Kawasan cagar budaya;
 - a. situs budaya;
 - a) kawasan makam keluarga Raja Siantar di kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan;
 - b) kawasan museum simalungun di kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Selatan.
 - b. bangunan bersejarah (heritage) dan bangunan keagamaan.
 - a) balai Kota di kelurahan Proklamasi;
 - b) gedung DPRD Kota di kelurahan Proklamasi; gedung BRI cabang Pematang Siantar di kelurahan Proklamasi;
 - c) gedung Kantor Pos di Kelurahan Proklamasi;
 - d) gedung juang di kelurahan Proklamasi;
 - e) monumen taman merdeka di Kelurahan Proklamasi;



- f) kawasan hotel bersejarah di Kelurahan Proklamasi;
- g) kawasan stasiun kereta api di Kelurahan Proklamasi;
- h) kawasan rumah sakit umum di Kelurahan Simalungun;
- i) bangunan gereja GPIB di Kelurahan Teladan;
- j) bangunan gereja Katholik St. Laurentius di Kelurahan Karo;
- k) kawasan gereja HKBP di Kelurahan Kristen;
- l) kantor pusat GKPS di Kelurahan Bane;
- m) kantor pusat Gereja Pentakosta di Kelurahan Siopat Suhu;
- n) kantor pusat Gereja HKI di Kelurahan Pardamean;
- o) kantor pusat Gereja GKPI di Kelurahan Teladan;
- p) kawasan mesjid Raya di Kelurahan Timbanggalung;
- q) patung Dewi Kwan Im di Kelurahan Tomuan;
- r) vihara Maha vihar vidya Maitreya di Kelurahan Melayu;
- s) gereja GKPS jalan Sudirman Kelurahan Teladan; dan
- t) bangunan Mesjid Kampung Keling jalan Cipto di Kelurahan Simalungun.

4. Kawasan rawan bencana.

- a. kawasan rawan bencana longsor yang meliputi : Kelurahan Setia Negara, Kelurahan Simarito, Kelurahan Timbang Galung, Kelurahan Teladan, Kelurahan Simalungun, Kelurahan Tomuan, Kelurahan Sigulang-gulang, Kelurahan Nagapitu dan Kelurahan Pondok Sayur, Kelurahan Banjar;
- b. kawasan rawan bencana banjir yang meliputi: Kelurahan Proklamasi, Kelurahan Dwikora, Kelurahan Simalungun, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Baru, Kelurahan Melayu, Kelurahan Banjar, Kelurahan Siopat suhu, Kelurahan Sukadame, Kelurahan Sigulang-gulang, Sebagian Kelurahan Sumber Jaya dan sebagian Kelurahan Tanjung Tengah;
- c. kawasan rawan bencana kebakaran yang meliputi perumahan kepadatan tinggi.

B. Kawasan budidaya seluas kurang lebih 6.472,06 hektar atau 80,93%, terdiri dari:

- 1. Kawasan peruntukan perumahan; seluas lebih kurang 2.556,73 hektar, meliputi:
 - a. Perumahan kepadatan tinggi seluas lebih kurang 640,05 hektar:
 - a) perumahan kepadatan tinggi ditetapkan di Kelurahan Suka Makmur, Kristen, Toba, Pardamean, Kebun Sayur, Baru, Martoba,



- Banjar, Proklamasi, Dwi Kora, Simarito, Timbang Galung, Sipinggol-pingol, Bantan, Bah Sorma, Gurilla, Asuhan;
- b) pengembangan kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi diarahkan pembangunan vertikal di kawasan pusat kota dan sekitar lokasi kegiatan industri dan pendidikan
 - b. Perumahan kepadatan sedang seluas lebih kurang 1542,88 Ha:
 - a) perumahan kawasan perumahan kepadatan sedang baru diarahkan ke luar pusat kota dan arah timur dan utara kota;
 - b) perumahan kepadatan sedang ditetapkan di Kelurahan Tong Marimbun, Pematang Marihat, Nagahuta, BP Nauli, Tomuan, Pardomuan, Siopat Suhu, Merdeka, Teladan, Sukadame, Bukit Sofa, Bah Kapul, Setia Negara, Sigulang-gulang, Kahean, Nagapitu, Nagapita, Pondok Sayur, Tanjung Pinggir;
 - c) pengembangan Kawasan petuntukan perumahan sedang:
 - 1. pengembangan kawasan perumahan kawasan ke luar kawasan pusat kota di Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Marihat dan Kecamatan Siantar Martoba;
 - 2. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - 3. menyediakan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan perumahan.
 - c. Perumahan kepadatan rendah seluas lebih kurang 373,8 Ha:
 - a) perumahan kepadatan rendah ditetapkan di Kelurahan Nagahuta, Marihat Jaya, Pematang Marihat, Sukaraja, Mekar Nauli, Tanjung Pinggir dan Tambun Nabolon;
 - b) pengembangan kawasan perumahan kepadatan rendah:
 - 1. pengembangan kawasan perumahan kepadatan rendah baru diarahkan ke wilayah selatan kota di Kelurahan Simarimbun, Kelurahan Tong Marimbun, Kelurahan Nagahuta, Kelurahan Setia Negara, Kelurahan Pematang Marihat, Kelurahan Marihat Jaya, Kelurahan Naga Huta Timur, Kelurahan Suka Makmur dan Kelurahan Gurila;
 - 2. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - 3. menyediakan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan perumahan.



2. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; seluas lebih kurang 234,2 hektar, meliputi :
 - a. Pusat perbelanjaan;
 - a) kecamatan Siantar Utara;
 - b) kecamatan Siantar Timur;
 - c) kecamatan Siantar Selatan;
 - d) kecamatan Siantar Barat;
 - e) kecamatan Siantar Marimbun.
 - b. Toko modern;
 - a) kecamatan Siantar Utara;;
 - b) kecamatan Siantar Selatan;
 - c) kecamatan Siantar Barat;;
 - d) kecamatan Siantar Sitalasari;
 - e) kecamatan Siantar Martoba.
 - c. Pasar tradisional.
 - a) pasar Horas di Kecamatan Siantar Barat;
 - b) pasar Dwikora di Kecamatan Siantar Utara;
 - c) pasar Regional Agroindustri Parluasan di Kec. Siantar Utara.

Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa:

 - a. pengembangan pasar pusat jajanan di kelurahan Simarimbun seluas 5 hektar;
 - b. pengembangan pasar tradisional di setiap Kecamatan lainnya.
3. Kawasan peruntukan perkantoran; seluas lebih kurang 84,92 hektar, meliputi:
 - a. perkantoran pemerintahan;
 - a) kawasan Balai Kota dan sekitarnya di kelurahan Proklamasi seluas 11,87 hektar;
 - b) pengembangan kawasan perkantoran di kelurahan Tanjung Pinggir seluas 23,32 hektar; dan
 - c) pengembangan kawasan perkantoran di kelurahan Setia Negara 32,4 hektar.
 - b. perkantoran swasta; perkantoran swasta ditetapkan di Kecamatan Siantar Sitalasari, Kecamatan Siantar Utara, Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Selatan dan Kecamatan Siantar Barat.
4. Kawasan peruntukan industri; seluas lebih kurang 338,7 hektar:
 - a. kawasan peruntukan industri besar dan sedang seluas lebih kurang 220,86 hektar, meliputi :
 - a) kelurahan Tanjung Tongah;



- b) kelurahan Tanjung Pinggir;
 - c) kelurahan Nagapitu; dan
 - d) kelurahan Siopat Suhu
- b. kawasan peruntukan industri kecil; seluas 102,84 Ha meliputi::
 - a) kelurahan Tomuan;
 - b) kelurahan Sumber Jaya;
 - c) kelurahan Tambun Nabolon;
 - d) kelurahan Tanjung Pinggir; dan
 - e) kawasan agroindustri di Kelurahan Tong Marimbun.
- c. Kegiatan distribusi dan pergudangan.
 - a) Pengembangan kawasan industri kecil seluas 15 hektar di Kelurahan Setia Negara.
 - b) Kegiatan pergudangan meliputi kawasan pergudangan di kelurahan Melayu.
 - c) Pengembangan kawasan peruntukan distribusi, meliputi: pengembangan pusat distribusi regional di Kecamatan Siantar Marihat;
 - d) Pengembangan kawasan pergudangan di kelurahan Tanjung Pinggir dan kelurahan Tanjung Tengah.
- 5. Kawasan peruntukan pendidikan;
 - a. Kawasan peruntukan pendidikan seluas lebih kurang 123,5 ha, :
 - a) kelurahan Bah Kapul;
 - b) kelurahan Siopat Suhu;
 - c) kelurahan Pondok Sayur; dan
 - d) kelurahan Sukamaju.
 - b. Pengembangan kawasan peruntukan pendidikan meliputi :
 - a) pengembangan pendidikan di kelurahan Setia Negara seluas 20 hektar;
 - b) membatasi pengembangan pendidikan pada kawasan pusat kota.
- 6. Kawasan peruntukan pariwisata; seluas 5,9 hektar, meliputi :
 - a. pariwisata budaya;
 - a) Kawasan sekitar situs budaya makam Raja Siantar;
 - b) Museum Simalungun;
 - c) Kawasan bersejarah pusat pemerintahan di Kel. Proklamasi;
 - b. pariwisata buatan;
 - a) taman Hewan di Kelurahan Teladan;
 - b) pusat jajanan Siantar Square di Kelurahan Simalungun Kecamatan Siantar Selatan;



- c) kawasan Taman Merdeka di Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat;
- d) kawasan pemandian di Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara, Kecamatan Sitalasari dan Siantar Martoba;
- e) pengembangan kawasan wisata seluas 5 hektar di Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun;
- f) pengembangan pusat jajanan di Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat.
- c. Pariwisata alam; Pariwisata alam meliputi Kawasan Pemandian Sibatu-batu kelurahan Bah Sorma, dan kawasan wisata Rindam di kelurahan Setia Negara.
- 7. Kawasan peruntukan pertanian; seluas 2.433,5 hektar, meliputi:
 - a. kawasan pertanian pangan (lahan basah) seluas 1.945 Ha:
 - a) kelurahan Mekar Nauli;
 - b) kelurahan BP Nauli;
 - c) kelurahan Sukaraja;
 - d) kelurahan Tong Marimbun;
 - e) kelurahan Nagahuta;
 - f) kelurahan Martimbang;
 - g) kelurahan Marihat Jaya;
 - h) kelurahan Pematang Marihat;
 - i) kelurahan Nagahuta Timur;
 - j) kelurahan Gurilla;
 - k) kelurahan Bah Sorma;
 - l) kelurahan Tanjung Pinggir;
 - m) kelurahan Tanjung Tonga;
 - n) kelurahan Pondok Sayur; dan
 - o) kelurahan Sumber Jaya.
 - b. kawasan pertanian hortikultura (lahan kering) seluas 195 Ha :
 - a) kelurahan Nagahuta;
 - b) kelurahan Simarimbun;
 - c) kelurahan Tong Marimbun;
 - d) kelurahan Marihat Jaya;
 - e) kelurahan Pematang Marihat;
 - f) kelurahan Bp. Nauli;
 - g) kelurahan Sukaraja;
 - h) kelurahan Tambun Nabolon;
 - i) kelurahan Tanjung Tonga; dan



- j) kelurahan Sumber Jaya.
- c. kawasan perkebunan seluas 293,5 hektar meliputi;
 - a) kelurahan Setia Negara;
 - b) kelurahan Bah Kapul;
 - c) kelurahan Gurilla;
 - d) kelurahan Tambun Nabolon;
 - e) kelurahan Tanjung Tongah; dan
 - f) kelurahan Sumber Jaya.
- 8. Kawasan peruntukan perikanan; Kawasan perikanan meliputi prasarana perikanan berupa Balai Benih Ikan seluas 1 hektar di Kecamatan Siantar Martoba.
- 9. Kawasan ruang terbuka non hijau (RTNH); seluas 4,1 hektar :
 - a. lapangan Adam Malik di kelurahan Proklamasi;
 - b. pelataran Parkir Pariwisata di kelurahan Pahlawan;
 - c. lapangan terbuka di Simpang Koperasi di kelurahan Tanjung Tongah.
- 10. Ruang evakuasi bencana; meliputi :
 - a. lapangan Adam Malik dan Taman Merdeka di kelurahan Proklamasi, pelataran parkir Terminal Regional Agribisnis, Lapangan Parkir Pariwisata, dan Stadion Sangnauuluh;
 - b. pelataran terminal Tanjung Pinggir dan lahan terbuka Simpang Koperasi di kelurahan Tanjung Tonga, dan RTH lingkungan di PPL Tambun Nabolon;
 - c. kawasan pendidikan tinggi STT Nomensen dan pelataran parkir di Kawasan Megaland;
 - d. lapangan Bola Atas Farel Pasaribu, dan lapangan Sekolah Budi Mulia;
 - e. taman Wisata Rindam, Kawasan pendidikan tinggi USI, RTH di kelurahan Bah Kapul, dan pelataran parkir kawasan pemerintahan di kelurahan Gurilla;
 - f. pelataran kantor pemerintahan serta fasilitas sosial yang berdekatan dengan pinggiran sungai yang rawan bencana longsor di kelurahan Setia Negara, kelurahan Simarito, kelurahan Timbang Galung, Kelurahan Teladan, Kelurahan Simalungun, kelurahan Tomuan, kelurahan Sigulang-gulang, kelurahan Nagapitu dan kelurahan Pondok Sayur;
 - g. kompleks rumah Sakit Umum di kelurahan Simalungu
- 11. Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal; meliputi;
 - a. pusat jajanan di kelurahan Simalungun Kecamatan Siantar Selatan;



- b. pusat jajanan kawasan taman bunga di kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat;
 - c. pengembangan pusat jajanan di kelurahan Simarimbun dan kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat seluas 2,5 ha.
12. Kawasan peruntukan lainnya. meliputi :
- a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; seluas lebih kurang 52,8 hektar, meliputi :
 - a) kawasan Rindam I/BB di kelurahan Setia Negara;
 - b) daerah Latihan Militer Rindam I/BB di kelurahan Nagahuta;
 - c) kawasan Brimob di kelurahan Nagapitu.
 - b. Kawasan peruntukan kesehatan; seluas 45,63 hektar, meliputi:
 - a) rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Djasamen Saragih di kelurahan Simalungun;
 - b) rumah Sakit Umum Swasta di kelurahan Nagapitu;
 - c) rumah Sakit TNI AD di kelurahan Teladan;
 - d) pengembangan kawasan kesehatan seluas 19,5 hektar di kelurahan Simarimbun.
 - c. Kawasan peruntukan fasilitas sosial lainnya; Kawasan peruntukan fasilitas sosial seluas lebih kurang 18,35 hektar meliputi fasilitas peribadatan dan sosial lainnya yang menyebar di seluruh wilayah kota.
 - d. Kawasan peruntukan badan jalan raya, jalur rel Kereta Api dan badan sungai; Kawasan peruntukan badan jalan raya meliputi :
 - a) badan jalan raya seluas 344,83 hektar;
 - b) jalur rel kereta api seluas 8,2 hektar;
 - c) badan sungai seluas 217,2 hektar yang menyebar di seluruh wilayah kota.

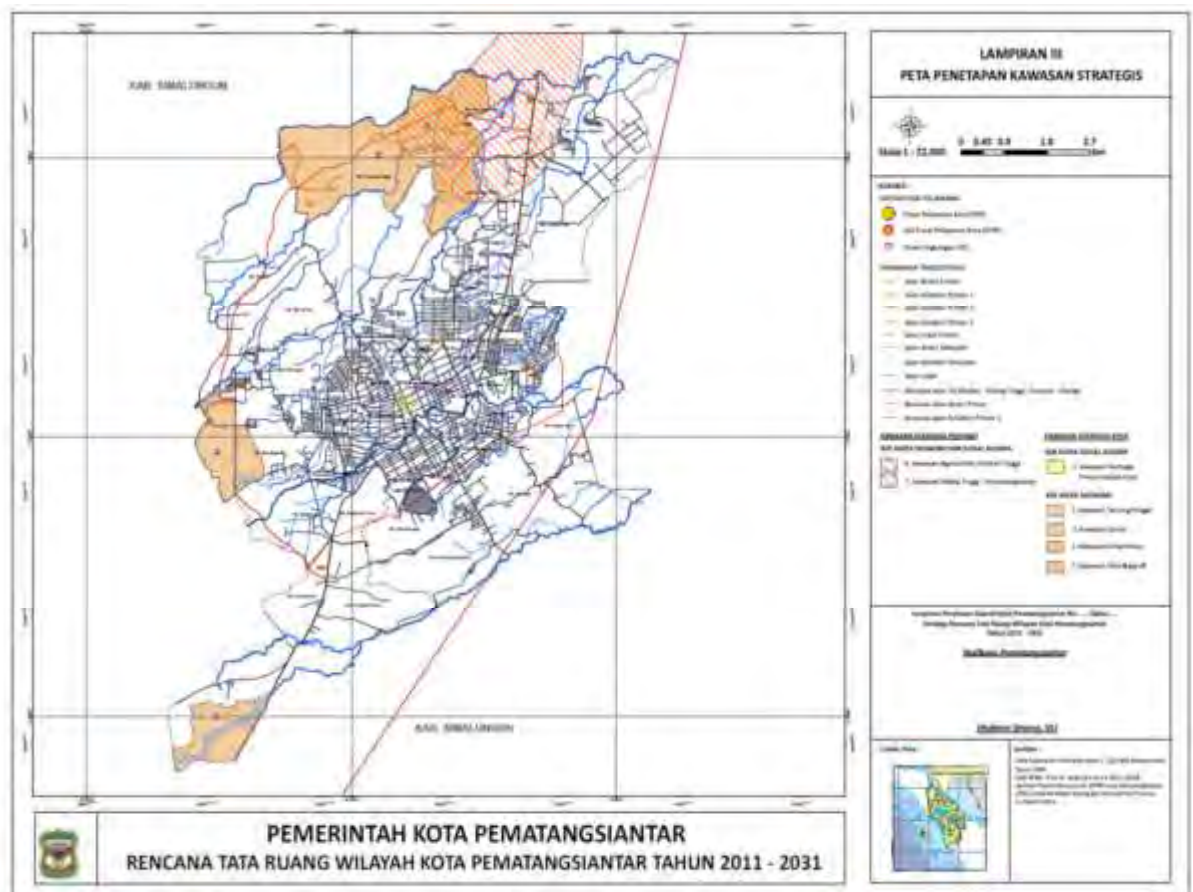
6.2.1.1.1. Kawasan Strategis

Kawasan strategis dibagi menjadi 2 kepentingan, yaitu (1) untuk pertumbuhan ekonomi; dan (2) kepentingan sosial budaya.

- 1. Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - a. kawasan agropolitan dataran tinggi di kelurahan Tanjung Tengah;
 - b. kawasan pengembangan perkantoran di kelurahan Gurilla dan Kelurahan Tanjung Pinggir;
 - c. kawasan wisata agro di kelurahan Simarimbun; dan
 - d. kawasan pengembangan perkantoran di kelurahan Setia Negara.
- Peruntukan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi



1. peningkatan dan pengembangan kawasan industri besar;
 2. peningkatan dan pengembangan penataan kawasan perdagangan;
 3. peningkatan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa yang diarahkan pada pusat pelayanan kota dengan arahan rencana untuk perdagangan dan jasa yang skala besar dan grosir;
 4. peningkatan dan pengembangan industri rumah tangga/kecil dan industri ringan diarahkan pada setiap sub pusat pelayanan kota.
2. Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya.
- Rencana pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya meliputi Kawasan Pusat Pemerintahan Kota di kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat.



Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012–2032

Gambar 6.12

Peta Kawasan Strategis Kota Pematang Siantar

6.2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam di Kota Pematang Siantar,

1. Kawasan rawan bencana longsor yang meliputi: Kelurahan Setia Negara, Kelurahan Simarito, Kelurahan Timbang Galung, Kelurahan Teladan,



- Kelurahan Simalungun, Kelurahan Tomuan, Kelurahan Sigulang-gulang, Kelurahan Nagapitu dan Kelurahan Pondok Sayur, Kelurahan Banjar;
2. Kawasan rawan bencana banjir yang meliputi :Kelurahan Proklamasi, Kelurahan Dwikora, Kelurahan Simalungun, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Baru, Kelurahan Melayu, Kelurahan Banjar, Kelurahan Siopat suhu, Kelurahan Sukadame, Kelurahan Sigulang-gulang, Sebagian Kelurahan Sumber Jaya dan sebagian Kelurahan Tanjung Tengah;
 3. Kawasan rawan bencana kebakaran yang meliputi; perumahan kepadatan tinggi.

6.2.2. Arah Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 158 Prioritas dibagi dalam tiga kategori, Prioritas pertama adalah program untuk membiayai belanja yang sifatnya wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; Prioritas kedua adalah program untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah dan Prioritas ketiga dialokasikan untuk program penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Pencapaian standart pelayanan minimal yang dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Penjelasan ini tertuang secara jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. PP Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dengan adanya dinamika perubahan maka aturan pelaksanaannya SPM dari PMDN Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dicabut dan berganti menjadi PMDN Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan. Berdasarkan aturan tersebut, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. SPM yang ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Pemerintah daerah menyusun rencana penerapan SPM disesuaikan dengan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah namun tetap menjadi hal yang prioritas. Pemerintah Kota Pematang Siantar menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar maka telah dilakukan inetgrasi SPM dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM dalam dokumen RPJMD Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut.



Tabel 6.6
Rencana Program Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kondisi Awal				Alokasi Pagu SPM									
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
			Realisasi	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		7.199.600.000		10.368.361.519		10.575.728.749		10.787.243.324		11.002.988.191		11.223.047.955		11.447.508.915	
1	Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	119.91%	5.513.150.000	100%	6.861.536.519	100%	6.998.767.249	100%	7.138.742.594	100%	7.281.517.446	100%	7.427.147.795	100%	7.575.690.751
2	Pendidikan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	100%	432.300.000	100%	1.146.875.000	100%	1.169.812.500	100%	1.193.208.750	100%	1.217.072.925	100%	1.241.414.384	100%	1.266.242.672
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	52.93%	1.254.150.000	100%	2.359.950.000	100%	2.407.149.000	100%	2.455.291.980	100%	2.504.397.820	100%	2.554.485.776	100%	2.605.575.492
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		4.578.515.716		36.163.416.925		42.757.515.500		47.033.267.050		51.736.593.755		56.910.253.131		62.601.278.444	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	76,74%	1.012.019.124	100%	446.306.322	100%	1.586.293.000	100%	1.744.922.300	100%	1.919.414.530	100%	2.111.355.983	100%	2.322.491.581
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	81,61%	1.040.345.912	100%	369.216.806	100%	2.028.820.500	100%	2.231.702.550	100%	2.454.872.805	100%	2.700.360.086	100%	2.970.396.094
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	77%	204.170.568	100%	157.244.022	100%	2.336.230.000	100%	2.569.853.000	100%	2.826.838.300	100%	3.109.522.130	100%	3.420.474.343
4	Pelayanan kesehatan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	78%	709.714.424	100%	854.180.721	100%	2.672.960.000	100%	2.940.256.000	100%	3.234.281.600	100%	3.557.709.760	100%	3.913.480.736
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	82%	337.644.198	100%	199.546.920	100%	994.706.000	100%	1.094.176.600	100%	1.203.594.260	100%	1.323.953.686	100%	1.456.349.055
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	25,24%	153.678.182	100%	307.122.428	100%	827.550.000	100%	910.305.000	100%	1.001.335.500	100%	1.101.469.050	100%	1.211.615.955



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kondisi Awal				Alokasi Pagu SPM									
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
			Realisasi	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Upaya Kesehatan Masyarakat														
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	81,00%	331.250.887	100%	266.327.557	100%	1.494.376.000	100%	1.643.813.600	100%	1.808.194.960	100%	1.989.014.456	100%	2.187.915.902
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	12,70%	88.574.065	100%	50.686.187	100%	4.820.535.000	100%	5.302.588.500	100%	5.832.847.350	100%	6.416.132.085	100%	7.057.745.294
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	56,95%	57.019.852	100%	31.684.147.309	100%	2.610.930.000	100%	2.872.023.000	100%	3.159.225.300	100%	3.475.147.830	100%	3.822.662.613
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	85,95%	92.636.013	100%	62.897.432	100%	19.398.860.000	100%	21.338.746.000	100%	23.472.620.600	100%	25.819.882.660	100%	28.401.870.926
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	63,44%	286.655.524	100%	1.469.005.171	100%	2.740.640.000	100%	3.014.704.000	100%	3.316.174.400	100%	3.647.791.840	100%	4.012.571.024
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	78,44%	264.806.967	100%	296.736.050	100%	1.245.615.000	100%	1.370.176.500	100%	1.507.194.150	100%	1.657.913.565	100%	1.823.704.922
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1.219.887.000		2.054.121.000		1.800.000.000		1.900.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
1	Penyediaan Kebutuhan	Program Pengelolaan dan Pengembangan	99,03%	0	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kondisi Awal				Alokasi Pagu SPM									
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
			Realisasi	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	pokok air minum sehari-hari	Sistem Penyediaan Air Minum (DPKP)														
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (DPKP)	100%	1.219.887.000	100%	1.854.121.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000		100.000.000		600.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Program Pengembangan Perumahan	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Program Pengembangan Perumahan	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		272.581.990		498.843.000		893.796.950		971.176.645		1.052.296.310		1.136.923.740		1.227.276.115	
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		100%		100%	23.796.950	100%	26.176.645	100%	28.796.310	100%	31.073.740	100%	34.841.115
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	100%	100.500.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	242.000.000	100%	266.200.000	100%	292.820.000
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	100%		100%		100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	219.615.000
4	Pelayanan penyelamatan	Program Penanggulangan Bencana	100%	172.081.990	100%	318.843.000	100%	320.000.000	100%	340.000.000	100%	360.000.000	100%	380.000.000	100%	400.000.000



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kondisi Awal				Alokasi Pagu SPM									
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
			Realisasi	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	dan evakuasi korban bencana															
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%		100%		100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	240.000.000	100%	260.000.000	100%	280.000.000
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		72.598.811		185.840.000		194.140.000		196.140.000		197.140.000		198.140.000		199.140.000	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	100%	2.625.000	100%	44.535.000	100%	44.535.000	100%	44.535.000	100%	44.535.000	100%	44.535.000	100%	44.535.000
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	100%	22.625.000	100%	44.535.000	100%	44.535.000	100%	44.535.000	100%	44.535.000	100%	44.535.000	100%	44.535.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	100%	2.625.000	100%	44.535.000	100%	44.535.000	100%	44.535.000	100%	44.535.000	100%	44.535.000	100%	44.535.000
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	100%	2.625.000	100%	20.535.000	100%	20.535.000	100%	20.535.000	100%	20.535.000	100%	20.535.000	100%	20.535.000
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Program Rehabilitasi Sosial	100%	42.098.811	100%	31.700.000	100%	40.000.000	100%	42.000.000	100%	43.000.000	100%	44.000.000	100%	45.000.000
T O T A L (Rp)			13.443.183.517		49.370.582.444		56.821.181.199		61.687.827.019		66.989.018.256		72.468.364.826		78.475.203.474	

Sumber: Perangkat Daerah Pelaksana SPM



6.3. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Seperti halnya perumusan sebelumnya, dalam tahap perumusan program pembangunan daerah, proses pendampingan, masukan, kritik dan koreksi dari pusat terhadap provinsi, dan pendampingan, masukan, kritik dan koreksi oleh pusat dan/atau provinsi terhadap kabupaten/kota sangat penting untuk dilakukan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah yang akan ditunjukkan dalam Tabel 6.6. Kemudian akan disajikan (gambar 6.3 sampai dengan gambar 6.6) program antar lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikator kinerja yang berkontribusi secara langsung sesuai perangkat daerah pengampu sasaran strategis dengan program pembangunan daerah dan program pendukung dari perangkat daerah lainnya (perangkat daerah yang tidak mengampu sasaran) dalam upaya mengatasi isu-isu strategis dan mencapai misi Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027. Berikut disampaikan rencana program pembangunan disertai dengan target kinerja dan pendanaan dan program lintas perangkat daerah.



Tabel 6.7
Rencana Program Pembangunan Daerah Disertai Dengan Target Kinerja dan Pagu Indikatif

No	Visi/Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Formula/Sumber	Stn	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggun gi Jawab	
							2021		P 2022		2023		2024		2025		2026		2027			
							R	Rp	P	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
VISI : Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas																						
1	M 1	Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas																				
	T 1.1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas																				
		IPM																				
	SS 1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																				
		1. Usia Harapan Hidup																				
		2. Prevelensi Stunting																				
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Capaian SPM Kesehatan	((Sigma 12 Capaian SPM Bidang Kesehatan)/ 12 x 100%)	Mandiri	%	90,9 5	4.578.51 5.716	100	36.163.4 16.925	100	42.757.51 5.500	100	47.033.26 7.050	100	51.736.59 3.755	100	56.910.25 3.131	100	6.260.127 .844	Dinas Kesehata n
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	% tenaga kesehatan di PKM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan (Tenaga kesehatan meliputi medis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, psikologi klinis, kesehatan lingkungan , teknik biomedika, kesehatan masyarakat , gizi, keteknisian medis, keterampilan	Rata - rata jumlah tenaga medis yang memenuhi standar/jumla h seluruh tenaga kesehatan x 100%	Mandiri	%	14	37.520.9 11	100	17.793.5 22	60	500.000.0 00	65	500.000.0 00	75	500.000.0 00	80	500.000.0 00	85	500.000.0 00	Dinas Kesehata n



No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Formula/Sumber		Stn	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggunggi Jawab	
									2021		P 2022		2023		2024		2025		2026		2027			
									R	Rp	P	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
					fisik yang memenuhi standar (pendidikan D3, memiliki STR/SIP, memiliki sertifikat diklat kompetensi) yang ada di Puskesmas																			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kota	Persentase Rumah Tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah	Mandiri	%	42	21.625.507	68	74.244.572	50	100.000.000	55	150.000.000	60	200.000.000	65	250.000.000	70	300.000.000	Dinas Kesehatan	
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi (SPP-IRT)	Jumlah industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-IRT)/jumlah IRT x 100%	Mandiri	%	80	17.405.904	90	238.598.201	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas Kesehatan	
					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di PKM yang sesuai standar	Jumlah PKM dengan sarana dan prasarana sesuai standar/Jumlah seluruh PKM x 100%	Mandiri	%	60	4.092.329.495	66	7.702.574.705	60	2.000.000.000	65	1.500.000.000	75	1.000.000.000	80	750.000.000	85	500.000.000	Dinas Kesehatan	
					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan di RSUD /Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan	Mandiri	%	80,44	16.644.258.620	81,36	21.011.212.886	84,71	26.474.128.236	87,1	33.357.401.578	89,49	42.030.325.988	91,88	52.958.210.745	94,27	66.727.345.539	RSUD dr. Djasamen Saragih	



No	Visi/Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Formula/Sumber		Stn	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
									2021		P 2022		2023		2024		2025		2026		2027		
									R	Rp	P	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			
						sesuai standart RSUD x 100%																	
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta (khusus rsud)	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyarat kan (Tenaga kesehatan meliputi medis, keperawata n, kebidanan, kefarmasia n, psikologi klinis, kesehatan lingkungan , teknik biomedika, kesehatan masyarakat , gizi, keteknisian medis, keterapian fisik yang memenuhi standar (pendidika n D3, memiliki STR/SIP, memiliki sertifikat diklat kompetensi) yang ada di RSUD	Rata - rata jumlah tenaga medis yang memenuhi standar/jumla h seluruh tenaga kesehatan x 100%	Mandiri	%	40,8 8	376.857. 000	70	1.490.11 8.000	75	1.675.661 .500	80	1.861.205 .000	85	2.046.748 .500	85	2.046.748 .500	85	2.046.748 .500	RSUD dr. Djasamen Saragih



No	Visi/Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Formula/Sumber	Stn	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	
							2021		P 2022		2023		2024		2025		2026		2027					
							R	Rp	P	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp				
			Program Pengendalian Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	7TFR = 5 ∑ ASFR i	PMDN 18 Tahun 2020		63,1 9	150.000. 000	69,1 2	155.000. 000	75,2 1	158.000.0 00	78,2 5	165.000.0 00	80	175.000.0 00	85,1 5	178.000.0 00	90	180.000.0 00	DPP & KB		
			Program Pengembang an Kapasitas Daya Saing keolahragaan	Persentase Peningkata n prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional (Emas, Perak, Perunggu)	PMDN 18 Tahun 2020	%	Ema s 7	751.020. 733	Ema s 8	2.336.26 4.800	Ema s 9	1.630.000 .000	Ema s 10	525.000.0 00	Ema s 11	575.000.0 00	Ema s 12	625.000.0 00	Ema s 13	655.000.0 00	Dinas Pariwisat a		
								Pera k 4		Pera k 5		Pera k 6		Pera k 7		Pera k 8		Pera k 9		Pera k 10				
								Peru nggu 4		Peru nggu 5		Peru nggu 6		Peru nggu 7		Peru nggu 8		Peru nggu 9		Peru nggu 10				
			SS 1.1.2																					
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat																					
					1. Rata-Rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah																			
						Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	((Sigma 3 Capaian SPM Bidang Pendidikan)/3 x 100%)	Mandiri	%	66,5 9	71.397.3 80.296	100	54.443.1 53.724	100	57.165.31 1.410	100	68.598.37 3.692	100	82.318.04 8.431	100	89.156.58 1.170	100	118.537.9 89.740
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukup an pendidik dan tenaga kependidik an (PAUD, SD, SMP)	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD/ Jumlah Pendidik PAUD x 100%				PMDN 18 2020	%	100	3.914.95 0.000	100	247.330. 000	100	951.580.8 00	100	1.087.520 .914	100	1.178.147 .657	100	1.276.326 .629	100	1.361.415 .070	Dinas Pendidika n		
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustaka an Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	Jumlah Pengunjung perpustakaan usia (5- 60)/Jumlah penduduk Usia 5-60) tahun x 100%				Mandiri	%	9.5	391.844. 758,00	17.9 8	958.550. 000	18.5 6	1.060.000 .000	19.1 7	1.161.450	19.8 0	1.262.900 .000	20.4 5	1.364.350 .000	21.1 4	1.465.800 .000	Dinas Arsip dan Perpusta kaan		



N o	Visi/Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Formula/Sumber		Stn	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggun gi Jawab
								2021		P 2022		2023		2024		2025		2026		2027				
								R	Rp	P	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			
			Program Pengembangana n Kebudayaan	Penyelenggar aan festival seni & budaya	Jumlah penyelenggara an festival seni/budaya /jumlah kelompok seni/budaya yang ada x 100%	Mandiri	Jum lah	100	20.601.800	100	264.508.322	100	364.000.000	100	464.000.000	100	464.000.000	100	364.000.000	100	364.000.000	Dinas Pendidika n		
	SS 1.1.3	Meningkatnya kehidupan harmonis masyarakat																						
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan																						
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian SPM bidang Keamanan dan ketertiban umum	((Sigma 2 Capaian SPM Bidang Trantibum)/2 x 100%) (khusus Satpol)	Mandiri	%	100	n/a	95	2.875.721.622	98	951.878.000	97,8	1.047.065.800	97.5	1.151.772.380	97,2	1.266.949.618	97	1.393.644.580	Satpol PP		
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rasio Masyarakat yang Mendapatk an Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaa n per 100.000rb penduduk. (10% dari jumlah pelajar SMP dan SMA 40,000 orang).	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penguatan idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan/1 00.000 Penduduk x 100%	Mandiri	Ora ng/ %	100	41.840.627	50	30.871.870	700	208.000.000	750	228.800.000	800	251.680.000	850	276.848.000	900	304.532.000	KesbangP ol		
								2,5		1,25		17,5		18,75		20		21,25		22,5				
2	M 2	Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19																						
	M 4	Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara																						
	T 2.1	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat																						
		1. Persentase penduduk miskin																						
		2. Persentase TPT																						



No	Visi/Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Formula/Sumber	Stn	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung gi Jawab	
							2021		P 2022		2023		2024		2025		2026		2027			
							R	Rp	P	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
	SS 2.1.1	Menurunnya angka kemiskinan																				
		Persentase penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)																				
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase capaian SPM Bidang Sosial	((Sigma 5 Capaian SPM Bidang Sosial)/5 x 100%)	Mandiri	%	100	30.500.0 00	100	154.140. 000	100	1.154.140 .000	100	1.154.140 .000	100	1.154.140 .000	100	1.154.140 .000	100 %	1.154.140 .000	Dinsos PP & PA
			Program Perlindungan dan Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase Verifikasi dan Validasi Data Calon penerima Bantuan Sosial	Jumlah PPKS yang terdata/Jumla h Seluruh PPKS x 100%	Mandiri	%	100	547.340. 810	100	142.474. 440	100	200.000.0 00	100	300.000.0 00	100	400.000.0 00	100	500.000.0 00	100 %	600.000.0 00	Dinsos PP & PA
	SS 2.1.2	Menurunnya angka pengangguran																				
		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan																				
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifika t kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi/ Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	PMDN 18 Tahun 2020	%	20	82.830.0 00	20	82.830.0 00	100	420.000.0 00	200	845.000.0 00	300	1.350.000 .000	400	1.800.000 .000	500	2.325.000 .000	Disnaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatka n (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan/ Jumlah pencaker yang terdaftar x 100%	PMDN 18 Tahun 2020	%	61,8 1	82.750.0 00	64,2 8	85.350.0 00	66,6 7	87.650.00 0	68,7 5	89.450.00 0	70,5 8	90.650.00 0	72	92.350.00 0	73,6 9	95.780.00 0	Disnaker
	T 2.2 1	Mewujudkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata																				
		1. Laju Pertumbuhan ekonomi																				
		2. Indeks Gini																				
	SS 2.2.1	Meningkatnya kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah																				



No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Formula/Sumber	Stn	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab	
							2021		P 2022		2023		2024		2025		2026		2027			
							R	Rp	P	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			1. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha																			
			2. Persentase sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB																			
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan pemasaran/Jumlah usaha kecil keseluruhan x 100%	PMDN 18 Tahun 2020	%	0,18	119.304.168	0,2	120.578.381	0,25	232.636.219	0,3	255.899.841	0,35	281.489.825	0,4	309.638.807	0,5	340.602.688	Dinkop UKM dan Perdagangan
			Program Pengembangan UMKM	1. Meningkatkan usaha Mikro yang menjadi wiira usaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha/Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	PMDN 18 Tahun 2020	%	2,94	164.780.388	3,01	226.876.632	3,08	349.564.295	3,15	384.520.725	3,22	422.972.797	3,29	465.270.077	3,36	511.797.084	Dinkop UKM dan Perdagangan
				2. Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	(Jumlah omset UMKM binaan tahun n dikurangi jumlah omset UMKM Binaan tahun n-1)/jumlah omset UMKM binaan tahun t-1) x 100%	Mandiri	%	0	0	30%	452.000.000	40%	519.800.000	45%	597.770.000	50%	687.435.500	60%	790.550.825	70%	909.133.449	Dinkop UKM dan Perdagangan
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/ Jumlah seluruh koperasi x 100%	PMDN 18 Tahun 2020	%	14,93	238.608.337	16	262.469.171	17,33	288.716.088	18,67	317.587.697	20	349.346.466	21,33	384.281.113	22,93	422.709.224	Dinkop UKM dan Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi	K = (a + b) x 100% K = Persentase pengembangan dan pengelolaan	PMDN 18 Tahun 2020	%	25,67	359.780.730	25,92	2.751.163.560	26,19	3.000.000.000	26,45	3.026.279.916	26,72	413.747.840	26,98	455.122.623	27,24	500.634.886	Dinkop UKM dan Perdagangan



No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Formula/Sumber	Stn	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggunggi Jawab	
								2021		P 2022		2023		2024		2025		2026		2027			
								R	Rp	P	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
					perdagangan	sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)																	
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PAD	(PAD n dikurangi jumlah PAD tahun n-1)/jumlah PAD tahun t-1) x 100%	PMDN 86 2017	%	0,01 %	11.642.000	- 1 kegiatan - Pem anfa atan Kawasan Aliran Sungai Bah Bolo n	2.045.419.800	0,02 %	24.000.000	0,04 %	46.000.000	0,04 %	54.000.000	0,05 %	60.000.000	0,05 %	64.000.000	Dinas Pariwisata
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase kenaikan produksi pertanian (Kategorinya apa saja)	1. ((Jumlah produksi pertanian tahun berkenaan - jumlah produksi pertanian tahun	1. Mandiri	%	4,30 %	1.968.870.794	2,05 %	288.751.887	2,50 %	460.000.000	2,88 %	460.000.000	3,23 %	500.000.000	3,50 %	500.000.000	3,87 %	550.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



No	Visi/Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Formula/Sumber		Stn	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
								2021		P 2022		2023		2024		2025		2026		2027		
								R	Rp	P	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
					sebelumnya) / jumlah produksi pertanian tahun sebelumnya) x 100%																	
				2. Persentase kenaikan kenaikan produksi peternakan (Kategoriny a apa saja)	2. ((Jumlah produksi peternakan tahun berkenaan - jumlah produksi peternakan tahun sebelumnya)/j umlah produksi peternakan tahun sebelumnya) x 100 %	2. Mandiri	20,7 5%		5,45 %		6,54 %		7,25 %		7,87 %		8,32 %		8,82 %			
SS 2.2.2	Meningkatnya investasi daerah																					
		Persentase peningkatan investasi																				
			Program Pengembang an Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkata n jumlah investor (PMDN dan PMA)	(Jumlah Investor (PMDN/PMA) tahun n- jumlah Investor (PMDN/PMA) tahun n-1) di kota/Jumlah Investor (PMDN/PMA) tahun n-1 di kota x 100%	Mandiri	%	6 PMA	0	6 PMA	0	6 PMA	400.000.0 00	7 PMA	500.000.0 00	7 PMA	600.000.0 00	7 PMA	700.000.0 00	8 PMA	800.000.0 00	DPM PTSP
								3093 PMD N		3164 PMD N		3227 PMD N		3291 PMD N		3356 PMD N		3423 PMD N		3491 PMD N		
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkata n jumlah investor (pelaku usaha)	Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM/Jumla h promosi yang	Mandiri	%	0	0	0	0	8	500.000.0 00	12	1.000.000 .000	15	1.100.000 .000	15	1.100.000 .000	18	1.210.000 .000	DPM PTSP



No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Formula/Sumber		Stn	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggunggi Jawab	
								2021		P 2022		2023		2024		2025		2026		2027			
								R	Rp	P	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
					dilaksanakan x 100%																		
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum/ Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum x 100%	Mandiri	%	0	#####	15	#####	15	30.000.00 0.000,00	15	30.000.00 0.000,00	15	31.500.00 0.000,00	15	33.075.00 0.000,00	25	34.728.75 0.000,00	BPKD	
3	M 3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance																					
	T 3.1	Mewujudkan reformasi Tata Kelola Pemerintahan																					
		Indeks Reformasi Birokrasi																					
	SS 3.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik																					
			1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Indeks SPBE																				
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN berkembang kompetensinya	Jumlah ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 JPL pertahun/ jumlah seluruh ASN x 100%	Mandiri	%	27,7 9%	306.236. 000	34,5 3%	934.322. 000	53,2 6%	2.530.731 .000	72,0 0%	2.530.731 .000	77,6 8%	760.632.0 00	84,0 0%	863.384.0 00	90,5 2%	889.614.0 00	BKD	
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan layanan publik yang terintegrasi ke website opd dan website pemerintah kota	Jumlah layanan publik yang / Jumlah layanan publik yang sudah terintegrasi x 100%	Mandiri	%	0	0	50%	3.500.00 0.000	80%	5.000.000 .000	85%	5.200.000 .000	90%	5.300.000 .000	95%	5.400.000 .000	100 %	5.500.000 .000	Diskominfo	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	Hasil survei pengukuran IKM Pelayanan Kecamatan (Skor hasil IKM 8	Permenpan RB 14 Tahun 2017	%	0	0	0	0	80	400.000.0 00	85	440.000.0 00	90	480.000.0 00	95	520.000.0 00	100	560.000.0 00	Semua Kecamatan	



No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Formula/Sumber		Stn	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab	
								2021		P 2022		2023		2024		2025		2026		2027			
								R	Rp	P	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
					Kecamatan/8 Kecamatan x100 %)																		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei pengukuran IKM Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik	Permenpan RB 14 Tahun 2017	indeks	C	279.176.713	C	274.718.895	B	340.000.000	B	400.000.000	B	460.000.000	B	520.000.000	B	580.000.000		Sekretariat Daerah
								(73,36)		(73,36-76,)		(76-78)		(78-80)		(80-82)		(82-84)		(84-86)			
			Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pelayanan agenda kerja DPRD	Jumlah Agenda kerja DPRD yang dilaksanakan pada tahun n /Jumlah agenda kerja DPRD pada tahun n x 100%	Mandiri	%	54,70%	4.906.124.130	100%	11.587.710.514	100%	15.504.053.439	100%	17.054.458.783	100%	18.759.904.661	100%	20.635.895.127	100%	22.699.484.640		Sekretariat DPRD
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk (hasil Rata-rata pelayanan KTP, KK, KIA)	(Jumlah penduduk ber-KTP/jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP x 100%)+(Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga/ Jumlah kepala keluarga x 100%)+(jumlah penduduk yang memiliki KIA /jumlah penduduk berusia kurang dari 17 tahun dan belum	Mandiri	%	98	1.122.056.000	99	1.122.056.000	99	914.800.000	99	1.006.280.000	99	1.106.908.000	99	1.217.598.800	99	1.339.358.680		DisdukCapil



No	Visi/Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Formula/Sumber		Stn	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung gi Jawab
								2021		P 2022		2023		2024		2025		2026		2027		
								R	Rp	P	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
					menikah) x 100%)/3 x 100%																	
SS 3.1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja																					
		1. Nilai SAKIP 2. Indeks IPKD																				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/k ota (Sekretariat Daerah)	1. Predikat/S kor AKIP Tingkat Kota	Penilaian Menpan RB	Permen pan RB 12 Tahun 2015	Pred ikat	C (40,5 7	379.176. 713	C (40,5 7- 50)	374.718. 895	CC (50- 55)	440.000.0 00	B (55- 61)	500.000.0 00	B (61- 65)	560.000.0 00	BB (65- 71)	620.000.0 00	BB (71- 75)	680.000.0 00	Sekretari at Daerah/I nspektora t/Bapped a	
				3. Persentase penyampai an laporan kinerja perangkat daerah tepat waktu (LPPD/LAK IP/LKPJ)	Persentase perangkat daerah yang mengirimkan laporan kinerja tepat waktu/Jumla h OPD x 100%	Mandiri	%	65		70		75		80		85		90		100		Sekretari at Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/k ota (Semua PD)	Capaian rata-rata Laporan AKIP Perangkat Daerah	Rarata Skor LAKIP Perangkat Daerah (Hasil Evaluasi Mandiri)	Mandiri	Pred ikat	C 580.212. 611.688	CC	626.645. 099.957	CC	645.444.4 52.956	B 664.807.7 86.544	B 684.752.0 20.141	B 701.294.5 80.745	B 726.453.4 18.167	Semua Perangkat Daerah					
			Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna n Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Jumlah Program dalam RKPD/Jumlah Program dalam APBD x 100%	Mandiri	%	65 488.526. 900	70	845.676. 352	85	998.935.0 00	90	1.154.653 .700	95	973.746.7 74	100	1.243.221 .709	100	1.642.882 .795	Bappeda	
				Persentase keselarasa n RKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD =(Ki1+Ki2+Ki3	Mandiri	%	55		60		85		90		95		100		100		



No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Formula/Sumber		Stn	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggunggi Jawab	
									2021		P 2022		2023		2024		2025		2026		2027			
									R	Rp	P	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
						+Ki4+Ki5+Ki6)/6																		
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan sub kegiatan Renja PD bidang perekonomian dan SDA /sub kegiatan dalam rensta PD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100%	Mandiri	%	70	374.266.200	75	936.796.398	80	1.441.601.737	85	1.470.433.772	90	1.499.842.447	95	1.529.839.296	100	1.606.331.261	Bappeda	
					Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan sub kegiatan Renja PD bidang sosial budaya /sub kegiatan dalam rensta PD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100%	Mandiri	%	70		75		80		85		90		95		100			
					Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahannya	Persentase keselarasan sub kegiatan Renja PD bidang infrastruktur/sub kegiatan dalam rensta PD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100%	Mandiri	%	70		75		80		85		90		95		100			
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Hasil kelitbangan yang dimanfaatkan /jumlah seluruh hasil	Mandiri	%	55	53.474.650	60	74.997.912	65	195.000.000	70	598.900.000	75	402.878.000	80	406.935.560	85	417.282.338	Bappeda	




No	Visi/Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Formula/Sumber	Stn	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
							2021		P 2022		2023		2024		2025		2026		2027				
							R	Rp	P	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			
					kelitbangan x 100%																		
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Level Kapabilitas APIP	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai 0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	PMDN 18 Tahun 2020	Leve 1	2	1.680.384.400	2	3.899.761.871,00	2	3.266.635.650,00	3	3.297.353.935,00	3	3.358.790.505,00	3	3.389.508.790,00	3	3.420.227.075,00	Inspektora	
				2. Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaa n	(Jumlah temuan yang ditindaklanjuti /Jumlah total temuan) x 100%	PMDN 86 Tahun 2017	%	75		78		80		85		90		95		95			
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku / jumlah Perangkat Daerah di Kota Pematang Siantar x 100%	Mandiri	%	20	56.283.740	24	65.623.000	30	275.000.000	45	325.000.000	60	345.000.000	75	365.000.000	90	365.000.000	Dinas Kearsian dan Perpustakaan	
SS 3.1.3		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah																					
		Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)																					
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapata n Asli Daerah	Total PAD/ total pendapatan daerah x 100%	Mandiri	%	100	42.025.625,00	100	4.179.761.967,00	100	4.237.000.000,00	100	4.448.850.000,00	100	4.671.292.500,00	100	4.904.857.125,00	100	5.150.099.900,00	BPKD	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap	Nilai Realisasi SiLPA/ Total Belanja Anggaran	PMDN 18 Tahun 2020	%	10,21	#####	10	#####	9,5	3.733.594.421,00	9	3.970.274.142,05	8,5	4.218.787.849,15	8	4.479.727.241,61	7,5	4.753.713.603,69	BPKD	



No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Formula/Sumber		Stn	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggunggi Jawab
								2021		P 2022		2023		2024		2025		2026		2027		
								R	Rp	P	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
				total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	tahun sebelumnya x 100%																	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik/ jumlah seluruh barang milik daerah x 100	Mandiri	%	0	0	100	1.306.687.019,00	100	2.113.000.000,00	100	2.218.650.000,00	100	2.329.582.500,00	100	2.446.061.625,00	100	2.568.364.700,00	BPKD
5	M 5	Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.																				
	T 5.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan																				
		Indeks infrastuktur																				
	SS 5.1.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah kota sesuai dengan peruntukannya																				
		Persentase kesesuaian tata ruang																				
		Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan yang diterima, x 100%	Mandiri	%	65	195.552.500,00	100	1.268.400.000,00	100	1.395.240.000,00	100	1.534.764.000,00	100	1.688.240.400,00	100	1.857.064.440,00	100 %	2.042.770.884,00	Dinas PUTR	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG)	Jumlah bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung/ jumlah bangunan gedung x 100%	Mandiri	%	100 %	299.078.000,00	100	500.000.000,00	100	550.000.000,00	100	605.000.000,00	100	665.500.000,00	100	732.050.000,00	1000 0%	805.255.000,00	Dinas PUTR	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kota	Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap (baik dan sedang)/ Panjang seluruh	PMDN 18 Tahun 2020	%	81,12	20.697.513.702	89	13.298.719.313	90	95.200.000.000	90,5	104.720.000.000	91	115.192.000.000	91,5	126.711.200.000	92	139.382.320.000	Dinas PUTR	



N o	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Formula/Sumber	Stn	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggunggi Jawab		
							2021		P 2022		2023		2024		2025		2026		2027				
							R	Rp	P	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			
					<i>jalan Kota di daerah x 100%</i>																		
			<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</i>	<i>Persentase drainase dalam kondisi baik</i>	<i>Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) / Panjang seluruh drainase di daerah Kota (Km) x 100%</i>	<i>PMDN 86 Tahun 2017</i>	%	87,28	11.557.370.143	87	10.295.244.168	88	14.700.000.000	90	16.170.000.000	91	17.787.000.000	92	19.565.700.000	93	21.522.270.000	Dinas PUTR	
			Program Kawasan Permukiman	Persentase capaian SPM bidang PRKP	((Sigma 2 Capaian SPM Bidang PRKP)/2x 100%)	Mandiri	%	99,75	3.400.000.000	99,8	3.570.000.000	99,85	3.748.500.000	99,9	3.935.925.000	99,95	4.132.721.250	100	4.339.357.313	100	4.556.325.178	Dinas PKP	
				Luas kawasan permukima n kumuh	<i>Luas Kawasan Kumuh/ Luas Wilayah x 100%</i>	<i>PMDN 18 Tahun 2020</i>	Hektar	154,94	3.000.000.000	149,94	3.300.000.000	144,94	3.630.000.000	139,94	3.993.000.000	134,94	4.392.300.000	129,94	4.831.530.000	124,94	5.314.683.000	Dinas PKP	
			<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	<i>Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni</i>	<i>Jumlah rumah layak huni/ Jumlah seluruh rumah di wilayah Kota x 100%</i>	<i>PMDN 18 Tahun 2020</i>	%	80,19	2.100.000.000	81,19	2.310.000.000	82,29	2.541.000.000	83,39	2.795.100.000	84,02	3.074.610.000	84,52	3.382.071.000	85,01	3.720.278.100	Dinas PKP	
			<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</i>	<i>Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ</i>	<i>Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n /Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia x 100%</i>	<i>PMDN 86 Tahun 2017</i>	%	72,14	0	100	0	100	10.267.753.244	100	10.191.818.970	100	10.191.818.970	100	10.181.166.102	100	10.181.166.102	Dinas Perhubungan	
SS 5.1.2		Meningkatnya keseimbangan lingkungan hidup																					
		1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Persentase sampah perkotaan yang tertangani																					
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air, Udara		PMDN 18 Tahun 2020	indeks	53,71	77.554.200	53,81	327.100.580	53,91	3.803.500.000	54,01	753.500.000	54,11	753.500.000	54,31	753.500.000	54,31	753.500.000	Dinas Lingkungan Hidup		
							83,89		84,3		84,4		84,5		84,6		84,8		84,8				
							23,38		25,42		26,94		28,46		29,98		33,02		33,02				



N o	Visi/Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Formula/Sumber		Stn	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggun gi Jawab
									2021		P 2022		2023		2024		2025		2026		2027		
									R	Rp	P	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaa n sampah	Total Vol sampah yang dapat ditangani/ Tota l vol timbunan sampah kota x 100%	PMDN 18 Tahun 2020	%	93,8 1	11.833.5 72.785	98	13.200.7 47.509	100	15.509.00 0.000	100	17.000.00 0.000	100	19.000.00 0.000	100	21.000.00 0.000	100	23.712.00 0.000	Dinas Lingkung an Hidup
				Program penanggulana gan Bencana	Persentase bencana alam yang tertangani	Jumlah Bencana alam yang tertangani/ Ju mlah Bencana alam yang terjadi x 100%	Mandiri	%	100	14.410.9 27.000	100	15.852.0 19.700	100	17.437.22 1.670	100	19.180.94 3.837	100	21.099.03 8.221	100	23.208.94 2.043	100	25.529.83 6.247	Badan Penanggu lanagan Bencana Daerah
T O T A L										785.857. 856.749		946.029. 047.351		1.032.276 .236.815		1.088.796 .221.280		1.154.748 .903.861		1.218.678 .320.945		1.263.895 .559.350	

Sumber: Analisis Tim Penyusunan

Upaya pencapaian setiap sasaran ditunjukkan melalui kerangka logis berikut:



KERANGKA LOGIS SASARAN 1

MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Sasaran : 1. Usia Harapan Hidup 2. Prevelensi Stunting

PD UTAMA	PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN						
	DINAS KESEHATAN		DINAS KESEHATAN	RSUD Diasamen Saragih	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		
	Sasaran: 1. Pemenuhan SPM bidang Kesehatan 2. Percepatan penanganan Covid-19 dan vaksinasi		Sasaran: 1. Mengoptimalkan pelayanan Kesehatan (PKM-RSUD) 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan (PKM-RSUD)		Sasaran: Peningkatan cakupan pelayanan Kesehatan KB		
	Program: 1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Kesiadaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab//Kota		Program: 1. Pengendalian Penduduk 2. Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) 3. Pembinaan keluarga berencana (KB)		
PD PENDUKUNG	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan			Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat			
	Dinas Kesehatan		RSUD Diasamen Saragih	DINSOS	Dinas Kesehatan	DISPAR	KECAMATAN
	Sasaran: Peningkatan kualitas sarana dan Prasarana Kesehatan PKM, RSUD		Sasaran: Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Sasaran: Peningkatan PHBS Masy	Sasaran: Peningkatan Olahraga Masy	Sasaran: Peningkatan Peran Masy dlm Pemb.	
	Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab//Kota	Program: 1. Pemenuhan hak anak (PHA) 2. Perlindungan Khusus Anak 3. Peningkatan kualitas keluarga	Program: Pemberdayaan Masyarakat Bid Kesehatan	Program: Pengembangan Kapasitas Daya Saing keolahragaan	Program: Pemberdayaan Masy Desa dan Kelurahan



KERANGKA LOGIS SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT

Indikator Sasaran : 1. Rata-Rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah





KERANGKA LOGIS SASARAN 3

MENINGKATNYA KEHIDUPAN HARMONIS MASYARAKAT

Indikator Sasaran : Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

PD UTAMA	PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT				
	SATPOL PP		BPPD	BAKESBANGPOL	
	Sasaran: Pemenuhan capaian SPM bidang Ketertiban umum		Sasaran: Penguatan Idologi Pancasila		
	Sasaran: Penegakan Peraturan daerah dan PERKADA	Sasaran: Peningkatan Tanggap Bencana	Program: 1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Peningkatan Peran Parpol dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
Program: 1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Program: Penanggulangan Bencana				
PD PENDUKUNG	Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		
	Satpol PP	BPPD	DISPORA	KECAMATAN	SETDAKO (Bag KESRA/TAPEM)
	Sasaran: Peningkatan kualitas sarana dan Prasarana Tanggap bencana		Sasaran: Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Sasaran: Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan dan TRANTIBUM	Sasaran: Peningkatan koordinasi lintas sektor
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab//Kota		Program: Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program: 1. Pemberdayaan Masy Desa dan Kel 2. Koordinasi trantibun Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Program: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



KERANGKA LOGIS SASARAN 4

MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN

Indikator Sasaran : Persentase Penurunan PPKS

PD UTAMA	PENINGKATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK MISKIN							
	DINSOS PP dan Anak							
	Sasaran: 1. <u>Pemenuhan capaian SPM bidang Sosial</u> 2. <u>Peningkatan pelayanan bantuan sosial yang tepat sasaran sesuai data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</u>							
	Program: 1. <u>Rehabilitasi Sosial</u> 2. <u>Perlindungan dan Perlindungan Jaminan Sosial</u> 3. <u>Pemberdayaan sosial</u>							
PD PENDUKUNG	Peningkatan Infrastruktur	Peningkatan Pelayanan Publik			Peningkatan Data dan Informasi		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	
	PRKP	DINSOS	Dinas Pendidikan	Dinas Kesehatan	KECAMATAN	DISKOMINFO	Dinkop dan UMKM	
	Sasaran: <u>Pemenuhan SPM Bid PRKP</u>	Sasaran: <u>Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan</u>	Sasaran: <u>Pemenuhan SPM Bid. Pendidikan</u>	Sasaran: <u>Pemenuhan SPM Bid Kesehatan</u>	Sasaran: <u>Peningkatan Peran Masy.dlm Pemb</u>	Sasaran: <u>Peningkatan Data Statistik Sektor</u>	Sasaran: <u>Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM</u>	
	Program: <u>Kawasan Permukiman</u>	Program: 1. <u>Penanganan bencana</u> 2. <u>Pengelolaan TMP</u>	Program: 1. <u>Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan</u> 2. <u>Perlindungan perempuan</u>	Program: <u>Pengelolaan Pendidikan</u>	Program: <u>Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</u>	Program: <u>Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</u>	Program: 1. <u>Pengembangan UMKM</u> 2. <u>Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</u>	



KERANGKA LOGIS SASARAN 5

MENURUNNYA ANGKA PENGANGGURAN

Indikator Sasaran : Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan

PD UTAMA	PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA		
	DISNAKER		
	<p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan lapangan kerja berbasis potensi daerah 2. Peningkatan kompetensi dan Ketampilan tenaga kerja/calon tenaga kerja 3. Kerjasama dengan pihak swasta (link and match) 		
	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program <u>Penempatan Tenaga Kerja</u> 		
PD PENDUKUNG	Peningkatan Data dan Informasi		Peningkatan Pendapatan Masyarakat
	KECAMATAN	DISKOMINFO	<u>Dinkop</u> dan UMKM
	Sasaran: <u>Peningkatan Peran Masy.dlm Pemb</u>	Sasaran: <u>Peningkatan Data Statistik Sektoral</u>	Sasaran: Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program: Aplikasi Informatika	Program: 1. <u>Pengembangan UMKM</u> 2. <u>Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</u>



KERANGKA LOGIS SASARAN 6

MENINGKATNYA KONTRIBUSI UMKM DAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH

Indikator : 1. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha 2. Persentase sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB

PD UTAMA	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KOPERASI DAN UMKM		PENINGKATAN VOLUME PEDAGANGAN BARANG DAN JASA			
	Dinas Koperasi dan UMKM		Dinas Koperasi dan UMKM			
	<p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Peningkatan manajemen pengelolaan Koperasi dan UMKM,</u> 2. <u>Fasilitasi modal usaha dan penguasaan teknologi standarisasi produk dan pemasarannya</u> 		<p>Sasaran:</p> <u>Peningkatan sarana dan prasarana pendukung sektor unggulan</u>			
	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</u> 2. <u>Pengembangan UMKM</u> 3. <u>Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</u> 		<p>Program:</p> <u>Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</u>			
PD PENDUKUNG	Peningkatan Pelayanan Regulasi (PIRT)	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja (TK)	Peningkatan Sektor Potensial Lainnya			
	DINAS KESEHATAN	DISNAKER	DISPAR	DISKETAPANG	KECAMATAN	SETDAKO (Bagian Perekonomian)
	<p>Sasaran:</p> Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan	<p>Sasaran:</p> Peningkatan kompetensi & Ketampilan TK/calon TK	<p>Sasaran:</p> Peningkatan Potensi Lainnya			<p>Sasaran:</p> <u>Peningkatan fasilitasi BUMD dan BLUD milik daerah</u>
	<p>Program:</p> Kesediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	<p>Program:</p> Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	<p>Program:</p> Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	<p>Program:</p> Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	<p>Program:</p> Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<p>Program:</p> <u>Perekonomian dan Pembangunan</u>



KERANGKA LOGIS SASARAN 7

MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH

Indikator : Persentase Peningkatan investasi

PD UTAMA	PENINGKATAN IKLIM USAHA YANG KONDISIF DENGAN OPTIMALISASI POTENSI DAERAH							
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP							
	<p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan <u>pengurusan izin berusaha yang mudah, cepat dan profesional</u> 2. Meningkatkan <u>promosi potensi unggulan daerah yang clean dan clear</u> 							
	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. <u>Promosi Penanaman Modal</u> 							
PD PENDUKUNG	Peningkatan Infrastruktur				Peningkatan Regulasi	Peningkatan Inovasi	Peningkatan Trantibum	
	PUPR	PRKP	DISHUB	BPKD	SETDAKO (Bagian Hukum)	BAPPEDA	SATPOL PP	Kecamatan
	<p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengendalian tata ruang sesuai RTRW 2. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur kota : jalan, drainase 	<p>Sasaran:</p> <p>Peningkatan sarana & prasarana infrastruktur kota : sanitasi, air bersih, kawasan kumuh</p>	<p>Sasaran:</p> <p>Peningkatan Sarana dan Prasarana & Pelayanan lalu lintas kota</p>	<p>Sasaran:</p> <p>Penyediaan lahan untuk pengembangan ekonomi daerah</p>	<p>Sasaran:</p> <p>Peningkatan kepastian hukum bagi investor</p>	<p>Sasaran:</p> <p>Peningkatan kualitas kelitbangan/ inovasi Daerah</p>	<p>Sasaran:</p> <p><u>Penegakan Perda dan Perkada</u></p>	<p>Sasaran:</p> <p><u>Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan</u></p>
	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Jalan 2. <u>Pengelolaan & Pengembangan Sistem Drainase</u> 3. <u>Penataan Bangunan Gedung</u> 	<p>Program:</p> <p>Kawasan Permukiman</p>	<p>Program:</p> <p>Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</p>	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian ganti kerugian & Santunan Tanah utk Pembangunan 2. <u>Pengelolaan Barang Milik Daerah</u> 	<p>Program:</p> <p>Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat</p>	<p>Program:</p> <p>Penelitian Dan Pengembangan Daerah</p>	<p>Program:</p> <p>Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum</p>	<p>Program:</p> <p>Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>



KERANGKA LOGIS SASARAN 8

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Indeks SPBE





KERANGKA LOGIS SASARAN 9

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA

Indikator : 1. Nilai SAKIP 2. Indeks IPKD





KERANGKA LOGIS
SASARAN 10

MENINGKATNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Indikator : Derajat Desentralisasi Fiskal

PD UTAMA	MENGOPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
	BPKD
	<p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah 2. Peningkatan kinerja badan usaha milik daerah 3. Meningkatkan kualitas belanja daerah 4. Peningkatan pengelolaan aset daerah
	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah
PD PENDUKUNG	Peningkatan Kinerja Pendapatan Asli Daerah
	SEMUA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH
	<p>Sasaran:</p> <p><u>Pendapatan Asli Daerah Meningkat</u></p>
	<p>Program:</p> <p><u>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u></p>



KERANGKA LOGIS SASARAN 11

MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR WILAYAH KOTA SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA

Indikator : Persentase kesesuaian tata ruang

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH			
PD UTAMA	Dinas PUPR	Dinas PRKP	
	<p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengendalian tata ruang sesuai RTRW 2. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur kota : jalan, drainase <p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Penataan Bangunan Gedung 3. Penyelenggaraan Jalan 4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 	<p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan capaian SPM bidang PUPR 2. Pemenuhan capaian SPM bidang PRKP 3. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur kota : sanitasi, air bersih, kawasan kumuh <p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Kawasan Permukiman 4. Program Pengembangan Perumahan 	
PD PENDUKUNG	Peningkatan Trantibum	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Infrastruktur
	SATPOL PP	KECAMATAN	DISHUB
	<p>Sasaran:</p> <p>Penegakan Perda dan Perkada</p> <p>Program:</p> <p>Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum</p>	<p>Sasaran:</p> <p>Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan</p> <p>Program:</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p>	<p>Sasaran:</p> <p>Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pelayanan lalu lintas kota</p> <p>Program:</p> <p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</p>



KERANGKA LOGIS SASARAN 12

MENINGKATNYA KESEIMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator : 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Persentase sampah perkotaan yang tertangani

PD UTAMA	PENINGKATAN DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP			
	Dinas Lingkungan Hidup			
	<p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan, penanggulangan pengendalian dampak, dan pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup 2. Peningkatan pengelolaan sampah (pengurangan sampah dan penanganan sampah). 			
	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Pengelolaan Persampahan 			
PD PENDUKUNG	Peningkatan Trantibum	Peningkatan Tanggap Bencana	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	
	SATPOL PP	BPPD	Dinas Kesehatan	KECAMATAN
	<p>Sasaran:</p> <p>Penegakan Perda dan Perkada</p>	<p>Sasaran:</p> <p>Pemenuhan capaian SPM bidang Ketertiban umum</p>	<p>Sasaran:</p> <p>Peningkatan PHBS Masyarakat</p>	<p>Sasaran:</p> <p>Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan</p>
	<p>Program:</p> <p>Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum</p>	<p>Program:</p> <p>Penanggulangan Bencana</p>	<p>Program:</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p>	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 2. Pengelolaan Persampahan



Tabel 6.8

Matriks Dukungan Kota Pematangsiantar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara		Dukungan Kota Pematangsiantar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	
PP1	Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses Pendidikan	PP1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
			Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan melalui: 1. Pemenuhan capaian SPM bidang pendidikan; 2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan; 3. Pemerataan tenaga pendidik 4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 5. Peningkatan minat baca masyarakat 6. Pelestarian kebudayaan daerah
PP2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;	PP1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
			Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan melalui: 1. Pemenuhan SPM bidang kesehatan 2. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan 4. Peningkatan cakupan pelayanan Kesehatan dan KB 5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan olahraga 6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan 7. Percepatan penanganan Covid-19 dan vaksinasi
PP3	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;	PP2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat



Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara		Dukungan Kota Pematangsiantar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	
			Meningkatkan Kesempatan Kerja melalui: 1. Perluasan lapangan kerja berbasis potensi daerah 2. Peningkatan kompetensi dan Ketampilan tenaga kerja/calon tenaga kerja 3. Kerjasama dengan pihak swasta (link and match)
PP4	Peningkatan daya saing melalui sektor agraris;	PP3	Meningkatkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata
			Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM dan Peningkatan volume perdagangan barang dan jasa, melalui: 1. Peningkatan manajemen pengelolaan Koperasi dan UMKM, 2. Fasilitasi modal usaha, penguasaan teknologi, standarisasi produk dan pemasarannya 3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung sektor unggulan 4. Peningkatan fasilitasi BUMD dan BLUD milik daerah 5. Peningkatan sektor potensial lainnya
PP5	Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata	PP3	Meningkatkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata
			Peningkatan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi daerah, melalui: 1. Meningkatkan pelayanan pengurusan izin berusaha yang mudah, cepat dan profesional 2. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah yang clean dan clear 3. Penyediaan lahan untuk pengembangan ekonomi daerah
PP6	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi	PP4	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan
			Peningkatan pelayanan prima dalam pelayanan publik dan Peningkatan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien transparan dan akuntabel, melalui : 1. Meningkatkan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah 2. Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang responsif, inovatif, akses yang cepat



Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara		Dukungan Kota Pematangsiantar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	
			<p>dan berbasis teknologi informasi</p> <p>3. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan inovasi daerah</p> <p>4. Peningkatan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan</p>
PP7	Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olah raga	PP1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
			<p>Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melalui:</p> <p>1. Pemenuhan capaian SPM bidang Ketertiban umum</p> <p>2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</p> <p>3. Penguatan idiologi Pancasila</p>
PP8	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	PP5	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan
			<p>Peningkatan infrastruktur daerah dan Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup melalui:</p> <p>1. Pemenuhan capaian SPM bidang PUPR</p> <p>2. Pemenuhan capaian SPM bidang PRKP</p> <p>3. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur kota : jalan, drainase, sanitasi, air bersih, kawasan kumuh</p> <p>4. Pembangunan dan pengendalian tata ruang sesuai sesuai RTRW</p> <p>5. Pencegahan, penanggulangan pengendalian dampak, dan pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup</p> <p>6. Peningkatan pengelolaan sampah (pengurangan sampah dan penanganan sampah).</p>



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kerangka pendanaan pembangunan daerah adalah kemampuan fiskal daerah dalam mendanai seluruh program pembangunan daerah. Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 diperoleh dari proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 yang telah disusun pada Bab III. Hasil proyeksi pendapatan merupakan kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai proyeksi belanja daerah. Proyeksi belanja daerah telah dijabarkan sebagai program pemenuhan standar pelayanan minimal dan program pembangunan daerah yang telah disusun pada Bab VI yang selanjutnya ditambahkan program yang sifatnya rutin dan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah menjadi satu kesatuan yang utuh dalam indikasi rencana program daerah.

Pada Tabel 7.1 dibawah ini ditunjukkan kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027. Proyeksi pendapatan yang telah dibahas pada Bab III diperoleh kemampuan pendapatan daerah yang diasumsikan meningkat setiap tahunnya. Kemampuan pendapatan daerah ini digunakan untuk membiayai belanja daerah yang juga diasumsikan cenderung meningkat. Selisih belanja daerah yang lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan daerah selanjutnya dibiayai dengan pembiayaan defisit berdasarkan proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2022-2027. Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 sebagai berikut



Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023–2027

Uraian	Proyeksi Tahun / (Rp. Juta)				
	2023	2024	2025	2026	2027
PENDAPATAN	964.404.082.066,00	971.746.895.107,00	983.748.929.700,50	993.921.353.517,00	1.002.008.582.714,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	143.489.075.815,00	150.905.463.891,00	158.321.851.967,00	165.738.240.043,00	173.154.628.119,00
Pendapatan Pajak Daerah	73.441.583.000,00	78.683.166.000,00	83.924.749.000,00	89.166.332.000,00	94.407.915.000,00
Hasil Retribusi Daerah	25.920.690.000,00	26.071.780.000,00	26.222.870.000,00	26.373.960.000,00	26.525.050.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.910.648.815,00	8.988.209.891,00	9.065.770.967,00	9.143.332.043,00	9.220.893.119,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.216.154.000,00	37.162.308.000,00	39.108.462.000,00	41.054.616.000,00	43.000.770.000,00
DANA TRANSFER	809.476.823.451,00	809.403.248.416,00	813.988.894.933,50	816.744.930.674,00	817.415.771.795,00
Transfer Pemerintah Pusat :	763.984.544.000,00	766.256.073.000,00	769.669.167.500,00	773.011.479.250,00	773.389.182.375,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.772.304.000,00	26.677.927.000,00	26.725.115.500,00	26.701.521.250,00	26.713.318.375,00
Dana Alokasi Umum	567.138.070.000,00	567.503.976.000,00	567.869.882.000,00	568.235.788.000,00	568.601.694.000,00
Dana Alokasi Khusus	170.074.170.000,00	172.074.170.000,00	175.074.170.000,00	178.074.170.000,00	178.074.170.000,00
Transfer Antar Daerah :	45.492.279.451,00	43.147.175.416,00	44.319.727.433,50	43.733.451.424,00	44.026.589.420,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Utara	45.492.279.451,00	43.147.175.416,00	44.319.727.433,50	43.733.451.424,00	44.026.589.420,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.438.182.800,00	11.438.182.800,00	11.438.182.800,00	11.438.182.800,00	11.438.182.800,00
Pendapatan Hibah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	9.938.182.800,00	9.938.182.800,00	9.938.182.800,00	9.938.182.800,00	9.938.182.800,00
BELANJA	999.404.082.066,00	1.006.746.895.107,00	1.018.748.929.700,50	1.028.921.353.517,00	1.037.008.582.714,00
BELANJA OPERASI	861.308.878.210,00	861.974.348.872,00	864.644.578.540,50	869.256.004.617,00	867.450.291.564,00
Belanja Pegawai	477.110.753.317,00	477.289.286.600,00	476.287.457.000,00	475.287.457.000,00	465.287.457.000,00
Belanja Barang dan Jasa	322.349.676.545,00	324.390.909.652,00	327.285.821.057,50	333.285.821.067,00	341.285.821.054,00
Belanja Hibah	57.363.448.344,00	56.202.027.618,00	56.782.737.980,00	56.492.382.800,00	56.637.560.390,00
Belanja Bantuan Sosial	4.485.000.004,00	4.092.125.002,00	4.288.562.503,00	4.190.343.750,00	4.239.453.120,00
BELANJA MODAL	104.095.203.856,00	120.772.546.235,00	130.104.351.160,00	135.665.348.900,00	145.558.291.150,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	34.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	34.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00



Uraian	Proyeksi Tahun / (Rp. Juta)				
	2023	2024	2025	2026	2027
SURPLUS / (DEFISIT)	-35.000.000.000,00	-35.000.000.000,00	-35.000.000.000,00	-35.000.000.000,00	-35.000.000.000,00
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0

Sumber : BPKD Kota Pematang Siantar Tahun 2021



Pada Tabel 7.1. diperoleh kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027. Proyeksi pendapatan yang telah dibahas pada Bab III diperoleh kemampuan pendapatan daerah yang diasumsikan meningkat setiap tahunnya. Kemampuan pendapatan daerah ini digunakan untuk membiayai belanja daerah yang juga diasumsikan cenderung meningkat. Selisih belanja daerah yang lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan daerah selanjutnya dibiayai dengan pembiayaan defisit berdasarkan proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2022-2027.

7.2. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan prioritas pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai visi dan misi daerah dan pencapaian SPM dan telah diselaraskan dengan arah kebijakan nasional, provinsi yang disusun dengan melibatkan Perangkat Daerah. Penentuan Program perangkat daerah memperhatikan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah dibahas pada BAB VI dan selanjutnya menjadi indikasi rencana program perangkat daerah yang akan dijabarkan pada Tabel 7.2.

Rencana program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2022-2027 difokuskan dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD dan mencapai visi dan misi daerah dan pencapaian SPM yang dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Secara garis besar fokus dan masing-masing program adalah sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan yaitu;

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini difokuskan dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pendidikan (Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Kesetaraan)

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan nonformal/kesetaraan.



- c. Program Pengembangan Kurikulum
Program ini diarahkan pada pengembangan kurikulum dan Implementasi Kurikulum Merdeka belajar
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
Program ini diarahkan pada pembinaan, pengawasan perizinan sarana pendidikan Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Kesetaraan
- e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
Program ini diarahkan pada Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam bahasa Daerah.

2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kesehatan dalam rangka mendukung pencapaian SPM Kesehatan Fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pertama yang dilaksanakan oleh 19 Puskesmas dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD).

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Berkaitan untuk peningkatan akses dan mutu layanan yang berkaitan dengan SPM kesehatan yaitu pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir dan balita, usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut. Deteksi dini penyakit tidak menular seperti pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi, diabetes melitus dan ODGJ, serta penyakit menular seperti pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, orang dengan risiko terinfeksi HIV. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan; Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya, pengelolaan Surveillans kesehatan, dan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program ini diarahkan pada pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan melalui Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan. yang lulus uji kompetensi.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Program ini diarahkan pada Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga serta pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro



- obat tradisional (UMOT). Program ini ditujukan dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase produk pangan PIRT yang tersertifikasi.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program ini diarahkan untuk advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor, pelaksana hidup sehat dalam rangka promotif preventif dan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM). Program ini ditujukan dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase capaian PHBS tingkat Kota.
 - e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota selain berfokus pada pelayanan administrasi perkantoran dan perencanaan dan evaluasi, program ini fokus pada pelayanan kesehatan pada peningkatan pelayanan BLUD Rumah Sakit Daerah.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur estetika kota yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan RTRW Kota. Program yang dilaksanakan antara lain;

- a. Program penyelenggaraan tata ruang
Program ini diarahkan pada penetapan perda revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kota, kordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kota, dan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kota. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kesesuaian lahan dengan RTRW.
- b. Program penataan bangunan gedung
Program ini diarahkan pada perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan, rehabilitasi, renovasi, ubah suai serta pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kota. Selain itu fokus pada penyelenggaraan penerbitan ijin mendirikan bangunan, sertifikat laik fungsi, peran tenaga ahli bangunan gedung, pendataan bangunan gedung serta implementasi SIMBG.
- c. Program penyelenggaraan jalan
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan jalan kota melaluisistem pengembangan jalan, survey kondisi jalan/jembatan, pembangunan jalan, pelebaran jalan menuju standar, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan, pembangunan jembatan dan pemeliharaan berkala jembatan. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase jalan kota dalam kondisi baik.



- d. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
Program ini diarahkan pada pembangunan sistem drainase, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan, operasi dan pemeliharaan sistem drainase
- e. Program pengembangan jasa konstruksi
Program ini diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi sehingga kinerja penyedia jasa konstruksi semakin baik.
- f. Program penataan bangunan dan lingkungannya
Program ini diarahkan pada penataan bangunan dengan memperhatikan kondisi lingkungan
- g. Program Pengelolaan sumber daya air (SDA)
Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sekunder melalui rehabilitasi jaringan, pemeliharaan jaringan dan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan pengembangan sumber air yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan air

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sebagian tugas dan fungsi bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan lingkungan hidup (RTH) ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya penyelenggaraan SPM bidang air minum dan limbah domestik, untuk itu fokus tetap diarahkan untuk pemmcapaian SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat. Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
Program ini diarahkan pada pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan air minum dan atau air bersih non perpipaan di wilayah kota
- b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Diarahkan untuk pembangunan saluran pembuangan air limbah rumah tangga; pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolah lumpur tinja (IPLT) pengembangan dan pengoptimalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal tersebar di seluruh wilayah perkotaan pengembangan dan pengoptimalan instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) on site atau individu tersebar di masingmasing perumahan dan kawasan permukiman;

Untuk pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

- a. Program Pengembangan Perumahan
Program ini diarahkan pada rehabilitasi rumah bagi para korban bencana dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota
- b. Program Kawasan Permukiman



- Program ini diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha di wilayah kota
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program ini diarahkan pada pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kota melalui perbaikan rumah tidak layak huni untuk penegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dilaur Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha.
 - c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian
 - d. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati)
Program ini diarahkan pada pengelolaan taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) milik kota

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, SPM Pemadam Kebakaran dan SPM Penanggulangan Bencana melalui program:

- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan dalam rangka penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah melalui pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan kapasitas sdm satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas penegakkan perda dan peraturan Wali kota melalui penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan-peraturan Wali Kota dan sosialisasi penegakan perda dan perkada. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penegakkan perda.
- b. Program Penanggulangan Bencana
Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana Kota melalui sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana di wilayah kota (per jenis bencana), pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana wilayah kota pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan pascabencana serta pengembangan kapasitas unit/tim reaksi cepat bencana kota. Selain itu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban



bencana melalui Respon Cepat Darurat Bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana wilayah kota, serta penyediaan logistik, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kota untuk mendukung respon time terhadap penanggulangan bencana dan kebakaran, kesiapsiagaan SDM Damkar dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran.

6. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Sosial dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang Sosial.

a. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial melalui penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, penyediaan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pemberian layanan data dan pengaduan, serta pemberian layanan kedaruratan. rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya diluar panti sosial

b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kota dan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.

c. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan untuk peningkatan kemampuan potensi para tenaga kesejahteraan sosial

d. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kota melalui penyediaan makanan, penyediaan sandang, penyediaan tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan pelayanan dukungan psikososial. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota melalui koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana.

e. Program pengelolaan taman makam pahlawan

Program ini diarahkan pada pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.



B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja mendukung pencapaian visi misi daerah ke 2 dan 4 dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta melalui proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelayanan antar kerja di daerah kota dan perluasan kesempatan kerja untuk mendukung persentase penempatan tenaga kerja/pencari kerja yang terdaftar baik pencari kerja dalam daerah, Antar Lintas Daerah (AKAD) bahkan pencari kerja Antar Lintas Negara (AKAN).

c. Program hubungan industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah dan pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kota.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Program ini diarahkan pada kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kota melalui sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kota melalui advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi

b. Program perlindungan perempuan

Program ini diarahkan pada penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kota melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kota dan koordinasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kota. Selain itu sebagai bentuk promosi difokuskan pada pencegahan kekerasan terhadap



- perempuan lingkup daerah kota.
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program ini diarahkan pada pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kota
 - d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
Program ini diarahkan pada penyediaan data gender dan anak kewenangan kota
 - e. Program Pemenuhan Hak Anak
Program ini diarahkan pada pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kota serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian Kota Layak Anak (KLA).
 - f. Program perlindungan khusus anak
Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah dengan fokus pada penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kota

3. Pangan

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang pangan adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kota dengan fokus pada pengadaan cadangan pangan pemerintah kota dan mendorong pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

4. Pertanahan

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang pertanahan adalah Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Program ini dilakukan untuk mendukung pengadaan tanah untuk pembangunan kota, pembangunan kantor-kantor pemerintahan, penyediaan lahan untuk tempat pemakaman umum (TPU) dan lahan pembuangan akhir sampah kota

5. Lingkungan Hidup

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur kota yang berwawasan lingkungan sebagai berikut:



- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada pembuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup
Program ini diarahkan pada pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup wilayah kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air dan udara lingkungan hidup kota. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kota melalui penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat. Selain itu pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi, penghentian sumber pencemaran dan pelaksanaan restorasi.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati)
Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati kota dengan fokus pada Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kota dengan fokus pada fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH dan pengawasa usaha atas izin yang telah diterbitkan.
- e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup dan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup
- f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan
- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan fokus pada pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kota dan penerapan sanksi lingkungan hidup.



h. Program pengelolaan persampahan

Program ini diarahkan pada pengelolaan sampah dengan fokus pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada pelayanan pendaftaran penduduk dengan fokus pada pencatatan, penatausahaan dan penertiban dokumen atas pendaftaran penduduk serta peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk.

b. Program Pencatatan sipil

Program ini diarahkan pada pelayanan pencatatan sipil dan penyelenggaraan pencatatan sipil dengan fokus pada peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil, pencatatan, penatausahaan dokumen peristiwa penting, peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil serta koordinasi terkait pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan institusi lainnya.

c. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Program ini diarahkan pada pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan melalui pengolahan dan penyajian data kependudukan dan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan fokus pada fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan dan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan.

d. Program pengelolaan profil kependudukan

Program ini diarahkan pada penyusunan profil kependudukan kota

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat. Program ini diarahkan pada pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan/kelurahan seperti Posyandu, PKK, LPM dan lain sebagainya

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

a. Program pengendalian penduduk

Program ini diarahkan dalam rangka penengendalian kuantitas penduduk dan



- pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah melalui penyusunan profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta penyusunan kajian dampak kependudukan
- b. Program pembinaan keluarga berencana (KB)
Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB, pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/ Petugas lapangan KB, Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di
 - c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program ini diarahkan pada pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dilaksanakan melalui orientasi bagi pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga, promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan dan mitra kerja. Program ini juga mendukung penurunan jumlah stunting di wilayah kota

9. Perhubungan

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan untuk penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kota melalui penyediaan dan rehabilitasi serta pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kota. Penerbitan izin penyelenggaraan parkir melalui pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. Pengujian berkala kendaraan bermotor melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Program ini diarahkan pada pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas
- b. Program Aplikasi Informatika



Program ini diarahkan pada pengelolaan domain lingkup pemerintah kota dengan fokus pada penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah kota dan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah kota serta pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
Program ini diarahkan pada pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kota.
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Program ini diarahkan pada pengawasan terhadap koperasi aktif yang berada di wilayah kota dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Pengawasan dimaksudkan untuk menjaga operasional koperasian sesuai dengan Undang undang Koperasi dan AD/ART Koperasi. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah kota.
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Program ini diarahkan pada penilaian koperasi dan mendata koperasi yang aktif serta pembinaan terhadap koperasi yang kurang sehat.
- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
Program ini diarahkan pada pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kota dengan fokus pada Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Program ini diarahkan pada pemberdayaan koperasi dengan memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan terhadap anggota koperasi yang bermasalah di wilayah kota
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Program ini diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan fokus pada Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.
- g. Program Pengembangan UMKM
Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan fokus pada fasilitasi



usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, kemudahan akses modal, serta desain dan teknologi.

12. Penanaman Modal

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada pemberian fasilitas/intensif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan penyusunan peta serta rencana umum penanaman modal.
- b. Program Promosi Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada promosi kepada calon investor untuk dapat menanamkan modal ke daerah
- c. Program Pelayanan Penanam Modal
Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota. Peningkatan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan termasuk layanan konsultasi dan pemantauan pemenuhan atas komitmen perizinan non perizinan penanaman modal
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada pengendalian terhadap penanaman modal sesuai dengan perundang undangan yang berlaku dalam kewenangan kota dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data informasi perizinan dan non perizinan termasuk kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga antara lain:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program ini diarahkan pada penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kota



melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga wilayah kota. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kota melalui peningkatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah

14. Statistik

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Statistik adalah Program Penyelenggaraan Statistik dengan fokus pada pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral.

15. Persandian

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Persandian adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang diarahkan pada penyelenggaraan layanan keamanan informasi pemerintah daerah

16. Kebudayaan

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kebudayaan adalah Program Pengembangan Kebudayaan yang diarahkan pada pelestarian budaya kesenian tradisional daerah yang difokuskan pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya, pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan

17. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perpustakaan antara lain:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada pengelolaan perpustakaan tingkat daerah serta membudayakan gemar membaca bagi masyarakat dan peningkatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan serta pengembangan literasi

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada pelestarian koleksi naskah kuno yang dimiliki daerah

18. Kearsipan

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kearsipan adalah

a. Program pengelolaan arsip

Program ini diarahkan pada pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan tingkat kota.

b. Program perlindungan dan penyelamatan arsip

Program ini diarahkan pada perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana dan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah yang telah



memiliki retensi di bawah atau tepat 10 (sepuluh) tahun

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Program ini diarahkan pada pengembangan pembudidaya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan serta perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat.

2. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang pariwisata antara lain:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada peningkatan daya tarik destinasi pariwisata melalui Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata. Pengelolaan destinasi pariwisata dimulai dari perencanaan destinasi pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada pemasaran daya tarik destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata melalui penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif

Program ini diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia pengelola wisata, pelaku usaha sektor pariwisata dan pemberdayaan perekonomian kreatif pendukung pariwisata

3. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang pertanian antara lain:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme; dan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak

b. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah; dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat



- Veteriner.
- c. Program Penyuluhan Pertanian
- Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan/kelurahan

4. Perdagangan

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perdagangan yaitu:

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- Program ini diarahkan pada koordinasi dan pengawasan perizinan dibidang perdagangan
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan melalui penyediaan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat
- c. Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Program ini diarahkan pada pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang akan dilaksanakan melalui upaya menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota dengan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat. Selain itu pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kota melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- d. Program Pengembangan ekspor
- Program ini diarahkan pada pengembangan ekspor produk-produk daerah
- e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- Program ini diarahkan pada pelaksanaan metrologi legal berupa tera ulang dan pengawasan.
- f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan fokus pada pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri tingkat kota (hasil pengusaha kecil dan menengah daerah)

5. Perindustrian

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perindustrian adalah:



- a. Program perencanaan dan pembangunan industri
Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kota yang difokuskan pada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.
- b. Program pengendalian izin usaha industri
Program ini diarahkan pada koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri kecil, menengah dan besar
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi industri nasional
Program ini diarahkan pada penyediaan informasi yang dipergunakan untuk kepentingan pengembangan industri daerah yang menjadi kewenangan kota

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan, Sekretariat Daerah adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini diarahkan pada administrasi keuangan perangkat daerah dengan fokus pada pelayanan administrasi keuangan pada lingkup sekretariat daerah termasuk penyediaan gaji dan tunjangan. Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan fokus pada pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Administrasi umum perangkat daerah, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan fokus pada penyediaan layanan umum sekretariat daerah. Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah dengan fokus pada penyediaan pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penataan organisasi dengan fokus pada pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. Serta protokol dan komunikasi pimpinan dengan fokus pada fasilitasi keprotokolan, fasilitasi komunikasi pimpinan, dan pendokumentasian tugas pimpinan.
- b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Program ini diarahkan pada Administrasi Tata Pemerintahan dengan fokus pada penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan, dan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan fokus pada fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual serta pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan



- sosial dan kesejahteraan masyarakat. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan fokus pada fasilitasi penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, dan pendokumentasian produk hukum, serta pengelolaan informasi hukum. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan fokus pada fasilitasi kerjasama daerah, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- c. Program Perekonomian Dan Pembangunan
- Program ini diarahkan pada pelaksanaan kebijakan perekonomian melalui koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD Dan BLUD, serta pengendalian dan distribusi perekonomian. Pelaksanaan Administrasi pembangunan melalui pengendalian dan evaluasi program pembangunan, serta pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam melalui koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan

2. Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan, Sekretariat DPRD antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program ini diarahkan pada layanan administrasi DPRD dan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD dengan fokus pada penyelenggaraan administrasi, ketata usahaan dan kepegawaian DPRD, Fasilitasi Rapat DPRD, fasilitasi fraksi DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyediaan pakaian dinas DPRD, serta pelaksanaan medical *check up* DPRD.
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
- Program ini diarahkan pada pembentukan perda dan peraturan DPRD dengan fokus pada penyusunan dan pembahasan program pembentukan perda, pembahasan rancangan perda, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, dan fasilitasi penyusunan naskah akademik. Pembahasan kebijakan anggaran dengan fokus pada pembahasan KUA dan PPAS, pembahasan APBD, pembahasan pertanggungjawaban APBD dan pembahasan pertanggungjawaban APBD. Peningkatan Kapasitas DPRD dengan fokus pada bimbingan teknis DPRD, penyusunan program kerja DPRD, Penyediaan tenaga ahli fraksi dan Tenaga Ahli. Penerapan penghimpunan aspirasi masyarakat dengan fokus pada kunjungan kerja dalam daerah, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan pelaksanaan reses. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan fokus pada pengawasan kode etik DPRD. Fasilitasi tugas pimpinan DPRD dengan fokus pada koordinasi dan konsultasi pelaksanaan



tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD dan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Perencanaan yaitu:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan fokus pada koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Kota dan pelaksanaan musrenbang Kota serta monitoring program dan kegiatan perangkat daerah. Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pada analisis data informasi perencanaan pembangunan daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pada monitoring dan evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan fokus pada koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan fokus pada koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam. Koordinasi perencanaan bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan dengan fokus pada koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) bidang

2. Keuangan

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan adalah:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah dengan fokus pada penyusunan regulasi bidang anggaran, koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah, penyusunan KUA dan PPAS, dan penyusunan perda APBD murni/perubahan dan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD murni/perubahan. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah dengan fokus pada koordinasi dan pengelolaan kas daerah, penyusunan laporan realisasi dan rekonsiliasi penerimaan dan



- pengeluaran kas daerah serta penatausahaan dan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dengan fokus pada penyusunan perda pertanggungjawaban APBD, konsolidasi laporan keuangan dan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program ini diarahkan pada pengelolaan barang milik daerah dengan fokus pada penyusunan perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pengamanan, optimalisasi penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan, rekonsiliasi dan pelaporan Barang Milik Daerah dan koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pemindahtanganan barang milik daerah.
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Program ini diarahkan pada pengelolaan pendapatan daerah fokus pada analisa dan pengembangan pajak daerah dan penyusunan kebijakan pajak daerah, penyuluhan kebijakan pajak daerah, pendataan dan pendaftaran objek pajak, pengelolaan basis data pajak daerah dan penagihan pajak daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Kepegawaian adalah Program Kepegawaian daerah. Program ini diarahkan pada pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang fokus pada penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan administrasi dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian melalui mutasi dan promosi ASN dan pengembangan kompetensi ASN dengan pendidikan lanjutan dan pengembangan karir dalam jabatan fungsional ASN. Dalam pelaksanaan evaluasi ASN dengan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan fokus pada pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Penyelenggaraan diklat bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diarahkan untuk peningkatan kompetensi para aparatur daerah

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Penunjang urusan pemerintahan, penelitian dan pengembangan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diarahkan pada penelitian dan pengembangan



bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan dan pengembangan inovasi dan teknologi

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat)

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Pengawasan yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan fokus pada pengawasan kinerja, keuangan, pengawasan internal serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, serta pengawasan

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawsan serta pendampingan dan asistensi. Fokus penyelenggaraan reformasi birokrasi, penegakkan integritas dan monitoring dan evaluasi dan verifikasi penegahan dan pemberantasan korupsi.

G. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam Unsur Kewilayahan antara lain:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan.

b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Program ini diarahkan pada koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kegiatan pemberdayaan kelurahan fokus pada pelaksanaan padat karya dan swakelola pada pembangunan fisik lingkungan kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan evaluasi kelurahan.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah pengampu urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam upaya menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

d. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pelimpahan kewenangan pemerintah daerah fokus pada pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional



H. Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam fungsi pemerintahan umum yaitu:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan fokus pada perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja rasio masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan dan koordinasi dibidang pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, mediasi sengketa dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan fokus pada Pelaksanaan Kebijakan dan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dengan fokus pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan



dini kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta penanganan konflik di daerah.

Selain program yang tercakup dalam klasifikasi urusan kewenangan pemerintah daerah di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan juga program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang urusan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diampu oleh perangkat daerah.



Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2023-2027

URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														Disdik
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	188.582.716.69 8	B	190.468.543.8 65	B	192.373.229.3 04	B	194.296.961.5 97	B	196.239.931.2 13	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM pendidikan	((Sigma 3 Capaian SPM Bidang Pendidikan)/3 x 100%)	%	100	16.066.528.889	100	16.227.194.17 8	100	16.389.466.12 0	100	16.553.360.78 1	100	16.718.894.38 9	
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah satuan pendidikan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal/Jumlah total satuan pendidikan pendidikan non formal x 100%	%	100	135.000.000	100	136.350.000	100	137.713.500	100	139.090.635	100	140.481.541	
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD, SD, SMP)	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD/ Jumlah Pendidik PAUD x 100%	%	80	613.175.000	85	619.306.750	90	625.499.818	95	631.754.816	100	638.072.364	
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar	Jumlah sekolah akreditasi yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar/ Jumlah sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar x 100%	%	80	86.300.000	85	87.163.000	90	88.034.630	95	88.914.976	100	89.804.126	
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Daerah	Jumlah satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Daerah/ seluruh	%	5	100.000.000	10	101.000.000	15	102.010.000	20	103.030.100	25	104.060.401	



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
		satuan pendidikan x 100%												
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														DinKes
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	135.056.500.00 0	B	136.407.065.0 00	B	137.771.135.6 50	B	139.148.847.0 07	B	140.540.335.4 77	DinKes
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan di RSUD /Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan sesuai standart RSUD x 100%	%	84,71		87,1		89,49		91,88		94,27		RSUD
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian SPM Kesehatan	((Sigma 12 Capaian SPM Bidang Kesehatan)/ 12x 100%)	%	100	79.066.882.378	100	79.857.551.20 2	100	80.656.126.71 4	100	81.462.687.98 1	100	82.277.314.86 1	DinKes
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan di PKM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	Rata - rata jumlah tenaga medis yang memenuhi standar/jumlah seluruh tenaga kesehatan x 100%	%	60	179.000.000	65	180.790.000	75	182.597.900	80	184.423.879	85	186.268.118	DinKes
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi (SPP-IRT)	Jumlah industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-IRT)/jumlah IRT x 100%	%	100	245.000.000	100	247.450.000	100	249.924.500	100	252.423.745	100	254.947.982	DinKes
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di PKM yang sesuai standar	Jumlah PKM dengan sarana dan prasarana sesuai standar/Jumlah seluruh PKM x 100%	%	60		65		75		80		95		DinKes
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kota	Persentase Rumah Tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah	%	50	1.068.000.000	55	1.078.680.000	60	1.089.466.800	65	1.100.361.468	70	1.111.365.083	DinKes
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														Dinas PUTR



URUSAN/ BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	14.901.205.023	B	15.050.217.07 3	B	15.200.719.24 4	B	15.352.726.43 6	B	15.506.253.70 1	Dinas PUTR
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Irigasi Kondisi Baik (kewenangan kota)	panjang saluran irigasi kewenangan kota dalam kondisi baik dibagi panjang keseluruhan saluran irigasi kewenangan kota x100%	%	82	4.095.000.000	82,5	4.135.950.000	83	4.177.309.500	83,5	4.219.082.595	84	4.261.273.421	Dinas PUTR
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik (kewenangan kota)	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) / Panjang seluruh drainase di daerah Kota (Km) x 100%	%	88	13.100.000.000	90	13.231.000.00 0	91	13.363.310.00 0	92	13.496.943.10 0	93	13.631.912.53 1	Dinas PUTR
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan Pembangunan bangunan Gedung Kab/Kota		%	100	500.000.000	100	505.000.000	100	510.050.000	100	515.150.500	100	520.302.005	Dinas PUTR
	Persentase bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG)	Jumlah bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung/jumlah bangunan gedung x 100%	%											Dinas PUTR
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Kesesuaian Ruang		%	100	3.200.000.000	100	3.232.000.000	100	3.264.320.000	100	3.296.963.200	100	3.329.932.832	Dinas PUTR
	Persentase jumlah kelurahan yang diawasi atas perizinan bangunan gedung dan bangun atau prasarana bangunan	jumlah kelurahan yang diawasi/jumlah total kelurahan di Kota x 100%	%											Dinas PUTR
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kota	Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap (baik dan sedang)/Panjang seluruh jalan Kota di daerah x 100%	%	90	13.286.769.329	90,5	13.419.637.02 2	91	13.553.833.39 3	91,5	13.689.371.72 6	92	13.826.265.44 4	Dinas PUTR



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Bangunan dan Lingkungan yang tertata baik		%	3	160.000.000	3	161.600.000	3	163.216.000	3	164.848.160	3	166.496.642	Dinas PUTR
	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisi s yang memiliki sertifikat kompetensi x 100%	%											Dinas PUTR
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota		%	100	300.000.000	100	303.000.000	100	306.030.000	100	309.090.300	100	312.181.203	Dinas PUTR
	Persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan yang diterima, x 100%	%											Dinas PUTR
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air minum layak	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi/ jumlah rumah tangga kota x 100%	%	100	1.141.789.146	100	1.153.207.037	100	1.164.739.108	100	1.176.386.499	100	1.188.150.364	Dinas PKP
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak/ jumlah rumah tangga kota x 100%	%	100	2.030.000.000	100	2.050.300.000	100	2.070.803.000	100	2.091.511.030	100	2.112.426.140	Dinas PKP
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														Dinas PKP
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	19.500.278.838	B	19.695.281.62 6	B	19.892.234.44 3	B	20.091.156.78 7	B	20.292.068.35 5	Dinas PKP
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni/ Jumlah seluruh rumah di wilayah Kota x 100%	%	82,29	50.000.000	83,39	50.500.000	84,02	51.005.000	84,52	51.515.050	85,01	52.030.201	Dinas PKP



URUSAN/ BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase capaian SPM bidang PRKP	((Sigma 2 Capaian SPM Bidang PRKP)/2 x 100%	%	99,85	1.900.000.000	99,9	1.919.000.000	99,95	1.938.190.000	100	1.957.571.900	100	1.977.147.619	Dinas PKP
	Luas kawasan permukiman kumuh	Luas Kawasan Kumuh/ Luas Wilayah x 100%	hektar	144,9		139,9		134,9		129,9		124,9		Dinas PKP
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Jumlah rumah tidak layak huni yang berada diluar SK kawasan kumuh yang ditangani/ jumlah total rumah tidak layak huni yang berada diluar SK kawasan kumuh x 100 %	%		175.000.000		176.750.000		178.517.500		180.302.675		182.105.702	Dinas PKP
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah perumahan yang dibangun pengembang yang telah dilengkapi PSU/ jumlah perumahan total x 100%	%		9.000.000.000		9.090.000.000		9.180.900.000		9.272.709.000		9.365.436.090	Dinas PKP
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														SatPol PP
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	9.302.521.975	B	9.395.547.195	B	9.489.502.667	B	9.584.397.693	B	9.680.241.670	SatPol PP
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	% Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani/ Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%	%		3.383.238.004		3.417.070.384		3.451.241.088		3.485.753.499		3.520.611.034	SatPol PP
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time)	Jumlah kasus kebakaran yang dapat ditangani oleh unit damkar dalam waktu tanggap/ jumlah keseluruhan kasus kebakaran x 100%	%		1.541.340.000		1.556.753.400		1.572.320.934		1.588.044.143		1.603.924.585	SatPol PP
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	4.465.807.301	B	4.510.465.374	B	4.555.570.028	B	4.601.125.728	B	4.647.136.985	BPPD



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase bencana alam yang tertangani	Jumlah Bencana alam yang tertangani/Jumlah Bencana alam yang terjadi x 100%	%	100	2.260.000.000	100	2.282.600.000	100	2.305.426.000	100	2.328.480.260	100	2.351.765.063	BPPD
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														Dinsos, PP dan Perlindungan Anak
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	4.873.230.615	B	4.921.962.921	B	4.971.182.550	B	5.020.894.376	B	5.071.103.320	Dinsos, PP dan Perlindungan Anak
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif PSKS meliputi 1. WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), 2. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), 3. TSKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), 4. LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga), 5. Family Care Unit (FCU), 6. LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), 7. Karang Taruna, 8. Tagana (Taruna Siaga Bencana)	Jumlah PSKS yang aktif dibagi PSKS yang ada dikalikan 100%	%		375.662.589		379.419.215		383.213.407		387.045.541		390.915.997	Dinsos, PP dan Perlindungan Anak
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase capaian SPM Bidang Sosial	((Sigma 5 Capaian SPM Bidang Sosial)/5 x 100%)	%	100	688.538.799	100	695.424.187	100	702.378.429	100	709.402.213	100	716.496.235	Dinsos, PP dan Perlindungan Anak
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Verifikasi dan Validasi Data Calon penerima Bantuan Sosial	Jumlah PPKS yang terdata/Jumlah Seluruh PPKS x 100%	%	100	201.074.440	100	203.085.184	100	205.116.036	100	207.167.197	100	209.238.869	Dinsos, PP dan Perlindungan Anak
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa			155.600.000		157.156.000		158.727.560		160.314.836		161.917.984	Dinsos, PP dan Perlindungan Anak



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
	sosial selama masa tanggap darurat	tanggap darurat/jumlah korban bencana skala kabupaten x 100%												
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat/jumlah korban bencana skala kabupaten x 100%	%		18.439.500		18.623.895		18.810.134		18.998.235		19.188.218	Dinsos, PP dan Perlindungan Anak
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														Disnaker
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	4.012.927.674	B	4.053.056.951	B	4.093.587.520	B	4.134.523.395	B	4.175.868.629	Disnaker
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi/ Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	%	100	726.379.226	200	733.643.018	300	740.979.448	400	748.389.243	500	755.873.135	Disnaker
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan/Jumlah pencaker yang terdaftar x 100%	%	66,67	279.122.418	68,75	281.913.642	70,58	284.732.779	72	287.580.106	73,69	290.455.907	Disnaker
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	(Jumlah perselisihan kerja yang terselesaikan/ jumlah seluruh perselisihan kerja yang terjadi) x 100%	%	100	175.650.000	100	177.406.500	100	179.180.565	100	180.972.371	100	182.782.094	Disnaker
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														Dinsos, PP dan Perlindungan Anak
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan sebagai tenaga professional	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah/ jumlah pekerja perempuan x 100%	%		175.015.215		176.765.367		178.533.021		180.318.351		182.121.535	Dinsos, PP dan Perlindungan Anak
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah/ jumlah pekerja perempuan x 100%	%		60.000.000		60.600.000		61.206.000		61.818.060		62.436.241	Dinsos, PP dan Perlindungan Anak



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan layanan konseling	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konseling/ jumlah keluarga x 100%	%		650.000.000		656.500.000		663.065.000		669.695.650		676.392.607	Dinsos, PP dan Perlindungan Anak
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kelurahan ramah anak	Jumlah kelurahan ramah anak/ jumlah desa x100%	%		173.860.926		175.599.535		177.355.531		179.129.086		180.920.377	Dinsos, PP dan Perlindungan Anak
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	Jumlah pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani/ jumlah pengaduan x 100%	%		60.000.000		60.600.000		61.206.000		61.818.060		62.436.241	Dinsos, PP dan Perlindungan Anak
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														Disketapang
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	9.647.466.365	B	9.743.941.029	B	9.841.380.439	B	9.939.794.243	B	10.039.192.18 6	Disketapang
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan utama (beras)	Jumlah cadangan pangan utama (beras)/ jumlah kebutuhan pangan utama (beras)) x 100%	%		580.000.000		585.800.000		591.658.000		597.574.580		603.550.326	Disketapang
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														BPKD
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GAN TI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum/ Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum x 100%	%	15	19.471.586.427	15	19.666.302.29 1	15	19.862.965.31 4	15	20.061.594.96 7	25	20.262.210.91 7	BPKD
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														DLH
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	10.982.000.000	B	11.091.820.00 0	B	11.202.738.20 0	B	11.314.765.58 2	B	11.427.913.23 8	DLH
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun (Dokumen perencanaan lingkungan hidup meliputi RPPLH, KLHS, DDDT, DIKPLHD, IKLH)	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang disusun pada tahun berjalan dibagi jumlah jenis dokumen yang harus disusun pada			220.000.000		222.200.000		224.422.000		226.666.220		228.932.882	DLH



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
		<i>tahun berjalan dikalikan 100%</i>												
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Indeks Kualitas Air, Udara</i>		<i>Indeks</i>	53,91	451.171.600	54,01	455.683.316	54,11	460.240.149	54,31	464.842.551	54,31	469.490.976	DLH
				84,4		84,5		84,6		84,8		84,8		DLH
				26,94		28,46		29,98		33,02		33,02		DLH
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Luas RTH/luas wilayah perkotaan x 100%	%		95.600.000		96.556.000		97.521.560		98.496.776		99.481.743	DLH
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan Pemko	Jumlah ketaatan terhadap persetujuan lingkungan yang ditindaklanjuti persetujuan teknis, yang ditebitkan oleh Pemko/total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina (diawasi) terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemko x 100%	%		73.932.886		74.672.215		75.418.937		76.173.126		76.934.858	DLH
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan</i>	Persentase Jenis Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat non air limbah domestik dan non sampah yang dilaksanakan dibagi jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat non air limbah domestik yang harus dilaksanakan pada	%		185.000.000		186.850.000		188.718.500		190.605.685		192.511.742	DLH



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
		tahun berjalan dikalikan 100%												
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup (Penghargaan lingkungan hidup adalah penghargaan di bidang lingkungan hidup baik tingkat propinsi maupun nasional.	Jumlah jenis penghargaan bidang LH yang dicapai dibagi jumlah jenis penghargaan bidang LH yang diikuti dikalikan 100%	%		430.300.000		434.603.000		438.949.030		443.338.520		447.771.906	DLH
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan lingkungan	Jumlah kasus LH yang ditangani atau diselesaikan/jumlah keseluruhan kasus LH yang diadakan x 100%	%		18.600.000		18.786.000		18.973.860		19.163.599		19.355.235	DLH
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	Total Vol sampah yang dapat ditangani/ Total vol timbunan sampah kota x 100%	%	100	13.844.000.000	100	13.982.440.000	100	14.122.264.400	100	14.263.487.044	100	14.406.121.914	DLH
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Luas RTH/luas wilayah perkotaan x 100%	%		3.422.500.000		3.456.725.000		3.491.292.250		3.526.205.173		3.561.467.224	Dinas PKP
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	Total Vol sampah yang dapat ditangani/ Total vol timbunan sampah wilayah kecamatan x 100%	%	100	1.438.790.000	100	1.453.177.900	100	1.467.709.679	100	1.482.386.776	100	1.497.210.644	Siantar Timur
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	Total Vol sampah yang dapat ditangani/ Total vol timbunan sampah wilayah kecamatan x 100%	%	100	1.781.623.030	100	1.799.439.260	100	1.817.433.653	100	1.835.607.989	100	1.853.964.069	Siantar Barat
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	Total Vol sampah yang dapat ditangani/ Total vol timbunan sampah wilayah kecamatan x 100%	%	100	1.478.620.350	100	1.493.406.554	100	1.508.340.619	100	1.523.424.025	100	1.538.658.265	Siantar Utara
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	Total Vol sampah yang dapat ditangani/ Total vol timbunan sampah wilayah kecamatan x 100%	%	100	600.890.000	100	606.898.900	100	612.967.889	100	619.097.568	100	625.288.544	Siantar Selatan
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	Total Vol sampah yang dapat ditangani/ Total vol timbunan	%	100	154.843.310	100	156.391.743	100	157.955.661	100	159.535.217	100	161.130.569	Siantar Marihat



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
		sampah wilayah kecamatan x 100%												
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	Total Vol sampah yang dapat ditangani/ Total vol timbunan sampah wilayah kecamatan x 100%	%	100	868.763.425	100	877.451.059	100	886.225.570	100	895.087.826	100	904.038.704	Siantar Martoba
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	Total Vol sampah yang dapat ditangani/ Total vol timbunan sampah wilayah kecamatan x 100%	%	100	767.934.522	100	775.613.867	100	783.370.006	100	791.203.706	100	799.115.743	Siantar Sitalasari
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	Total Vol sampah yang dapat ditangani/ Total vol timbunan sampah wilayah kecamatan x 100%	%	100	640.350.000	100	646.753.500	100	653.221.035	100	659.753.245	100	666.350.778	Siantar Marimbun
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														Disdukcapil
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	4.951.389.293	B	5.000.903.186	B	5.050.912.218	B	5.101.421.340	B	5.152.435.553	Disdukcapil
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk (hasil Rata-rata pelayanan KTP, KK, KIA)	(Jumlah penduduk ber-KTP/jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP x 100%) +(Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga/ Jumlah kepala keluarga x 100%)+(jumlah penduduk yang memiliki KIA /jumlah penduduk berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah) x 100%)/3 x 100%	%	99	565.800.000	99	571.458.000	99	577.172.580	99	582.944.306	99	588.773.749	Disdukcapil
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan/jumlah data perubahan penduduk karena kematian x 100%	%		85.000.000		85.850.000		86.708.500		87.575.585		88.451.341	Disdukcapil



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	Jumlah anak yang memiliki akte kelahiran/ jumlah anak) x 100%	%											
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	Jumlah lembaga yg memanfaatkan data kependudukan tahun N dan tahun N-1/ jumlah data yang memanfaatkan data kependudukan tahun N-1 x 100%	%		61.000.000		61.610.000		62.226.100		62.848.361		63.476.845	Disdukcapil
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang disusun/jumlah profil yang seharusnya x 100%	%		45.000.000		45.450.000		45.904.500		46.363.545		46.827.180	Disdukcapil
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														Kecamatan
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% PKK Aktif	Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK x 100 %	%	100	478.140.000	100	482.921.400	100	487.750.614	100	492.628.120	100	497.554.401	Siantar Timur
	% Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu aktif/Jumlah Posyandu x 100 %	%	100		100		100		100		100		
	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan x 100%	%	100		100		100		100		100		
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% PKK Aktif	Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK x 100 %	%	100	756.378.513	100	763.942.298	100	771.581.721	100	779.297.538	100	787.090.514	Siantar Barat
	% Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu aktif/Jumlah Posyandu x 100 %	%	100		100		100		100		100		
	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif / Jumlah Lembaga	%	100		100		100		100		100		



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
		Kemasyarakatan x 100%												
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% PKK Aktif	Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK x 100 %	%	100	621.540.000	100	627.755.400	100	634.032.954	100	640.373.284	100	646.777.016	Siantar Utara
	% Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu aktif/Jumlah Posyandu x 100 %	%	100		100		100		100		100		
	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan x 100%	%	100		100		100		100		100		
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% PKK Aktif	Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK x 100 %	%	100	396.200.000	100	400.162.000	100	404.163.620	100	408.205.256	100	412.287.309	Siantar Selatan
	% Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu aktif/Jumlah Posyandu x 100 %	%	100		100		100		100		100		
	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan x 100%	%	100		100		100		100		100		
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% PKK Aktif	Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK x 100 %	%	100	519.551.312	100	524.746.825	100	529.994.293	100	535.294.236	100	540.647.179	Siantar Marihat
	% Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu aktif/Jumlah Posyandu x 100 %	%	100		100		100		100		100		
	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif / Jumlah Lembaga	%	100		100		100		100		100		



URUSAN/ BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
		Kemasyarakatan x 100%												
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% PKK Aktif	Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK x 100 %	%	100	516.840.000	100	522.008.400	100	527.228.484	100	532.500.769	100	537.825.777	Siantar Martoba
	% Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu aktif/Jumlah Posyandu x 100 %	%	100		100		100		100		100		
	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan x 100%	%	100		100		100		100		100		
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% PKK Aktif	Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK x 100 %	%	100	400.000.000	100	404.000.000	100	408.040.000	100	412.120.400	100	416.241.604	Siantar Sitalasari
	% Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu aktif/Jumlah Posyandu x 100 %	%	100		100		100		100		100		
	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan x 100%	%	100		100		100		100		100		
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% PKK Aktif	Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK x 100 %	%	100	285.900.000	100	288.759.000	100	291.646.590	100	294.563.056	100	297.508.686	Siantar Marinbum
	% Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu aktif/Jumlah Posyandu x 100 %	%	100		100		100		100		100		
	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif / Jumlah Lembaga	%	100		100		100		100		100		



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
		Kemasyarakatan x 100%												
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														DPP dan KB
2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	5.371.437.307	B	5.425.151.680	B	5.479.403.197	B	5.534.197.229	B	5.589.539.201	DPP dan KB
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	% jumlah rumah tangga yang didata/Jumlah seluruh rumah tangga x 100%	%	75,21	110.000.000	78,25	111.100.000	80	112.211.000	85,15	113.333.110	90	114.466.441	DPP dan KB
	TFR (Angka Kelahiran Total)	7TFR = 5 ∑ ASFR i	Angka											
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate / mCPR)	Jumlah peserta IUD ,Implan, MOW,MOP, pil, Suntik dan CO di /Jumlah PUS x 100%	%		1.898.000.000		1.916.980.000		1.936.149.800		1.955.511.298		1.975.066.411	DPP dan KB
	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta IUD ,Implan, MOW,MOP, /Jumlah PUS x100%	%											DPP dan KB
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	Jumlah PUS (ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi)/Jumlah PUS x 100	%											DPP dan KB
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase jumlah poktan (kelompok kegiatan) yang mendukung program Bangsa Kencana	Jumlah Kelompok kegiatan yang dibina /jumlah kelompok kegiatan yang ada x 100%	%		1.800.000.000		1.818.000.000		1.836.180.000		1.854.541.800		1.873.087.218	DPP dan KB
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														DisHub
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	18.225.914.520	B	18.408.173.665	B	18.592.255.402	B	18.778.177.956	B	18.965.959.735	DisHub
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n /Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia x 100%	%	100	2.370.500.000	100	2.394.205.000	100	2.418.147.050	100	2.442.328.521	100	2.466.751.806	DisHub
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														Diskominfo



URUSAN/ BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	5.500.000.000	B	5.555.000.000	B	5.610.550.000	B	5.666.655.500	B	5.723.322.055	Diskominfo
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi		%	100	938.823.312	100	948.211.545	100	957.693.661	100	967.270.597	100	976.943.303	Diskominfo
	Persentase aduan masyarakat terlayani	Jumlah aduan yang di layani di bagi jumlah seluruh aduan yang masuk di kanal resmi x 100%	%											Diskominfo
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang / Jumlah layanan publik yang sudah terintegrasi x 100%	%	80	4.773.987.533	80	4.821.727.408	80	4.869.944.682	80	4.918.644.129	80	4.967.830.571	Diskominfo
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														Dinkop, UKM dan perdagangan
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	7.155.841.126	B	7.227.399.537	B	7.299.673.533	B	7.372.670.268	B	7.446.396.971	Dinkop, UKM dan perdagangan
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Meningkatnya Jumlah Koperasi Simpan Pinjam		%		65.000.000		65.650.000	10	66.306.500	10	66.969.565	10	67.639.261	Dinkop, UKM dan perdagangan
	Persentase usaha mikro yang mengakses pembiayaan perbankan	(Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitas kredit perbankan/ jumlah seluruh usaha mikro x 100%	%											Dinkop, UKM dan perdagangan
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/ Jumlah seluruh koperasi x 100%	%	17,33	75.000.000	18,67	75.750.000	20	76.507.500	21,33	77.272.575	22,93	78.045.301	Dinkop, UKM dan perdagangan

URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Meningkatnya Jumlah KSP/USP koperasi yang sehat	(Jumlah KSP atau USP koperasi sehat/jumlah KSP atau USP koperasi) x 100%	%	16,97	80.000.000	16,97	80.800.000	17,07	81.608.000	17,71	82.424.080	17,78	83.248.321	Dinkop, UKM dan perdagangan
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat	Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikasi / jumlah total pengelola koperasi x 100%	%		785.000.000		792.850.000	10	800.778.500	10	808.786.285	10	816.874.148	Dinkop, UKM dan perdagangan
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	volume usaha koperasi tahun n dikurangi volume usaha koperasi tahun n-1 / volume usaha tahun n-1 x 100%	%		85.000.000		85.850.000	10	86.708.500	10	87.575.585	10	88.451.341	Dinkop, UKM dan perdagangan
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaku usaha mikro baru yang berizin	Jumlah pelaku usaha mikro yang berijin tahun n1 / jumlah total pelaku usaha mikro dalam tahun n-1 x 100%	%		330.000.000		333.300.000	10	336.633.000	10	339.999.330	10	343.399.323	Dinkop, UKM dan perdagangan
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wiira usaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha/Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	%	3,08	125.000.000	3,15	126.250.000	3,22	127.512.500	3,29	128.787.625	3,36	130.075.501	Dinkop, UKM dan perdagangan
	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	(Jumlah omset UMKM binaan tahun n dikurangi jumlah omset UMKM Binaan tahun n- 1)/jumlah omset UMKM binaan tahun t-1) x 100%	%	40		45		50		60		70		Dinkop, UKM dan perdagangan
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														DPM PTSP
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	6.021.130.080	B	6.081.341.381	B	6.142.154.795	B	6.203.576.343	B	6.265.612.106	DPM PTSP
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor (PMDN dan PMA)	(Jumlah Investor (PMDN/PMA) tahun n- jumlah Investor (PMDN/PMA) tahun n-	%	6 PMA	250.000.000	7 PMA	252.500.000	7 PMA	255.025.000	7 PMA	257.575.250	8 PMA	260.151.003	DPM PTSP



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
		1) di kota/ Jumlah Investor (PMDN/PMA) tahun n-1 di kota x 100%												
				3227 PMDN		3291 PMDN		3356 PMDN		3423 PMDN		3491 PMDN		
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan jumlah investor (pelaku usaha)	Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM/Jumlah promosi yang dilaksanakan x 100%	%	1,6	150.000.000	1,65	151.500.000	1,7	153.015.000	1,75	154.545.150	1,8	156.090.602	DPM PTSP
			%	8		12		15		15		18		DPM PTSP
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelenggaraan penanaman modal		%	100	310.000.000	100	313.100.000	100	316.231.000	100	319.393.310	100	322.587.243	DPM PTSP
	Persentase jumlah permohonan izin yang dilayani	Jumlah permohonan izin yang dilayani/jumlah permohonan izin yang masuk pada tahun n, x100%	%											DPM PTSP
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Tertib Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)		%	2,65	175.000.000	2,7	176.750.000	2,75	178.517.500	2,8	180.302.675	2,85	182.105.702	DPM PTSP
	Persentase jumlah izin yang diselesaikan	Jumlah izin yang diselesaikan/jumlah permohonan izin yang masuk dalam 1 tahun x100%	%											DPM PTSP
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi penanaman modal terintegrasi secara elektronik		%	100	50.000.000	100	50.500.000	100	51.005.000	100	51.515.050	100	52.030.201	DPM PTSP
	Persentase pengelolaan data/informasi perijinan dan non perizinan terintegrasi	Jumlah data atau informasi perijinan dan non perijinan terintegrasi/jumlah data atau informasi perijinan dan non perijinan yang seharusnya terintegrasi x100%	%											DPM PTSP



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														Dinas Pariwisata
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Jumlah organisasi pemuda yang aktif/jumlah seluruh organisasi pemuda x 100%	%		576.000.000		581.760.000		587.577.600		593.453.376		599.387.910	Dinas Pariwisata
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional (Emas, Perak, Perunggu)	Angka	Emas 9 Perak 6 Perun ggu 6	1.350.000.000	Emas 10 Perak 7 Perung gu 7	1.363.500.000	Emas 11 Perak 8 Perun ggu 8	1.377.135.000	Emas 12 Perak 9 Perung gu 9	1.390.906.350	Emas 13 Perak 10 Perun ggu 10	1.404.815.414	Dinas Pariwisata
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														Diskominfo
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data sektoral	Data sektoral (metadata yang disediakan perangkat daerah untuk memenuhi kebutuhan laporan dan evaluasi RKPD, RPJMD, SPM dan EKPPD serta statistik dasar BPS) yang tersedia/ total data yg harus disediakan) x 100%	%		150.000.000		151.500.000		153.015.000		154.545.150		156.090.602	Diskominfo
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														Diskominfo
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian x 100%	%		56.008.620		56.568.706		57.134.393		57.705.737		58.282.795	Diskominfo
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														Dinas Pendidikan
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan festival seni & budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni/budaya /jumlah kelompok seni/budaya yang ada x 100%	%	100	150.000.000	100	151.500.000	100	153.015.000	100	154.545.150	100	156.090.602	Dinas Pendidikan
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	5.495.081.343	B	5.550.032.156	B	5.605.532.478	B	5.661.587.803	B	5.718.203.681	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	Jumlah Pengunjung perpustakaan usia (5-60)/Jumlah penduduk Usia 5-60) tahun x 100%	%	18,56	954.983.907	19,17	964.533.746	19,8	974.179.084	20,45	983.920.874	21,14	993.760.083	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Cakupan naskah kuno yang diakuisisi atau dialih media (digitalisasi) atau terdaftar yang ada di wilayahnyaJumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (di- gitalisasi)/ terdaftar dalam wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi atau dialih media (digitalisasi) atau terdaftar yang ada di wilayahnya/ jumlah seluruh koleksi x 100%	%		81.321.002		82.134.212		82.955.554		83.785.110		84.622.961	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku / jumlah Perangkat Daerah di Kota Pematang Siantar x 100%	%	30	221.395.350	45	223.609.304	60	225.845.397	75	228.103.851	90	230.384.889	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip digital	Jumlah arsip digital/ jumlah total arsip) x 100%	%		60.000.000		60.600.000		61.206.000		61.818.060		62.436.241	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														Disketapang Disketapang
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi	((Jml produksi ikan konsumsi tahun berkenaan -jml produksi ikan konsumsi tahun lalu) / jml produksi ikan konsumsi tahun lalu) x 100%	%		1.060.000.000		1.070.600.000		1.081.306.000		1.092.119.060		1.103.040.251	
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN									-					



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
BIDANG PARIWISATA														
3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	5.108.751.231	B	5.159.838.743	B	5.211.437.131	B	5.263.551.502	B	5.316.187.017	Dinas Pariwisata
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	(PAD n dikurangi jumlah PAD tahun n-1)/jumlah PAD tahun t-1) x 100%	%	0,02	704.000.000	0,04	711.040.000	0,04	718.150.400	0,05	725.331.904	0,05	732.585.223	Dinas Pariwisata
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	(Jumlah kunjungan wisatawan tahun t- Jumlah kunjungan wisatawan tahun t-1)/jumlah kunjungan wisatawan tahun t-1) x 100%	%		675.000.000		681.750.000		688.567.500		695.453.175		702.407.707	Dinas Pariwisata
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi	(Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi/jumlah seluruh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif) x 100	%		340.000.000		343.400.000		346.834.000		350.302.340		353.805.363	Dinas Pariwisata
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi pertanian	1. ((Jumlah produksi pertanian tahun berkenaan - jumlah produksi pertanian tahun sebelumnya) / jumlah produksi pertanian tahun sebelumnya) x 100%	%	2,5	754.000.000	2,88	761.540.000	3,23	769.155.400	3,5	776.846.954	3,87	784.615.424	Disketapang Disketapang
	Persentase kenaikan produksi peternakan	2. ((Jumlah produksi peternakan tahun berkenaan - jumlah produksi peternakan tahun sebelumnya)/jumlah produksi peternakan tahun sebelumnya) x 100 %	%	6,54		7,25		7,87		8,32		8,82		Disketapang



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Peningkatan jumlah kelompok tani hortikultura dan perkebunan yang menerima bantuan alat	jumlah kelompok tani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menerima bantuan alat pada tahun berkenaan	Angka		3.680.000.000		3.716.800.000		3.753.968.000		3.791.507.680		3.829.422.757	Disketapang
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan menular strategis (PHMS)/zoonosis yang ditangani	(Jumlah PHMS yang ditangani/jumlah PHMS) x 100	%		350.000.000		353.500.000		357.035.000		360.605.350		364.211.404	Disketapang
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya sesuai Permentan No.91/Permentan/OT.140/ 9/2013 NPK = (Total NEM/80) x 100%	(NPK tahun berkenaan - NPK tahun sebelumnya)/NPK tahun sebelumnya) x 100%	%		430.000.000		434.300.000		438.643.000		443.029.430		447.459.724	Disketapang
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														Dinkop UKM dan Perdagangan
3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	200.000.000	B	202.000.000	B	204.020.000	B	206.060.200	B	208.120.802	Dinkop UKM dan Perdagangan
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pedagang pasar yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	pedagang pasar yang memiliki SPTD / jumlah pedagang pasar kabupaten yang menempati tempat dasaratan tetap x 100%	%		130.000.000		131.300.000		132.613.000		133.939.130		135.278.521	Dinkop UKM dan Perdagangan
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	K = (a + b) x 100% K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)	%	26,19	1.160.000.000	26,45	1.171.600.000	26,72	1.183.316.000	26,98	1.195.149.160	27,24	1.207.100.652	Dinkop UKM dan Perdagangan



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
		b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)												
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kecukupan stok barang kebutuhan pokok daerah	Stock rata-rata barang kebutuhan pokok daerah dibagi kebutuhan pokok x 100%	%		485.000.000		489.850.000		494.748.500		499.695.985		504.692.945	Dinkop UKM dan Perdagangan
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan jumlah komoditas ekspor	(Jumlah komoditas ekspor tahun t-jumlah komoditas ekspor ahun t-1)/jumlah komoditas ekspor tahun t-1) x 100%	%		500.000.000		505.000.000		510.050.000		515.150.500		520.302.005	Dinkop UKM dan Perdagangan
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang bertanda Tera Sah	Jumlah alat UTTP bertanda tera sah dibagi jumlah alat UTTP dikalikan 100%	%		1.050.000.000		1.060.500.000		1.071.105.000		1.081.816.050		1.092.634.211	Dinkop UKM dan Perdagangan
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran/ Jumlah usaha kecil keseluruhan x 100%	%	0,25	215.000.000	0,3	217.150.000	0,35	219.321.500	0,4	221.514.715	0,5	223.729.862	Dinkop UKM dan Perdagangan
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														Dinkop UKM dan Perdagangan
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri aktif (industri skala kecil)	Jumlah industri yang masih aktif/jumlah seluruh industri yang ada dikalikan 100%	%		600.000.000		606.000.000		612.060.000		618.180.600		624.362.406	Dinkop UKM dan Perdagangan
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase industri pengolahan yang mempunyai izin usaha	(Jumlah industri pengolahan yang mempunyai ijin usaha/ jumlah seluruh industri pengolahan) x 100%	%		85.000.000		85.850.000		86.708.500		87.575.585		88.451.341	Dinkop UKM dan Perdagangan
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data industri yang dimutakhirkan	Data industri yang dimutakhirkan/data industri pada tahun bersangkutan x 100%	%		120.000.000		121.200.000		122.412.000		123.636.120		124.872.481	Dinkop UKM dan Perdagangan



URUSAN/ BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4.01 SEKRETARIAT DAERAH														Sekretariat Daerah Kota
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat/ Skor AKIP Tingkat Kota	Penilaian Menpan RB	Predika t	CC (50- 55)	33.921.450.741	B (55-61)	34.260.665.248	B (61- 65)	34.603.271.901	BB (65-71)	34.949.304.620	BB (71- 75)	35.298.797.666	Sekretariat Daerah Kota
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei pengukuran IKM Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik	indeks	B (76- 78)		B (78-80)		B (80- 82)		B (82-84)		B (84- 86)		Sekretariat Daerah Kota
	Persentase penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tepat waktu (LPPD/LAKIP/LKPJ)	Persentase perangkat daerah yang mengirimkan laporan Kinerja tepat waktu/Jumlah OPD x 100%	%	75		80		85		90		100		Sekretariat Daerah Kota
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	jumlah permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti /jumlah permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang didelegasikan untuk ditindaklanjuti x 100 %	%		10.491.733.759		10.596.651.097		10.702.617.608		10.809.643.784		10.917.740.221	Sekretariat Daerah Kota
	Persentase raperda yang diundangkan menjadi peraturan daerah	jumlah Raperda yang mendapatkan nomor registrasi /jumlah Raperda yang diusulkan x 100 %	%											Sekretariat Daerah Kota
	Persentase kerjasama yang aktif	naskah kerjasama daerah aktif /naskah kerjasama daerah x100 %	%											Sekretariat Daerah Kota
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	jumlah permasalahan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti /jumlah permasalahan bidang perekonomian yang didelegasikan untuk	%		2.384.410.000		2.408.254.100		2.432.336.641		2.456.660.007		2.481.226.607	Sekretariat Daerah Kota



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
		ditindaklanjuti x100% persen												
	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang selesai /jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang masuk x100%	%											Sekretariat Daerah Kota
4.02 SEKRETARIAT DPRD									-					Sekretariat DPRD
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	30.578.387.539	B	30.884.171.41 4	B	31.193.013.12 9	B	31.504.943.26 0	B	31.819.992.69 2	Sekretariat DPRD
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelayanan agenda kerja DPRD	Jumlah Agenda kerja DPRD yang dilaksanakan pada tahun n /Jumlah agenda kerja DPRD pada tahun n x 100%	%	100	13.738.809.171	100	13.876.197.26 3	100	14.014.959.23 5	100	14.155.108.82 8	100	14.296.659.91 6	Sekretariat DPRD
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5.01 PERENCANAAN														Bappeda
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	6.732.811.778	B	6.800.139.896	B	6.868.141.295	B	6.936.822.708	B	7.006.190.935	Bappeda
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Jumlah Program dalam RKPD/Jumlah Program dalam APBD x 100%	%	85	1.115.000.000	90	1.126.150.000	95	1.137.411.500	100	1.148.785.615	100	1.160.273.471	Bappeda
	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD =(Ki1+Ki2+Ki3+Ki4+Ki5 +Ki6)/6	%	100		100		100		100				
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap	Persentase keselarasan sub kegiatan Renja PD	%	75	1.017.482.391	80	1.027.657.215	85	1.037.933.787	90	1.048.313.125	90	1.058.796.256	Bappeda



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Renstra PD bidang perekonomian dan SDA	bidang perekonomian dan SDA /sub kegiatan dalam renstra PD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100%												
	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang Sosaial dan Budaya	Persentase keselarasan sub kegiatan Renja PD bidang sosial budaya /sub kegiatan dalam renstra PD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100%	%	75		80		85		90		90		Bappeda
	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan sub kegiatan Renja PD bidang infrastuktur/sub kegiatan dalam renstra PD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100%	%	75		80		85		90		90		Bappeda
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														Bappeda
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Hasil kelitbangan yang dimanfaatkan/jumlah seluruh hasil kelitbangan x 100%	%	65	700.000.000	70	707.000.000	75	714.070.000	80	721.210.700	85	728.422.807	Bappeda
5.02 KEUANGAN														BPKD
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	66.102.970.613	B	66.764.000.31 9	B	67.431.640.32 2	B	68.105.956.72 6	B	68.787.016.29 3	BPKD
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA/Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya x 100%	%	9,5	36.643.594.421	9	37.010.030.36 5	8,5	37.380.130.66 9	8	37.753.931.97 6	7,5	38.131.471.29 5	
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase ketersediaan daftar asset tetap		%	100	2.396.000.000	100	2.419.960.000	100	2.444.159.600	100	2.468.601.196	100	2.493.287.208	BPKD
	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik/jumlah seluruh barang milik daerah x 100												



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	Total PAD/ total pendapatan daerah x 100%	%	100	4.237.000.000	100	4.279.370.000	100	4.322.163.700	100	4.365.385.337	100	4.409.039.190	BPKD
5.03 KEPEGAWAIAN														BKD
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	5.431.974.291	B	5.486.294.034	B	5.541.156.974	B	5.596.568.544	B	5.652.534.229	BKD
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN berkinerja baik	(Jumlah ASN berkinerja baik/ jumlah ASN) x 100%	%		3.732.520.391		3.769.845.595		3.807.544.051		3.845.619.491		3.884.075.686	BKD
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														BKD
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN berkembang kompetensinya	Jumlah ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 JPL pertahun/jumlah seluruh ASN x 100%	%		100.000.000		101.000.000		102.010.000		103.030.100		104.060.401	BKD
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6.01 INSPEKTORAT DAERAH														Inspektorat
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	19.167.447.437	B	19.359.121.911	B	19.552.713.130	B	19.748.240.262	B	19.945.722.664	Inspektorat
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti /Jumlah total temuan x 100%	%	80	2.130.059.105	85	2.151.359.696	90	2.172.873.293	95	2.194.602.026	95	2.216.548.046	Inspektorat
	Level Kapabilitas APIP	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	2		3		3		3		3		Inspektorat
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota	Nilai capaian aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Predika t		1.136.576.545		1.147.942.310		1.159.421.734		1.171.015.951		1.182.726.110	Inspektorat



URUSAN/ BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
7 UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01 KECAMATAN														SEMUA KECAMATAN
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	6.354.134.438	B	6.417.675.782	B	6.481.852.540	B	6.546.671.066	B	6.612.137.776	Siantar Timur
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	Hasil survei pengukuran IKM Pelayanan Kecamatan	%	80	100.000.000	85	101.000.000	90	102.010.000	95	103.030.100	100	104.060.401	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	(Jumlah lembaga masyarakat aktif/ Jumlah lembaga masyarakat) x 100%	%	100	45.000.002	100	45.450.002	100	45.904.502	100	46.363.547	100	46.827.183	
	Persentase Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah usulan masyarakat yang ditampung dalam RKPD/ Seluruh jumlah usulan masyarakat x 100%												Siantar Timur
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	(Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan tingkat Kecamatan / jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Tingkat Kecamatan yang dilaporkan masyarakat) x 100%	%	100	20.000.000	100	20.200.000	100	20.402.000	100	20.606.020	100	20.812.080	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan/ jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai	%	100	241.600.000	100	244.016.000	100	246.456.160	100	248.920.722	100	251.409.929	



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
		<i>penugasan Kepala Daerah x 100%</i>												
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	8.224.604.065	B	8.306.850.106	B	8.389.918.607	B	8.473.817.793	B	8.558.555.971	Siantar Barat
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	Hasil survei pengukuran IKM Pelayanan Kecamatan	%	80	50.000.000	85	50.500.000	90	51.005.000	95	51.515.050	100	52.030.201	Siantar Barat
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	<i>(Jumlah lembaga masyarakat aktif/ Jumlah lembaga masyarakat) x 100%</i>	%	100	55.500.000	100	56.055.000	100	56.615.550	100	57.181.706	100	57.753.523	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan</i>	<i>(Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan tingkat Kecamatan / jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Tingkat Kecamatan yang dilaporkan masyarakat) x 100%</i>	%	100	100.000.000	100	101.000.000	100	102.010.000	100	103.030.100	100	104.060.401	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan</i>	<i>Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan/ jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah x 100%</i>	%	100	362.008.740	100	365.628.827	100	369.285.116	100	372.977.967	100	376.707.746	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	8.582.180.701	B	8.668.002.508	B	8.754.682.533	B	8.842.229.358	B	8.930.651.652	Siantar Utara



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	Hasil survei pengukuran IKM Pelayanan Kecamatan	%	80	120.500.000	85	121.705.000	90	122.922.050	95	124.151.271	100	125.392.783	Siantar Utara
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	(Jumlah lembaga masyarakat aktif/ Jumlah lembaga masyarakat) x 100%	%	100	72.460.802	100	73.185.410	100	73.917.264	100	74.656.437	100	75.403.001	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	(Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan tingkat Kecamatan / jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Tingkat Kecamatan yang dilaporkan masyarakat) x 100%	%	100	70.000.000	100	70.700.000	100	71.407.000	100	72.121.070	100	72.842.281	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan/ jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah x 100%	%	100	292.543.308	100	295.468.741	100	298.423.428	100	301.407.663	100	304.421.739	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predikat	CC	5.298.375.988	B	5.351.359.748	B	5.404.873.345	B	5.458.922.079	B	5.513.511.300	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	Hasil survei pengukuran IKM Pelayanan Kecamatan	%	80	120.000.000	85	121.200.000	90	122.412.000	95	123.636.120	100	124.872.481	Siantar Selatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	(Jumlah lembaga masyarakat aktif/	%	100	120.000.000	100	121.200.000	100	122.412.000	100	123.636.120	100	124.872.481	



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Jumlah lembaga masyarakat) x 100%</i>												
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan</i>	<i>(Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan tingkat Kecamatan / jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Tingkat Kecamatan yang dilaporkan masyarakat) x 100%</i>	%	100		100		100		100		100		Siantar Selatan
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan</i>	<i>Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan/ jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah x 100%</i>	%	100	197.600.000	100	199.576.000	100	201.571.760	100	203.587.478	100	205.623.352	Siantar Selatan
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	8.246.436.369	B	8.328.900.733	B	8.412.189.740	B	8.496.311.637	B	8.581.274.754	Siantar Marihat
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	Hasil survei pengukuran IKM Pelayanan Kecamatan	%	80	80.000.000	85	80.800.000	90	81.608.000	95	82.424.080	100	83.248.321	Siantar Marihat
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan</i>	<i>(Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan tingkat Kecamatan / jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Tingkat Kecamatan</i>	%	%	42.493.145		42.918.076		43.347.257		43.780.730		44.218.537	



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
		yang dilaporkan masyarakat) x 100%												
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan/ jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah x 100%	%	100	163.380.200	100	165.014.002	100	166.664.142	100	168.330.783	100	170.014.091	Siantar Marihat
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predikat	CC	7.028.730.510	B	7.099.017.815	B	7.170.007.993	B	7.241.708.073	B	7.314.125.154	Siantar Maartoba
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	Hasil survei pengukuran IKM Pelayanan Kecamatan	%	80	100.000.000	85	101.000.000	90	102.010.000	95	103.030.100	100	104.060.401	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	(Jumlah lembaga masyarakat aktif/ Jumlah lembaga masyarakat) x 100%	%		41.093.984		41.504.924		41.919.973		42.339.173		42.762.565	Siantar Maartoba
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	(Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan tingkat Kecamatan / jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Tingkat Kecamatan yang dilaporkan masyarakat) x 100%	%	100	100.000.000	100	101.000.000	100	102.010.000	100	103.030.100	100	104.060.401	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang	%	100	274.546.426	100	277.291.890	100	280.064.809	100	282.865.457	100	285.694.112	



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
		<i>dilaksanakan/ jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah x 100%</i>												
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	5.732.157.750	B	5.789.479.328	B	5.847.374.121	B	5.905.847.862	B	5.964.906.341	Siantar Sitalasari
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	Hasil survei pengukuran IKM Pelayanan Kecamatan	%	80	100.000.000	85	101.000.000	90	102.010.000	95	103.030.100	100	104.060.401	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	<i>(Jumlah lembaga masyarakat aktif/ Jumlah lembaga masyarakat) x 100%</i>	%		42.000.000		42.420.000		42.844.200		43.272.642		43.705.368	Siantar Sitalasari
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan</i>	<i>(Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan tingkat Kecamatan / jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Tingkat Kecamatan yang dilaporkan masyarakat) x 100%</i>	%	100	10.000.000	100	10.100.000	100	10.201.000	100	10.303.010	100	10.406.040	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan</i>	<i>Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan/ jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah x 100%</i>	%	100	192.000.000	100	193.920.000	100	195.859.200	100	197.817.792	100	199.795.970	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	5.870.706.139	B	5.929.413.200	B	5.988.707.332	B	6.048.594.406	B	6.109.080.350	Siantar Marimbun



URUSAN/ BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	Hasil survei pengukuran IKM Pelayanan Kecamatan	%	80	50.000.000	85	50.500.000	90	51.005.000	95	51.515.050	100	52.030.201	Siantar Marimbun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	(Jumlah lembaga masyarakat aktif/ Jumlah lembaga masyarakat) x 100%	%	100	210.516.052	100	212.621.213	100	214.747.425	100	216.894.899	100	219.063.848	Siantar Marimbun
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	(Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan tingkat Kecamatan / jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Tingkat Kecamatan yang dilaporkan masyarakat) x 100%	%	100	10.000.000	100	10.100.000	100	10.201.000	100	10.303.010	100	10.406.040	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan/ jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah x 100%	%	100	181.827.619	100	183.645.895	100	185.482.354	100	187.337.178	100	189.210.549	
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	Predika t	CC	4.574.373.540	B	4.620.117.275	B	4.666.318.448	B	4.712.981.633	B	4.760.111.449	BakesbangPol BakesbangPol
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN	Rasio Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan	Orang/ %	700/1 7,5	301.000.000	750/18 ,75	304.010.000	800/2 0	307.050.100	850/21 ,25	310.120.601	900/2 2,5	313.221.807	BakesbangPol



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan per 100.000rb penduduk.	penguatan idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan/100.000 Penduduk x 100% (10% dari jumlah pelajar SMP dan SMA 40,000 orang)												
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan jumlah masyarakat terhadap pendidikan politik	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik tahun N dikurangi N - 1/ jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik tahun n-1 x 100%	%		947.431.257		956.905.570		966.474.625		976.139.372		985.900.765	BakesbangPol
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif/jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar x 100%	%		41.000.000		41.410.000		41.824.100		42.242.341		42.664.764	BakesbangPol
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penurunan konflik SARA	Jumlah konflik SARA (setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan) tahun N-1 dikurangi N/ jumlah konflik SARA tahun n-1 x 100%	%		277.236.282		280.008.645		282.808.731		285.636.819		288.493.187	BakesbangPol
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kasus atau kejadian potensi konflik sosial yang ditangani	Jumlah kasus konflik sosial (perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan	%		260.976.220		263.585.982		266.221.842		268.884.060		271.572.901	BakesbangPol



URUSAN/BIDANG URUSAN/ KODE PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027		
				T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
		disintegrasi sosial) yang selesai tahun N /jumlah kasus konflik sosial tahun n x 100%												
T O T A L					1.005.404.082 .066		1.015.458.122 .887		1.025.612.704 .116		1.035.868.831 .161		1.046.227.519 .477	



BAB VIII

INDIKATOR KINERJA DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, aspek pelayanan dan aspek daya saing yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

8.1. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil.



Penetapan kinerja pemerintah tersebut untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Pemilihan dan penetapan IKU Daerah Kota Pematang Siantar mempertimbangkan ketercapaian visi misi daerah dan arah kebijakan strategis, kelaziman indikator makro pada bidang tertentu, kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja daerah dan bidang kewenangan, tugas, fungsi dan peran lainnya. Selengkapnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pematang Siantar Tabel 8.1 dibawah ini.



Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022-2027

No	Indikator	Formula Indikator/Sumber		Satuan	Kondisi Awal			Target (Proyeksi)					Kondisi Akhir 2027	Sumber Data	Urusan
					Realisasi 2020	Realisasi 2021	Proyeksi 2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = 1/3 [X_{01} + X_{02} + X_{03}]$	PMDN 86 Tahun 2017	Indeks	78,75	79,17	(79,17-79,65)	(79,65-80,13)	(80,13-80,61)	(80,61-81,10)	(81,10-81,59)	(81,59-82,09)	82,09	BPS	Kesehatan dan Pendidikan
2	Persentase Tingkat Kemiskinan	$P_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^m$	PMDN 86 Tahun 2017	%	8,27	8,52	(8,52-8,46)	(8,46-8,07)	(8,07-7,69)	(7,69-7,30)	(7,30-6,92)	(6,92-6,53)	6,53	BPS	Sosial
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{PT}{PAH} \times 100\%$	PMDN 86 Tahun 2017	%	11,50	11,00	(11-10,40)	(10,40-9,74)	(9,74-8,57)	(8,57-7,46)	(7,46-6,41)	(6,41-5,28)	5,28	BPS	Tenaga kerja
4	Laju Pertumbuhan ekonomi	PDRB tahun n- PDRBn-1/PDRB n-1 x 100%	PMDN 86 Tahun 2017	%	-1,89	1,25	(1-25-2,21)	(2,21-3,38)	(3,38-4,54)	(4,54-5,72)	(5,72-6,89)	(6,89-7,08)	7,08	BPS	Koperasi UKM, Perdagangan, Penanaman Modal
5	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i+1})$	PMDN 86 Tahun 2017	Indeks	0,336	0,307	(0,307-0,305)	(0,305-0,300)	(0,300-0,295)	(0,295-0,290)	(0,290-0,285)	(0,285-0,280)	0,280	BPS	
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian Kemenpan RB	Permenpan RB No. 5 Tahun 2020	Indeks	C (40,47)	C (42,39)	C (42,39-45)	C (45-50)	B (50-61)	B (61-65)	B (65-67)	B (67-70)	B (70)	Kemenpan RB	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Setdako
7	Indeks infrastuktur	Perhitungan data kualitas infrastruktur ke-PU-an yaitu persentase akses air minum, akses sanitasi, tingkat kemantapan jalan, dan kondisi irigasi	Mandiri	Indeks	0,84	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,92	0,92	Dinas PUPR	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup




8.2. Indikator Kinerja Daerah
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 ditampilkan pada dan Tabel 8.2 berikut.

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2027

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja/Tahun					Kondisi Akhir 2027	Penanggung Jawab
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
						Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
		1	Pertumbuhan ekonomi	PDRB tahun n- PDRB tahun n-1 /PDRB tahun n-1 x 100%	%	1,25	(1-25-2,21)	(2,21- 3,38)	(3,38- 4,54)	(4,54- 5,72)	(5,72- 6,89)	(6,89- 7,08)	7,08	Kota
		2	Laju inflasi	$IIR_t = \frac{\sum_{i=1}^n (P_{i,t} - P_{i,t-1})}{\sum_{i=1}^n P_{i,t-1}} \times 100\%$	%	2,12	2± 1	2± 1	2± 1	2± 1	2± 1	2± 1	2± 1	Kota
		3	Angka Kemiskinan	$K_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[\frac{Y_i - Y_k}{Y_k} \right]^2$	%	8,52	(8,52-8,46)	(8,46- 8,07)	(8,07- 7,69)	(7,69- 7,30)	(7,30- 6,92)	(6,92- 6,53)	6,53	Kota
		4	Angka Pengangguran	$AP = \frac{P - E}{P} \times 100\%$	%	11,00	(11-10,40)	(10,40- 9,74)	(9,74- 8,57)	(8,57- 7,46)	(7,46- 6,41)	(6,41- 5,28)	5,28	Kota
		5	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \frac{1}{3} (X_0 + X_1 + X_2)$	Indeks	79,17	(79,17- 79,65)	(79,65- 80,13)	(80,13- 80,61)	(80,61- 81,10)	(81,10- 81,59)	(81,59- 82,09)	82,09	Kota
		6	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	$G = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (Q_i + Q_{i-1})$	Indeks	0,307*	(0,307- 0,305)	(0,305- 0,300)	(0,300- 0,295)	(0,295- 0,290)	(0,290- 0,285)	(0,285- 0,280)	0,280	Kota
		7	Pendapatan Perkapita (nominal)	Pendapatan Perkapita = Produk Nasional Bruto /Total Jumlah Penduduk	Rp (juta)	52,473	53,800	56,320	58,840	61,360	63,890	66,420	66,420	Kota
			ASPEK PELAYANAN UMUM											
1			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar											
1	01		Pendidikan											Dinas Pendidikan
		1	Rata-Rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$	Tahun	11,29	11,38	11,48	11,58	11,67	11,77	11,87	11,87	
		2	Harapan Lama Sekolah	$HLS = \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{P_i}$	Tahun	14,57	14,67	14,77	14,87	14,97	15,07	15,17	14,67	
		3	Persentase capaian SPM pendidikan	((Sigma 3 Capaian SPM Bidang Pendidikan)/3 x 100%)	%	90,95	100	100	100	100	100	100	100	

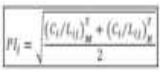


No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja/Tahun					Kondisi Akhir 2027	Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
					Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
1	02		Kesehatan										Dinas Kesehatan
		1	Usia Harapan Hidup		Tahun	73,77	73,88	73,91	74,13	74,53	74,82	75,06	
		2	Prevelensi Stunting	Jumlah Balita Stunting tahun n / Jumlah antropometri tahun n x100%	%	1,3	13,17	11,08	8,96	7	6	5	
		3	Persentase Capaian SPM Kesehatan	((Sigma 12 Capaian SPM Bidang Kesehatan)/12x 100%)	%	66,69	100	100	100	100	100	100	
1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										Dinas PUTR
		1	Persentase kesesuaian tata ruang	Realisasi RTRW/ Rencana Peruntukan x 100%	%	62,00	63,00	64,80	66,05	68,05	70,05	72,05	
		2	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kota	Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap (baik dan sedang)/Panjang seluruh jalan Kota di daerah x 100%	%	81,12	89,00	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	
		3	Persentase drainase dalam kondisi baik	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) / Panjang seluruh drainase di daerah Kota (Km) x 100%	%	87,28	87,00	88,00	90,00	91,00	92,00	93,00	
1	04		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										Dinas PKP
		1	Persentase capaian SPM bidang PRKP	((Sigma 2 Capaian SPM Bidang PRKP)/2x 100%)	%	99,75	100	100	100	100	100	100	
		2	Persentase capaian SPM bidang PUPR	((Sigma 2 Capaian SPM Bidang PUPR)/2x 100%)	%	99,75	100	100	100	100	100	100	
		3	Luas kawasan permukiman kumuh	Luas Kawasan Kumuh/Luas Wilayah x 100%	Hektar	154,94	149,94	144,94	139,94	134,94	129,94	124,94	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja/Tahun					Kondisi Akhir 2027	Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
					Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		4	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni/Jumlah seluruh rumah di wilayah Kota x 100%	%	80,19	81,19	82,29	83,39	84,02	84,52	85,01	
1	05		Ketentraman dan Ketertiban Umum										Satpol PP/BPPD
		1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani/ Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%	%	90	80	80	80	80	80	80	
		2	Persentase capaian SPM bidang Keamanan dan ketertiban umum	((Sigma 2 Capaian SPM Bidang Trantibum)/2 x 100%) (khusus Satpol)	%	0	95	98	97,8	97,5	97,2	97	Satpol PP/BPPD
		3	Persentase bencana alam yang tertangani	Jumlah pengaduan yang ditangani/ Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	BPPD
1	06		Sosial										Dinsos PP & PA
		1	Persentase penurunan PPKS/PMKS	Jumlah PPKS yang terdata/Jumlah Seluruh PPKS x 100%	%	0,18	0,08	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	
		2	Persentase capaian SPM Bidang Sosial	((Sigma 5 Capaian SPM Bidang Sosial)/5 x 100%)	%	100	100	100	100	100	100	100	
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
2	07		Tenaga Kerja										Disnaker
		1	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan/Jumlah pencaker yang terdaftar x 100%	%	61,81	64,28	66,67	68,75	70,58	72,00	73,69	
		2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi/ Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	%	20	20	100	200	300	400	500	
2	08		Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak										Dinsos PP & PA



No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja/Tahun					Kondisi Akhir 2027	Penanggung Jawab
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
						Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		1	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kota yang didampingi/ Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	9		Pangan											Disketapang
		1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan/ Jumlah kebutuhan pangan x 100%	%	20	25	30	35	40	45	50	50	
2	10		Pertanahan											BPKD
		1	Persentase tanah aset pemda yang bersertifikat	Jumlah aset bidang tanah pemda yang bersertifikat/total jumlah bidang aset tanah pemda x 100	%	60	70	80	85	90	95	100	100	
2	11		Lingkungan Hidup											DLH
		1	Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan		indeks	IKA=61,17; IKU = 83,89; ITL=20	IKA=63; IKU = 85; ITL=22,23	IKA=64; IKU = 85; ITL=25	IKA=64; IKU = 85; ITL=27	IKA=65; IKU = 85; ITL=29	IKA=66; IKU = 85; ITL=31	IKA=67; IKU = 85; ITL=33	IKA=67; IKU = 85; ITL=33	
		2	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Total volume sampah yang dapat ditangani/ Total vol timbunan sampah kota x 100%	%	93,81	98	100	100	100	100	100	100	
2	12		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											DisDukCapil
		1	Persentase ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk (hasil Rata-rata pelayanan)	(Jumlah penduduk ber-KTP/jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP x 100%) +(Jumlah Kepala	%	98	99	99	99	99	99	99	99	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja/Tahun					Kondisi Akhir 2027	Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
					Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
			Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga/ Jumlah kepala keluarga x 100%)+ (jumlah penduduk yang memiliki KIA /jumlah penduduk berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah) x 100%)/3 x 100%										
2	13		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										Seluruh Kecamatan
		1	PKK aktif	Jumlah PKK aktif /Jumlah PKK x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	
		2	Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu aktif /Jumlah Posyandu x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	14		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										DPP & KB
		1	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern/Jumlah Pasangan Usia Subur*100%	%	53,28	53,28	54,96	56,64	58,32	58,65	60,00	
2	15		Perhubungan										Dinas Perhubungan
		1	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n /Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia x 100%	%	73.14	80	100	100	100	100	100	
2	16		Komunikasi dan informatika										Diskominfo
		1	Indeks SPBE	Penilaian Kemenpan RB	indeks	Kurang (1,53)	Baik (2,604)	Baik (2,854)	Baik (2,994)	Baik (3,187)	Sangat Baik (3,409)	Sangat Baik (3,563)	Sangat Baik (3,563)
		1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja/Tahun					Kondisi Akhir 2027	Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
					Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
			secara online dan terintegrasi)	secara online dan terintegrasi/Jumlah Layanan Publik x 100%									
2	17		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										Dinkop UKM dan Perdagangan
		1	Persentase sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	PDRB ektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Total PDRB x 100%	%	25,67	25,92	26,19	26,45	26,72	26,98	27,24	
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran/ Jumlah usaha kecil keseluruhan x 100%	%	0,18	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	
		3	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha/Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	%	2,94	3,01	3,08	3,15	3,22	3,29	3,36	
		4	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	(Jumlah omset UMKM binaan tahun n dikurangi jumlah omset UMKM Binaan tahun n-1)/jumlah omset UMKM binaan tahun t-1) x 100%	%	0	30	40	45	50	60	70	
		5	Persentase koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/ Jumlah seluruh koperasi x 100%	%	14,93	16	17,33	18,67	20	21,33	22,93	
							-						
2	18		Penanaman Modal										DPM PTSP
		1	Persentase peningkatan investasi	Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi	%	48	50	52	54	56	58	60	



No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja/Tahun					Kondisi Akhir 2027	Penanggung Jawab
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
						Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
				tahun n-1/Jumlah investasi tahun n-1 x 100%										
		2	Persentase peningkatan jumlah investor (PMDN dan PMA)	(Jumlah Investor (PMDN/PMA) tahun n- jumlah Investor (PMDN/PMA) tahun n- 1) di kota/ Jumlah Investor (PMDN/PMA) tahun n-1 di kota x 100%	%	2% 6 PMA 3093 PMDN	2% 6 PMA 3164 PMDN	6 PMA 3227 PMDN	7 PMA 3291 PMDN	7 PMA 3356 PMDN	7 PMA 3423 PMDN	8 PMA 3491 PMDN	8 PMA 3491 PMDN	DPM PTSP
		3	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kota	Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM/Jumlah promosi yang dilaksanakan x 100%	%	0	0	8	12	15	15	18	18	DPM PTSP
2	19		Kepemudaan dan Olahraga											Dinas Pariwisata
		1	Persentase Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional (Emas, Perak, Perunggu)	%	Emas 7 Perak 4 Perunggu 4	Emas 8 Perak 5 Perunggu 5	Emas 8 Perak 5 Perunggu 5	Emas 8 Perak 5 Perunggu 5	Emas 8 Perak 5 Perunggu 5	Emas 8 Perak 5 Perunggu 5	Emas 8 Perak 5 Perunggu 5	Emas 8 Perak 5 Perunggu 5	
2	20		Statistik											Diskominfo
		1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah/ jumlah OPD x 100%	%	n/a	2	3	4	5	6	7	8	
2	21		Persandian											Diskominfo
		1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi / Jumlah area penilaian x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	22		Kebudayaan											Dinas Pariwisata



No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja/Tahun					Kondisi Akhir 2027	Penanggung Jawab
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
						Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		1	Persentase event kesenian dan kebudayaan yang dilaksanakan	Jumlah penyelenggaraan festival seni/budaya /jumlah kelompok seni/budaya yang ada x 100%	%	40	42	44	46	48	50	52	52	
2	23		Perpustakaan											Dinas Arsip dan Perpustakaan
		1	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	Jumlah Pengunjung perpustakaan usia (5-60)/Jumlah penduduk Usia 5-60) tahun x 100%	%	9.5	17.98	18.56	19.17	19.80	20.45	21.14	21.14	
2	24		Kearsipan											Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		1	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku / jumlah Perangkat Daerah di Kota Pematang Siantar x 100%	%	20	24	30	45	60	75	90	90	
3			Urusan Pemerintahan Pilihan											
3	21		Kelautan dan Perikanan											Disketapang
		1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota (sumber data: one data KKP)	Kg	500,000	510,000	515,000	520,000	525,000	530,000	535,000	540,000	
3	26		Pariwisata											Dinas Pariwisata
		1	Persentase Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	(PAD n dikurangi jumlah PAD tahun n-1)/jumlah PAD tahun t-1) x 100%	%	0,01	0,01	0,02	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	
3	27		Pertanian											Disketapang



No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja/Tahun					Kondisi Akhir 2027	Penanggung Jawab
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
						Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		1	Persentase kenaikan produksi pertanian	((Jumlah produksi pertanian tahun berkenaan - jumlah produksi pertanian tahun sebelumnya) / jumlah produksi pertanian tahun sebelumnya) x 100%	%	4,30	2,05	2,5	2,88	3,23	3,5	3,87	3,87	
		2	Persentase kenaikan produksi peternakan	((Jumlah produksi peternakan tahun berkenaan - jumlah produksi peternakan tahun sebelumnya) / jumlah produksi peternakan tahun sebelumnya) x 100 %	%	20,75	5,45	6,54	7,25	7,87	8,32	8,82	8,82	
3	30		Perdagangan											Dinkop UKM dan Perdagangan
		1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	K = (a + b) x 100% K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	%	25,67	25,92	26,19	26,45	26,72	26,98	27,24	27,24	



No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja/Tahun					Kondisi Akhir 2027	Penanggung Jawab
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
						Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
3	31		Industri											Dinkop UKM dan Perdagangan
		1	Pertambahan jumlah industri besar di kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n–Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) / Jumlah industri besar tahun n-1 x 100%	%	25	27	29	31	32	34	36	36	
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan											
4	01		Sekretariat Daerah											Sekretariat Daerah
		1	Predikat/Skor AKIP Tingkat Kota	Penilaian Menpan RB	Predikat	C (40,57)	C (40,57-50)	CC (50-55)	B (55-61)	B (61-65)	BB (65-71)	BB (71-75)	BB (71-75)	
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei pengukuran IKM Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik	indeks	C (73,36)	C (73,36-76,)	B (76-78)	B (78-80)	B (80-82)	B (82-84)	B (84-86)	B (84-86)	
		3	Persentase penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Persentase perangkat daerah yang mengirimkan laporan Kinerja tepat waktu/Jumlah OPD x 100%	%	65	70	75	80	85	90	100	100	
4	02		Sekretariat DPRD											Sekretariat DPRD
		1	Persentase Pelayanan agenda kerja DPRD	Jumlah Agenda kerja DPRD yang dilaksanakan pada tahun n /Jumlah agenda kerja DPRD pada tahun n x 100%	%	54,7	100	100	100	100	100	100	100	
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan											
5	01		Perencanaan											BAPPEDA



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja/Tahun					Kondisi Akhir 2027	Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
					Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		1	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD/Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100%	%	0	75	100	100	100	100	100	
		2	Persentase Kinerja RPJMD yang Tercapai	Jumlah target kinerja dalam RPJMD yang tercapai /Jumlah target kinerja dalam RPJMD x 100%	%	0	75	80	85	90	95	100	
5	02		Keuangan										BPKD
		1	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	Total PAD/ total pendapatan daerah x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	
		2	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA/Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya x 100%	%	10,21	10	9,5	9	8,5	8	7,5	
5	03		Kepegawaian										BKD
		1	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi / Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) X 100%	%	20	25	30	35	40	45	50	
5	04		Pendidikan dan Pelatihan										BKD
		1	Persentase ASN berkembang kompetensinya	Jumlah ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20	%	27,79	34,53	53,26	72,00	77,68	84,00	90,52	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja/Tahun					Kondisi Akhir 2027	Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
					Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
			JPL pertahun/jumlah seluruh ASN x 100%										
5	05		Penelitian dan Pengembangan										BAPPEDA
		1	Persentase Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian dan Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kajian/penelitian yang ditindaklanjuti/seluruh kajian/penelitian yang dihasilkan tahun berkenaan x 100%	%	60	65	70	75	80	85	90	
6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan										
6	01		Pengawasan										Inspektorat
		1	Level Kapabilitas APIP	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	2	2	2	3	3	3	3	
		2	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	(Jumlah temuan yang ditindaklanjuti /Jumlah total temuan) x 100%	%	75	78	80	85	90	95	95	
7			Unsur Kewilayahan										
7	01		Kecamatan										Semua Kecamatan
		1	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	Hasil survei pengukuran IKM Pelayanan Kecamatan (Skor hasil IKM 8 Kecamatan/8 Kecamatan x100 %) / Survei Mandiri	%	n/a	n/a	80	85	90	95	100	
8			Urusan Pemerintahan Umum										
8	01		Kesatuan Bangsa dan Politik										KesbangPol



No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja/Tahun					Kondisi Akhir 2027	Penanggung Jawab
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
						Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		1	Rasio Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan per 100.000rb penduduk.	Jumlah penduduk yang mengikuti penguatan ideologi/ Jumlah 100.000 Penduduk x 100% (10% dari jumlah pelajar SMP dan SMA 40,000 orang).	Orang/%	100 2,5	50 1,25	700 17,5	750 18,75	800 20	850 21,25	900 22,50	900 22,50	
ASPEK DAYA SAING DAERAH														
		1	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)		%	18,71	14.54	14.88	15.53	16.09	16.68	17.28	17.28	BPKD
		2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Indeks/skor	59,29	59,94	60,35	60,76	61,17	61,58	61,99	61,99	DLH
		3	Indeks IPKD	IPKD = (A x 15) + (B x 20) + (C x 15) + (D x 20) + (E x 15) + (F x 15)	Indeks	(32,54-40)	(40-43)	(43-47)	(47-52)	(52-57)	(57-60)	(60-63)	63	Bappeda/BPKD
		4	Indeks Kriminalitas	Jumlah tindak kriminalitas tahun n /Jumlah Penduduk taahun n x 100%	%	0.14	0.12	0.11	0.10	0.9	0.8	0.7	0.7	Kota



BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis daerah yang proses penyusunannya telah menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas serta melalui beberapa tahapan proses dimulai dari penyusunan rancangan teknokratik, rancangan awal, rancangan, rancangan akhir hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pendekatan politis disamping disajikan dalam penjabaran Visi-Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, juga telah dilakukan pembahasan penajaman di DPRD sebagai representasi politik/strategis. Sedangkan pendekatan teknokratis telah dilakukan saat penyusunan rancangan teknokratis dan rancangan awal RPJMD, dan disempurnakan dengan pendekatan partisipatif publik melalui forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang diperuntukkan mendapatkan masukan dari bawah.

Berdasarkan setiap tahapan proses diatas, maka pada akhir periode RPJMD 2022-2027 pembangunan di Kota Pematang Siantar akan mencapai kondisi yang diharapkan sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkeadilan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Mewujudkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata
4. Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan

RPJMD sebagai dokumen “cetak biru” kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, dengan muatan materi yang disajikan sudah melalui proses analisis yang sistematis mulai dari analisa potensi, permasalahan, isu strategis hingga penyusunan kerangka program dan pendanaannya., RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 merupakan produk hukum daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, karenanya harus menjadi tanggungjawab kolektif seluruh pemangku kepentingan di Kota Pematang Siantar untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan secara konsisten mengawal implementasi tahunannya yang dijabarkan dalam Rencana



Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan yang selengkapnya dijelaskan dalam kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 merupakan dokumen yang harus dijadikan dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), serta masyarakat dalam mengawal pelaksanaan RPJMD, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD, sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022- 2027 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta masyarakat termasuk dunia usaha;
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;
4. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022-2027 berpedoman pada RPJMD Tahun 2022-2027, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2028. Sebagaimana diketahui, tahun 2027 adalah tahun terakhir RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dan pada saat itu RPJMD periode berikutnya belum disusun. Untuk itu, penyusunan RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2028 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pematang Siantar Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RKP Tahun 2028.

Pemerintah Kota Pematang Siantar akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2028 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan mengimplementasikan berbagai pendekatan proses perencanaan agar



perencanaan yang berkualitas dapat terwujud. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan tahun 2027, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR

dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A